



PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024-2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN, LANTAI IV
JL.Satria Sudirman No.1 Tangerang 15111**



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang berakhir pada Tahun 2023, diperlukan kepastian program pembangunan Tahun 2024 sampai dengan 2026 yang disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang 2024-2026;
 - b. bahwa rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026 adalah Dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024-2026

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026.
- (2) RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Pagu yang tercantum dalam RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026 merupakan pagu Indikatif yang prediksinya mengacu tahun sebelumnya.

- (2) Pagu RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (3) Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari pagu yang tercantum dalam RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026; dan
 - b. hasil RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA TANGERANG,



Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 15

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, maka **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026** dapat terselesaikan dengan baik. RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang untuk periode Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pada prinsipnya, RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026 ini menyajikan tentang: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah; Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta Penutup.

Akhir kata, semoga Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 diharapkan memberi arah dan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 guna mewujudkan cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atas partisipasi seluruh pihak dalam proses penyusunan Rancangan RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026 ini, Kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Tangerang, Maret 2023

BAPEDA KOTA TANGERANG

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
BAB 1. GAMBARAN UMUM	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	1-7
1.4. Maksud dan Tujuan	1-9
1.5. Sistematika Penulisan	1-10
BAB 2. GAMBARAN UMUM	2-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	2-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	2-1
2.1.2. Kondisi Demografi.....	2-18
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	2-23
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan.....	2-24
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	2-48
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	2-53
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	2-54
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2-54
2.3.1.1. Pendidikan.....	2-56
2.3.1.2. Kesehatan.....	2-58
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	2-61
2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman	2-74
2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2-76
2.3.1.6. Sosial.....	2-77
2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	2-86
2.3.2.1. Tenaga Kerja.....	2-86
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-87
2.3.2.3. Pangan.....	2-91
2.3.2.4. Pertanahan	2-92
2.3.2.5. Lingkungan Hidup	2-93
2.3.2.6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-94
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ...	2-95
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	2-95
2.3.2.9. Perhubungan	2-96
2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika.....	2-97
2.3.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.....	2-97
2.3.2.12. Penanaman Modal	2-98
2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga.....	2-99
2.3.2.14. Statistik	2-101

2.3.2.15.	Persandian.....	2-101
2.3.2.16.	Kebudayaan.....	2-102
2.3.2.17.	Perpustakaan.....	2-103
2.3.2.18.	Kearsipan	2-103
2.3.3.	Urusan Pilihan	2-104
2.3.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	2-105
2.3.5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	2-107
2.3.6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2-108
2.3.7.	Unsur Kewilayahan	2-109
2.3.8.	Unsur Pemerintahan Umum	2-109
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	2-110
2.4.1.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2-113
2.4.2.	Kerja Sama Daerah	2-117
2.5.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah.....	2-118
2.6.	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023.....	2-146
2.7.	Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal).....	2-158
2.8.	Gambaran Kerjasama Daerah	2-174
2.9.	Gambaran Usaha Milik Daerah	2-175

BAB 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH3-1

3.1.	Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu	3-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	3-2
3.1.1.1.	Analisis Pendapatan Daerah	3-2
3.1.1.2.	Analisis Belanja Daerah	3-10
3.1.1.3.	Analisis Pembiayaan Daerah.....	3-17
3.1.2.	Neraca Keuangan Daerah.....	3-26
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu.....	3-29
3.3.	Kerangka Pendanaan.....	3-34
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah.....	3-34
3.3.2.	Proyeksi Belanja Daerah	3-36
3.3.3.	Proyeksi Pembiayaan Daerah	3-38

BAB 4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS4-1

4.1.	Potensi Pembangunan Daerah.....	4-1
4.2.	Permasalahan Pembangunan Daerah	4-4
4.2.1.	Aspek Geografi dan Demografi.....	4-4
4.2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	4-5
4.2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	4-7
4.2.3.1.	Fokus Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	4-7
4.2.3.2.	Fokus Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	4-13
4.2.3.3.	Fokus Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	4-21
4.2.3.4.	Fokus Penyelenggaraan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan Serta Kewilayahan dan Pemerintahan Umum.....	4-23
4.2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	4-26

4.3.	Tantangan Pembangunan Daerah	4-28
4.3.1.	Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	4-28
4.3.2.	Tantangan Pembangunan Tata Ruang Daerah	4-49
4.3.3.	Tantangan Pembangunan Global	4-62
4.4.	Isu Strategis Pembangunan Daerah	4-76
BAB 5.	TUJUAN DAN SASARAN	5-1
5.1.	Tujuan	5-1
5.1.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025	5-1
5.1.2.	Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026	5-22
5.2.	Sasaran	5-23
5.3.	Casecading Kinerja	5-37
BAB 6.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS..	6-1
6.1.	Strategi	6-1
6.2.	Arah Kebijakan	6-17
6.3.	Program Pembangunan Daerah	6-24
BAB 7.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	7-1
7.1.	Kerangka Pendanaan	7-1
7.2.	Program Perangkat Daerah	7-2
BAB 8.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	8-1
8.1.	Indikator Makro Pembangunan Daerah	8-1
8.2.	Indikator Kinerja Utama	8-2
8.3.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	8-9
BAB 9.	PENUTUP	9-1
9.1.	Kaidah Pelaksanaan	9-1
9.2.	Pedoman Transisi	9-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kota Tangerang Menurut Kecamatan	2-3
Tabel 2.2.	Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (Km)	2-5
Tabel 2.3.	Letak dan Posisi Geografi Kota Tangerang	2-6
Tabel 2.4.	Kondisi Topografi Kota Tangerang	2-7
Tabel 2.5.	Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang.....	2-9
Tabel 2.6.	Nama Situ/Danau di Kota Tangerang.....	2-11
Tabel 2.7.	Temperatur Udara di Kota Tangerang.....	2-13
Tabel 2.8.	Rata-rata Curah Hujan dan Kelembaban Udara di Kota Tangerang.....	2-14
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk Kota Tangerang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022.....	2-19
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Tangerang Tahun 2020-2022.....	2-20
Tabel 2.11.	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2020-2022	2-21
Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Tahun 2020-2022	2-22
Tabel 2.13.	Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang.....	2-22
Tabel 2.14.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Tangerang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	2-27
Tabel 2.15.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kota Tangerang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	2-28
Tabel 2.16.	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Tangerang Tahun 2018-2022 (Persen)	2-29
Tabel 2.17.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Persen).....	2-31
Tabel 2.18.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2018-2022 (Persen)	2-32
Tabel 2.19.	PDRB per Kapita Kota Tangerang Tahun 2018-2022	2-32
Tabel 2.20.	Laju Inflasi Kota Tangerang Tahun 2018-2022	2-33
Tabel 2.21.	Laju Inflasi Kota Tangerang Tahun 2018-2022	2-35
Tabel 2.22.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2018-2022	2-41
Tabel 2.23.	Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2018-2022.....	2-42
Tabel 2.24.	Indeks Gini Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2018-2022.....	2-42
Tabel 2.25.	Penduduk Kota Tangerang Berdasarkan Jenis Kegiatan, TPAK dan TPT Tahun 2022	2-44
Tabel 2.26.	Penduduk Bekerja di Kota Tangerang Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2022	2-45
Tabel 2.27.	Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja yang Tersedia (Menurut Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2022	2-46
Tabel 2.28.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Tangerang Tahun 2018-2022.....	2-48
Tabel 2.29.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2-48

Tabel 2.30.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Tahun 2018-2022.....	2-51
Tabel 2.31.	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Menurut Aspek, Fokus dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2022.....	2-119
Tabel 2.32.	Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 Untuk Pelaksanaan Tahun 2019-2022	2-147
Tabel 2.33.	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 Untuk Pelaksanaan Tahun 2019-2022	2-151
Tabel 2.34.	Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2022	2-159
Tabel 2.35.	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2022.....	2-161
Tabel 2.36.	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2022	2-164
Tabel 2.37.	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2022 ...	2-167
Tabel 2.38.	Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2022.....	2-170
Tabel 2.39.	Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2022.....	2-173
Tabel 2.40.	Daftar Kerjasama Daerah	2-175
Tabel 3.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.....	3-2
Tabel 3.2.	Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2022.....	3-3
Tabel 3.3.	Realisasi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022	3-5
Tabel 3.4.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.....	3-9
Tabel 3.5.	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.....	3-9
Tabel 3.6.	Rasio Elastisitas Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022	3-10
Tabel 3.7.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.....	3-11
Tabel 3.8.	Realisasi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022	3-13
Tabel 3.9.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022	3-16
Tabel 3.10.	Realisasi dan Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.....	3-18
Tabel 3.11.	Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.....	3-20
Tabel 3.12.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.....	3-21
Tabel 3.13.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.....	3-23
Tabel 3.14.	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022	3-25
Tabel 3.15.	Perkembangan Neraca Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2021	3-27
Tabel 3.16.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024-2026.....	3-35

Tabel 3.17.	Proyeksi Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024-2026.....	3-37
Tabel 3.18.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Anggaran Tahun 2024-2026.....	3-39
Tabel 4.1.	Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2025.....	4-30
Tabel 4.2.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2013-2032.....	4-50
Tabel 4.3.	Tujuan dan Target Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2030.....	4-62
Tabel 4.4.	Isu Strategis Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026	4-76
Tabel 5.1	Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026.....	5-23
Tabel 5.2	Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026	5-23
Tabel 5.3	Rencana (Target) Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026.....	5-26
Tabel 5.4	Tabel Cascading Kinerja Tahun 2024-2026	5-38
Tabel 6.1.	Identifikasi Faktor Strategis Internal Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026	6-7
Tabel 6.2.	Identifikasi Faktor Strategis Eksternal Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026	6-9
Tabel 6.3.	Matriks SWOT Perumusan Alternatif Strategi Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026	6-10
Tabel 6.4.	Strategi Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026	6-12
Tabel 6.5.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.....	6-18
Tabel 6.6.	Program Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2022-2026	6-25
Tabel 6.7.	Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah.....	6-53
Tabel 7.1.	Kebutuhan Pendanaan Kota Tangerang Tahun 2024-2026	7-3
Tabel 8.1	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.....	8-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tangerang Tahun 2024-2026.....	8-3
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2023.....	8-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	1-9
Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang	2-4
Gambar 2.2. Peta Hidrologi Kota Tangerang.....	2-12
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2020-2024	III-4



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan Kota Tangerang sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dapat tercapai.

Berbagai potensi sumber daya Kota Tangerang (geostrategis, sumber daya manusia, sumber daya alam dan infrastruktur wilayah) terus digali, dikembangkan dan digerakan secara optimal guna mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, hasil-hasil pembangunan Kota Tangerang yang telah dicapai juga dihadapkan pada kendala dan tantangan pembangunan. Kendala dan tantangan pembangunan di Kota Tangerang yang dihadapi sekarang ini maupun pada masa mendatang secara umum meliputi: kualitas dan daya saing sumber daya manusia, infrastruktur dan perekonomian. Oleh karena itu, potensi, permasalahan (kendala) dan tantangan pembangunan tersebut harus dikelola secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan Daerah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi:

- Pendekatan perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada substansi.
- Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses : a. teknokratik; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas-bawah dan bawah-atas.
- Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi : a. holistik-tematik; b. integratif; dan c. spasial.

Untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, lingkup perencanaan pembangunan nasional diklasifikasikan atas rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Pada tingkat daerah, periode jangka panjang diwujudkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), periode jangka menengah diwujudkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan periode tahunan diwujudkan melalui

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu untuk menjaga terlaksananya kesinambungan pembangunan maka keterkaitan, keselarasan, dan sinergitas antar setiap dokumen perencanaan sangat diperlukan.

Seiring dengan rencana diberlakukannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak secara nasional di seluruh Indonesia pada Tahun 2024 maka kondisi ini berdampak pada perencanaan pembangunan daerah, termasuk Kota Tangerang. Hal ini mengingat, periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 akan berakhir pada Tahun 2023, di sisi lain siklus perencanaan pembangunan tahunan daerah mengamanatkan bahwa pada akhir Tahun 2022, Pemerintah Kota Tangerang harus menyusun Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang Tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada tidak adanya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan rencana tahunan daerah, terutama untuk RKPD Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026. Oleh karena itu, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada tahun transisi, yaitu Tahun 2024-2026. Dalam kaitan ini, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang mengamanatkan pada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (RPD Tahun 2024-2026).

Seiring dengan upaya untuk mendukung perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2024-2026 serta mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah (keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Provinsi Banten dan Nasional) maupun lingkup waktu (menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan jangka menengah daerah di Kota Tangerang maka diperlukan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180).
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 Tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570).
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

21. Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26).
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5),
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3).
25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6).
26. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1).
27. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6).
28. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7).

29. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9).
30. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 5).

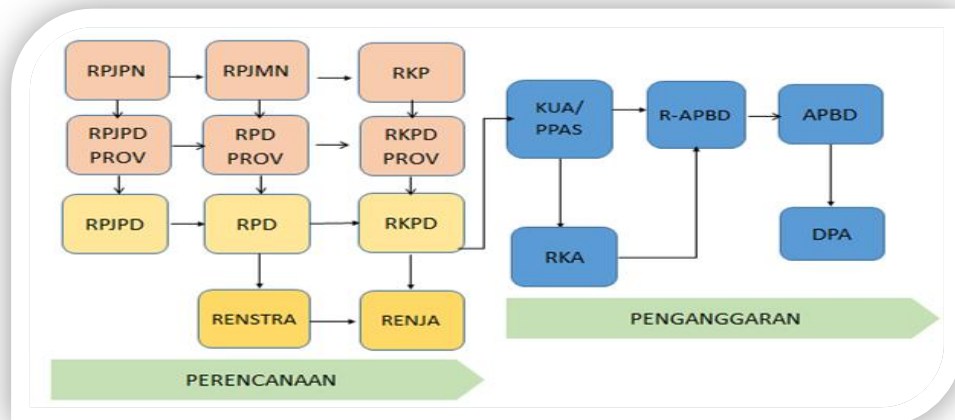
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

RPD Kota Tangerang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun sebagai pengganti RPJMD menunggu sampai dilaksanakannya Pemilukada serentak tahun 2024. Secara substansi RPD mempedomani RPJPD Kota Tangerang tahun 2005-2025. RPD Kota Tangerang menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RPD tetap mempedomani RPJMN dan RPD Provinsi Banten.

RPD Kota Tangerang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2024-2026. Selanjutnya RPD setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Kota Tangerang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Penganggaran yang dimulai dari penyusunan KUAPPAS sampai dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Keterkaitan dokumen RPD dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

GAMBAR 1.1 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Sumber: Diagram mempedomani arahan Imendgari Nomor 52 Tahun 2022

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 **dimaksudkan** untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 disusun dengan **tujuan** sebagai berikut:

- Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.
- Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
- Menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.
- Menjadi pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha (swasta) untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026.
- Mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

Berpijak maksud dan tujuan tersebut maka **sasaran** penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terumuskannya gambaran umum kondisi daerah.
2. Terumuskannya gambaran keuangan daerah.
3. Terumuskannya permasalahan dan isu strategis.
4. Terumuskannya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
5. Terumuskannya strategi, arah kebijakan dan program prioritas.
6. Terumuskannya kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah.
7. Terumuskannya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Terumuskannya kaidah pelaksanaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 disusun dengan tata urutan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud, tujuan dan sasaran; serta sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan kerangka pendanaan daerah Tahun 2024-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bagian ini menjelaskan tentang potensi, permasalahan, tantangan dan isu strategis pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bagian ini menjelaskan tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Tahun 2024-2026.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2024-2026.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.



BAB 2

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum wilayah Kota Tangerang dijabarkan menurut aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi meliputi : gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, dan demografi.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kota Tangerang meliputi : luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, serta penggunaan lahan.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Pembentukan wilayah administratif Kota Tangerang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Pada Pasal.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, wilayah administratif Kota Tangerang terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Batuaceper, Kecamatan Jatiuwung, dan Kecamatan Benda. Seiring dengan pembentukan Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka Kota Tangerang sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang tersebut merupakan Kota yang berada dalam Wilayah Provinsi Banten. Untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan sehingga jumlah Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tangerang bertambah menjadi 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tangerang.
2. Kecamatan Jatiuwung.
3. Kecamatan Batuceper.
4. Kecamatan Benda.
5. Kecamatan Cipondoh.
6. Kecamatan Ciledug.
7. Kecamatan Karawaci.
8. Kecamatan Periuk.
9. Kecamatan Cibodas.
10. Kecamatan Neglasari.
11. Kecamatan Pinang.
12. Kecamatan Karang Tengah.
13. Kecamatan Larangan.

Kota Tangerang memiliki luas $\pm 184,24 \text{ km}^2$ (termasuk Bandara Soekarno-Hatta seluas $\pm 19,69 \text{ km}^2$) atau sekitar 1,59% dari luas Provinsi Banten dan merupakan wilayah yang terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan, yang berjarak $\pm 65 \text{ km}$ dari Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten dan berjarak $\pm 27 \text{ km}$ dari Ibukota DKI Jakarta. Secara administratif, batas wilayah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan di Kabupaten Tangerang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di DKI Jakarta.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang.

Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Berikut ini diuraikan mengenai luas dan batas wilayah administrasi Kota Tangerang menurut kecamatan.

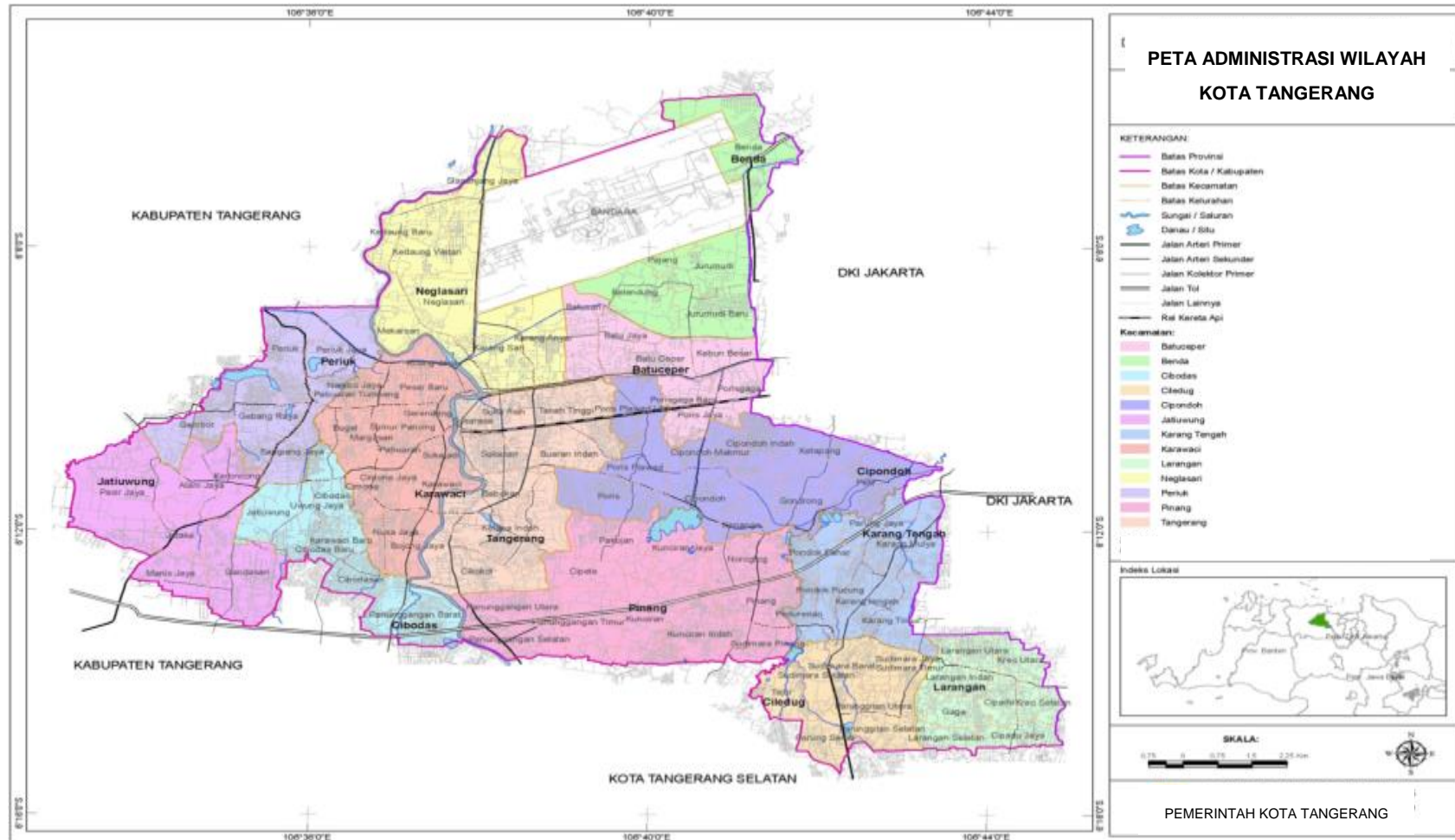
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Tangerang Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Batas Wilayah Administrasi			
				Utara	Timur	Selatan	Barat
1	Ciledug	8,77	8	Kec. Karang Tengah; Kec Pinang	Kec. Larangan	Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
2	Larangan	9,40	8	Prov. DKI Jakarta	Prov. DKI Jakarta	Kab. Tangerang	Kec. Ciledug; Kec. Karang Tengah
3	Karang Tengah	10,47	7	Kec. Cipondoh	Prov. DKI Jakarta	Kec. Ciledug	Kec. Pinang
4	Cipondoh	17,91	10	Kec. Batuceper; Prov. DKI Jakarta	Kec. Karang Tengah; Prov. DKI Jakarta	Kec. Pinang; Kec. Karang Tengah	Kec. Tangerang
5	Pinang	21,59	11	Kec. Cipondoh; Kec. Tangerang	Kec. Karang Tengah	Kab. Tangerang	Kec. Cibodas
6	Tangerang	15,79	8	Kec. Neglasari; Kec. Batuceper	Kec. Cipondoh; Kec. Pinang	Kec. Pinang	Kec. Karawaci
7	Karawaci	13,48	16	Kec. Neglasari	Kec. Tangerang	Kec. Cibodas	Kec. Cibodas
8	Cibodas	9,61	6	Kec. Periuk; Kec. Karawaci	Kec. Pinang	Kab. Tangerang	Kec. Periuk; Kec. Jatiuwung
9	Jatiuwung	14,41	6	Kec. Periuk	Kec. Cibodas	Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
10	Periuk	9,54	5	Kab. Tangerang	Kec. Neglasari; Kec. Karawaci	Kec. Jatiuwung; Kec. Cibodas	Kab. Tangerang
11	Neglasari	16,08	7	Kab. Tangerang	Kec. Benda; Kec. Batuceper	Kec. Karawaci; Kec. Tangerang	Kab. Tangerang; Kec. Periuk
12	Batuceper	11,58	7	Kec. Benda	Prov. DKI Jakarta	Kec. Cipondoh; Kec. Tangerang	Kec. Neglasari
13	Benda*)	5,92	5	Kab. Tangerang	Prov. DKI Jakarta	Kec. Batuceper; Kec. Neglasari	Kec. Neglasari
Jumlah		164,55	104				

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

Keterangan: *) Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta (19.69 km²)

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang



B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Tangerang terletak pada koordinat 106°36'–106°42' Bujur Timur (BT) dan 6°6'–6°13' Lintang Selatan (LS). Diantara ke-13 kecamatan, Kecamatan Larangan merupakan kecamatan terjauh dari Ibukota Tangerang (sekitar 14 km) dan Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan terdekat dari Ibukota Tangerang. Jarak paling jauh antar kecamatan adalah antara Kecamatan Larangan dengan Kecamatan Benda yaitu sekitar 21 km dan Jarak paling dekat antar kecamatan adalah antara Kecamatan Cibodas dengan Kecamatan Jatiuwung yaitu sekitar 1 km.

Tabel 2.2. Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (Km)

Kecamatan	Ciledug	Larangan	Karang Tengah	Cipondoh	Pinang	Tangerang	Karawaci	Cibodas	Jatiuwung	Periuk	Neglasari	Batuceper	Benda
Ciledug	0	3	4	5	7	11	12	15	17	15	13	15	18
Larangan	3	0	3	8	10	14	15	18	20	18	16	18	21
Karang Tengah	4	3	0	6	8	12	13	16	18	16	14	11	14
Cipondoh	5	8	6	0	4	6	9	10	12	10	8	3	6
Pinang	7	10	8	4	0	7	4	3	5	3	9	11	14
Tangerang	11	14	12	6	7	0	4	6	7	4	2	4	7
Karawaci	12	15	13	9	4	4	0	2	4	6	6	8	11
Cibodas	15	18	16	10	3	6	2	0	1	5	8	10	13
Jatiuwung	17	20	18	12	5	7	4	1	0	3	9	11	14
Periuk	15	18	16	10	3	4	6	5	3	0	4	8	11
Neglasari	13	16	14	8	9	2	6	8	9	4	0	4	7
Batuceper	15	18	11	3	11	4	8	10	11	8	4	0	3
Benda	18	21	14	6	14	7	11	13	14	11	7	3	0

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

Letak dan kondisi geografis yang strategis ini serta ditunjang dengan aksesibilitas yang baik ke kota Jakarta dan kota-kota penting di Provinsi Banten dan Jawa Barat, yaitu dengan adanya Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak sepanjang 100 km, jalan rel kereta api double track Tangerang-Jakarta, perpanjangan koridor IV Busway Kalideres-Tangerang, serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, selain telah memicu pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa di Kota Tangerang, juga telah memicu migrasi penduduk yang masuk ke Kota Tangerang, baik sebagai tenaga kerja atau pencari kerja, maupun akibat ledakan penduduk Kota Jakarta yang menyebabkan sebagian besar penduduk Kota Jakarta bermigrasi ke daerah sekitar Kota Jakarta termasuk Kota Tangerang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di masa mendatang. Sejalan dengan semakin meningkatnya migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Kota Tangerang akan menimbulkan terjadinya ekspansi pemanfaatan lahan untuk permukiman. Pesatnya pertumbuhan permukiman akibat semakin

meningkatnya migrasi penduduk ke Kota Tangerang selanjutnya akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana serta fasilitas perkotaan di Kota Tangerang, di samping berimplikasi pada turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel 2.3. Letak dan Posisi Geografi Kota Tangerang

No.	Kecamatan	Posisi Astronomi	Posisi Geografi
1	Batuceper	6° 9'45.74"S 106°39'46.71"E	3,6 KM dari Ibukota Tangerang, 70 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 20 KM dari Ibukota DKI Jakarta
2	Benda	6° 6'44.03"S 106°41'10.53"E	13 KM dari Ibukota Tangerang, 86 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 22 KM dari Ibukota DKI Jakarta
3	Cibodas	6°12'41.51"S 106°36'30.61"E	8,5 KM dari Ibukota Tangerang, 60 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 28 KM dari Ibukota DKI Jakarta
4	Ciledug	6°13'12.15"S 106°42'48.35"E	15,4 KM dari Ibukota Tangerang, 73 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 19 KM dari Ibukota DKI Jakarta
5	Cipondoh	6°11'40.65"S 106°40'36.91"E	7,7 KM dari Ibukota Tangerang, 68,4 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 25,5 KM dari Ibukota DKI Jakarta
6	Jatiuwung	6°11'26.28"S 106°35'19.87"E	8 KM dari Ibukota Tangerang, 56,5 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 36,6 KM dari Ibukota DKI Jakarta
7	Karang Tengah	6°13'6.96"S 106°42'7.06"E	12,4 KM dari Ibukota Tangerang, 72 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 20,4 KM dari Ibukota DKI Jakarta
8	Karawaci	6°11'33.80"S 106°36'45.07"E	6,1 KM dari Ibukota Tangerang, 59,3 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 29,3 KM dari Ibukota DKI Jakarta
9	Larangan	6°13'37.46"S 106°43'53.56"E	17,7 KM dari Ibukota Tangerang, 77,6 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 16,6 KM dari Ibukota DKI Jakarta
10	Neglasari	6° 9'23.32"S 106°37'47.68"E	2,7 KM dari Ibukota Tangerang 68,3 KM dari Ibukota Provinsi Banten dan 24,9 KM dari Ibukota DKI Jakarta
11	Periuk	6°10'14.11"S 106°35'45.07"E	5,8 KM dari Ibukota Tangerang 59,1 KM dari Ibukota Provinsi Banten dan 39,2 KM dari Ibukota DKI Jakarta
12	Pinang	6°13'28.04"S 106°41'25.56"E	12,5 KM dari Ibukota Tangerang 70,2 KM dari Ibukota Provinsi Banten dan 21,5 KM dari Ibukota DKI Jakarta
13	Tangerang	6°10'19.81"S 106°37'59.29"E	1,5 KM dari Ibukota Tangerang 66,9 KM dari Ibukota Provinsi Banten dan 31,1 KM dari Ibukota DKI Jakarta

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

C. Topografi

Wilayah Kota Tangerang sebagian besar berada pada ketinggian 10-18 m di atas permukaan laut (dpl), sedangkan di bagian Utara meliputi sebagian besar Kecamatan Benda ketinggiannya rata-rata 10 m dpl, sedang di bagian selatan seperti Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Karang Tengah memiliki ketinggian 18 m dpl. Selain itu, Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah 0-3% dan sebagian kecil (yaitu di bagian Selatan wilayah Kota) kemiringan tanahnya 3-8% yang meliputi wilayah Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan, dan Kelurahan Cipadu Jaya.

Kota Tangerang tidak memiliki wilayah pesisir karena tidak ada daerah yang langsung berbatasan dengan pantai. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan di Kota Tangerang cukup landai. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi pengembangan Kota Tangerang secara umum, terutama untuk pengembangan kegiatan perkotaan. Namun demikian, kondisi topografi Kota Tangerang yang cukup landai ini juga menjadi tantangan tersendiri karena hal ini menyebabkan Kota Tangerang memiliki potensi genangan dan banjir.

Tabel 2.4. Kondisi Topografi Kota Tangerang

No	Kecamatan	Kondisi Topografi	
		Kemiringan Lahan	Ketinggian dpl (m)
1	Batuceper	0-3%	14,0
2	Benda	0-3%	10,0
3	Cibodas	0-3%	14,0
4	Ciledug	3-8%	18,0
5	Cipondoh	0-3%	14,0
6	Jatiuwung	0-3%	14,0
7	Karang Tengah	0-3%	18,0
8	Karawaci	0-3%	14,0
9	Larangan	3-8%	18,0
10	Neglasari	0-3%	14,0
11	Periuk	0-3%	14,0
12	Pinang	0-3%	14,0
13	Tangerang	0-3%	14,0
	Kota Tangerang	0-3%	14,0

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

D. Geologi

Secara geologis, daerah Tangerang berada pada suatu tinggian struktur yang dikenal dengan sebutan *Tangerang High*. Tinggian ini terdiri atas batuan Tersier yang memisahkan Cekungan Jawa Barat Utara di bagian barat dengan Cekungan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan normal, berarah utara-selatan. Di bagian timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan pengendapan yang disebut dengan Sub cekungan Jakarta.

Tinggian ini terbentuk oleh batuan Tersier yang memisahkan cekungan Jawa Barat Utara di bagian Barat dengan cekungan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan normal yang berarah Utara-Selatan. Di bagian Timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan pengendapan yang disebut dengan Sub cekungan Jakarta.

Batuan yang menutupi Kota Tangerang terdiri dari endapan alluvium, endapan kipas alluvium vulkanik muda, dan satuan Tuf Banten. Deskripsi singkat mengenai jenis batuan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Satuan Batuan Tuf Banten Atas/Tuf Banten**

Satuan ini terdiri atas lapisan tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan yang berasal dari letusan Gunung Rawa Danau. Tuf tersebut menunjukkan sifat yang lebih asam (pumice) dibandingkan dengan batuan vulkanik yang diendapkan sesudahnya. Bagian atas satuan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan pengendapan dari lingkungan pengendapan di atas permukaan air menjadi di bawah permukaan air. Satuan ini berumur Plio–Plistosen atau sekitar dua juta tahun.

- **Endapan Vulkanik Muda**

Endapan ini terdiri atas material batu pasir, batu lempung tufan, endapan lahar, dan konglomerat yang membentuk endapan kipas. Ukuran butiran berubah menjadi semakin halus (lempungan) dan menebal ke arah utara. Hal ini menunjukkan sumber material berasal dari selatan. Satuan ini terbentuk oleh material endapan vulkanik yang berasal dari gunung api di sebelah selatan Kabupaten Tangerang, seperti Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango. Batuan ini diendapkan pada umur Plistosen (20.000 – dua juta tahun). Kipas vulkanik tersebut terbentuk pada saat gunung api menghasilkan material vulkanik dengan jumlah besar. Kemudian ketika menjadi jenuh air, tumpukan material tersebut bergerak ke bawah dan melalui lembah. Ketika mencapai tempat yang datar, material tersebut akan menyebar dan membentuk endapan seperti kipas.

- **Endapan Pantai dan Endapan Pematang Pantai**

Endapan batuan ini berasal dari material batuan yang terbawa oleh aliran sungai dan berumur antara 20.000 tahun hingga sekarang. Endapan tersebut tersusun oleh material lempung, pasir halus dan kasar, dan konglomerat serta mengandung cangkang moluska. Endapan alluvium tersebut dapat membentuk endapan delta, endapan rawa, endapan gosong pasir pantai, dan endapan sungai dengan bentuk meander atau sungai teranyam.

- **Endapan Aluvium**

Endapan ini terdiri atas lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah yang berumur Kuartar dan tersebar pada daerah pedataran serta sekitar aliran sungai.

E. Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Tangerang dilalui oleh 3 (tiga) aliran sungai yaitu sungai Cisadane, kali Angke dan kali Cirarab dengan panjang daerah yang dilalui sepanjang 32,00 Km. Sungai Cisadane membagi Kota Tangerang menjadi dua bagian, yaitu bagian Timur sungai dan bagian Barat sungai. Kecamatan yang terletak di bagian Barat Sungai Cisadane meliputi Kecamatan Jatiuwung dan sebagian Kecamatan Tangerang. Sungai Cisadane memiliki debit air 88 m³ per detik dan mengalir sejauh 15 Km.

Tabel 2.5. Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang

Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Catchment Area (ha)	Panjang (km)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Debit (m ³ /detik)
DAS Cisadane	106.350	15,00	100	5,35	88
DAS Cirarab	6.030	7,00	11	3,50	36
DAS Angke	7.430	10,00	12	5,50	24
Jumlah	119.810	32,00			

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

- Daerah Aliran Sungai Cisadane

Sungai Cisadane yang membagi Kota Tangerang menjadi dua wilayah (bagian Timur sungai dan bagian Barat sungai) memiliki daya tampung aersluas 106.350 Ha, dengan panjang 15 km dan lebar 100 m, kedalaman sungai Cisadane rata rata 5,35 m serta debit air dalam kondisi normal sekitar 88 m³/det. Bendungan Pintu 10 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari merupakan bendungan untuk mengendalikan debit air Sungai Cisadane ke arah hilir Kabupaten Tangerang dan dimanfaatkan untuk irigasi teknis. Pada DAS Cisadane yang berada di Kota Tangerang terdapat 43 anak sungai/saluran pembuangan yang semuanya bermuara di Kali Cisadane, dimana anak sungai yang terbesar adalah Saluran Mookervaart yang merupakan sodetan penghubung Kali Cisadane dan Kali Angke. Sungai Cisadane sangat panjang melintasi daerah administrasi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang dan akhirnya bermuara di Laut Jawa.

- Daerah Aliran Sungai Cirarab

Sungai Cirarab melintasi wilayah administrasi Kota Tangerang sekitar 7,00 km, di daerah perbatasan barat dengan Kabupaten Tangerang. Lebar Kali Cirarab sekitar 11 m dengan kedalaman rata-rata 3,50 m dan debit air dalam kondisi normal 36 m³/detik. DAS Cirarab memiliki daerah tangkapan air seluas 6.030 Ha. Hulu sungai Kali Cirarab berada di bagian Utara Kabupaten Bogor sekitar Kecamatan Rumpin. Aliran Kali Cirarab berkelok-kelok, melintasi 3 daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bogor,

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirarab merupakan kawasan budidaya daerah terbangun. Pada DAS Cirarab yang berada di Kota Tangerang terdapat 4 anak sungai/saluran pembuangan yang semuanya bermuara ke Kali Cirarab, yaitu: Kali Cangkring, Kali Sasak, Kali Keroncong, dan Kali Jatake.

- **Daerah Aliran Sungai Angke**

Sungai Angke melalui wilayah Kota Tangerang sepanjang 10,00 km dengan lebar sungai sekitar 12 m pada kawasan terbuka dan menyempit menjadi 3-4 meter pada kawasan terbangun/ perkotaan. Kedalaman rata-rata Kali Angke adalah 5,50 m, memiliki daerah tangkapan air seluas 7.430 Ha dan debit air pada kondisi normal tercatat sekitar 24 m³/det.

Sungai Angke mengalir di bagian Timur Kota Tangerang. Hulu Sungai Angke berasal dari daerah Semplak, Kabupaten Bogor. Aliran Sungai Angke melintasi 4 daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Jakarta Barat, berakhir di Saluran Pembuang Cengkareng Drain, Jakarta Barat.

Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke merupakan kawasan terbangun intensitas sedang-tinggi, yaitu kegiatan permukiman dan kegiatan perkotaan. Pada DAS Angke yang berada di Kota Tangerang terdapat 7 anak sungai/saluran pembuangan yang semuanya bermuara ke Kali Cirarab.

Selain sungai, di Kota Tangerang juga terdapat situ/rawa sebanyak 6 (enam) buah dengan total luas 152,01 Ha dan kedalaman antara 2-3 meter. Kota Tangerang juga mempunyai 54 saluran pembuangan dengan total panjang 150,03 Km, dan 16 saluran irigasi dengan total panjang mencapai 62.488,30 Km. Nama-nama situ/danau di Kota Tangerang tersebut diantaranya adalah Situ Cipondoh, Situ Besar/Gede, Situ Cangkring, Situ Kunci, Situ Bojong, dan Situ Bulakan. Sedangkan 3 (tiga) situ lainnya, yaitu Situ Kompeni, Situ Plawad, dan Situ Kambing sudah tidak aktif menjadi situ/danau.

Situ Cipondoh merupakan situ atau danau terbesar yang berada di Kecamatan Cipondoh dengan luas kurang lebih 126,17 Ha. Di sekitar Situ Cipondoh, terdapat bagian yang mengalami pendangkalan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan basah, sehingga perlu kontrol yang lebih ketat agar tidak beralih fungsi. Selama ini Situ Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, irigasi, cadangan air baku dan rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini cenderung mengalami pendangkalan terutama di tepi situ karena banyak ditumbuhi tanaman eceng gondok yang memenuhi permukaan

air Situ Cipondoh. Untuk lebih jelasnya, berikut kondisi 6 (enam) Situ/Rawa di Kota Tangerang.

Tabel 2.6. Nama Situ/Danau di Kota Tangerang

No	Nama Situ/Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Kewenangan	Digunakan oleh masyarakat
1	Cipondoh	Kec. Cipondoh Kec. Pinang	126,17	3,00	Pusat / Prov. Banten	sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata
2	Besar (Gede)	Kel. Cikokol Kec. Tangerang	5,07	3,00	Pusat / Prov. Banten	sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata
3	Cangkring	Kec. Periuk	5,17	3,00	Pusat / Prov. Banten	sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata
4	Kunciran	Kel. Kunciran Kec. Pinang	0,40	2,50	Pusat / Prov. Banten	sebagai danau Reservoir
5	Bojong	Kel. Kunciran Kec. Pinang	0,20	3,00	Pusat / Prov. Banten	sebagai danau reservoir
6	Bulakan	Kec. Periuk	15,00	3,00	Pusat / Prov. Banten	sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata
7	Kompeni	Kel. Rawa Bokor Kec. Benda	-	-	-	-
8	Plawad	Kec. Cipondoh	-	-	-	-
9	Kambing	Kec. Karang Tengah	-	-	-	-
Kota Tangerang			152,01	17,5		

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

F. Klimatologi

Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis dengan rata-rata temperatur (suhu) udara mencapai 29,3°C pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022, rata-rata temperatur (suhu) udara tertinggi mencapai 34,5°C dan rata-rata temperatur (suhu) udara terendah mencapai 22,5°C. Waktu terpanas pada Tahun 2022 terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 35,4°C dan waktu terdingin terjadi pada bulan Juli yang mencapai 21,0°C. Jika dilihat perkembangan dari tahun sebelumnya, terjadi perubahan rata-rata temperatur (suhu) udara yaitu dari 27,5 °C pada Tahun 2021 menjadi 29,3°C pada Tahun 2022. Berikut ini diuraikan kondisi temperatur (suhu) udara Kota Tangerang berdasarkan bulan pada Tahun 2022.

Tabel 2.7. Temperatur Udara di Kota Tangerang

Bulan	Temperatur Minimum (°C)	Temperatur Rata-rata (°C)	Temperatur Maximum (°C)
Januari	23,0	29,0	34,2
Februari	23,0	28,5	33,0
Maret	23,0	29,2	34,6
April	22,8	29,9	34,4
Mei	22,0	29,6	35,2
Juni	23,0	29,1	34,4
Juli	21,0	29,8	34,2
Agustus	22,0	29,9	35,0
September	22,4	29,6	34,4
Oktober	22,0	29,2	35,4
November	23,0	29,1	34,8
Desember	23,0	28,6	34,0
Tahun 2022	22,5	29,3	34,5
Tahun 2021	21,9	27,5	33,9
Tahun 2020	24,7	27,8	32,6
Tahun 2019	24,9	27,9	32,3
Tahun 2018	24,3	27,9	32,6

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

Kondisi iklim Kota Tangerang juga dapat dilihat dari banyaknya hari hujan, curah hujan, dan kelembapan udara pada kurun waktu tertentu. Pada Tahun 2022, Kota Tangerang memiliki rata-rata banyaknya hari hujan adalah 15 hari dalam sebulan. Hujan terbanyak pada Tahun 2022 terjadi pada Bulan Februari sebanyak 21 hari dan bulan yang mengalami hujan paling sedikit adalah Bulan Juli sebanyak 7 hari dalam satu bulan. Rata-rata curah hujan di Kota Tangerang pada Tahun 2022 adalah 198,59 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Mei sebesar 403,10 mm sedangkan curah hujan terendah adalah Juni sebesar 83,10 mm.

Kota Tangerang memiliki rata-rata kelembaban pada Tahun 2022 sebesar 74,73 %, dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Desember dan kelembaban terendah terjadi pada bulan Agustus. Jika dilihat dari tahun sebelumnya, terjadi penurunan tingkat kelembaban di Kota Tangerang.

Tabel 2.8. Rata-rata Curah Hujan dan Kelembaban Udara di Kota Tangerang

Bulan	Banyak Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Kelembaban Udara (%)
Januari	16	174,5	75,0
Februari	21	179,8	76,3
Maret	16	301,5	75,5
April	15	191,2	73,3
Mei	17	403,1	76,2
Juni	15	83,1	75,7
Juli	7	100,4	71,4
Agustus	12	96,9	71,2
September	14	253,7	72,8
Oktober	16	197,7	75,3
November	16	197,8	75,8
Desember	17	203,4	78,3
Tahun 2022	15,0	198,59	74,73
Tahun 2021	13,0	170,7	78,8
Tahun 2020	14,8	170,4	80,3
Tahun 2019	16,2	221,9	81,3
Tahun 2018	11,0	147,5	77,2

Keterangan :

-Curah hujan tidak dalam rata-rata tetapi total dalam satu bulan

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2023

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah merupakan kondisi yang menjadi kekuatan pembangunan daerah yang mencakup: aspek fisik (geografi, topografi, hidrologi), aspek sumber daya manusia (demografi), serta aspek pengembangan kawasan dan wilayah. Berikut ini diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Tangerang.

1. Aspek Fisik

- **Kondisi topografi wilayah yang landai**

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang memiliki kondisi topografi yang landai (0-3%) di mana sangat menguntungkan bagi pengembangan kegiatan perkotaan.

- **Ketersediaan potensi sumber air baku**

Kota Tangerang memiliki potensi sumber air baku yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun

kebutuhan industri, yaitu dengan terdapatnya banyak sungai di wilayah Kota Tangerang, seperti Sungai Cisadane, Sungai Cirarab, Kali Angke, dan beberapa anak sungainya.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (Demografi)

- **Jumlah penduduk yang besar**

Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu 1.930.556 jiwa pada Tahun 2022 yang dapat menjadi potensi pembangunan.

- **Kelompok usia produktif yang tinggi**

Struktur penduduk Kota Tangerang menurut kelompok umur pada Tahun 2022 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu 1.364.631 jiwa (70,69%).

3. Aspek Pengembangan Kawasan dan Wilayah

- **Letak geografis yang strategis**

Kota Tangerang memiliki nilai geostrategis yang sangat penting dalam konstelasi nasional karena letaknya yang berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (berjarak ±27 km).

- **Aksesibilitas yang baik**

Kota Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik terhadap kota Jakarta dan kota-kota penting di Provinsi Banten dan Jawa Barat serta terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, yaitu dengan adanya Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak, jalan rel kereta api double track Tangerang-Jakarta, perpanjangan koridor IV Busway Kalideres-Tangerang, serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

- **Ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)**

Kota Tangerang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu dalam RTRW Nasional yang diprioritaskan pengembangannya dalam skala nasional.

- **Ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**

Kota Tangerang ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi dalam RTRW Provinsi Banten yang diprioritaskan pengembangannya dalam skala Provinsi Banten.

- **Dukungan kebijakan transportasi Provinsi DKI Jakarta**

Adanya rencana pengembangan sistem transportasi massal terpadu dengan daerah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta.

- **Keberadaan kawasan industri, pusat perdagangan dan jasa**

Perekonomian Kota Tangerang didominasi oleh kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang merupakan sektor basis dan unggulan kota yang mampu membangkitkan dan menggerakkan sektor-sektor perekonomian lainnya.

- **Infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang cukup memadai**

Kota Tangerang didukung oleh ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dalam mendukung aktivitas masyarakat. Kondisi ini tercermin dengan tersedianya sistem transportasi umum perkotaan, pelayanan air bersih dan minum, pengolahan air limbah domestik, persampahan, energi, fasilitas Pendidikan, Kesehatan, olah raga, taman, dan lain-lain.

- **Kawasan Strategis Kota**

Dengan kedudukan geografis dan dukungan aksesibilitas tersebut Kota Tangerang mempunyai beberapa potensi kawasan strategis dan potensi ruang yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikembangkan. antara lain:

- **Sungai Cisadane**

Sungai Cisadane yang membelah Kota Tangerang mengalir dari hulunya di Gunung Pangrango Bogor dan berhilir ke Laut Jawa dengan panjang sekitar 137.8 km. Sungai Cisadane memiliki sembilan anak sungai dan jutaan warga yang menggantungkan hidup terhadapnya sebagai sumber baku air minum dan MCK (mandi, cuci, dan kakus). Selain itu, Sungai Cisadane mempunyai debit aliran relatif tinggi serta kedalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi prasarana transportasi alternatif (transportasi air), pengairan (irigasi) pertanian, dan sebagai pendukung budidaya perikanan air tawar.

- **Situ/Danau**

Keberadaan situ yang berlokasi di Kota Tangerang memiliki prospek dan potensi yang baik apabila mampu dikelola dengan optimal. Hal ini terlihat dari karena beberapa situ mempunyai lokasi yang cukup strategis, antara lain Situ Cipondoh dan Situ Bulakan yang dapat dikembangkan menjadi obyek pariwisata daerah.

- **Pariwisata**

Kota Tangerang memiliki beberapa lokasi objek wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata rohani. Obyek-obyek wisata tersebut perlu dikelola dengan profesional sehingga bukan hanya mencapai tujuan-tujuan ekonomis seperti meningkatkan arus kunjungan wisatawan. tetapi juga dapat memelihara cagar budaya dan sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Kota Tangerang. Selain itu, Kota Tangerang juga memiliki berbagai tempat dan agenda budaya yang jika dikelola lebih baik akan mendatangkan arus wisatawan dan mendorong perekonomian wilayah. serta akan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata, seni, dan budaya, serta akan memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Kota Tangerang.

Untuk itu, idealnya tidak direduksi hanya sebatas pemeliharaan seni dan tradisi masyarakat, tetapi juga upaya untuk mengelaborasi nilai-nilai yang terdapat dalam setiap tempat pariwisata dan agenda budaya tersebut untuk kemudian dijadikan salah satu elemen dalam membangun kultur dan karakter masyarakat Kota Tangerang. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar kekayaan yang dimiliki ini terus disosialisasikan dan dipromosikan khususnya kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang sehingga akan lebih mengenal dan timbul rasa memiliki terhadap kekayaan pariwisata. seni dan budaya tersebut. Untuk meningkatkan program pariwisata ini. Pemerintah Daerah Kota Tangerang perlu mengadakan berbagai event wisata dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan operator pariwisata.

- **Industri**

Dilihat dari jumlah industri yang ada, Kota Tangerang termasuk kota industri. Kedekatan dengan Ibukota negara dan kemudahan akses terhadap berbagai prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara. menyebabkan Kota Tangerang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif bagi pelaku industri. Oleh karena itu, sektor industri memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Sektor industri merupakan sektor yang dominan kontribusinya terhadap perekonomian di Kota Tangerang. Pengembangan sektor ini akan berdampak signifikan bagi masyarakat Kota Tangerang. Pembangunan industri di Kota Tangerang diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh dalam menciptakan landasan perekonomian yang kuat agar tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri.

Sektor industri yang perlu terus dikembangkan adalah industri pengolahan karena memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang tinggi. Untuk pengembangannya, perlu dibangun kawasan-kawasan industri baru dengan infrastruktur yang memadai. Untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif industrialisasi terhadap lingkungan, perlu dipilih industri-industri non-polutif dan kewajiban bagi pengembang kawasan industri untuk membangun sarana IPAL.

H. Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang mengancam Kota Tangerang dapat digolongkan pada tiga kategori, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Jenis bencana tersebut meliputi, antara lain: banjir, kekeringan, gempa bumi, wabah penyakit, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Dengan kondisi geografis Kota Tangerang yang sebagian besar terletak pada dataran rendah serta tingginya kepadatan penduduk di beberapa wilayah kecamatan, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana lebih difokuskan pada kerawanan terhadap bencana banjir dan kebakaran.

Selain bencana kebakaran, bencana lain yang sering dialami oleh warga Kota Tangerang yaitu bencana banjir yang terjadi dari tahun ke tahun di wilayah Kota Tangerang. Pada Tahun 2022 terjadi bencana banjir di Kota Tangerang yang menggenangi sekitar 217,79 Ha. Namun demikian, kondisi banjir dan genangan ini pada Tahun 2022 tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2021 yang mencapai 289,68 Ha. Dari tahun ke tahun wilayah Kota Tangerang mengalami banjir yang disebabkan berbagai faktor antara lain: kurang/tidak berfungsinya saluran drainase dan sungai, curah hujan yang tinggi, serta banjir kiriman dari daerah hulu.

2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Tangerang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 penduduk Kota Tangerang berjumlah 1.895.486 jiwa (Hasil Sensus Penduduk 2020), 1.911.914 jiwa pada Tahun 2021 dan meningkat menjadi 1.930.556 jiwa pada Tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2022 mencapai 0,98%.

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan jika memiliki kualitas yang memadai. Oleh karena itu, penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk

tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berikut ini diuraikan jumlah penduduk Kota Tangerang Pada Tahun 2020-2022.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022

No.	Kecamatan	Satuan	2010	2020	2021	2022
1	Ciledug	Jiwa	147.023	164.151	166.308	168.670
2	Larangan	Jiwa	163.901	165.599	166.161	166.900
3	Karang Tengah	Jiwa	118.473	117.721	118.003	118.409
4	Cipondoh	Jiwa	216.346	248.212	252.136	256.392
5	Pinang	Jiwa	160.206	180.131	182.622	185.342
6	Tangerang	Jiwa	152.145	153.859	154.394	155.094
7	Karawaci	Jiwa	171.317	184.388	186.149	188.124
8	Jatiuwung	Jiwa	120.216	102.053	102.297	102.650
9	Cibodas	Jiwa	142.479	147.279	148.106	149.093
10	Periuk	Jiwa	129.384	141.003	142.522	144.208
11	Batuceper	Jiwa	90.590	92.044	92.407	92.868
12	Neglasari	Jiwa	103.504	115.520	117.034	118.692
13	Benda	Jiwa	83.017	83.526	83.775	84.114
	Jumlah	Jiwa	1.798.601	1.895.486	1.911.914	1.930.556

Sumber: BPS Kota Tangerang (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023)

Keterangan:

Tahun 2010 = Hasil Sensus Penduduk 2010

Tahun 2020 = Hasil Sensus Penduduk 2020

Pada Tahun 2022, Kecamatan Cipondoh merupakan wilayah berpenduduk paling besar yaitu sebanyak 256.392 jiwa atau 13,28% dari total penduduk Kota Tangerang. Kecamatan Benda merupakan wilayah berpenduduk paling sedikit yaitu sebanyak 84.114 jiwa atau 4,36% dari total penduduk Kota Tangerang.

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda-beda.

Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Berikut ini diuraikan jumlah penduduk Kota Tangerang menurut kelompok umur Tahun 2020-2022.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Tangerang Tahun 2020-2022

No.	Kelompok Umur	2010	2020	2021	2022
1	0-4	173.157	167.518	166.179	165.321
2	5-9	159.428	158.198	157.782	157.097
3	10-14	141.176	151.229	150.883	151.216
4	15-19	155.838	146.774	144.876	143.398
5	20-24	188.168	149.136	147.691	145.991
6	25-29	215.582	160.202	159.550	159.346
7	30-34	192.769	162.526	162.680	162.528
8	35-39	159.323	167.823	168.977	170.536
9	40-44	127.995	157.153	158.936	160.565
10	45-49	98.132	134.383	137.348	140.364
11	50-54	74.388	108.857	112.107	115.551
12	55-59	48.551	88.475	91.919	95.282
13	60-64	26.668	63.947	67.332	71.070
14	65-69	16.538	44.820	47.905	50.638
15	70-75	10.910	17.992	20.674	23.774
16	75+	9.978	16.453	17.075	17.879
	Total	1.798.601	1.895.486	1.911.914	1.930.556

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

Keterangan:

Tahun 2010 = Hasil Sensus Penduduk 2010

Tahun 2020 = Hasil Sensus Penduduk 2020

Dari tabel di atas, penduduk Kota Tangerang Tahun 2022 pada kelompok usia anak (0–14 tahun) jumlahnya mencapai 473.634 jiwa (24,53%). Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Seiring dengan jumlah proporsi usia anak dalam komposisi penduduk maka peningkatan kualitas anak sebagai sumber daya manusia membutuhkan perhatian yang besar. Sedangkan jumlah Penduduk pada kelompok usia (15–64 tahun) yang merupakan usia produktif berjumlah 1.364.631 jiwa atau sekitar 70,69% dari jumlah penduduk Kota Tangerang. Kondisi ini mengartikan bahwa potensi SDM dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di Kota Tangerang tahun 2022 terlihat relatif besar, sehingga perlu adanya upaya antisipasi terhadap penyediaan sarana, prasarana pada tiga bidang tersebut, terutama bidang ketenagakerjaan/lowongan kerja.

Terkait dengan jumlah penduduk menurut struktur usia, maka dapat pula dihitung besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk (*Depedency Ratio*) pada wilayah dan pada tahun tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar seorang penduduk usia produktif harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan penduduk di Kota Tangerang Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2020-2022

No.	Uraian	Satuan	2010	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Menurut Kelomok Umur					
1.1	Jumlah Penduduk (0-14)	Jiwa	473.761	476.945	474.844	473.634
1.2	Jumlah Penduduk (15-64)	Jiwa	1.287.414	1.339.276	1.351.416	1.364.631
1.3	Jumlah Penduduk (65+)	Jiwa	37.426	79.265	85.654	92.291
2	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	%	39,71	41,53	41,47	41,47

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

Keterangan:

Tahun 2010 = Hasil Sensus Penduduk 2010

Tahun 2020 = Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kualitas produktivitas penduduk Kota Tangerang pada Tahun 2022 dilihat dari struktur penduduk Kota Tangerang yang memiliki nilai rasio ketergantungan sebesar 41,47%. Hal ini berarti bahwa diantara 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) terdapat sekitar 41 jiwa penduduk usia non produktif (0–14 tahun dan 65+ tahun). Atau dengan kata lain bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar sebanyak 41 penduduk usia non produktif.

Pada Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Tangerang menurut jenis kelamin ditandai dengan jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar dari penduduk perempuan. Penduduk Kota Tangerang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Peningkatan penduduk yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kota Tangerang terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Berikut ini diuraikan jumlah penduduk Kota Tangerang menurut struktur umur dan jenis kelamin Tahun 2020-2022.

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Tahun 2020-2022

NO.	UMUR	JENIS KELAMIN			JENIS KELAMIN			JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
		2020			2021			2022		
1	0-4	85.513	82.005	167.518	84.838	81.341	166.179	84.391	80.930	165.321
2	5-9	81.180	77.018	158.198	80.891	76.891	157.782	80.518	76.579	157.097
3	10-14	77.748	73.481	151.229	77.472	73.411	150.883	77.504	73.712	151.216
4	15-19	75.635	71.139	146.774	74.669	70.207	144.876	73.923	69.475	143.398
5	20-24	75.190	73.946	149.136	74.431	73.260	147.691	73.555	72.436	145.991
6	25-29	80.098	80.104	160.202	79.741	79.809	159.550	79.596	79.750	159.346
7	30-34	81.652	80.874	162.526	81.906	80.774	162.680	81.973	80.555	162.528
8	35-39	84.897	82.926	167.823	85.604	83.373	168.977	86.522	84.014	170.536
9	40-44	79.474	77.679	157.153	80.405	78.531	158.936	81.294	79.271	160.565
10	45-49	67.750	66.633	134.383	69.187	68.161	137.348	70.663	69.701	140.364
11	50-54	54.803	54.054	108.857	56.302	55.805	112.107	57.896	57.655	115.551
12	55-59	43.728	44.747	88.475	45.288	46.631	91.919	46.822	48.460	95.282
13	60-64	32.212	31.735	63.947	33.763	33.569	67.332	35.463	35.607	71.070
14	65-69	23.069	21.751	44.820	24.613	23.292	47.905	25.941	24.697	50.638
15	70+	16.060	18.385	34.445	17.698	20.051	37.749	19.648	22.005	41.653
	JUMLAH	959.009	936.477	1.895.486	966.808	945.106	1.911.914	975.709	954.847	1.930.556

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

Keterangan:

Tahun 2010 = Hasil Sensus Penduduk 2010

Tahun 2020 = Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2022 penduduk Kota Tangerang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan sex ratio sebesar 102,18%..

Kepadatan Penduduk Kota Tangerang pada Tahun 2022 adalah 11.732 jiwa/km², dengan luas wilayah 164,55 km² berada pada kriteria kepadatan Tinggi. Berikut diuraikan kepadatan penduduk Kota Tangerang Tahun 2020-2022.

Tabel 2.13. Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang Tahun 2020-2022

No.	Kecamatan	Satuan	2010	2020	2021	2022
1	Ciledug	Jiwa/Km2	16.764	18.717	18.963	19.233
2	Larangan	Jiwa/Km2	17.436	17.617	17.677	17.755
3	Karang Tengah	Jiwa/Km2	11.315	11.244	11.271	11.309
4	Cipondoh	Jiwa/Km2	12.080	13.859	14.078	14.316
5	Pinang	Jiwa/Km2	7.420	8.343	8.459	8.585
6	Tangerang	Jiwa/Km2	9.636	9.744	9.778	9.822
7	Karawaci	Jiwa/Km2	12.709	13.679	13.809	13.956
8	Jatiuwung	Jiwa/Km2	8.343	7.082	7.099	7.124
9	Cibodas	Jiwa/Km2	14.826	15.326	15.412	15.514
10	Periuk	Jiwa/Km2	13.562	14.780	14.939	15.116
11	Batuceper	Jiwa/Km2	7.823	7.949	7.980	8.020
12	Neglasari	Jiwa/Km2	6.437	7.184	7.278	7.381
13	Benda	Jiwa/Km2	14.023	14.109	14.151	14.208
	Jumlah	Jiwa/Km2	10.930	11.519	11.619	11.732

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

Keterangan:

Tahun 2010 = Hasil Sensus Penduduk 2010

Tahun 2020 = Hasil Sensus Penduduk 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A 1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
A 1 3	Penunjang Urusan Pemerintahan						
A 1 3 0 0 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	77,92	78,43	78,25	78,50	78,90
A 1 3 0 0 2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,95	4,05	-6,93	3,70	4,42*
A 1 3 0 0 3	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) (Persentase Penduduk yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan)	%	4,76	4,43	5,22	5,93	5,77
A 1 3 0 0 4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	82,54	82,62	84,25	84,84	85,35
A 1 3 0 0 5	Indeks Daya Beli (IDB)	Point	81,37	82,24	81,46	81,65	82,34
A 1 3 0 0 6	Pengeluaran per Kapita Setahun yang Disesuaikan (PPP/DB)	Rp. Ribu	14.443	14.860	14.484	14.575	14.909
A 1 3 0 0 7	Laju Inflasi	%	3,46	4,30	1,18	1,81	4,56
A 1 3 0 0 8	Indeks gini Indeks gini (gini rasio)	Point	0,330	0,328	0,339	0,343	0,345*
A 2	Fokus Kesejahteraan Sosial						
A 2 1	Urusan Wajib						
A 2 1 1	Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
A 2 1 1 1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
A 1 1 1 1 1	Indeks Pengetahuan (Indeks Pendidikan) (IP)	Point	73,45	73,94	74,11	74,63	74,69
A 1 1 1 1 2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,83	13,84	13,85	13,87	13,88
A 1 1 1 1 3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,51	10,65	10,69	10,83	10,84
A 1 1 1 1 4	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,48	98,46	97,51	97,91	97,91
A 1 1 1 1 5	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98,97	98,99	87,23	99,00	99,00
A 2 1 1 2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
A 2 1 1 2 1	Indeks Kesehatan (Indeks	Point	79,15	79,34	79,38	79,38	79,86

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						Harapan Hidup)						
A	2	1	1	2	2	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	71,45	71,57	71,60	71,60	71,91
A	2	1	1	2	3	Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	1,25	1,15	1,14	1,03	1,09
A	2	1	1	2	4	Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	15,31	15,66	12,92	15,47	12,34
A	2	1	1	2	5	Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	N/A	223,00	186,22	171,14	183,94
A	2	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
A	2	1	2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
A	2	1	2	1	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,41	7,13	8,63	9,07	7,15

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Penyusunan PDB maupun PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah

mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari PDRB antara lain adalah sebagai berikut:

1. PDRB harga berlaku (nominal) (PDRB ADHB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) (PDRB ADHK) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Klasifikasi PDB/PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDB/PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. PDB/PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha

pada tahun dasar 2010. PDB/PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2010 dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha : (1) pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) pengadaan listrik dan gas; (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (6) konstruksi; (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (8) transportasi dan pergudangan; (9) penyediaan akomodasi dan makan minum; (10) informasi dan komunikasi; (11) jasa keuangan dan asuransi; (12) real estate; (13) jasa perusahaan; (14) administrasi pemerintah, pertanahan dan jaminan sosial wajib; (15) jasa pendidikan; (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (17) jasa lainnya.

Terdapat 2 (dua) jenis penghitungan PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni Tahun 2010. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dengan memperhitungkan tingkat inflasi.

Berikut ini diuraikan perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.14. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Tangerang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Kode	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021*	2022**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp. Juta	2.343.585,78	2.562.820,60	2.684.166,81	2.809.865,97	3.003.781,42
B.	Pertambangan dan Penggalian	Rp. Juta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Industri Pengolahan	Rp. Juta	47.487.779,79	49.970.293,80	48.364.141,36	51.554.899,29	53.428.842,32
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp. Juta	305.496,43	318.829,40	311.093,09	331.781,63	353.761,91
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp. Juta	94.457,82	100.590,60	110.943,61	125.411,40	131.038,17
F.	Konstruksi	Rp. Juta	11.129.353,99	12.193.194,00	12.258.528,68	14.038.094,38	14.876.974,13
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	16.293.271,74	17.990.117,50	18.337.840,71	19.073.767,77	20.158.231,12
H.	Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	51.096.359,42	53.209.280,10	23.047.848,13	22.232.413,92	48.793.072,75
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp. Juta	2.216.176,32	2.379.327,50	2.265.473,30	2.354.816,11	2.462.091,20
J.	Informasi dan Komunikasi	Rp. Juta	7.055.592,14	7.490.861,50	8.110.545,78	8.576.367,51	8.898.908,23
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp. Juta	4.270.048,32	4.446.650,90	4.723.469,29	5.254.070,87	5.621.288,63
L.	Real Estat	Rp. Juta	8.456.828,40	9.289.094,70	10.245.485,74	10.857.690,50	11.193.344,60
M.N.	Jasa Perusahaan	Rp. Juta	1.624.076,95	1.815.763,30	1.840.747,52	1.836.456,66	1.892.290,47
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp. Juta	1.844.938,64	2.013.512,20	2.113.610,09	2.177.790,60	2.245.338,26
P.	Jasa Pendidikan	Rp. Juta	3.579.575,59	3.996.897,20	4.355.723,98	4.362.139,74	4.477.793,15
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp. Juta	1.339.727,45	1.498.789,10	1.796.028,25	2.009.336,35	2.047.491,40
R.S.T.U.	Jasa Lainnya	Rp. Juta	2.222.359,57	2.456.424,00	2.457.117,41	2.544.099,08	2.626.536,10
	PDRB ADHB	Rp. Juta	161.359.628,35	171.732.446,40	143.022.763,75	150.139.001,78	182.210.783,86

Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2023 (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023)

Keterangan :

Tahun 2020 = Angka Revisi

Tahun 2021 (*) = Angka Sementara

Tahun 2022 (**) = Angka Sangat Sementara

Tabel 2.15. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kota Tangerang Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Kode	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021*	2022**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp. Juta	1.586.326,31	1.694.004,10	1.744.673,67	1.745.997,48	1.811.678,09
B.	Pertambangan dan Penggalian	Rp. Juta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Industri Pengolahan	Rp. Juta	38.351.714,78	39.566.347,70	37.527.628,83	39.039.924,90	39.045.449,51
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp. Juta	178.654,99	185.037,20	181.389,18	193.229,70	203.836,67
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp. Juta	85.882,57	91.121,40	99.850,83	111.423,54	115.947,34
F.	Konstruksi	Rp. Juta	7.696.595,50	8.219.964,00	8.184.618,14	8.917.959,93	9.152.502,28
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	13.691.609,49	14.679.063,30	14.503.429,06	14.834.200,26	15.143.402,35
H.	Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	17.495.765,87	16.724.276,00	9.056.918,30	9.171.871,77	14.157.561,31
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp. Juta	1.637.995,38	1.746.490,80	1.651.820,89	1.708.366,45	1.768.466,69
J.	Informasi dan Komunikasi	Rp. Juta	8.469.876,76	9.260.963,20	10.141.680,86	10.717.728,33	11.045.690,81
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp. Juta	3.015.473,78	3.094.442,30	3.286.161,09	3.509.708,01	3.566.266,46
L.	Real Estat	Rp. Juta	7.011.719,20	7.691.166,60	8.178.786,53	8.508.391,63	8.733.864,01
M.N.	Jasa Perusahaan	Rp. Juta	1.114.613,98	1.204.897,70	1.189.595,51	1.174.606,61	1.186.470,13
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp. Juta	1.174.803,28	1.252.340,30	1.247.957,10	1.246.584,35	1.252.069,32
P.	Jasa Pendidikan	Rp. Juta	2.342.070,06	2.518.896,30	2.670.785,80	2.642.742,55	2.644.063,92
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp. Juta	977.207,26	1.056.361,10	1.226.012,63	1.344.200,25	1.356.029,21
R.S.T.U.	Jasa Lainnya	Rp. Juta	1.453.308,21	1.571.026,20	1.524.366,69	1.546.774,88	1.596.735,71
	PDRB ADHB	Rp. Juta	106.283.617,42	110.556.398,20	102.415.675,11	106.413.710,64	112.780.033,81

Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2023 (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023)

Keterangan :

Tahun 2020 = Angka Revisi

Tahun 2021 (*) = Angka Sementara

Tahun 2022 (**) = Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB ADHB Kota Tangerang pada periode Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 161,36 Triliun pada Tahun 2018 menjadi Rp. 182,21 Triliun pada Tahun 2022. Sedangkan nilai PDRB ADHB pada periode Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 106,46 Triliun pada Tahun 2018 menjadi Rp. 112,98 Triliun pada Tahun 2022.

Karakteristik perekonomian Kota Tangerang dapat dilihat dari struktur perekonomian yang menggambarkan tentang keunggulan masing-masing sektor, dimana keunggulan ini dihitung berdasarkan kontribusi setiap sektor terhadap total PDRB. Kontribusi yang paling besar dapat dikategorikan sebagai sektor basis dan sektor unggulan daerah. Berikut ini diuraikan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB ADHB Tahun 2018-2022.

Tabel 2.16. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Tangerang Tahun 2018-2022 (Persen)

KODE	LAPANGAN USAHA	SATUAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,45	1,49	1,88	1,87	1,65
B.	Pertambangan dan Penggalian	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Industri Pengolahan	%	29,43	29,10	33,82	34,34	29,32
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,19	0,19	0,22	0,22	0,19
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,06	0,06	0,08	0,08	0,07
F.	Konstruksi	%	6,90	7,10	8,57	9,35	8,16
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	10,10	10,48	12,82	12,70	11,06
H.	Transportasi dan Pergudangan	%	31,67	30,98	16,11	14,81	26,78
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1,37	1,39	1,58	1,57	1,35
J.	Informasi dan Komunikasi	%	4,37	4,36	5,67	5,71	4,88
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	2,65	2,59	3,30	3,50	3,09
L.	Real Estat	%	5,24	5,41	7,16	7,23	6,14
M,N.	Jasa Perusahaan	%	1,01	1,06	1,29	1,22	1,04
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	1,14	1,17	1,48	1,45	1,23
P.	Jasa Pendidikan	%	2,22	2,33	3,05	2,91	2,46
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	0,83	0,87	1,26	1,34	1,12
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	%	1,38	1,43	1,72	1,69	1,44
	PDRB ADHB	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2023 (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023)

Keterangan :

Tahun 2020 = Angka Revisi

Tahun 2021 (*) = Angka Sementara

Tahun 2022 (**) = Angka Sangat Sementara

Kontribusi sektor ekonomi Kota Tangerang yang dihitung berdasarkan sisi produksi masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Ketiga sektor ini memberikan daya ungkit yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan per kapita. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang didominasi oleh konsumsi masyarakat sedangkan investasi dan ekspor masih perlu didorong untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pada Tahun 2022, sektor Industri Pengolahan (29,32%), sektor Transportasi dan Pergudangan (26,78%), dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,06%) merupakan tiga penyumbang terbesar terhadap PDRB ADHB.

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kinerja ekonomi suatu daerah atau negara dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung terhadap tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah, tingkat investasi dan besaran ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam formulasi adalah $Y = C + I + G + (X - M)$. Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB ADHK. Berikut ini diuraikan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kota Tangerang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Persen)**

KODE	LAPANGAN USAHA	SATUAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	7,69	6,79	2,99	0,08	3,76
B.	Pertambangan dan Penggalian	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Industri Pengolahan	%	2,68	3,17	-5,15	4,03	0,01
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	%	3,54	3,57	-1,97	6,53	5,49
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	5,44	6,10	9,58	11,59	4,07
F.	Konstruksi	%	5,29	6,80	-0,43	8,96	2,63
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,82	7,21	-1,20	2,28	2,08
H.	Transportasi dan Pergudangan	%	5,69	-4,41	-45,85	1,27	54,36
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	7,22	6,62	-5,42	3,42	3,52
J.	Informasi dan Komunikasi	%	7,04	9,34	9,51	5,68	3,06
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	7,29	2,62	6,20	6,80	1,61
L.	Real Estat	%	7,18	9,69	6,34	4,03	2,65
M,N.	Jasa Perusahaan	%	6,67	8,10	-1,27	-1,26	1,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	5,63	6,60	-0,35	-0,11	0,44
P.	Jasa Pendidikan	%	7,45	7,55	6,03	-1,05	0,05
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	6,66	8,10	16,06	9,64	0,88
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	%	7,87	8,10	-2,97	1,47	3,23
	PDRB ADHK	%	4,95	4,02	-7,36	3,90	5,98

Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2023 (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023)

Keterangan :

Tahun 2020 = Angka Revisi

Tahun 2021 (*) = Angka Sementara

Tahun 2022 (**) = Angka Sangat Sementara

Pada periode Tahun 2018-2022, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang mengalami fluktuasi yaitu dari 4,95% pada Tahun 2018 menjadi 5,98% pada Tahun 2022. Bahkan pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berkontraksi -7,36% sebagai dampak pandemi Covid 19 dan resesi ekonomi yang terjadi sejak Tahun 2020. Pada Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan tumbuh positif menjadi 3,90%. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2021, proses pemulihan ekonomi mulai terjadi. Berikut ini diuraikan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2018-2022.

Tabel 2.18. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2018-2022 (Persen)

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Kota Tangerang	%	4,95	4,02	-7,36	3,90	5,98
2	Provinsi Banten	%	5,77	5,26	-3,39	4,45	5,03
3	Indonesia	%	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Tahun 2023

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional dalam periode Tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa LPE Kota Tangerang dibawah atau lebih rendah dari Provinsi Banten dan nasional setiap tahunnya. Namun demikian, pada Tahun 2022, LPE Kota Tangerang mencapai 5,98% lebih tinggi dari Provinsi Banten yang mencapai 5,03% dan lebih tinggi dari nasional yang mencapai 5,31%.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per jiwa atau satu orang penduduk yang dihitung berdasarkan harga pada tahun penghitungan dengan mengesampingkan laju inflasi. Sedangkan PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk dengan memperhitungkan angka inflasi. Berikut ini diuraikan perkembangan PDRB per kapita Kota Tangerang.

Tabel 2.19. PDRB per Kapita Kota Tangerang Tahun 2018-2022

Kode	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	PDRB ADHB per Kapita per Tahun	Rp.Juta/ Jiwa/Tahun	73,84	78,05	75,56	78,53	94,38
2	PDRB ADHK per Kapita per Tahun	Rp.Juta/ Jiwa/Tahun	48,72	50,33	54,20	55,76	58,52
3	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB per Kapita per Tahun	%	6,04	5,70	-3,19	3,93	20,19
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita per Tahun	%	2,76	3,31	7,70	2,87	4,96
5	PDRB ADHB per Kapita per Bulan	Rp.Juta/ Jiwa/Bulan	6,15	6,40	5,22	5,33	6,47
6	PDRB ADHK per Kapita per Bulan	Rp.Juta/ Jiwa/Bulan	4,06	4,13	3,75	3,79	4,01
7	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB per	%	6,09	4,03	-18,38	2,13	21,36

Kode	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021*	2022**
	Kapita per Bulan						
8	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita per Bulan	%	2,81	1,68	-9,20	1,09	5,98

Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2023 (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023)

Keterangan :

Tahun 2020 = Angka Revisi

Tahun 2021 (*) = Angka Sementara

Tahun 2022 (**) = Angka Sangat Sementara

Pada Tahun 2022 pendapatan per kapita (PDRB ADHB per kapita) mencapai sebesar Rp. 94,38 juta/jiwa/tahun. Realisasi pendapatan per kapita (PDRB ADHB per kapita) tersebut mengalami peningkatan 20,19% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mencapai Rp. 78,53 juta/jiwa/tahun.

D. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu gejala naiknya harga secara terus menerus (berkelanjutan) terhadap sejumlah barang. Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah. Inflasi dapat digambarkan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di suatu wilayah meningkat maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Atas dasar hal tersebut maka laju inflasi kerap dijadikan sebagai salah satu indikator pembangunan suatu daerah atau negara. Tingginya nilai inflasi mengindikasikan semakin terbebannya perekonomian masyarakat karena terjadinya kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, semakin rendah nilai inflasi atau bahkan bernilai negatif (deflasi), maka hal tersebut menunjukkan relatif stabilnya perekonomian masyarakat.

Berikut ini diuraikan perkembangan tingkat inflasi Kota Tangerang dalam kurun waktu Tahun 2018-2022.

Tabel 2.20. Laju Inflasi Kota Tangerang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Inflasi	%	3,46	4,30	1,18	1,81	4,56

Sumber: BPS Kota Tangerang Tahun 2023

Pada Tahun 2022, inflasi mencapai 4,56%. Realisasi inflasi Tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mencapai 1,81%.

E. Investasi

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka investasi merupakan salah satu upaya bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya persaingan antar daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi dari daerahnya masing-masing. Mengingat daya tarik investasi dipengaruhi oleh banyak hal, maka tiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor mau melakukan investasi. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maka diperlukan investasi baik yang berasal dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri/asing (PMA).

Kegiatan pengembangan penanaman modal (investasi), sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, seperti menciptakan lapangan kerja, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Persetujuan dan perizinan penanaman modal baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai pengaruh dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia. Proses persetujuan dan perizinan penanaman modal yang mudah, cepat, efisien serta tidak berbelit-belit dan birokrasi yang panjang merupakan suatu kendala yang sangat memberatkan bagi pelaku usaha. Dalam upaya pembenahan pelayanan perizinan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang menyediakan pelayanan perizinan secara Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara elektronik. Pelayanan izin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dilakukan secara online atau daring atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS) dalam arti penanaman modal tidak perlu hadir secara fisik untuk mendapatkan pelayanan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, perizinan telah banyak disederhanakan serta dapat diterbitkan berdasarkan komitmen bahkan waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan perizinan juga telah ditentukan namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya.

Pada Tahun 2022, nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN) mencapai Rp. 13,05 Triliun. Realisasi nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN) Tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mencapai Rp. 12,63 Triliun. Berikut ini diuraikan realisasi investasi di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.21. Laju Inflasi Kota Tangerang Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai Investasi (Rp.Juta)
2018	6.790.000.00
2019	7.970.000,00
2020	8.350.000,00
2021	12.630.000,00
2022	13.050.000,00

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang, Tahun 2023

Perkembangan realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Izin Usaha ini sangat tergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha baik PMA maupun PMDN dalam menyampaikan LKPM setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang. Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan Iklim Investasi di Kota Tangerang cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dan pemerintah daerah, dengan upaya secara terus menerus menyederhanakan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Mall Pelayanan Publik khususnya di Kota Tangerang.

F. Tingkat Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian seluruh pemerintah di manapun. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi

kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kehidupan ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat/budaya, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Kemiskinan di suatu wilayah terjadi karena beberapa hal antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka ketergantungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan *in efficiency economic*, terdapat alokasi asset yang tidak efisien dan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar dan kemudian menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar.

Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas dan tidak ada masyarakat yang dapat merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan-rekan satu wilayahnya berada dalam kesengsaraan karena kemiskinan yang diderita mereka.

F.1. Konsep

Pada hakekatnya setiap negara yang melakukan pembangunan akan menuju pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu orientasi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan, haruslah menjadi muara dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah/bangsa. Sejalan dengan cita-cita mulia Milenium Development Goals (MDG's) yang berakhir Tahun 2015 kemudian dilanjutkan Sustainable Development goals (SDG's) yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia, dengan target salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Di dalam dokumen SDG's di dalamnya memuat tujuan antara lain:

- (1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
- (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- (3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, termasuk Indonesia. Masalah mendasar (kemiskinan) tidak hanya menyangkut jumlah/persentase atau identifikasi penduduk miskin yang layak mendapat bantuan saja, juga menyangkut masalah definisi kemiskinan itu sendiri. Perbedaan definisi ini akan mengakibatkan perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan dan perbedaan dalam persepsi atas hasil dan implementasinya.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kehidupan ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat/budaya, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Kemiskinan di suatu wilayah terjadi karena beberapa faktor antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka ketergantungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan *in efficiency economic*, terdapat alokasi asset yang tidak efisien dan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar dan kemudian menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar.

Menurut World Bank, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain (BPS, 2015). Sedangkan konsep yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK).

Berdasarkan cara pendekatannya, ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai "*inability of the individual to meet basic needs*" (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut

sejalan dengan Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *“the failure to have certain minimum capabilities”*. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu melebihi kemampuan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin. Perhitungan penduduk miskin di Indonesia pada dasarnya mengikuti konsep di atas.

Menurut definisinya, terdapat empat definisi kemiskinan yang digunakan saat ini, yaitu sebagai berikut:

- **Kemiskinan absolut**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Dapat dikatakan pula kemiskinan absolut adalah orang atau rumah tangga yang berada atau hidup di bawah standar minimal kehidupan. Standar ini dikenal dengan sebutan Garis Kemiskinan (GK). Dalam hal ini Garis Kemiskinan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Sehingga orang atau rumah tangga yang berada di bawah GK masuk dalam kelompok miskin. Konsep atau definisi ini bersifat mutlak tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan, budaya, kondisi ataupun status sosialnya.

- **Kemiskinan relatif**

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau rumah tangga yang masih jauh lebih rendah kondisinya dibandingkan keadaan masyarakat sekitar. Seseorang atau rumah tangga berada dalam keadaan miskin meskipun sesungguhnya sudah berada di atas standar minimal (GK). Dalam hal ini Garis Kemiskinan sudah tidak menjadi pembatas lagi, karena kebutuhan minimal hidup orang atau rumah tangga ini sudah tidak hanya pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan saja, tetapi sudah masuk unsur gaya hidup, diantaranya unsur kualitas makanan, hiburan, komunikasi, dsb. Konsep atau definisi ini mengandung dimensi ketimpangan di dalamnya.

- **Kemiskinan subyektif**

Kemiskinan adalah kondisi atau status sosial seseorang atau rumah tangga yang memenuhi kriteria-kriteria miskin tertentu yang sudah ditetapkan. Kriteria ini dapat berupa kriteria yang obyektif melalui kajian ataupun tidak, seperti yang telah umum digunakan oleh masyarakat kita, misalnya janda, jompo, anak yatim, pengangguran, orang cacat, guru ngaji, dsb. Sehingga orang atau rumah tangga yang di dalamnya terdapat orang yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, masuk ke dalam kelompok miskin.

- **Budaya kemiskinan**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk dapat secara mandiri memperbaiki kondisi kehidupannya. Sehingga orang atau rumah tangga ini sulit untuk dapat lepas dari lingkaran kemiskinan-pemiskinan (budaya kemiskinan). Konsep atau definisi ini mengandung dimensi yang lebih luas karena tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial budaya. Karena kemiskinan kultural dapat disebabkan oleh faktor alami maupun tidak. Kultur/budaya atau pola pikir seseorang atau masyarakat merupakan faktor alami dari budaya kemiskinan. Sedangkan kesalahan strategi atau kebijakan pembangunan yang menyebabkan tertutupnya atau bahkan matinya kesempatan seseorang untuk dapat memperbaiki kondisi hidupnya merupakan faktor bukan alami budaya kemiskinan.

Indikator kemiskinan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Kemiskinan menggunakan standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar disebut dengan Garis Kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita.

F.2. Metode Perhitungan

Berbeda dengan penentuan garis kemiskinan (GK) yang digunakan oleh Bank Dunia (pendapatan per kapita per hari US\$ 1,25 untuk kategori negara *low income* atau US\$ 2 untuk negara dengan kategori *lower middle income*), perkembangan tingkat kemiskinan dengan menggunakan konsep absolut yang digunakan oleh BPS perlu mendapatkan perhatian secara seksama, karena dua alasan.

Pertama, standar kemiskinan (GK) yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan bersifat dinamis, untuk menyesuaikan dengan perkembangan pola konsumsi penduduk kelas bawah, khususnya untuk standar kecukupan non makanan (perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan). Sedangkan untuk standar kecukupan makanan sampai saat ini masih dianggap ideal yaitu setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari (rekomendasi Widyakarya Pangan dan Gizi 1978).

Kedua, standar kemiskinan sangat sensitif terhadap gejolak harga-harga (inflasi) kebutuhan pokok baik makanan maupun non makanan. Ketika

harga-harga naik, GK juga meningkat sesuai dengan kenaikan nilai yang dibayar penduduk kelas bawah untuk memenuhi standar minimal kebutuhan dasarnya (makanan, perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan).

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Formula garis kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Dimana:

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan

GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan

F.3. Garis Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli makanan yang mengandung 2.100 kkal perhari dan keperluan mendasar bukan makanan. Penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran perkapitan tiap bulan dibawah garis kemiskinan, secara fisik sering ditandai dengan menderita kekurangan gizi dan tingkat kesehatan yang buruk, sedikit melek huruf atau buta huruf sama sekali. Ciri orang miskin lainnya adalah biasanya bekerja dengan memperoleh penghasilan yang minim, bekerja di sektor informal maupun buruh serabutan, dengan penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok satu hari saja.

F.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Berikut ini diuraikan tentang garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.22. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2018	556.782	103.490	4,76
2019	584.318	98.370	4,43
2020	632.835	118.220	5,22
2021	655.061	134.240	5,93
2022	695.225	132.880	5,77

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2023

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Tangerang dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung fluktuatif, dimana terjadi penurunan dan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tangerang dan persentase penduduk miskin di interval angka 4 persen sampai 5 persen. Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang pada Tahun 2022 mencapai 5,77% yang mengalami penurunan dari Tahun 2021 yang mencapai 5,93%. Kondisi ini mencerminkan pemulihan kemiskinan dari dampak Pandemi Covid 19 dan resesi ekonomi yang terjadi sejak Tahun 2020 mulai terjadi.

Pemerintah Kota Tangerang melalui program kesehatan gratis, pendidikan, infrastruktur dan subsidi pangan tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Masyarakat dengan pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan biasanya hanya dengan sedikit goncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar masuk menjadi miskin. Oleh karenanya program-program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Kondisi kemiskinan Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia pada periode Tahun 2018-2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.23. Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Tangerang	%	4,76	4,43	5,22	5,93	5,77
2	Provinsi Banten	%	5,24	5,09	5,92	6,66	6,16
3	Indonesia	%	9,66	9,22	10,19	9,71	9,54

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, 2023

Pada Tahun 2022, Tingkat kemiskinan Kota Tangerang mencapai 5,77% lebih rendah dari Provinsi Banten yang mencapai 6,16% dan lebih rendah dari nasional yang mencapai 9,54%. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemiskinan Kota Tangerang lebih baik dari Provinsi Banten dan nasional.

G. Tingkat Ketimpangan dan Pemerataan Ekonomi

Indeks Gini (*Gini Rasio*) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai Indeks Gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol nilainya maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Tingginya ketimpangan pendapatan atau kemiskinan relatif, berarti kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi indeks gini Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia pada periode Tahun 2018-2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.24. Indeks Gini Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Tangerang	Point	0,330	0,328	0,339	0,343*	0,343*
2	Provinsi Banten	Point	0,367	0,361	0,365	0,363	0,377
3	Indonesia	Point	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Tahun 2023

Keterangan: *) Angka Sementara

Pada Tahun 2022, indeks gini (gini rasio) Kota Tangerang mencapai 0,343 point dan tidak mengalami perubahan dari Tahun 2021 yang mencapai 0,343. Kondisi mencerminkan belum berubahnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tangerang. Kondisi ini dipicu oleh terjadinya Pandemi Covid 19 dan resesi ekonomi yang melanda sejak Tahun 2020. Indeks gini Kota Tangerang Tahun 2022 tersebut juga mengandung arti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tangerang pada Tahun 2022 dikategorikan sebagai tingkat “ketimpangan sedang”.

Pada Tahun 2022, indeks gini (gini rasio) Kota Tangerang mencapai 0,343 point lebih rendah dari Provinsi Banten yang mencapai 0,377 point dan lebih rendah dari nasional yang mencapai 0,4381 point. Kondisi ini mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tangerang lebih baik dari Provinsi Banten dan nasional.

H. Tingkat Pengangguran

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, dikarenakan tenaga kerja sebagai motor penggerak pembangunan. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator ekonomi yang mempunyai arti penting dalam beberapa aspek untuk memperoleh gambaran dan permasalahan ketenagakerjaan, seperti penduduk usia kerja, angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang mengurus rumah tangga, sekolah atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja (yang bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja, biasanya dinyatakan dalam persen.

Berdasarkan data Sakernas BPS Tahun 2022, kondisi ketenagakerjaan di Kota Tangerang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.25. Penduduk Kota Tangerang Berdasarkan Jenis Kegiatan, TPAK dan TPT Tahun 2022

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Total	TPAK	TPT
	Laki-laki	Perempuan			
Bekerja	722.916	383.520	1.106.436	66,08%	7,16%
Pengangguran	45.336	39.988	85.324		
Bukan Angkatan Kerja	151.045	460.724	611.769		
Jumlah	919.297	884.232	1.803.529		

Sumber : BPS Sakernas, Agustus 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir (2019 – 2022) nilai Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) mengalami fluktuasi di 2 (dua) tahun terakhir. Pada Tahun 2019 APAK sebesar 65,70%, mengalami penurunan pada Tahun 2020 APAK sebesar 64,97% dan mengalami penurunan kembali pada Tahun 2021 sebesar 64,52%. Sejalan dengan pulihnya kondisi perekonomian, maka APAK Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 66,08%. Angka tersebut menggambarkan dari 100 orang yang termasuk ke dalam Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) pada Tahun 2022 terdapat 66 orang yang merupakan angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan program dan

kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ketahun. Angka TPT bersumber dari hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS setiap tahunnya.

Berdasarkan tabel sebelumnya, terlihat bahwa pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kota Tangerang sebesar 7,16%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT untuk Kota Tangerang turun menjadi 7,16% dari tahun sebelumnya yaitu 9,04%.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang banyak terjadi sebagai dampak dari mewabahnya virus Covid-19 sejak awal Tahun 2020, menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Tangerang. Angka TPT Kota Tangerang Tahun 2021 sebesar 9,07% meningkat dibandingkan Tahun 2020 yang sebesar 8,63%. Namun seiring menurunnya kasus Covid-19, angka TPT Kota Tangerang juga mengalami penurunan pada Tahun 2022 yakni mencapai angka 7,16%. Hal ini menunjukkan adanya perbakan ketenagakerjaan di Kota Tangerang.

Adapun distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kota Tangerang pada Tahun 2022 dibagi menjadi 3 (tiga) sektor pekerjaan (lapangan usaha) utama. Tabel di bawah menunjukkan sebaran penduduk yang bekerja menurut sektor pekerjaan (lapangan usaha) utama di Kota Tangerang Tahun 2022, yaitu sektor pertanian, manufaktur dan jasa-jasa.

Tabel 2.26. Penduduk Bekerja di Kota Tangerang Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2022

Lapangan Usaha (3 Sektor)	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Pertanian	7.861	1.437	9.298
Manufaktur	247.041	98.827	345.868
Jasa-jasa	468.014	283.256	751.270
Jumlah	722.916	383.520	1.106.436

Sumber : BPS Sakernas, Agustus 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja terbagi pada 3 (tiga) kelompok sektor lapangan usaha tersebut. Mayoritas penduduk di Kota Tangerang pada Tahun 2022 bekerja di kelompok sektor Jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 67,90% dari total penduduk bekerja, disusul kelompok sektor Manufaktur dengan kontribusi sebesar 31,26% dari total penduduk bekerja, dan terkecil pada sektor Pertanian dengan kontribusi sebesar 0,84% dari total penduduk bekerja. Kondisi tersebut menunjukkan ciri tenaga kerja perkotaan yang mendukung perekonomian

perdagangan dan jasa. Hal ini menunjukkan pula karakteristik pekerja di Kota Tangerang pada Tahun 2022 mempunyai potensi ketenagakerjaan pada sektor perdagangan dan industri pengolahan. Potensi lain yang mungkin tidak banyak memberikan kontribusi ketenagakerjaan dapat dikembangkan/alih usaha melalui program padat karya produktif dan kewirausahaan. Dengan demikian sejalan dengan perkembangannya, sektor pekerjaan (lapangan usaha) dapat ditingkatkan melalui penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya bagi penduduk Kota Tangerang dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal.

Salah satu pendekatan yang sering dilakukan terkait dengan ketenagakerjaan adalah optimalisasi kemampuan dan keterampilan berdasarkan kebutuhan serta penyesuaian jenis lowongan pekerjaan dengan kualifikasi tingkat pendidikan serta keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja. Pada Tahun 2022, di Kota Tangerang terdapat 12.898 orang pencari kerja, sedangkan banyaknya lowongan kerja yang tersedia (terdaftar) sebanyak 22.737 lowongan, yang berarti rasio pencari kerja terhadap lowongan kerja sebesar 56,73% atau dari 100 lowongan pekerjaan yang mencari kerja hanya sekitar 57 pencari pekerja. Adapun rasio terbesar pencari kerja terhadap lowongan kerja adalah pada kelompok tingkat pendidikan SD dengan rasio sebesar 147,37% atau dari 100 lowongan pekerjaan yang mencari kerja sekitar 147 pencari pekerja.

Tabel 2.27. Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja yang Tersedia (Menurut Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja			Lowongan Kerja		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	0	0	0	0	0	0
2	SD	26	50	56	23	15	38
3	SLTP	124	136	260	186	135	321
4	SLTA & SMK	5.398	5.273	10.671	9.996	9.892	19.888
6	Diploma/Sarjana Muda	119	121	240	245	257	502
7	Sarjana	562	574	1.136	647	725	1.372
8	Pasca Sarjana (S2)	258	277	535	289	327	616
Tahun 2022		6.487	6.411	12.898	11.386	11.351	22.737
Tahun 2021		7.350	6.840	14.190	6.230	5.962	12.192
Tahun 2020		8.322	7.170	15.492	8.981	7.609	16.590
Tahun 2019		7.562	7.420	14.982	11.869	10.935	22.804
Tahun 2018		7.745	8.318	16.063	8.713	8.875	17.588

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, pencari kerja pada Tahun 2022 didominasi oleh tamatan SLTA & SMK sebanyak 10.671 orang (82,73%), sedangkan lowongan kerja yang tersedia untuk

lulusan SLTA & SMK sebanyak 19.888 lowongan (186,37%). Pencari kerja berjenis kelamin laki-laki dan lowongan kerja laki-laki masih lebih banyak dibanding pencari kerja berjenis kelamin perempuan dan lowongan kerja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Kota Tangerang yang mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan masih didominasi oleh laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi belum maksimal di Kota Tangerang. Implikasinya banyak perempuan yang masih menjadi kelompok bukan angkatan kerja. Mengurus rumah tangga, adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan perempuan. Diduga pula, pergeseran nilai-nilai budaya terutama dalam hal bekerja secara ekonomis, yang terjadi di Kota Tangerang belum bergerak cepat. Istilah bahwa yang mencari pekerjaan (mencari nafkah) adalah kewajiban laki-laki masih cukup kuat berakar dalam budaya masyarakat Kota Tangerang.

Indikator ketenagakerjaan yang bisa digunakan untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu adalah Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK). Secara khusus APAK sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bisa diartikan sebagai bagian dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Disamping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus.

Secara formulasi TPAK bisa dihitung melalui rasio antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dikali seratus. Pada Tahun 2022, TPAK Kota Tangerang sebesar 66,08%, naik sebesar 1,56% dari TPAK Tahun 2021 yang mencapai 64,52%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pada Tahun 2022 terdapat sekitar 66 persen dari penduduk usia kerja di Kota Tangerang yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan/penghasilan, walaupun di dalamnya termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Berikut ini diuraikan

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.28. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Tangerang Tahun 2018-2022

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)
2018	63,67
2019	65,70
2020	64,97
2021	64,52
2022	66,08

Sumber: BPS Kota Tangerang, Tahun 2022

Kondisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia pada periode Tahun 2018-2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.29. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Tangerang	%	7,41	7,13	8,63	9,07	7,16
2	Provinsi Banten	%	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09
3	Indonesia	%	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Tahun 2022

Pada Tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang mencapai 7,16% lebih rendah dari Provinsi Banten yang mencapai 8,09% dan lebih tinggi dari nasional yang mencapai 5,86%. Kondisi ini mencerminkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang lebih baik dari Provinsi Banten dan lebih buruk dari nasional.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report*, 1995), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja;

3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;
4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*) yang diukur dari tiga indikator komposit yang terdiri dari 3 ukuran, yaitu kesehatan (sebagai ukuran *longevity*), pendidikan (sebagai ukuran *knowledge*) dan tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran *living standards*). Bagi pembangunan suatu wilayah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara dan mengukur kinerja Pemerintah.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pengetahuan, dan pendapatan. Mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indikator yang dipilih untuk mengukur IPM, adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kesehatan diukur dari angka harapan hidup;
2. Indeks Pengetahuan/Pendidikan diukur dari angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah;
3. Indeks Pengeluaran diukur dari tingkat pengeluaran perkapita setahun yang disesuaikan.

Hasil perhitungan menggunakan indeks artinya rasio (angka perbandingan) yang mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik. United Nations for Development Program disingkat UNDP (1990) mengelompokkan negara berdasarkan tingkat pembangunan manusianya. Tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,59. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), apabila

memiliki nilai IPM antara 0,59 sampai 0,70. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (high human development), bila memiliki nilai IPM antara 0,70 sampai 1. Artinya, semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik yang berkorelasi dengan kebijakan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Berikut ini klasifikasi status pembangunan manusia:

NILAI IPM	KLASIFIKASI
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Pembangunan manusia yang meliputi : pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat merupakan program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan misi pembangunan daerah Kota Tangerang. Melalui pembangunan manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus dapat diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Berikut ini diuraikan perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.30. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang
Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
I.	INDEKS KESEHATAN (IK)	Point	79,15	79,34	79,38	79,38	79,86
1.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	71,45	71,57	71,60	71,60	71,91
	Indeks Harapan Hidup (IHH)	Point	79,15	79,34	79,38	79,38	79,86
II.	INDEKS PENDIDIKAN (IP)	Point	73,45	73,94	74,11	74,63	74,69
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,83	13,84	13,85	13,87	13,88
	Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS)	Point	76,83	76,89	76,94	77,06	77,11
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,51	10,65	10,69	10,83	10,84
	Indeks Rata-rata Lama Sekolah (IRLS)	Point	70,07	71,00	71,27	72,20	72,27
III.	INDEKS DAYA BELI (IDB)	Point	81,37	82,24	81,46	81,65	82,34
1.	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PKP)	Rp. Ribu	14.443	14.860	14.484	14.575	14.909
	Indeks Daya Beli (IDB)	Point	81,37	82,24	81,46	81,65	82,34
IV.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Point	77,92	78,43	78,25	78,50	78,90
	Laju Pertumbuhan IPM	%	1,19	0,66	-0,23	0,31	0,51
	Pertumbuhan IPM	Point	0,91	0,51	-0,18	0,24	0,40

Sumber: BPS Provinsi Banten, BPS Kota Tangerang, Tahun 2023

Selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, IPM Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari 77,92 point pada Tahun 2018 meningkat menjadi 78,90 point pada Tahun 2022. Namun demikian pada Tahun 2020, IPM Kota Tangerang mengalami penurunan sekitar -0,18 point dari Tahun 2019 menjadi 78,25 point. Kondisi ini disebabkan dampak Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang terjadi sejak Tahun 2020.

Indeks harapan hidup yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM adalah angka harapan hidup dibandingkan angka ideal sesuai standar global (UNDP) yaitu 85 tahun. Angka harapan hidup menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka kesempatan untuk hidupnya cenderung semakin panjang. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka harapan hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya. Angka harapan hidup (usia harapan hidup saat lahir) Kota Tangerang menunjukkan angka yang meningkat selama periode Tahun 2018-2022, yaitu dari 71,48 tahun pada Tahun 2018 meningkat menjadi

71,91 tahun pada Tahun 2022. Artinya, rata-rata bayi yang lahir di Kota Tangerang pada Tahun 2022 memiliki harapan hidup hingga usia 71,91 tahun.

Indeks pengetahuan menggambarkan partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Indeks pengetahuan Kota Tangerang selama periode Tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan dari 73,45 point pada Tahun 2018 meningkat menjadi 74,69 pada Tahun 2022. Indeks pengetahuan atau pendidikan dihitung berdasarkan indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks harapan lama sekolah adalah angka harapan lama sekolah dibandingkan angka ideal sesuai standar global (UNDP) yaitu 18 tahun. Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang program wajib belajar adalah pada usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang. Selama kurun waktu Tahun 2018-2022, angka harapan lama sekolah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari 13,83 tahun pada Tahun 2018 menjadi 13,88 tahun pada Tahun 2022. Artinya, pada Tahun 2022 setiap penduduk Kota Tangerang yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,88 tahun (setara dengan kuliah semester I-II). Sedangkan indeks rata-rata lama sekolah adalah angka rata-rata lama sekolah dibandingkan angka ideal sesuai standar global (UNDP) yaitu 15 tahun. Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dalam periode Tahun 2018-2022, angka rata-rata lama sekolah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari 10,51 tahun pada Tahun 2018 menjadi 10,84 tahun pada Tahun 2022. Artinya bahwa pada Tahun 2022 penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kota Tangerang rata-rata telah menjalani pendidikan formal selama 10,84 tahun (setara dengan kelas I SLTA).

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk, sebagai dampak membaiknya ekonomi. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), BPS menggunakan indikator yang dikenal dengan pengeluaran riil per kapita setahun disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Selama kurun waktu Tahun 2018-2022, angka pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari Rp. 14.443.000 pada Tahun 2018 menjadi Rp. 14.909.000 pada Tahun 2022.

Namun demikian, pada Tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi, angka pengeluaran per kapita disesuaikan mengalami penurunan dari Rp. 14.860.000 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 14.484.000 pada Tahun 2020.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Sebagaimana umumnya sebagai sebuah kota besar, Kota Tangerang merupakan kota yang penduduknya sangat heterogen dengan mayoritas penduduk yaitu etnis Sunda/Betawi. Adapun etnis Tionghoa yang cukup banyak terdapat di Kota Tangerang dikarenakan sejarahnya sekitar pada Abad ke-7 M orang Tionghoa ke Asia Tenggara dan diduga banyak yang menetap di Kota Tangerang yang kemudian beranak-pinak dan melahirkan warga keturunan.

Dapat dilihat akulturasi budaya yang sangat kental di Kota Tangerang, oleh karena itu dibuatlah program pemerintah yaitu Festival Cisadane yang merupakan event tahunan yang diselenggarakan di tepian Sungai Cisadane. Selain itu tradisi menyambut Maulid Nabi di Kota Tangerang sangat beragam, untuk memeriahkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW banyak hal yang dilakukan oleh sebagian umat Islam seperti yang dilakukan di Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan. Sudah menjadi tradisi setiap memperingati Maulid selalu diisi dengan ceramah, tausyiah ataupun Tabligh Akbar yang mayoritas diikuti ibu-ibu pengajian.

Peringatan Cap Gomeh merupakan tradisi etnis Tionghoa yang diadakan di Kota Tangerang yang dijadikan sebagai acara pesta rakyat. Etnis Tionghoa Tangerang merayakan Cap Gomeh di Klenteng Boen Bio. Yang menarik dari acara ini adalah penampilan ornamen khas China seperti lampion dan pertunjukan budaya seperti barongsai dan tarian naga.

Selain memiliki keragaman adat istiadat, Kota Tangerang juga memiliki banyak atraksi kesenian yang menarik, antara lain seperti: Tari lenggang Cisadane, Tari Cokek, Gambang Kromong, dan Barongsai.

Sebagai upaya melestarikan kekayaan seni dan budaya tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah menyediakan berbagai fasilitas diantaranya berupa sanggar seni dan budaya.

Fasilitas seni dan budaya yang terdapat di Kota Tangerang diantaranya yaitu sanggar seni, seni tradisional, seni tradisi, seniman, dan lembaga seni. Sedangkan sanggar seni rupa tidak terdapat di Kota Tangerang. Pada

Tahun 2020 di Kota Tangerang terdapat 142 sanggar seni, 115 seni tradisional, 283 seni tradisi, 595 seniman, 3 lembaga seni, dan 2 galeri. Selain seni budaya daerah, bangunan bersejarah di Kota Tangerang juga tetap dipelihara dan dilestarikan. Hingga Tahun 2020 di Kota Tangerang telah terdapat 3 museum, 15 bangunan bersejarah, dan 9 makam sejarah.

Keberadaan museum dan bangunan bersejarah ini di samping merupakan rujukan sejarah masa lalu masyarakat Kota Tangerang, dapat juga digunakan untuk meningkatkan kepariwisataan di Kota Tangerang. Kepariwisata adalah potensi masa depan yang harus digali agar semakin maju seiring majunya perekonomian di daerah. Karenanya potensi tersebut harus dikelola dengan baik, selain untuk melestarikannya namun juga dapat mendatangkan keuntungan ekonomis.

Selain fasilitas untuk seni budaya, Kota Tangerang juga menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat berolahraga. Pada Tahun 2020 terdapat sejumlah 41 organisasi olahraga, 463 gedung olahraga, dan 387 klub olahraga di Kota Tangerang.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Analisis pada aspek pelayanan umum mencakup analisis kinerja atas fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dilandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berikut ini jenis pelayanan beserta indikator standar pelayanan minimal menurut Permendagri No. 59 Tahun 2021.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan			
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa Pendidikan dasar berdasarkan hasil asesmen nasional (pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs))	Meningkat	Setiap Tahun
1.2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi	Meningkat	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		siswa Pendidikan kesetaraan berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan kesetaraan)		
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun
2	Kesehatan		100 %	Setiap Tahun
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3	Pekerjaan Umum			
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
4.1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5.5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun
6	Sosial			
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

2.3.1.1. Pendidikan

Sumberdaya manusia berperan penting terhadap kemajuan suatu bangsa, oleh karenanya diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui bidang

pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan formal maupun informal.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program belajar 9 tahun dan sampai saat ini masih melanjutkan program belajar 6 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tangerang adalah dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan informal. Kinerja pembangunan pada urusan pendidikan dapat dilihat dari aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Aksesibilitas pendidikan dilihat dari angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan rasio ketersediaan sekolah. Sedangkan kualitas pendidikan dilihat dari angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan, angka kelulusan, rata-rata nilai ujian nasional, kondisi bangunan sekolah, dan kelayakan guru mengajar.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B						ASPEK PELAYANAN UMUM						
B	1					Fokus Urusan Wajib						
B	1	1				Urusan Wajib						
B	1	1	1			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B	1	1	1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
B	1	1	1	1	1	Tingkat ketersediaan daya tampung SD	%	82,11	87,62	87,92	100,00	100,00
B	1	1	1	1	2	Persentase SD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	85,32	98,96	98,96	98,65	98,87
B	1	1	1	1	3	Tingkat layanan terhadap siswa miskin SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	4	Persentase pengembangan minat bakat siswa SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	5	Tingkat ketersediaan daya tampung SMP	%	84,29	92,19	96,68	100,00	100,00
B	1	1	1	1	6	Persentase SMP yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	75,38	98,47	98,47	99,50	98,48
B	1	1	1	1	7	Tingkat layanan terhadap siswa miskin SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	1	1	1	1	8	Persentase pengembangan minat bakat Siswa SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	9	Persentase jumlah warga negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100,00	86,79	58,97	100,00	100,00
B	1	1	1	1	10	Tingkat ketersediaan daya tampung PAUD	%	67,26	72,42	82,05	100,00	100,00
B	1	1	1	1	11	Persentase PAUD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	71,08	89,15	89,15	88,94	83,73
B	1	1	1	1	12	Persentase pengembangan minat bakat siswa PAUD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	13	Persentase jumlah warga negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	14	Persentase pendidikan non formal yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	15	Persentase lulusan Paket A, B dan C	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	16	Persentase guru bersertifikat	%	70,66	97,50	97,50	91,73	82,48
B	1	1	1	1	17	Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1/D4	%	87,01	89,39	90,88	91,29	91,42
B	1	1	1	1	18	Tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Tahun 2023

2.3.1.2. Kesehatan

Menurut Undang-undang No 39 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa tujuan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang tinggi dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah menurut undang-undang Kesehatan adalah menyediakan pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial, sumber daya bidang kesehatan yang adil dan merata, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan, memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan, dan pelaksanaan

jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Pelaksanaan pembangunan Kesehatan di Kota Tangerang dapat dilihat dari pencapaian indikator setiap program pembangunan kesehatan. Indikator pembangunan kesehatan meliputi indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (Permenkes Nomor 4 Tahun 2019), indikator dalam Buku I Lampiran Permendagri 54 tahun 2010, Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM dan indikator kinerja kesehatan lainnya.

Dengan kewenangan yang dimiliki, maka Dinas Kesehatan kota Tangerang mengemban misi untuk mencapai visi melalui berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan kesehatan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode					Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B					ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1					Fokus Urusan Wajib						
B 1 1					Urusan Wajib						
B 1 1 1					Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 1 1 1 2					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
B 1 1 1 2 1					Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 2 2					Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,49	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 2 3					Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	104,39	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 2 4					Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,40	100,00	94,04	98,04	100,00
B 1 1 1 2 5					Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,45	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 2 6					Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86,46	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 2 7					Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 2 8					Cakupan pembinaan lingkungan sehat	%	88,96	89,95	56,45	100,00	89,00
B 1 1 1 2 9					Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 2 10					Persentase orang dengan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 2 11					Persentase kasus berpotensi KLB yang ditangani	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode					Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	
B	1	1	1	2	12	Persentase jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	13	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	14	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	15	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	16	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar	%	67,78	83,33	75,71	80,00	85,33
B	1	1	1	2	17	Cakupan masyarakat yang mendapat kunjungan rumah oleh petugas kesehatan sesuai standar	%	30,00	50,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar	%	45,00	87,50	50,00	55,00	62,50
B	1	1	1	2	19	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan alat laboratorium puskesmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	20	Cakupan penduduk Kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	%	94,00	101,56	92,33	95,00	94,99
B	1	1	1	2	21	Cakupan pembinaan kesehatan kerja dan olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	22	Persentase pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	%	N/A	85,29	89,47	90,00	90,91
B	1	1	1	2	23	Persentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensinya	%	32,11	99,20	21,38	79,82	97,93
B	1	1	1	2	24	Persentase IRTP yang memenuhi syarat (Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan)	%	N/A	96,67	80,83	95,00	95,00
B	1	1	1	2	25	Persentase fasilitas kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) dan alat kesehatan (Toko Alat Kesehatan dan Optikal) yang memenuhi syarat	%	67,78	70,00	72,00	75,00	85,00
B	1	1	1	2	26	Cakupan posyandu aktif	%	100,00	100,00	98,07	100,00	100,00
B	1	1	1	2	27	Cakupan rumah tangga ber PHBS	%	47,06	60,61	68,29	69,00	72,00
B	1	1	1	2	28	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana RS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	29	Cakupan pelayanan medik RS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	30	Cakupan pelayanan keperawatan RS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	31	Presentase ketersediaan SIRS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	32	Cakupan ketersediaan sarana prasarana penunjang RS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	33	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pelayanan medik RS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	34	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Tahun 2023

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pelayanan prasarana dan sarana pada suatu daerah merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan sarana dan prasarana infrastruktur kota menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Tangerang. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Sumberdaya Air, Jalan dan Jembatan, Perkotaan dan Perdesaan, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.

A. Jalan dan Jembatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, telah ditetapkan mengenai sistem, fungsi dan status jalan di wilayah perkotaan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan fungsi jalan yang dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan, baik dalam sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sedangkan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional. Jalan provinsi terdiri atas jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

Di dalam RTRW Kota Tangerang tidak semua fungsi jalan ditetapkan hanya pada tingkatan jalan arteri dan jalan kolektor, dengan perincian:

1. Jalan Arteri Primer adalah jalan nasional dalam sistem jaringan jalan primer, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan

menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

2. Jalan Kolektor Primer adalah jalan provinsi dalam sistem jaringan jalan primer, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat provinsi, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan kota dalam sistem jaringan jalan sekunder, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kota, dengan menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
4. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan kota dalam sistem jaringan jalan sekunder, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kota, dengan menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota, yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Panjang seluruh jalan di Kota Tangerang terdiri dari 16,18 km jalan nasional, 27,41 km jalan provinsi, dan 1.402,64 km jalan kota. Berikut nama jalan beserta klasifikasi dan status seluruh jalan di Kota Tangerang.

No.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
1	Daan Mogot	Utama	Nasional	7.497	14
2	Merdeka (Serang Raya)	Utama	Nasional	2.277	15
3	Gatot Subroto	Utama	Nasional	6.402	11
4	Sudirman	Utama	Provinsi	3.657	28
5	HOS. Cokroaminoto	Utama	Provinsi	5.336	14
6	Raden Fattah	Utama	Provinsi	3.332	12
7	MH. Thamrin	Utama	Provinsi	3.100	18
8	Beringin	Utama	Provinsi	1.700	9,5
9	Hasyim Ashari	Utama	Provinsi	10.285	13
10	Sempati	Konektor	Kota	500	3,5
11	Garuda	Konektor	Kota	2.200	6
12	Pembangunan 1	Konektor	Kota	1.200	3.5
13	Pembangunan 1A	Konektor	Kota	1.000	4
14	Ampera	Konektor	Kota	1.290	6
15	Ampera 1	Konektor	Kota	190	2
16	Budi Indah	Utama	Kota	500	10
17	Macadam	Utama	Kota	500	6
18	Poris Jaya	Utama	Kota	983	7
19	Taman Poris Gaga	Utama	Kota	450	6

No.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
20	KH. Agus Salim	Utama	Kota	1.600	6
21	Atang Sanjaya	Konektor	Kota	921	7,5
22	Halim Perdana Kusumah	Utama	Kota	2.385	5,5
23	Husein Sastranegara	Utama	Kota	4.832	6
24	Laksamana Yos Sudarso	Utama	Kota	1.198	7,5
25	Cibodas Besar	Konektor	Kota	810	4,5
26	Dipati Unus	Konektor	Kota	720	4
27	Hayam Wuruk	Konektor	Kota	365	6
28	Krida	Konektor	Kota	210	3,5
29	Pandawa	Konektor	Kota	102	5
30	Taman Cibodas Raya	Konektor	Kota	890	6
31	Dharmawangsa	Utama	Kota	750	6
32	Baja	Konektor	Kota	555	5
33	Borobudur	Utama	Kota	1220	6
34	Prambanan	Utama	Kota	725	6
35	Cemara	Konektor	Kota	655	6
36	Malabar	Konektor	Kota	330	5
37	Nanas	Konektor	Kota	450	4
38	Karet	Utama	Kota	667	5
39	Palem	Utama	Kota	645	5
40	Kalimantan 1	Konektor	Kota	275	4,5
41	Kavling Dirjen Perkebunan	Konektor	Kota	775	3
42	Kavling Dirjen Perkebunan 1	Konektor	Kota	340	3
43	Kavling PGRI	Konektor	Kota	245	2
44	Nila Raya	Konektor	Kota	120	4
45	Palem Raja Raya	Konektor	Kota	1630	7
46	Sultan Faletah	Konektor	Kota	214	7,5
47	Qadr	Utama	Kota	75	10
48	Kali Sabi 1	Utama	Kota	1710	5,5
49	Kali Sabi 2	Utama	Kota	818	5
50	Prabu Siliwangi	Utama	Kota	1020	5,5
51	KH. M. Yusuf	Konektor	Kota	306	3
52	Pondok Lakah	Konektor	Kota	900	3,5
53	Sunan Sunung Jati (Lapos)	Konektor	Kota	720	4,2
54	H. Gedad	Konektor	Kota	1319	3
55	Hj. Runa	Konektor	Kota	280	2,5
56	H. Taufik	Konektor	Kota	463	3
57	Dr. Setia Budi	Utama	Kota	980	4
58	Kedondong	Konektor	Kota	580	3
59	Sektor Raya	Konektor	Kota	1276	4
60	Dr. Wahidin (Tanah Seratus)	Utama	Kota	1420	3
61	KH. Thosin	Konektor	Kota	462	3
62	Puri Kartika 4	Konektor	Kota	621	4
63	Makam	Konektor	Kota	520	4,5
64	Winong	Konektor	Kota	880	3
65	Cipto Mangunkusumo	Utama	Kota	3300	4,5
66	Akasia	Konektor	Kota	1059	3
67	Komp. Wisma Tajur	Konektor	Kota	678	3,5
68	Pondok Kacang	Utama	Kota	1099	4
69	Maulana Hasanudin (Ampera)	Utama	Kota	3453	5
70	KH. Mustafa	Konektor	Kota	1256	3
71	H. Mansyur	Utama	Kota	2488	5
72	Ki Hajar Dewantoro	Utama	Kota	2791	5
73	KH. Ahmad Dahlan	Utama	Kota	2488	5
74	Panglima Polim	Utama	Kota	2631	3,5
75	Benteng-Betawi	Konektor	Kota	4000	14
76	Dahu	Konektor	Kota	1074	5
77	Komp. Ledug Raya	Konektor	Kota	1116	5

No.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
78	Pasar Doyong	Konektor	Kota	939	6,5
79	Puratih	Konektor	Kota	630	6,5
80	Kasir 1	Utama	Kota	811	6,5
81	Pasar Kemis	Utama	Kota	1457	7
82	Prabu Siliwangi	Utama	Kota	1878	7
83	Raya Gembor	Utama	Kota	787	4
84	Manis 5	Utama	Kota	329	6
85	Pajajaran	Utama	Kota	1117	8
86	Manis 4	Utama	Kota	754	6
87	Kampung Keroncong	Konektor	Kota	1220	4,5
88	KH. Chaerudin	Konektor	Kota	180	7
89	Kian Santang	Konektor	Kota	1800	7
90	Ki Samaun	Konektor	Kota	3025	21
91	Zona Industri Caplang	Utama	Kota	1526	8
92	Manis 1	Utama	Kota	1011	6
93	Manis 2	Utama	Kota	348	7
94	Manis 3	Utama	Kota	332	6
95	Manis Raya	Utama	Kota	1442	6
96	Kasir 2	Konektor	Kota	955	6
97	Gajah Tunggal	Utama	Kota	1393	6
98	Industri Raya 1	Utama	Kota	557	4
99	Industri Raya 7	Utama	Kota	622	6
100	Siliwangi	Utama	Kota	1313	7
101	Karyawan 4	Konektor	Kota	980	4
102	Nusa Indah	Konektor	Kota	172	3
103	Karyawan 3	Utama	Kota	677	3
104	Barata Jaya	Konektor	Kota	397	4
105	Barata Pahala	Konektor	Kota	192	4
106	Karyawan 1	Konektor	Kota	546	4
107	KH. Moch Natsir	Konektor	Kota	330	3,5
108	Swadaya	Konektor	Kota	264	3,5
109	Dr. Sutomo	Utama	Kota	473	6
110	Raden Saleh	Utama	Kota	4704	6
111	Ciledug Indah Blok B	Konektor	Kota	477	4,5
112	Ciledug Indah Utama	Konektor	Kota	1382	5
113	Desa Pondok Bahar	Konektor	Kota	288	6
114	Kampung Bulak	Konektor	Kota	955	3
115	Karyawan 2	Konektor	Kota	227	6
116	Sunan Giri	Konektor	Kota	1833	6
117	Kebon Jati	Konektor	Kota	534	5
118	Arta Santika	Konektor	Kota	1800	5
119	Bugel Indah Raya	Konektor	Kota	314	6,5
120	Ranca Dulang	Konektor	Kota	527	3
121	Arta Wasangkara	Utama	Kota	1825	5,5
122	Pabuaran Cimone	Konektor	Kota	306	3
123	Untung Suropati	Konektor	Kota	1227	4
124	Proklamasi	Utama	Kota	900	10
125	Teuku Umar	Utama	Kota	1718	9,3
126	Berhias	Konektor	Kota	245	7
127	Letjen Suprpto	Utama	Kota	288	6,7
128	Perguruan Budhi	Konektor	Kota	1200	5,8
129	Imam Bonjol	Utama	Kota	5300	8
130	Kisalman I/TMMD (2005)	Konektor	Kota	1045	3
131	Hasji Saalan	Konektor	Kota	400	3
132	K.S. Tubun	Utama	Kota	950	6
133	Galeong	Konektor	Kota	800	5
134	H. Subandi	Konektor	Kota	865	3,5
135	Padasuka 1	Konektor	Kota	159	4

No.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
136	Padasuka 2	Konektor	Kota	253	4
137	Kebon Jati	Konektor	Kota	400	5
138	Noeradji	Utama	Kota	1044	3
139	Sasmita	Utama	Kota	674	4
140	Sangeo	Utama	Kota	1400	7
141	Keramat 1	Konektor	Kota	185	4,3
142	Otista	Utama	Kota	717	11
143	Kenalban	Konektor	Kota	300	4
144	Sinar Hati	Konektor	Kota	340	5
145	Sangeo Selatan	Konektor	Kota	1200	7
146	Taman Asri Lama	Konektor	Kota	821	5
147	KH. Wahid Hasyim	Utama	Kota	3117	5
148	Prof. DR. Hamika (Caplin)	Utama	Kota	2974	4,5
149	Amal	Konektor	Kota	400	3
150	H. Mahbulb	Konektor	Kota	255	2,5
151	Pajak Raya	Konektor	Kota	380	4,5
152	Taman Asri Utama (2006)	Konektor	Kota	1046	5,5
153	Amilabas	Konektor	Kota	500	3
154	Perintis	Konektor	Kota	452	2,3
155	Chairil Anwar	Konektor	Kota	900	3,5
156	Notaris	Konektor	Kota	755	3
157	Gotong Royong	Utama	Kota	1010	4,5
158	Muchtar Raya	Utama	Kota	569	4
159	Taman Cipulir/ Duta Raya	Konektor	Kota	405	13
160	Adam Malik	Utama	Kota	1808	5
161	Pinang Merak	Konektor	Kota	565	4,5
162	Caplin 1	Konektor	Kota	315	3,5
163	Inpres 6	Lingkungan	Kota	353	3,2
164	Inpres Raya	Utama	Kota	2320	4
165	H. Risan	Konektor	Kota	700	5
166	H. Awan	Konektor	Kota	300	5
167	Ngurah Rai	Konektor	Kota	466	5
168	Bouraq (Lio Baru)	Utama	Kota	2606	7,5
169	Ir. H. Juanda	Utama	Kota	1668	6
170	Merpati	Utama	Kota	1085	4
171	Kp. Pisang	Konektor	Kota	534	3
172	Pembangunan 2	Konektor	Kota	342	3,5
173	Pembangunan 4	Konektor	Kota	290	3,5
174	Pembangunan 5	Konektor	Kota	694	3,5
175	Pembangunan 6	Konektor	Kota	1184	3,5
176	Dr. Sitanala	Utama	Kota	904	10
177	Pembangunan 1	Utama	Kota	1058	3,5
178	Pembangunan 3	Utama	Kota	2486	10
179	AMD	Utama	Kota	2197	4
180	Kp. Rawa Kucing	Konektor	Kota	520	3
181	Kp. Tangga Asem	Utama	Kota	800	4
182	Mustang	Konektor	Kota	471	3
183	Iskandar Muda	Utama	Kota	6805	4
184	Pembangunan 1A	Utama	Kota	328	3
185	Komp. Bandara Mas	Utama	Kota	328	17
186	Marsekal Suryadarma	Utama	Kota	5797	7
187	Bambu Runcing 1	Konektor	Kota	205	4,5
188	Gunung Sangga Buana 1	Konektor	Kota	185	3,5
189	Gunung Sangga Buana 2	Konektor	Kota	82	3,5
190	Pondok Makmur	Konektor	Kota	540	6
191	Prabu Kian Siantang	Utama	Kota	2610	6
192	Villa Regency 2	Utama	Kota	3050	12
193	Wisma Lantana Raya	Utama	Kota	188	6

No.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
194	Mutiara Pluit Utama	Konektor	Kota	683	15
195	Villa Tangerang Indah	Konektor	Kota	760	7,5
196	Moch. Toha	Utama	Kota	8679	11
197	Arya Kamuning	Konektor	Kota	1027	8,5
198	Periuk Jaya Permai 1	Konektor	Kota	521	4
199	Periuk Jaya Permai 2	Konektor	Kota	282	5
200	Periuk Jaya Permai 3	Konektor	Kota	393	4
201	Periuk Jaya Permai 4	Konektor	Kota	285	6
202	Sangego-Cadas	Utama	Kota	1398	7
203	HR. Rasuna Said	Utama	Kota	1939	5
204	Bango	Utama	Kota	875	4
205	KH. Mas Mansyur	Utama	Kota	3069	5
206	H. Siban	Konektor	Kota	499	4
207	Buana Agung Permai	Utama	Kota	325	5
208	Sultan Ageng Tirtayasa	Utama	Kota	2087	5
209	Inpres	Konektor	Kota	255	4,5
210	Banjar Wijaya	Konektor	Kota	502	3
211	Wijaya Kusumah 2	Konektor	Kota	200	4
212	Gajah Mada	Utama	Kota	897	3
213	Sultan Ageng Tirtayasa	Utama	Kota	1350	5
214	Kyai Maja	Utama	Kota	1167	4
215	Serpong Raya	Utama	Kota	1156	16
216	H. Cepe	Konektor	Kota	588	3
217	H. Djiran	Konektor	Kota	391	3
218	KH. Moch Kup	Konektor	Kota	393	3
219	Pinang-Kunciran	Konektor	Kota	1275	7
220	Pinang Griya Raya	Konektor	Kota	731	5
221	Komp. Lemigas	Utama	Kota	520	4
222	Lemigas	Utama	Kota	143	4
223	Bakti-Sudimara Pinang	Konektor	Kota	294	4
224	H. Kuncin	Konektor	Kota	264	3
225	Matahari	Konektor	Kota	631	4
226	Graha Raya Ciledug	Utama	Kota	1942	16
227	Harapan 1	Konektor	Kota	225	3
228	Moch. Yamin	Konektor	Kota	735	15
229	Modern Golf 3	Konektor	Kota	333	7,5
230	Modern Golf Barat 3	Konektor	Kota	416	8
231	Modern Golf Barat 4	Konektor	Kota	350	6
232	Perintis Kemerdekaan 1	Konektor	Kota	280	6
233	Perintis Kemerdekaan 2	Konektor	Kota	503	4
234	Perintis Kemerdekaan 2A	Konektor	Kota	165	4
235	Perintis Kemerdekaan 3	Konektor	Kota	238	14
236	Perintis Kemerdekaan 3A	Konektor	Kota	144	4
237	Teladan	Konektor	Kota	234	3
238	Maulana Yusuf	Utama	Kota	377	7,5
239	Perintis Kemerdekaan	Utama	Kota	1290	9,5
240	Bukit Golf Tengah	Konektor	Kota	109	12
241	Boulevard Raya	Konektor	Kota	629	16
242	Pemuda	Konektor	Kota	593	4
243	Prof. Dr. Soepomo (Jamblang)	Konektor	Kota	395	3,5
244	Kelapa PLN	Konektor	Kota	1530	4
245	Hartono Raya	Konektor	Kota	1214	14
246	Honoris Raya	Konektor	Kota	797	20
247	Modern Golf 2	Konektor	Kota	413	8
248	Embang Jaya	Konektor	Kota	1236	4
249	Benteng Makasar	Konektor	Kota	486	3,5
250	Kiasnawi	Konektor	Kota	523	21
251	Ahmad Yani	Utama	Kota	927	8

No.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
252	Baharuddin (Lembing)	Utama	Kota	486	5,5
253	Baharudin	Utama	Kota	486	5,5
254	Benteng Jaya	Utama	Kota	1157	7,8
255	Arif Rahman Hakim (Marga)	Konektor	Kota	626	7
256	Kali Pasir	Konektor	Kota	284	2,5
257	Modern Golf Raya	Konektor	Kota	2062	14
258	Soleh Ali	Konektor	Kota	1240	4,5
259	Damyati	Utama	Kota	545	8
260	MT. Haryono	Utama	Kota	859	8
261	Pahlawan Taruna	Utama	Kota	2323	15
262	Veteran	Utama	Kota	967	10
263	Kumdang 3 (Fatahillah)	Konektor	Kota	228	3,5
264	Mandala	Konektor	Kota	423	3
265	Meteorologi	Konektor	Kota	1499	3,5
266	Supriadi (Melati 1)	Konektor	Kota	730	4
267	KH. Agus Salim	Utama	Kota	481	5

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2022

B. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pasal 1 menyatakan bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pada pasal yang sama dijelaskan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Ada dua indikator pelayanan untuk sumberdaya air yaitu indikator: persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dengan target kondisi ideal sebesar 100% dan persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya dengan target SPM sebesar 100%.

Sementara itu untuk kondisi saluran irigasi mengalami perkembangan yang fluktuatif. Kota Tangerang merupakan kota yang aktivitas ekonominya tidak bergantung lagi pada sektor pertanian. Namun, masih terdapat penggunaan lahan berupa sawah yang masih produktif menghasilkan padi. Ditinjau dari luas lahan berdasarkan penggunaannya, terdapat sekitar 509,15 Ha digunakan sebagai lahan sawah dimana sekitar 70,33 persen. Sekitar 77,3% dari sepanjang 62,49 km jaringan irigasi di Kota Tangerang merupakan saluran irigasi induk. Saluran irigasi induk merupakan bagian dari jaringan irigasi primer. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari

jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

Keberadaan saluran irigasi yang diarahkan untuk menunjang penyediaan air bagi lahan pertanian eksisting yang ada di Kota Tangerang dengan kriteria pengembangan sistem jaringan irigasi adalah:

- a. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- c. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah wajib melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat.

Dari seluruh saluran irigasi yang ada di Kota Tangerang, tingkat keberfungsian jaringan irigasi pertanian rakyat sudah tercapai 100 persen setiap tahunnya.

C. Air Minum

Dari 8 tujuan dan 18 target SDGs, air minum bersama sanitasi termasuk dalam Tujuan 7 SDGs yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan target 10 yakni mengurangi separuh, pada tahun 2015, dari proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar. Untuk mencukupi kebutuhan air minum, telah dilakukan upaya pemenuhan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Penyediaan melalui sistem perpipaan dilakukan oleh PDAM sedangkan non perpipaan dilaksanakan oleh DPU.

Penyelenggaraan SPAM perpipaan di Kota Tangerang dilakukan oleh PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang (PDAM TB) dan PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (PDAM TKR). Sebagian kecil lainnya dilakukan oleh swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui beberapa informasi sebagai berikut:

1. Potensi kapasitas idle (*idle capacity*) yang ada dari semua sistem adalah sebesar 184 l/dt, yang terdiri dari:
 - PDAM TB melalui instalasi produksi sendiri, sebesar 28,1 l/dt
 - Swasta melalui pembelian air curah, sebesar 139 l/dt
 - PDAM TKR, sebesar 16,8 l/dt dari instalasi IPA Babakan
2. Kehilangan air pada jaringan distribusi PDAM TB adalah sebesar 23,5%, sedangkan pada jaringan distribusi PDAM TKR jauh lebih tinggi yakni 34,9%. Sehingga secara keseluruhan tingkat kehilangan air di wilayah pelayanan Kota Tangerang adalah sebesar 32,1%.
3. Jumlah sambungan pelanggan aktif PDAM TB sebanyak 38.136 SL yang memberikan tingkat pelayanan 8,91%, sedangkan pelanggan PDAM TKR sebanyak 70.632 SL dengan tingkat pelayanan 18,14%. Sehingga secara keseluruhan tingkat pelayanan yang sudah dicapai baru sebesar 27,05%.
4. Tingkat konsumsi air rata-rata di PDAM TB sebesar 21,2 m³/sambungan/bulan. Ini adalah konsumsi rata-rata gabungan dari pemakaian domestik dan non domestik. Analisa konsumsi air khusus pada pemakaian domestik akan dibahas kemudian setelah ini.
Berbeda dengan PDAM TKR yang konsumsi rata-ratanya jauh lebih tinggi yakni sebesar 32,4 m³/sambungan/bulan, sehingga konsumsi rata-rata 29,3 m³/sambungan/bulan.

D. Sistem Jaringan Air Limbah

Terdapat dua jenis sistem jaringan limbah di Kota Tangerang, yaitu sistem *on-site* dan sistem *off-site*.

1) Sistem On Site

IPAL komunal adalah IPAL sederhana berbasis masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum (DPU), saat ini di Kota Tangerang terdapat IPAL komunal yang tersebar di 7 (tujuh) kompleks perumahan dengan kapasitas total untuk melayani 618 KK.

No	Lokasi IPAL	Deskripsi
1	IPAL Perumahan Ciledug Indah	IPAL komunal ini terletak di Kelurahan Pedurenan (Kecamatan Karang Tengah) dengan kapasitas 4 m ³ /hari dan melayani 40 KK.
2	IPAL Perumahan Pondok Surya	IPAL komunal ini terletak di Kelurahan Karang Tengah (Kecamatan Karang Tengah) dengan kapasitas 4 m ³ /hari dan melayani 40 KK.
3	IPAL Perumahan P & K	IPAL komunal ini terletak di Kelurahan Cipondoh (Kecamatan Cipondoh) dengan kapasitas 2,5 m ³ /hari dan melayani 190 KK.
4	IPAL Perumahan Buana Permai	IPAL komunal ini terletak di Kelurahan Cipondoh (Kecamatan Cipondoh) dengan kapasitas 4 m ³ /hari dan melayani 43 KK.
5	IPAL Perumahan	IPAL komunal ini terletak di Kelurahan Pinang

No	Lokasi IPAL	Deskripsi
	Pinang Griya	(Kecamatan Pinang) dengan kapasitas 4 m ³ /hari dan melayani 40 KK.
6	IPAL Perumahan Bugel Mas Indah	IPAL komunal ini terletak di Kelurahan Bugel (Kecamatan Karawaci) dengan kapasitas 12 m ³ /hari dan melayani 208 KK.
7	IPAL Perumahan Benua Indah	IPAL komunal ini terletak di Kelurahan Pabuaran Tumpeng (Kecamatan Karawaci) dengan kapasitas 4 m ³ /hari dan melayani 48 KK.

Sumber : Dinas Perkimnaha Kota Tangerang, 2021

Untuk melayani penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari tangki septik digunakan armada truk tinja. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, hingga saat ini jumlah truk tinja yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang adalah 13 unit, yaitu: 6 unit tahun 2011, 3 unit tahun 2006, 3 unit tahun 2000, dan 1 unit tahun 1996. Kapasitas angkut masing-masing truk tinja tersebut adalah 3 m³, dengan tarif penyedotan lumpur tinja sebesar Rp 40.000,00/m³ atau Rp 120.000,00/rit.

Lumpur tinja yang disedot dan diangkut oleh truk tinja kemudian diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT yang masih dimanfaatkan hingga saat ini di Kota Tangerang adalah IPLT Bawang. IPLT Bawang terletak di Jalan Bawang Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas. IPLT Bawang mulai dioperasikan tanggal 23 November 1999. Pengelolaan IPLT Bawang saat ini berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang. IPLT Bawang mempunyai luas lahan 9.533 m² dan luas bangunan 2.244 m², dengan kapasitas pengolahan 70 m³/hari. Lumpur tinja dari truk tinja dimasukkan ke dalam *imhoff tank* yang kemudian dialirkan ke dalam kolam oksidasi, kolam fakultatif, dan kolam maturasi. Penyaluran dari masing-masing kolam dengan pengaliran secara gravitasi. Effluent dialirkan ke anak sungai terdekat.

2) Sistem Off Site

Prasarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat (*off site*) berskala kota/kawasan yang masih dimanfaatkan di Kota Tangerang hingga saat ini adalah IPAL Tanah Tinggi dan IPAL Perumnas Karawaci I. IPAL Tanah Tinggi terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang. IPAL Tanah Tinggi dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1981-1982. Pembangunan IPAL Tanah Tinggi ini sebagian dibiayai dari dana pinjaman dari Pemerintah Belanda dan sebagian lagi dari dana APBN.

Pada awalnya IPAL Tanah Tinggi dioperasikan oleh Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat hingga tahun 1993. Sejak

1993 tanggung jawab pengelolaan dialihkan ke PDAM Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2002 terbentuk Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang sehingga sejak saat itu pengelolaan IPAL Tanah Tinggi ini dialihkan ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan IPAL Tanah Tinggi ini.

IPAL Tanah Tinggi menggunakan sistem *oxidation ditch/aerated lagoon* yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit *clarifier* (bak pengendap), *sludge thickener* dan bak pengering lumpur (*sludge drying bed*). Kapasitas IPAL Tanah Tinggi mencapai 2,30 m³/jam dan saat ini melayani sekitar 2.758 sambungan rumah (KK). Effluents dari IPAL dialirkan ke saluran (Mookervaart) dan digunakan sebagai sarana irigasi teknis persawahan.

E. Sistem Jaringan Drainase

Adapun sistem jaringan drainase di Kota Tangerang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sistem drainase makro, yaitu sungai yang berfungsi sebagai badan air penerima, dan sistem drainase mikro meliputi saluran primer, sekunder, dan tersier dengan total panjang saluran sekitar 192.763 meter. Sistem drainase makro Kota Tangerang meliputi 4 (empat) sungai yaitu: Sungai Cisadane, Sungai Angke, Sungai Cirarab dan Sungai Sabi. Keempat sungai tersebut mempunyai daerah tangkapan air yang cukup luas dengan muara ke sebelah utara dan berakhir di Laut Jawa. Selain sungai yang berfungsi sebagai badan air penerima, terdapat juga Situ Cipondoh yang berfungsi sebagai tandon air seluas 120 ha.

Kota Tangerang memiliki kondisi genangan dan banjir, karena kondisi topografi kota yang cenderung datar dan belum memadainya kondisi saluran drainase, terutama untuk saluran drainase sekunder yaitu 52% dari panjang saluran sekunder kondisinya buruk. Akibat dari kurang terpeliharanya saluran drainase, maka genangan atau banjir menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan di Kota Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) telah melaksanakan beberapa program/kegiatan untuk mencegah dan meminimalisir banjir yang terjadi di wilayah Kota Tangerang. Salah satunya adalah program pembangunan turap, rumah pompa, dan pintu air yang

tersebar di 13 kecamatan, yaitu: turap sepanjang 12.063 m, rumah pompa sebanyak 36 unit, dan pintu air sebanyak 90 unit.

Kegiatan tersebut dinilai masih belum optimal, karena hingga saat ini Kota Tangerang masih mengalami bencana banjir. Secara fisik program pembangunan tersebut tercapai, namun belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai contoh Kota Tangerang berada pada 3 aliran sungai besar yaitu: Cisadane, Angke dan Cirarab. Ketiga sungai besar tersebut merupakan wewenang Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang tidak dapat bekerja sendiri. Daerah rawan banjir yang berada di wilayah Kota Tangerang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah konsekuensi dari dampak pembangunan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air.

F. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu sub urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang selama 20 tahun, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032.

Penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antarwilayah. Rencana tata ruang wilayah merupakan salah satu bentuk karya yang dihasilkan, untuk menjadi arahan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Disamping itu tata ruang juga sebagai alat untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urutan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	1					Fokus Urusan Wajib						
B	1	1				Urusan Wajib						
B	1	1	1			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B	1	1	1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
B	1	1	1	3	1	Persentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang ditindaklanjuti	%	57,14	57,14	57,14	96,43	82,14
B	1	1	1	3	2	Persentase sumber daya air yang dipelihara	%	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
B	1	1	1	3	3	Persentase luas banjir yang tertangani	%	19,87	19,87	30,42	48,44	95,87
B	1	1	1	3	4	Persentase sarana prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	%	66,06	66,06	71,33	75,00	87,50
B	1	1	1	3	5	Persentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase yang ditindaklanjuti	%	57,14	57,14	57,14	0,00	87,50
B	1	1	1	3	6	Persentase saluran drainase/ gorong-gorong yang dipelihara	%	50,00	50,00	53,00	56,00	59,00
B	1	1	1	3	7	Persentase luas genangan yang tertangani	%	19,87	19,87	30,42	34,43	68,44
B	1	1	1	3	8	Persentase sarana prasarana drainase dalam kondisi baik	%	66,06	66,06	71,33	75,00	85,00
B	1	1	1	3	9	Persentase dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang ditindaklanjuti	%	45,16	45,16	58,06	96,77	90,32
B	1	1	1	3	10	Persentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat	%	25,81	25,81	29,03	67,74	83,87
B	1	1	1	3	11	Persentase panjang jalan yang dipelihara	%	82,07	83,57	85,07	89,69	88,07
B	1	1	1	3	12	Persentase jembatan yang dipelihara	%	84,97	87,76	90,56	98,95	96,15
B	1	1	1	3	13	Tingkat ketersediaan jalan	%	98,23	98,37	98,42	98,70	67,50
B	1	1	1	3	14	Tingkat ketersediaan jembatan	%	97,94	98,28	98,63	100,00	99,31
B	1	1	1	3	15	Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
B	1	1	1	3	16	Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	17	Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	18	Cakupan layanan air minum	%	22,16	24,00	24,91	24,63	26,72

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						perpipaan						
B	1	1	1	3	19	Tingkat kualitas air minum memenuhi baku mutu yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	20	Cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik	%	99,00	99,79	99,79	99,79	99,80
B	1	1	1	3	21	Tingkat kualitas air limbah domestik memenuhi baku mutu yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	22	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	23	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	24	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	25	Tingkat penyelesaian pembangunan/ rehabilitasi gedung/ bangunan sarana dan prasarana pemerintah dan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	26	Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	100,00	17,50	35,73	59,35	40,00

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya adalah menyediakan rumah atau papan. Pembangunan perumahan memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga pihak swasta dan masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakatnya relative terbatas. Pemerintah harus dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam menyediakan rumah bagi penduduk Kota Tangerang. Selama ini pertumbuhan jumlah kebutuhan rumah tidak seimbang dengan kemampuan pihak pemerintah maupun swasta.

Kualitas lingkungan perumahan juga banyak ditentukan oleh berbagai faktor. Diantaranya yaitu kualitas bangunan dan fasilitas penunjang perumahan seperti akses terhadap sumber air bersih, penerangan, dan fasilitas tempat buang air besar.

A. Air Minum

Air minum merupakan salah satu kebutuhan manusia, untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat tentunya dibutuhkan air yang layak yang digunakan untuk keperluan keluarga atau rumah tangga yang prinsipnya telah memenuhi syarat. Ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

B. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Secara umum praktik buang air besar (BAB) masyarakat di Kota Tangerang telah disalurkan melalui fasilitas yang semestinya, di mana perilaku BAB di Kota Tangerang masyarakat telah menggunakan jamban pribadi. Sedangkan masyarakat yang lainnya memiliki perilaku buang air besar pada fasilitas tempat buang air besar bersama.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 1 1 1	Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 1 1 1 4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman						
B 1 1 1 4 1	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
B 1 1 1 4 2	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
B 1 1 1 4 3	Persentase bangunan yang memiliki kesesuaian dengan perijinan	%	100,00	129,73	129,73	56,01	56,01
B 1 1 1 4 4	Persentase rumah tidak layak huni	%	0,73	0,29	0,37	0,29	0,29
B 1 1 1 4 5	Persentase perumahan yang memiliki PSU	%	90,32	96,77	96,77	97,00	97,00

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Dalam upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sehingga program dan kebijakan yang akan dilaksanakan terarah. Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang adalah; terwujudnya kenyamanan dan ketertiban lingkungan, terwujudnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Secara umum, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi kebijakan dan peraturan serta operasi penertiban.
2. Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, penataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Secara khusus, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diselenggarakan melalui:

1. Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah-daerah vital dan masyarakat.
2. Peningkatan sosialisasi hukum masyarakat.
3. Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
4. Peningkatan pengamanan swakarsa baik di lingkungan pemukiman maupun tempat-tempat vital.
5. Penegakkan peraturan daerah.
6. Membangun komunikasi dan silaturahmi di antara komponen-komponen masyarakat.

Bencana yang mengancam Kota Tangerang dapat digolongkan pada tiga kategori, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Jenis bencana tersebut meliputi, antara lain: banjir, kekeringan, gempa bumi, wabah penyakit, kebakaran, dan pencemaran lingkungan.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode					Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B					ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1					Fokus Urusan Wajib						
B 1 1					Urusan Wajib						
B 1 1 1					Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 1 1 1 5					Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
B 1 1 1 5	1				Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 5	2				Tingkat pembinaan kewaspadaan dini masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 5	3				Tingkat pembinaan satlinmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 5	4				Tingkat penyelesaian penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 5	5				Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
B 1 1 1 5	6				Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 5	7				Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 5	8				Tingkat ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 5	9				Rata-rata waktu tanggap penanganan bencana kebakaran di daerah layanan WMK	Menit	15,00	14,91	14,10	12,99	14,65
B 1 1 1 5	10				Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 1 5	11				Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana non kebakaran (banjir)	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3.1.6. Sosial

Pembangunan sosial pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui upaya-upaya untuk mengangkat manusia dari keterbelakangan menuju kesejahteraan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga

negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, dan negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Sementara itu, definisi kesejahteraan sosial sendiri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pembangunan urusan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang mengacu pada indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Indikator tersebut terdapat dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal dan juga beberapa ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kota Tangerang. Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PMKS, yang mana jika tahun sebelumnya jumlah PM KS hanya sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PMKS. Adapun empat jenis PMKS baru yang dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori Anak dengan Kedisabilitas, Pemulung, Kelompok Minoritas serta Korban Trafficking. Kelompok PMKS yang ditangani oleh Dinas Sosial antara lain:

1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum

4. Anak jalanan
5. Anak dengan kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut usia terlantar
9. Penyandang disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban bencana alam
22. Korban bencana sosial
23. Perempuan rawan sosial ekonomi
24. Fakir miskin
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis
26. Komunitas adat terpencil

Berikut ini akan dijelaskan secara terinci definisi dari masing-masing jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tangerang.

1. Anak Balita Terlantar

Anak balita terlantar adalah anak berusia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya, karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya, meninggal, anak balita sakit, sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

2. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak berusia 6-18 tahun yang karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya, karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada

pengasuh/pengampu, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak/remaja yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang sebagian waktunya berada di jalanan sebagai pedagang asongan, pengemis, pengamen, jualan koran, jasa semir sepatu dan mengelap mobil. Mereka bekerja mencari nafkah untuk membantu orangtuanya, karena berasal dari keluarga tidak mampu. Kegiatan mereka ada yang bersekolah dan tidak bersekolah. Rata-rata mereka beraktivitas di jalanan selama 4-6 jam dalam sehari, dengan berjualan, meminta-minta, atau berkeliaran tidak menentu. Lokasi yang sering dikuasai antara lain di perempatan Jl. Muhammad Yamin, Perempatan Ciledug, Jaiuwung, Kawasan Perumnas, Jl. Daan Mogot, kawasan pasar, dan mall.

5. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)

Anak dengan kedisabilitasan (ADK) adalah anak yang berusia 0-18 tahun, yang mengalami kelainan fisik atau mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kecelakaan), sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak. Anak cacat dikelompokkan ke dalam anak cacat tubuh, tuna netra, tuna rungu wicara, dan mental.

6. Anak Yang Menjadi Korban Tindakan Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Anak yang menjadi korban tindakan kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak berusia 5-18 tahun dan belum menikah yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindakan kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarganya atau lingkungan sosial terdekatnya seperti diperjualbelikan atau menjadi korban pemerkosaan, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

8. Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berumur 60 tahun atau lebih, karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosial. Kondisinya tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi sandang, pangan, papan dan kesehatan yang layak serta tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya.

9. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Penyandang cacat dikelompokkan ke dalam penyandang cacat tubuh, tuna netra, tuna rungu wicara, dan mental (mental retardasi dan eks psikotik).

10. Tuna Susila

Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Biasanya mereka menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall, dan diskotek.

11. Gelandangan

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan perlu mendapat bantuan untuk hidup dan bekerja secara layak dan mandiri. Kondisinya tidak memiliki KTP, kekurangan secara ekonomi, tidak

memiliki pekerjaan tetap, dan hidup di tempat-tempat umum (tidak memiliki tempat tinggal tetap) seperti di gubug liar, emperan toko, bawah jembatan atau sejenisnya.

12. Pengemis

Pengemis adalah seseorang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Penampilannya berpakaian kumuh dan compang camping dan sering berada di tempat ramai atau strategis.

13. Pemulung

Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriterianya antara lain tidak mempunyai pekerjaan tetap dan suka mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas

Kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian. Kriterianya antara lain memiliki gangguan keberfungsian sosial, diskriminasi, marginalisasi, dan berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Salah satu upaya pemerintah mengurangi penularan HIV/AIDS adalah memberikan layanan komprehensif berkelanjutan (LKB) di puskesmas. Dan sudah ada tempat tes HIV secara gratis yang dikenal sebagai Klinik VCT, yaitu: 1) Klinik VCI di RS Qadra; 2) 'Bougenville' di RSU Tangerang; (3) 'Anggrek' di Puskesmas Ciledug, (4) 'Edelweis' di Puskesmas Cibodas.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Korban penyalahgunaan NAPZA adalah seorang pria atau wanita, terutama yang berusia antara 5 sampai 60 tahun bahkan lebih, yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras pada taraf coba-coba atau sampai mengalami ketergantungan/kecanduan, sesudah dinyatakan bebas dari ketergantungan fisik oleh dokter yang berwenang, berasal dari keluarga baik yang mampu maupun yang kurang mampu. Kondisi fisik korban penyalahgunaan NAPZA yaitu badan kurus, pucat, mata cekung, merah dan tidak tahan kena sinar matahari, berbicara di luar kontrol, sering begadang dan bergerombol tanpa tujuan.

18. Korban Trafficking

Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Perlakuan salah yang didapat antara lain tindakan kekerasan, eksploitasi seksual, penelantaran, dan pengusiran (deportasi).

19. Korban Tindak Kekerasan

Korban tindak kekerasan adalah seorang individu/keluarga/kelompok yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. Korban Bencana Alam

Korban bencana alam adalah seorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Dampak yang dialaminya antara lain mengalami kerugian harta benda, gangguan psikis, dan gangguan dalam melaksanakan fungsi sosial.

22. Korban Bencana Sosial

Korban bencana sosial/pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terusir dan atau atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan oleh karena ancaman dari kelompok/golongan sosial tertentu sebagai akibat dari konflik atau kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat lingkungannya.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa berusia 18-60 tahun yang belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

24. Fakir-Miskin

Fakir miskin adalah seseorang berusia 18-60 tahun yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang tetap dan tidak mempunyai ketrampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak. Kondisi tempat tinggalnya tidak layak huni, sumber air menggunakan air sumur/ sungai/ air hujan, dinding rumah berupa bambu, lantai rumah berupa tanah/ pasir, tidak mempunyai tempat buang air besar, dan sumber penerangan menggunakan petromak atau listrik bersama. Fasilitas kesehatan yang digunakan berasal dari mantra/ bidan/ puskesmas, dan tingkat pendidikan rendah (pendidikan terakhir maksimal tingkat SD).

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Keluarga yang Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri,

orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

26. Komunitas Adat Terpencil

Komunitas adat terpencil adalah kelompok yang hidupnya dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencil serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik serta masih sangat terikat pada sumber daya alam. Ciri-ciri komunitas adat terpencil adalah sebagai berikut:

- Berbentuk komunitas adat terpencil, tertutup dan homogen
- Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan
- Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif/sulit dijangkau
- Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistens
- Peralatan dan teknologinya sederhana
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi
- Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, lembaga kesejahteraan sosial merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Di Kota Tangerang terdapat beberapa lembaga kesejahteraan sosial yang tersebar di seluruh kecamatan, yaitu 182 lembaga Pekerja Sosial Masyarakat, 823 lembaga Organisasi Sosial, 246 lembaga Karang Taruna, 131 lembaga KKDU, 473 lembaga WKSMB, 20 lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 59 lembaga TAGANA, 134 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 87 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), 106 lembaga Keluarga Pioner, 209 lembaga Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), 382 lembaga Penyuluh Sosial, dan 34 lembaga Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kejuangan (NK3).

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan sosial di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 1 1 1	Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 1 1 1 6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
B 1 1 1 6 1	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya						
B	1	1	1	6	2	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	67,37	102,43	70,39	71,90	71,46
B	1	1	1	6	3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (yang terpenuhi kebutuhan dasarnya)	%	14,25	15,65	17,05	18,45	15,72
B	1	1	1	6	4	Persentase pelayanan perlindungan sosial	%	100,00	108,64	77,60	100,00	99,02
B	1	1	1	6	5	Persentase pelayanan jaminan sosial	%	100,00	102,05	100,00	100,00	99,02
B	1	1	1	6	6	Persentase jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6	7	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00

2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. dikarenakan tenaga kerja sebagai motor penggerak pembangunan. Aktivitas pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja jauh tertinggal dibanding dengan pertambahan angkatan kerja dari waktu ke waktu. Pembangunan harus mereposisi paradigmanya menjadi berorientasi pada ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dan produktivitas.

Pembangunan urusan ketenagakerjaan di Kota Tangerang mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Tangerang. Indikator tersebut antara lain ada dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan serta indikator pembangunan ketenagakerjaan lainnya. Pembangunan dalam urusan

ketenagakerjaan bertujuan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Upaya pemerintah Kota Tangerang dalam bidang ketenagakerjaan dijalankan melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, dan program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Berikut ini diuraikan capaian indikator pada urusan tenaga kerja di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
B 2 1 2 7 1	Tingkat ketersediaan perencanaan tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 2 1 2 7 2	Prosentase tenaga kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	%	50,00	51,25	53,13	51,43	50,00
B 2 1 2 7 3	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	76,00	78,13	80,00	85,91	80,94
B 2 1 2 7 4	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	58,33	59,06	83,62	71,75	63,78

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Pemberdayaan Perempuan

Istilah gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan secara biologis. Konsep gender mengacu pada laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi dapat mengakibatkan korban baik kaum laki-laki maupun perempuan. Untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, maka kebutuhan dasar

perempuan seperti kesehatan, pendidikan, serta partisipasi kerja harus mendapat perhatian. Kebutuhan dasar tersebut mencerminkan kualitas dari sumber daya manusia.

Selama ini peran publik dan domestik menjadi pembeda antara peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Laki-laki cenderung berperan dalam aktivitas publik, yaitu aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan pendapatan. Sedangkan perempuan lebih banyak dalam peran domestik, yaitu aktivitas yang dilakukan didalam rumah, yaitu mengurus rumah tangga dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pendapatan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat selama ini. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini tidak terlepas dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga. Sementara untuk mencari nafkah keluarga menjadi tanggung jawab laki-laki.

Pada perkembangannya, saat ini perempuan Indonesia sudah memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat. Terlihat dari banyaknya perempuan yang berkarya dan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena suami tidak bekerja atau menjadi orang tua tunggal. Semakin banyak kesempatan yang diberikan pada perempuan untuk peran publik, maka akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Mengingat jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki.

Jika dilihat dari sisi demografi, peran perempuan dapat terlihat dari komposisi umurnya. Perempuan sangat berperan dalam menghasilkan generasi penerus. Hal ini sangat terkait dengan fungsi reproduksinya. Untuk menghasilkan generasi yang unggul dan berkualitas, maka kesehatan perempuan dalam proses hamil, melahirkan sampai menyusui perlu dijaga dengan baik. Jaminan kesehatan tidak hanya fungsi reproduksinya, tetapi juga fisik dan psikologisnya. Fase perempuan pada proses ini tercermin pada masa usia subur yaitu pada kelompok umur 15-49 tahun.

B. Perlindungan Anak

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan perlindungan

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali. Jadi yang mengusahakan perlindungan bagi anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak. Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak.

Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) membina organisasi Forum Anak Kota Tangerang (FKAT) di setiap kecamatan. Pengurus forum anak tersebut terdiri dari perwakilan anak-anak yang aktif dalam organisasi, kelompok kegiatan atau sanggar-sanggar kegiatan seni-budaya dan olahraga, atau minat anak lainnya. FKAT bertujuan untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Kota Tangerang dalam rangka pemenuhan empat (4) Hak Dasar Anak yaitu: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. FKAT di Kota Tangerang dikelompokkan berdasarkan kecamatan, sebagai berikut:

1. Forum Anak Kecamatan Tangerang
2. Forum Anak Kecamatan Pinang
3. Forum Anak Kecamatan Neglasari
4. Forum Anak Kecamatan Benda
5. Forum Anak Kecamatan Karawaci
6. Forum Anak Kecamatan Jatiuwung
7. Forum Anak Kecamatan Larangan
8. Forum Anak Kecamatan Batucapeper
9. Forum Anak Kecamatan Karang Tengah
10. Forum Anak Kecamatan Ciledug
11. Forum Anak Kecamatan Cipondoh
12. Forum Anak Kecamatan Periuk
13. Forum Anak Kecamatan Cibodas

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode					Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B					ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1					Fokus Urusan Wajib						
B 1 1					Urusan Wajib						
B 2	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2	1	2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
B 2	1	2	8	1	Tingkat partisipasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemberdayaan perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 2	1	2	8	2	Cakupan perempuan yang meningkat kualitas hidup (Cakupan Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan)	%	17,35	20,00	40,00	60,00	80,00
B 2	1	2	8	3	Persentase organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan (Cakupan kelembagaan pemberdayaan perempuan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	2	1	2	8	4	Persentase kekerasan (KDRT) terhadap perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	8	5	Capaian indikator kota layak anak (KLA)	%	73,15	75,00	77,50	80,00	82,50
B	2	1	2	8	6	Persentase kekerasan (KDRT) terhadap anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3.2.3. Pangan

Pembangunan bidang pangan menjadi salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai, yaitu dalam Tujuan 1 menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi tahun 1990. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sementara itu ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan terkait tiga hal, meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan konsumsi pangan dan gizi.

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, antara lain melalui jaminan penyediaan pangan.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan pangan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						
B 2 1 2 9 1	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	Gram/kapita/hari	72,26	72,26	71,50	71,80	70,70
B 2 1 2 9 2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan	Gram/kapita/hari	133,60	56,70	85,90	57,33	57,65
B 2 1 2 9 3	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Kkal/kapita/hari	2.490,00	2.160,00	2.959,00	2.971,00	2.196,00
B 2 1 2 9 4	Tingkat stabilitas Harga Pangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 2 1 2 9 5	Tingkat cadangan pangan daerah	%	27,77	27,77	48,53	60,31	60,00
B 2 1 2 9 6	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/kapita/hari	2.311,60	2.291,40	2.305,40	2.254,20	2.230,80
B 2 1 2 9 7	Rasio rekomendasi SKPG dan FSVA yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 2 1 2 9 8	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan daerah	%	80,00	87,00	90,50	94,41	93,03

2.3.2.4. Pertanian

Pembangunan bidang pertanian mempunyai peranan yang sangat penting karena tanah mempunyai fungsi yang ekonomis dan sosial. Karena memiliki peran yang strategis tersebut maka kepemilikan tanah/status atas tanah perlu diberikan bukti yang kuat berupa sertifikat kepemilikan atas tanah yang sah di mata hukum. Sertifikat tanah terdiri atas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan, dan Wakaf.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan pertanian di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
B 2 1 2 10 1	Rasio tanah milik pemda bersertifikat	%	10,00	11,11	21,05	24,87	40,61
B 2 1 2 10 2	Tingkat pemenuhan ketersediaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan						
B	2	1	2	10	3	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	10	4	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	10	5	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	10	6	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan	%	5,76	32,93	34,18	66,63	85,71
B	2	1	2	10	7	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dan drainase	%	5,76	32,93	34,18	89,95	2,60
B	2	1	2	10	8	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas lingkungan	%	0,00	1,14	0,00	7,18	45,51

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Indikator pembangunan pada urusan lingkungan hidup meliputi pengembangan kinerja pengelolaan sampah, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan pengendalian polusi dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pola-pola pengelolaan persampahan berdasarkan undang-undang tersebut dimulai dari pembatasan timbulnya sampah, pendauran ulang sampah dan penggunaan sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan lingkungan hidup di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B						ASPEK PELAYANAN UMUM						
B	1					Fokus Urusan Wajib						
B	1	1				Urusan Wajib						
B	2	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B	2	1	2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	2	1	2	11	1	Tingkat pelaksanaan evaluasi dokumen lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	11	2	Persentase titik pantau udara, kebisingan, air sungai, air situ dan air tanah yang sesuai baku mutu	%	N/A	64,80	35,68	100,00	57,80
B	2	1	2	11	3	Tingkat penurunan emisi gas karbon	%	20,00	20,00	20,10	99,50	20,29
B	2	1	2	11	4	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang dikembangkan	%		4,13	4,13	4,14	4,19
B	2	1	2	11	5	Tingkat pengelolaan limbah B3	%	70,00	70,00	75,00	85,00	89,97
B	2	1	2	11	6	Persentase badan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	11	7	Persentase sekolah adhywiyata	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	11	8	Persentase RW yang dibina menjadi kampung iklim	%	N/A	10,00	15,00	23,00	25,00
B	2	1	2	11	9	Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	11	10	Persentase volume sampah yang tertangani	%	76,00	84,00	90,19	81,67	78,00
B	2	1	2	11	11	Persentase volume sampah yang berkurang melalui mekanisme 3R	%	15,00	16,00	9,03	18,33	22,00
B	2	1	2	11	12	Peningkatan luas taman untuk RTH dan ruang terbuka non hijau publik yang tersedia	%	100,00	98,01	98,48	98,96	99,53
B	2	1	2	11	13	Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya	%	107,96	88,73	91,55	94,36	97,18

2.3.2.6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dinilai melalui indikator yang meliputi kepemilikan dokumen kependudukan, sistem administrasi kependudukan, dan sistem pendaftaran penduduk. Indikator yang dimaksud adalah: rasio penduduk ber-KTP, rasio bayi ber-akte kelahiran, kepemilikan Akta Kelahiran, rasio pasangan berakte nikah, ketersediaan database kependudukan, dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B						ASPEK PELAYANAN UMUM						
B	1					Fokus Urusan Wajib						
B	1	1				Urusan Wajib						
B	2	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B	2	1	2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
B	2	1	2	12	1	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang	%	99,33	99,83	99,84	99,85	99,86

						terverifikasi sesuai standar									
B	2	1	2	12	2	Persentase peningkatan pengajuan permohonan dokumen administrasi kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	12	3	Persentase dokumen pencatatan sipil yang terverifikasi sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	12	4	Persentase peningkatan pengajuan permohonan dokumen pencatatan sipil	%	100,00	89,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	12	5	Cakupan layanan SIAK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	12	6	Cakupan database kependudukan yang akurat dan valid	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	12	7	Tingkat pemanfaatan data kependudukan	%	N/A	0,00	19,51	21,00	31,00	31,00	31,00	31,00

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						
B 2 1 2 13 1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Disebutkan pula bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan KB dan bahwa dalam menentukan cara KB pemerintah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan istri.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
B 2 1 2 14 1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 2 1 2 14 2	Persentase kelompok masyarakat (RW) yang berperan aktif dalam program pengendalian penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 2 1 2 14 3	Persentase peserta KB aktif	%	77,12	77,17	77,21	77,26	77,30
B 2 1 2 14 4	Cakupan keluarga sakinah mawadah warahmah (samawa)	%	N/A	N/A	22,76	45,52	8,00

2.3.2.9. Perhubungan

Simpul transportasi yang ada di Kota Tangerang meliputi terminal yang beroperasi untuk melayani angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, stasiun kereta api yang melayani pengangkutan penumpang, dan bandara Internasional.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan perhubungan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
B 2 1 2 15 1	Persentase hasil kajian, analisa dan evaluasi pengembangan sistem transportasi	%	100,00	17,24	37,93	58,62	79,31
B 2 1 2 15 2	Jumlah titik kemacetan yang tertangani	Titik	26,00	5,00	10,00	15,00	20,00
B 2 1 2 15 3	Jumlah beroperasinya koridor/trayek angkutan umum sistem transit	Koridor	2,00	3,00	8,00	12,00	13,00
B 2 1 2 15 4	Prosentase PJU keselamatan jalan dalam kondisi baik	%	100,00	11,67	27,66	47,85	72,00

2.3.2.11. Komunikasi dan Informatika

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan komunikasi dan informatika di Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika						
B 2 1 2 16 1	Persentase pengembangan diseminasi informasi dan komunikasi publik	%	20,00	24,65	96,67	60,00	80,00
B 2 1 2 16 2	Presentase konten saluran media informasi sesuai kebutuhan	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B 2 1 2 16 3	Presentase informasi yang terpublikasi	%	20,00	20,00	40,00	60,20	80,29
B 2 1 2 16 4	Presentase kecamatan yang memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM) yang aktif	%	0,00	7,69	23,08	38,46	53,84
B 2 1 2 16 5	Presentase penyelenggaraan pelayanan informasi	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
B 2 1 2 16 6	Persentase pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	%	20,00	24,65	96,67	97,03	98,83
B 2 1 2 16 7	Persentase pengembangan, integrasi aplikasi layanan publik	%	20,00	28,00	56,00	66,00	71,00
B 2 1 2 16 8	Presentase peningkatan pemahaman TIK	%	0,00	19,58	33,65	53,22	70,04
B 2 1 2 16 9	Persentase pengembangan, integrasi dan layanan eGovernment	%	20,00	19,92	39,45	59,76	79,68

2.3.2.12. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UKM di Kota Tangerang baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan						

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						Menengah						
B	2	1	2	17	1	Presentase koperasi yang patuh terhadap peraturan terhadap total jumlah koperasi aktif	%	100,00	29,28	33,56	38,59	50,33
B	2	1	2	17	1	Presentase koperasi yang sehat terhadap total jumlah koperasi aktif	%	100,00	6,71	10,07	16,77	33,55
B	2	1	2	17	2	Presentase koperasi yang melakukan RAT terhadap total jumlah koperasi aktif	%	100,00	36,91	43,62	50,34	60,40
B	2	1	2	17	3	Presentase koperasi yang dibina kapasitas dan kompetensi SDMnya terhadap total jumlah koperasi aktif	%	34,22	45,06	55,90	62,60	74,21
B	2	1	2	17	4	Pertambahan jumlah usaha mikro	%		7,90	15,80	5,00	5,00
B	2	1	2	17	5	Presentase jumlah usaha mikro yang meningkat daya saingnya (berdaya saing)	%		7,90	15,80	3,00	3,00

2.3.2.13. Penanaman Modal

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam PP Nomor 38 tahun 2007, Pemerintah Kota Tangerang harus melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang sama dengan kewenangan yang diberikan kepada kabupaten/kota lainnya. Kewenangan tersebut antara lain penyelenggaraan kebijakan pengembangan penanaman modal; koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal; melaksanakan promosi dan kerjasama penanaman modal; pelaksanaan pelayanan penanaman modal meliputi pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Tangerang cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa. Sedangkan potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri relatif tertutup untuk industri besar karena keterbatasan lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Tangerang perlu dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pembangunan daerah. Kegiatan pengembangan penanaman modal (investasi), sangat terkait

dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, seperti menciptakan lapangan kerja, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan penanaman modal di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode					Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B					ASPEK PELAYANAN UMUM						
B	1				Fokus Urusan Wajib						
B	1	1			Urusan Wajib						
B	2	1	2		Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B	2	1	2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						
B	2	1	2	18	1 Tingkat pelaksanaan kebijakan daerah mengenai perizinan dan penanaman modal	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
B	2	1	2	18	2 Presentase promosi yang menarik investor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	18	3 Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pelayanan penanaman modal	%	94,30	94,34	95,24	100,00	100,00
B	2	1	2	18	4 Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pemerintahan dan kesra	%	94,85	94,34	95,85	100,00	100,00
B	2	1	2	18	5 Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pembangunan	%	94,30	94,34	95,24	100,00	100,00
B	2	1	2	18	6 Tingkat penyelesaian pengaduan perijinan dan penanaman modal dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	18	7 Tingkat pengendalian pelaporan penanaman modal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	18	8 Tingkat pemanfaatan sistem terhadap pelayanan perizinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3.2.14. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda menurut UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan

penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri, masyarakat, bangsa, dan Negara. Jenis kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan antara lain, terkait dengan bidang pendidikan politik dan demokratisasi; sumberdaya ekonomi; kepedulian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, dan budaya; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan kewirausahaan; kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Pelayanan kepemudaan ditujukan untuk menumbuhkan budaya prestasi diantara para pemuda, termasuk didalamnya prestasi dalam bidang olahraga. Fasilitas keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah fasilitas pembentukan organisasi olahraga, pembangunan gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan gedung olahraga serta Lapangan olahraga.

Tercatat, sebanyak 13 jenis lapangan olahraga telah terbangun dan tersedia dalam rangka meningkatkan kualitas keolahragaan masyarakat Kota Tangerang. Ketigabelas jenis lapangan olahraga tersebut adalah, Gelanggang/Balai Remaja, Lapangan Sepak Bola, Lapangan Basket, Lapangan Volley, Lapangan Bulu Tangkis, Kolam Renang, Lapangan Tennis, Gedung Olahraga, Taman Olahraga, Lapangan Menembak, Sasana Tinju, Tempat Billiard, dan Arena Panjat Tebing. Pemerintah juga melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga dalam rangka menjangkau SDM keolahragaan yang baik dan berprestasi.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga						
B 2 1 2 19 1	Prosentase SDM kepemudaan yang berprestasi	%	100,00	20,00	40,00	90,55	95,00
B 2 1 2 19 2	Persentase jumlah wirausaha muda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 2 1 2 19 3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan	%	66,70	100,00	100,00	100,00	100,00
B 2 1 2 19 4	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	atlet	560,00	150,00	350,00	14,00	675,00
B 2 1 2 19 5	Prosentase SDM keolahragaan	%	100,00	20,00	40,00	60,00	80,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						yang berkompeten						
B	2	1	2	19	6	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	%	100,00	90,63	90,63	93,75	96,88
B	2	1	2	19	7	Prosentase SDM pramuka yang berprestasi	%	100,00	100,00	100,00	90,00	95,00
B	2	1	2	19	8	Tingkat ketersediaan fasilitasi kegiatan kepramukaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	19	9	Tingkat keterlibatan kepramukaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3.2.15. Statistik

Ketersediaan data/informasi/statistik berguna untuk mengambil satu kebijakan dimasa yang akan datang. Penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat akan memudahkan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mengevaluasi hasil pembangunan. Data yang ada, secara regular harus dilakukan pembaharuan sehingga terjaga keakuratannya.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan statistik di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B						ASPEK PELAYANAN UMUM						
B	1					Fokus Urusan Wajib						
B	1	1				Urusan Wajib						
B	2	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B	2	1	2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
B	2	1	2	20	1	Persentase layanan statistik daerah dan sektoral	%	18,00	18,92	37,84	56,76	75,67

2.3.2.16. Persandian

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan persandian di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B						ASPEK PELAYANAN UMUM						
B	1					Fokus Urusan Wajib						
B	1	1				Urusan Wajib						
B	2	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B	2	1	2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
B	2	1	2	21	1	Persentase pengelolaan keamanan informasi dan persandian	%	14,00	20,00	40,00	60,00	80,00

2.3.2.17. Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut. Pelestarian cagar budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; memperkuat kepribadian bangsa; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat Internasional.

Pemerintah Kota Tangerang memiliki perhatian yang cukup tinggi dalam pengembangan kebudayaan. Hal ini terlihat dari kondisi penunjang pengembangan kebudayaan itu sendiri yang sudah banyak tersedia di Kota Tangerang, baik dari SDM, sarana prasarana, maupun lembaga penanung pegiat kebudayaan. Kreativitas dan kepedulian masyarakat terhadap pengembangan kesenian sangatlah tinggi terlihat dari banyaknya jumlah kelompok kesenian yang terbentuk di Kota Tangerang dan jumlah pagelaran seni yang digelar setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan animo masyarakat yang tinggi terhadap kesenian dan kebudayaan mendapatkan ditangkap pemerintah dengan pembangunan sarana prasarana kesenian yang hingga tahun 2017 tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah mencapai 93,75%.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan kebudayaan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
B 2 1 2 22 1	Cakupan kajian seni dan budaya	%	100,00	42,86	57,14	71,43	85,71
B 2 1 2 22 2	Cakupan fasilitasi seni dan budaya	%	100,00	33,33	50,00	66,67	83,33
B 2 1 2 22 3	Cakupan pembinaan sejarah	%	N/A	N/A	N/A	25,00	50,00
B 2 1 2 22 4	Cakupan perlindungan seni dan budaya	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B 2 1 2 22 5	Tingkat pengelolaan museum	%	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00

2.3.2.18. Perpustakaan

Berkaitan dengan kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat dari indikator jumlah perpustakaan, jumlah peningkatan kualitas perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahun dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

Dimaksud dengan jumlah perpustakaan adalah jumlah perpustakaan umum, khusus, kelurahan dan sekolah yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perkembangan jumlah perpustakaan di Kota Tangerang menunjukkan kondisi yang baik, yaitu meningkat setiap tahunnya.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan perpustakaan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode					Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B					ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1					Fokus Urusan Wajib						
B 1 1					Urusan Wajib						
B 2 1 2					Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 23					Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
B 2 1 2 23 1					Cakupan pelayanan perpustakaan kecamatan sesuai standar nasional dari aspek layanan	%	N/A	7,69	38,46	53,85	76,92
B 2 1 2 23 2					Persentase perpustakaan kecamatan yang mengaplikasikan pelayanan otomasi	%	N/A	7,69	38,46	30,77	69,23

2.3.2.19. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku dikelola berdasarkan fungsinya yang terdiri dari arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih diperlukan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sedangkan arsip statis merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengelolaan arsip di lingkup Pemerintah Kota Tangerang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing SKPD. Secara umum pelaksanaan kegiatan pengarsipan setiap tahunnya dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan kearsipan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1	Fokus Urusan Wajib						
B 1 1	Urusan Wajib						
B 2 1 2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B 2 1 2 24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
B 2 1 2 24 1	Tingkat arsip yang memiliki nilai guna	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B 2 1 2 24 2	Tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B 2 1 2 24 3	Persentase digitalisasi arsip	%	N/A	20,00	40,00	60,00	40,00

2.3.3. Urusan Pilihan

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada urusan pilihan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1 1 3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
B 1 1 3 25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan						
B 1 1 3 25 1	Produktivitas perikanan	Kg/m2	5,77	5,81	5,85	8,00	6,25
B 1 1 3 26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
B 1 1 3 26 1	Tingkat perkembangan objek wisata daerah	%	100,00	10,00	20,00	30,00	60,00
B 1 1 3 26 2	Persentase wisatawan yang datang karena promosi	%	11,58	25,03	25,03	25,64	16,38
B 1 1 3 26 3	Tingkat kepatuhan usaha jasa pariwisata terhadap peraturan kepariwisataan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 3 27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
B 1 1 3 27 1	Produktivitas pertanian	Kwintal Per Ha	45,02	45,10	45,72	64,89	60,75
B 1 1 3 27 2	Persentase pendistribusian bibit ternak dan ikan	%	9,00	10,00	12,00	17,00	16,00
B 1 1 3 27 3	Angka prevalensi penyakit hewan	Point	0,73	1,00	1,00	1,00	0,00
B 1 1 3 30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
B 1 1 3 30 1	Persentase jumlah pasar tradisional yang difasilitasi sarana distribusi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 3 30 2	Persentase jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 3 30 3	Persentase pelaku usaha yang terlibat dalam promosi dagang produk ekspor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 3 30 4	Persentase jumlah kasus perlindungan konsumen yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	ditindaklanjuti						
B 1 1 3 30 5	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	%	68,22	96,30	96,30	96,29	97,76
B 1 1 3 30 6	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 3 31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
B 1 1 3 31 1	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	%	N/A	0,00	0,00	3,35	3,35
B 1 1 3 31 2	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki sertifikasi	%	41,54	0,00	0,00	3,35	3,35
B 1 1 3 31 3	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100,00	3,35	3,35	3,35	3,35

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada unsur pendukung urusan pemerintahan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1 1 4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
B 1 1 4 1	Sekretariat Daerah						
B 1 1 4 1 1	Prosentase OPD dengan struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi	%	100,00	90,70	97,56	100,00	100,00
B 1 1 4 1 2	Prosentase OPD yang memiliki peta proses bisnis yang lengkap dan sesuai aturan	%	0,00	0,00	2,44	50,00	100,00
B 1 1 4 1 3	Prosentase OPD yang memiliki SOP yang baik	%	23,26	46,51	73,17	87,50	100,00
B 1 1 4 1 4	Prosentase OPD/UPT dengan pelayanan publik kategori baik	%	85,07	88,06	91,04	100,00	97,01
B 1 1 4 1 5	Prosentase pemberitaan yang terpublikasi	%	19,94	32,97	65,94	98,65	87,67
B 1 1 4 1 6	Prosentase pembinaan anggota Korpri	%	100,00	82,69	90,38	100,00	0,00
B 1 1 4 1 7	Tingkat kepuasan kepala daerah/wakil kepala daerah/sekretaris daerah terhadap kegiatan humas	Kategori	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	(Sangat Puas)	Sangat Puas
B 1 1 4 1 8	Prosentase kecamatan dan kelurahan dengan nilai IKM kategori baik	%	100,00	93,16	93,16	100,00	97,44
B 1 1 4 1 9	Prosentase SDM keagamaan yang dibina	%	100,00	22,73	39,39	57,57	80,26
B 1 1 4 1 10	Prosentase organisasi keagamaan yang dibina	%	100,00	25,00	31,25	40,63	81,25
B 1 1 4 1 11	Prosentase organisasi sosial budaya keagamaan yang dibina	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
B 1 1 4 1 12	Prosentase peraturan daerah/perwal/kepwal yang harmonis	%	100,00	8,59	17,18	39,26	80,98
B 1 1 4 1 13	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada orang atau kelompok	Perkara Litigasi	20,00	20,00	20,00	60,00	60,00

Kode					Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	
					masyarakat miskin							
B	1	1	4	1	14	Persentase naskah kerjasama aktif yang ditindaklanjuti	%	67,16	65,00	65,00	100,00	85,00
B	1	1	4	1	15	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	%	100,00	18,75	37,50	60,00	80,00
B	1	1	4	1	16	Prosentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	%	100,00	100,00	28,39	100,00	97,25
B	1	1	4	1	17	Tingkat pengendalian kegiatan perangkat daerah tepat waktu	%	91,56	92,23	100,93	99,86	97,22
B	1	1	4	2	Sekretariat DPRD							
B	1	1	4	2	1	Persentase rapat-rapat DPRD tepat waktu dan sesuai rencana	%	N/A	95,00	95,00	90,00	100,00
B	1	1	4	2	2	Presentase kegiatan kehumasan dan publikasi terhadap kinerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	N/A	90,00	90,00	90,00	100,00
B	1	1	4	2	3	Presentase realisasi dukungan pembahasan peraturan daerah/non peraturan daerah sesuai rencana	%	N/A	70,00	70,00	70,00	100,00
B	1	1	4	2	4	Presentase dukungan pelaksanaan fungsi angaran DPRD sesuai rencana dan tepat waktu	%	N/A	90,00	90,00	90,00	100,00
B	1	1	4	2	5	Presentase dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sesuai rencana dan tepat waktu	%	N/A	90,00	90,00	90,00	100,00
B	1	1	4	2	6	Persentase aspirasi dan aduan masyarkat yang terfasilitasi dan tertindaklanjuti	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada unsur penunjang urusan pemerintahan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B						ASPEK PELAYANAN UMUM						
B	1	1	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
B	1	1	5	1		Perencanaan						
B	1	1	5	1	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	2	Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diverifikasi	%	68,89	70,25	71,65	100,00	100,00
B	1	1	5	1	3	Persentase indikator sasaran dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	4	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	5	Persentase keselarasan RKPD dengan renja OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	6	Persentase keselarasan Renstra dengan Renja OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	7	Persentase indikator sasaran dan program yang Tercapai oleh OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	2		Keuangan						
B	1	1	5	2	1	Tingkat penyelesaian berkas yang masuk sesuai standar (tepat waktu)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	2	2	Tingkat kenaikan potensi pendapatan daerah dari PBB dan BPHTB	%	10,00	11,97	33,49	60,07	76,06

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	1	1	5	2	3	Tingkat penyelesaian penetapan PBB dan BPHTB	%	15,00	15,64	33,13	53,96	78,20
B	1	1	5	2	4	Tingkat penyelesaian laporan Evaluasi Penerimaan PAD, keberatan dan pengendalian PBB dan BPHTB	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	2	5	Tingkat ketersediaan dokumen anggaran daerah	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	1	1	5	2	6	Tingkat ketersediaan dokumen penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	1	1	5	2	7	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan aset daerah	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	1	1	5	2	8	Tingkat pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B 1 1 5 3						Kepegawaian						
B	1	1	5	3	1	Persentase keterisian jabatan	%	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00
B	1	1	5	3	2	Persentase penempatan sesuai kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	3	3	Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	%	5,00	15,00	20,00	25,00	30,00
B	1	1	5	3	4	Persentase rata-rata Kehadiran kerja Pegawai	%	81,00	81,00	82,00	83,00	84,00
B	1	1	5	3	5	Nilai rata-rata SKP aparatur	Point	88,86	87,00	87,00	87,50	87,50
B 1 1 5 4						Pendidikan Dan Pelatihan						
B	1	1	5	4	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi aparatur sesuai jabatan	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B 1 1 5 5						Penelitian Dan Pengembangan						
B	1	1	5	5	1	Tingkat ketersediaan data base yang akurat untuk perencanaan pembangunan	%	71,56	79,00	80,00	81,00	82,00
B	1	1	5	5	2	Tingkat penelitian yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada unsur pengawasan urusan pemerintahan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B						ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1 1 6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
B 1 1 6 1						Inspektorat Daerah						
B	1	1	6	1	1	Tingkat pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP level 3 penuh	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 Penuh
B	1	1	6	1	2	Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3 (2,739)
B	1	1	6	1	1	Persentase OPD dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Minimal BB	%	53,49	83,72	88,37	100,00	100,00

2.3.7. Unsur Kewilayahan

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada unsur kewilayahan di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1 1 7	UNSUR KEWILAYAHAN						
B 1 1 7 1	Kecamatan						
B 1 1 7 1 1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 7 1 2	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 7 1 3	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 7 1 4	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 7 1 5	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada unsur pemerintahan umum di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B 1 1 8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
B 1 1 8 1	Kesatuan Bangsa Dan Politik						
B 1 1 8 1 1	Tingkat pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B 1 1 8 1 2	Tingkat pembinaan partai politik dalam pendidikan politik masyarakat	%	40,00	100,00	100,00	100,00	83,33
B 1 1 8 1 3	Tingkat pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	40,00	100,00	100,00	84,61	100,00
B 1 1 8 1 4	Tingkat pengawasan penyakit masyarakat (pekat)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	87,12
B 1 1 8 1 5	Tingkat pencegahan konflik melalui mediasi	%	100,00	10,45	22,12	100,00	100,00

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan, baik dengan kabupaten/kota lain, provinsi, nasional, ataupun internasional. Aspek daya saing daerah terdiri atas kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berikut ini diuraikan realisasi indikator pada aspek daya saing daerah di Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/ Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
C						ASPEK DAYA SAING DAERAH						
C	1					Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
C	1	1				Urusan Wajib						
C	1	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	1	1	2	3		Urusan Pangan						
C	1	1	2	3	1	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	Gram/kapita/hari	72,26	72,26	71,50	71,80	70,70
C	1	1	2	3	2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan	Gram/kapita/hari	133,60	56,70	85,90	57,33	57,65
C	1	1	2	3	3	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Kkal/kapita/hari	2.490,00	2.160,00	2.959,00	2.971,00	2.196,00
C	1	1	2	3	4	Tingkat stabilitas harga pangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	1	2	3	5	Tingkat cadangan pangan daerah	%	27,77	27,77	48,53	60,31	60,00
C	1	1	2	3	6	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/kapita/hari	2.311,60	2.291,40	2.305,40	2.254,20	2.230,80
C	1	1	2	3	7	Rasio rekomendasi SKPG dan FSVA yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	1	2	3	8	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan daerah	%	80,00	87,00	90,50	94,41	93,03
C	1	2				Urusan Pilihan						
C	1	2	0	3		Urusan Pertanian						
C	1	2	0	3	1	Produktivitas pertanian	Kwintal Per Ha	45,02	45,10	45,72	64,89	60,75
C	1	2	0	3	2	Persentase pendistribusian bibit ternak dan ikan	%	9,00	10,00	12,00	17,00	16,00
C	1	2	0	3	3	Angka prevalensi penyakit hewan	Point	0,73	1,00	1,00	0,00	0,00
C	1	2	0	6		Urusan Perdagangan						
C	1	2	0	6	1	Persentase jumlah pasar tradisional yang difasilitasi sarana distribusi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	2	Persentase jumlah pemantauan harga dan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/ Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						stok barang kebutuhan pokok dan penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan						
C	1	2	0	6	3	Persentase pelaku usaha yang terlibat dalam promosi dagang produk ekspor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	4	Persentase jumlah kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	5	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	%	68,22	96,30	96,30	96,29	97,76
C	1	2	0	6	6	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	7		Urusan Perindustrian						
C	1	2	0	7	1	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	%	N/A	0,00	0,00	3,35	3,35
C	1	2	0	7	2	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki sertifikasi	%	41,54	0,00	0,00	3,35	3,35
C	1	2	0	7	3	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100,00	3,35	3,35	3,35	3,35
C	2					Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
C	2	1				Urusan Wajib						
C	2	1	1			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	2	1	1	3		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
C	2	1	1	3	1	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	83,52	86,23	86,96	96,84	95,95
C	2	1	1	4		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
C	2	1	1	4	1	Persentase permukiman kumuh	%	0,16	0,12	0,12	0,12	0,07
C	2	1	1	4	2	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	4	3	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,63	99,73	99,79	99,79	99,80
C	2	1	1	5		Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
C	2	1	1	5	1	Tingkat penyelesaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/ Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						pelanggaran ketertiban umum						
C	2	1	1	5	2	Tingkat pembinaan kewaspadaan dini masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	3	Tingkat pembinaan satlinmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	4	Tingkat penyelesaian penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	5	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
C	2	1	1	5	6	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	7	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	8	Tingkat ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	9	Rata-rata waktu tanggap penanganan bencana kebakaran di daerah layanan WMK	Menit	15,00	14,91	14,10	12,99	14,65
C	2	1	1	5	10	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	11	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana non kebakaran (banjir)	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	2			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	2	1	2	5		Urusan Lingkungan Hidup						
C	2	1	2	5	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	54,10	60,32	57,33	62,15	62,80
C	2	1	2	5	2	Tingkat pengelolaan sampah	%	91,00	100,00	99,22	100,00	100,00
C	2	1	2	9		Urusan Perhubungan						
C	2	1	2	9	1	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	20,00	21,00	22,00	23,91	24,33
C	3					Fokus Iklim Berinvestasi						
C	3	1				Urusan Wajib						
C	3	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	3	1	2	12		Penanaman Modal						
C	3	1	2	12	1	Tingkat pertumbuhan investasi daerah	%	5,00	17,38	4,77	51,26	-13,06
C	3	1	2	12	2	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	6,79	7,97	8,35	12,63	10,98

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/ Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
C	4					Fokus Sumber Daya Manusia						
C	4	1				Urusan Wajib						
C	4	1	1			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	4	1	2			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
C	4	1	2	16		Urusan Kebudayaan						
C	4	1	12	16	1	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.4.1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan unit pemerintah daerah yang secara badan hukum berada di luar unsur pemerintah daerah. Hal ini karena BUMD merupakan unsur kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga pengelolaan keuangannya di luar APBD Kota Tangerang. BUMD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang dan Perseroan Terbatas (PT) Tangerang Nusantara Global.

a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng

PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang merupakan user dalam pengelolaan air minum di Kota Tangerang yang mana pada awalnya didirikannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Nomor 30 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Adapun dalam perjalanannya dasar hukum PDAM Tirta benteng Kota Tangerang mengalami perubahan yaitu Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Perusahaan

Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.

Tugas dari PDAM itu sendiri yaitu menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, pelayanan umum serta melaksanakan kebijakan umum yang digariskan oleh walikota Tangerang.

Fungsi dari PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang meliputi :

- Pelayanan umum dan jasa.
- Penyelenggara kepentingan umum.
- Peningkatan pendapatan daerah.

b. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang

Pasar tradisional merupakan infrastruktur ekonomi daerah yang menjadi pusat kegiatan distribusi dan pemasaran. Keberadaan pasar tradisional kian menurun dengan berkembangnya perpasaran swasta modern khususnya diperkotaan, serbuan pasar modern/hypermarket dengan dukungan kekuatan modal besar yang membuat semakin terpuruknya pasar tradisional. Image pasar tradisional terkesan becek, kotor, kurang nyaman serta fasilitas minim seperti parkir, toilet dan lain-lain.

Dengan berjalannya waktu keinginan mengembangkan pasar terus bergulir untuk memenuhi tuntutan konsumen pasar yang terus berubah maka pasar yang dibutuhkan adalah pasar yang memberikan kenyamanan dan pelayanan prima serta kepuasan pelanggan yang menjadi target utama. Walaupun demikian pasar tradisional adalah pasar yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat.

Seiring dengan perkembangan Kota Tangerang maka Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2003 membentuk Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 dan mulai beroperasi pada awal Januari 2004. Pasar-pasar tradisional milik Pemerintah Daerah Kota Tangerang sebagai aset yang dipisahkan dan diserahkan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang untuk dikelola.

PD Pasar Kota Tangerang mempunyai Visi :

“Menjadikan Perusahaan Daerah Pasar sebagai bagian penggerak perekonomian Kota Tangerang dengan membangun dan mengembangkan pasar yang representatif”.

Misi dari PD Pasar Kota Tangerang adalah :

- Meningkatkan manajemen kinerja perusahaan melalui pengembangan kapasitas manajemen profesionalisme pegawai.
- Memberikan pelayanan yang unggul dalam pengelolaan pasar tradisional yang sehat, bersih, aman nyaman dan kompetitif untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah, masyarakat dan lingkungan.
- Rehabilitasi/peremajaan pasar-pasar melalui APBD atau dengan pihak swasta.
- Penataan/Pembinaan PKL sebagai bagian dari penataan kota secara keseluruhan.
- Membangun dan atau bekerjasama dalam pengembangan pasar – pasar lingkungan yang lebih menyebar untuk keperluan :
 - o Mengurangi mobilitas penduduk dalam kaitannya dengan kemacetan lalu lintas.
 - o Membuka lapangan pekerjaan/wiraswasta.
 - o Memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - o Pemerataan ekonomi lingkungan.
- Meningkatkan pendapatan usaha, laba bersih dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tugas Pokok PD Pasar Kota Tangerang adalah mengupayakan peningkatan mutu pelayanan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di bidang perpasaran melalui kegiatan-kegiatan serta usaha-usaha perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pemanfaatan nilai sosial-ekonomi pasar.

Adapun Fungsi PD Pasar Kota Tangerang adalah :

- Pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran di daerah.
- Perencanaan dalam rangka pengembangan dan atau pembangunan pasar.
- Pemeliharaan dan pengawasan terhadap pasar.
- Pengelolaan terhadap biaya jasa pengelolaan yang berkenaan dengan pasar.
- Pelaksanaan pembinaan terhadap para pedagang, pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar.
- Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi barang di pasar.

c. PT. Tangerang Nusantara Global (PT. TNG)

PT. Tangerang Nusantara Global dibentuk pada tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun

2016, Undang-undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. PT. Tangerang Nusantara Global menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG), tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sangat diperlukan agar Perseroan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Dalam perkembangan persaingan bisnis yang sangat ketat dewasa ini, PT. Tangerang Nusantara Global (Persero) yang selanjutnya disebut “PT TNG” atau “Perseroan”, suatu Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Akta Pendirian No. 03 yang dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, SH, yang mana telah diberitakan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam surat tanggal 18 Maret 2002 membutuhkan suatu perangkat yang dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan dalam melaksanakan usahanya. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsekuen diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham pada khususnya dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yang pada umumnya.

Visi PT. TNG adalah :

“Menjadikan BUMD yang Profesional, Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Integritas”.

Adapun Misi PT. TNG adalah :

- Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.
- Membentuk unit-unit bisnis sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah yang maksimal sesuai dengan tujuan dan target perusahaan.
- Melaksanakan kerja secara professional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).
- Menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

PT. TNG memiliki motto “Kami Ada Untuk Anda (*We are Here for You*)”, sebagai landasan Perseroan untuk memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dengan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tangerang yang merupakan landasan untuk mencapai visi dan misi PT TNG. Perseroan juga menyadari akan pentingnya penerapan etika perilaku usaha dalam pengelolaan Perseroan yang diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan Tata Nilai Perseroan (Corporate Values) yang baik.

2.4.2. Kerja Sama Daerah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

1. Daerah lain baik dalam kategori kerja sama wajib dan kerja sama sukarela;
2. pihak ketiga; dan/atau
3. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kerja Sama Antar Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, pengertian kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

2. Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, yang dimaksud dengan Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

2.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah

Berikut ini diuraikan mengenai capaian (realisasi) indikator kinerja daerah (IKD) pembangunan daerah menurut aspek, fokus dan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018-2022.

Tabel 2.31. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Menurut Aspek, Fokus dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2022

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
A						ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A	1					Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
A	1	3				Penunjang Urusan Pemerintahan						
A	1	3	0	0	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	77,92	78,43	78,25	78,50	78,90
A	1	3	0	0	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,95	4,05	-7,36	3,90	5,98
A	1	3	0	0	3	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) (Persentase Penduduk yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan)	%	4,76	4,43	5,22	5,93	5,77
A	1	3	0	0	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	82,54	82,62	84,25	84,84	85,35
A	1	3	0	0	5	Indeks Daya Beli (IDB)	Point	81,37	82,24	81,46	81,65	82,34
A	1	3	0	0	6	Pengeluaran per Kapita Setahun yang Disesuaikan (PPP/DB)	Rp. Ribu	14.443	14.860	14.484	14.575	14.909
A	1	3	0	0	7	Laju Inflasi	%	3,46	4,30	1,18	1,81	4,56
A	1	3	0	0	8	Indeks gini Indeks gini (gini rasio)	Point	0,330	0,328	0,339	0,343	0,343*
A	2					Fokus Kesejahteraan Sosial						
A	2	1				Urusan Wajib						
A	2	1	1			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
A	2	1	1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
A	1	1	1	1	1	Indeks Pengetahuan (Indeks Pendidikan) (IP)	Point	73,45	73,94	74,11	74,63	74,69
A	1	1	1	1	2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,83	13,84	13,85	13,87	13,88
A	1	1	1	1	3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,51	10,65	10,69	10,83	10,84
A	1	1	1	1	4	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,48	98,46	97,51	97,91	97,92
A	1	1	1	1	5	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98,97	98,99	87,23	99,00	99,10
A	2	1	1	2		Urusan Pemerintahan Bidang						

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						Kesehatan						
A	2	1	1	2	1	Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup)	Point	79,15	79,34	79,38	79,38	79,86
A	2	1	1	2	2	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	71,45	71,57	71,60	71,60	71,91
A	2	1	1	2	3	Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	1,25	1,15	1,14	1,03	1,09
A	2	1	1	2	4	Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	15,31	15,66	12,92	15,47	12,34
A	2	1	1	2	5	Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	N/A	223,00	186,22	171,14	183,94
A	2	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
A	2	1	2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
A	2	1	2	1	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,41	7,13	8,63	9,07	7,16
B						ASPEK PELAYANAN UMUM						
B	1					Fokus Urusan Wajib						
B	1	1				Urusan Wajib						
B	1	1	1			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B	1	1	1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
B	1	1	1	1	1	Tingkat ketersediaan daya tampung SD	%	82,11	87,62	87,92	100,00	100,00
B	1	1	1	1	2	Persentase SD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	85,32	98,96	98,96	98,65	98,87
B	1	1	1	1	3	Tingkat layanan terhadap siswa miskin SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	1	1	1	1	4	Persentase pengembangan minat bakat siswa SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	5	Tingkat ketersediaan daya tampung SMP	%	84,29	92,19	96,68	100,00	100,00
B	1	1	1	1	6	Persentase SMP yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	75,38	98,47	98,47	99,50	98,48
B	1	1	1	1	7	Tingkat layanan terhadap siswa miskin SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	8	Persentase pengembangan minat bakat Siswa SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	9	Persentase jumlah warga negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100,00	86,79	58,97	100,00	100,00
B	1	1	1	1	10	Tingkat ketersediaan daya tampung PAUD	%	67,26	72,42	82,05	100,00	100,00
B	1	1	1	1	11	Persentase PAUD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	71,08	89,15	89,15	88,94	83,73
B	1	1	1	1	12	Persentase pengembangan minat bakat siswa PAUD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	13	Persentase jumlah warga negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	14	Persentase pendidikan non formal yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	15	Persentase lulusan Paket A, B dan C	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	16	Persentase guru bersertifikat	%	70,66	97,50	97,50	91,73	82,48
B	1	1	1	1	17	Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1/D4	%	87,01	89,39	90,88	91,29	91,42
B	1	1	1	1	18	Tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2		Urusan Pemerintahan Bidang						

Kode						Aspek/Fokus/Urutan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						Kesehatan						
B	1	1	1	2	1	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	2	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,49	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	3	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	104,39	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	4	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,40	100,00	94,04	98,04	100,00
B	1	1	1	2	5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,45	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	6	Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86,46	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	7	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	8	Cakupan pembinaan lingkungan sehat	%	88,96	89,95	56,45	100,00	89,00
B	1	1	1	2	9	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	10	Persentase orang dengan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	11	Persentase kasus berpotensi KLB yang ditangani	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	12	Persentase jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	13	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	14	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	15	Persentase orang dengan gangguan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urutan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
B	1	1	1	2	16	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar	%	67,78	83,33	75,71	80,00	85,33
B	1	1	1	2	17	Cakupan masyarakat yang mendapat kunjungan rumah oleh petugas kesehatan sesuai standar	%	30,00	50,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar	%	45,00	87,50	50,00	55,00	62,50
B	1	1	1	2	19	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan alat laboratorium puskesmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	20	Cakupan penduduk Kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	%	94,00	101,56	92,33	95,00	94,99
B	1	1	1	2	21	Cakupan pembinaan kesehatan kerja dan olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	22	Persentase pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	%	N/A	85,29	89,47	90,00	90,91
B	1	1	1	2	23	Persentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensinya	%	32,11	99,20	21,38	79,82	83,91
B	1	1	1	2	24	Persentase IRTP yang memenuhi syarat (Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan)	%	N/A	96,67	80,83	95,00	63,30
B	1	1	1	2	25	Persentase fasilitas kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) dan alat kesehatan (Toko Alat Kesehatan dan Optikal) yang memenuhi syarat	%	67,78	70,00	72,00	75,00	80,00
B	1	1	1	2	26	Cakupan posyandu aktif	%	100,00	100,00	98,07	100,00	100,00
B	1	1	1	2	27	Cakupan rumah tangga ber PHBS	%	47,06	60,61	68,29	69,00	72,00
B	1	1	1	2	28	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana RS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	29	Cakupan pelayanan medik RS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	30	Cakupan pelayanan keperawatan RS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	1	1	1	2	31	Presentase ketersediaan SIRS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	32	Cakupan ketersediaan sarana prasarana penunjang RS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	33	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pelayanan medik RS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	34	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
B	1	1	1	3	1	Persentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang ditindaklanjuti	%	57,14	57,14	57,14	96,43	82,14
B	1	1	1	3	2	Persentase sumber daya air yang dipelihara	%	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
B	1	1	1	3	3	Persentase luas banjir yang tertangani	%	19,87	19,87	30,42	48,44	95,87
B	1	1	1	3	4	Persentase sarana prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	%	66,06	66,06	71,33	75,00	87,50
B	1	1	1	3	5	Persentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase yang ditindaklanjuti	%	57,14	57,14	57,14	0,00	87,50
B	1	1	1	3	6	Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dipelihara	%	50,00	50,00	53,00	56,00	59,00
B	1	1	1	3	7	Persentase luas genangan yang tertangani	%	19,87	19,87	30,42	34,43	68,44
B	1	1	1	3	8	Persentase sarana prasarana drainase dalam kondisi baik	%	66,06	66,06	71,33	75,00	85,00
B	1	1	1	3	9	Persentase dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang ditindak lanjuti	%	45,16	45,16	58,06	96,77	90,32
B	1	1	1	3	10	Persentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat	%	25,81	25,81	29,03	67,74	83,87
B	1	1	1	3	11	Persentase panjang jalan yang dipelihara	%	82,07	83,57	85,07	89,69	88,07

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	1	1	1	3	12	Persentase jembatan yang dipelihara	%	84,97	87,76	90,56	98,95	96,15
B	1	1	1	3	13	Tingkat ketersediaan jalan	%	98,23	98,37	98,42	98,70	67,50
B	1	1	1	3	14	Tingkat ketersediaan jembatan	%	97,94	98,28	98,63	100,00	99,31
B	1	1	1	3	15	Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
B	1	1	1	3	16	Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	17	Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	18	Cakupan layanan air minum perpipaan	%	22,16	24,00	24,91	24,63	26,72
B	1	1	1	3	19	Tingkat kualitas air minum memenuhi baku mutu yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	20	Cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik	%	99,00	99,79	99,79	99,79	99,80
B	1	1	1	3	21	Tingkat kualitas air limbah domestik memenuhi baku mutu yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	22	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	23	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	24	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	25	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/ bangunan sarana dan prasarana pemerintah dan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	26	Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	100,00	17,50	35,73	59,35	40,00
B	1	1	1	4		Urusan Pemerintahan Bidang						

Kode						Aspek/Fokus/Urutan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						Perumahan Dan Kawasan Permukiman						
B	1	1	1	4	1	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
B	1	1	1	4	2	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
B	1	1	1	4	3	Persentase bangunan yang memiliki kesesuaian dengan perijinan	%	100,00	129,73	129,73	56,01	56,01
B	1	1	1	4	4	Persentase rumah tidak layak huni	%	0,73	0,29	0,37	0,29	0,29
B	1	1	1	4	5	Persentase perumahan yang memiliki PSU	%	90,32	96,77	96,77	97,00	97,00
B	1	1	1	5		Urutan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
B	1	1	1	5	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	2	Tingkat pembinaan kewaspadaan dini masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	3	Tingkat pembinaan satlinmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	4	Tingkat penyelesaian penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	5	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
B	1	1	1	5	6	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	7	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	1	1	1	5	8	Tingkat ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	9	Rata-rata waktu tanggap penanganan bencana kebakaran di daerah layanan WMK	Menit	15,00	14,91	14,10	12,99	14,65
B	1	1	1	5	10	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	11	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana non kebakaran (banjir)	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
B	1	1	1	6	1	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6	2	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	67,37	102,43	70,39	71,90	71,46
B	1	1	1	6	3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (yang terpenuhi kebutuhan dasarnya)	%	14,25	15,65	17,05	18,45	15,72
B	1	1	1	6	4	Persentase pelayanan perlindungan sosial	%	100,00	108,64	77,60	100,00	99,02
B	1	1	1	6	5	Persentase pelayanan jaminan sosial	%	100,00	102,05	100,00	100,00	99,02
B	1	1	1	6	6	Persentase jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persentase korban	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota)						
B	1	1	1	6	7	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
B	2	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B	2	1	2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
B	2	1	2	7	1	Tingkat ketersediaan perencanaan tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	7	2	Prosentase tenaga kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	%	50,00	51,25	53,13	51,43	50,00
B	2	1	2	7	3	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	76,00	78,13	80,00	85,91	80,94
B	2	1	2	7	4	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	58,33	59,06	83,62	71,75	63,78
B	2	1	2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
B	2	1	2	8	1	Tingkat partisipasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemberdayaan perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	8	2	Cakupan perempuan yang meningkat kualitas hidup (Cakupan Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan)	%	17,35	20,00	40,00	60,00	80,00
B	2	1	2	8	3	Persentase organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan (Cakupan kelembagaan pemberdayaan perempuan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	8	4	Persentase kekerasan (KDRT) terhadap perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	2	1	2	8	5	Capaian indikator kota layak anak (KLA)	%	73,15	75,00	77,50	80,00	82,50
B	2	1	2	8	6	Persentase kekerasan (KDRT) terhadap anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						
B	2	1	2	9	1	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	Gram/ kapita/ hari	72,26	72,26	71,50	71,80	70,70
B	2	1	2	9	2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan	Gram/ kapita/ hari	133,60	56,70	85,90	57,33	57,65
B	2	1	2	9	3	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Kkal/ kapita/ hari	2.490,00	2.160,00	2.959,00	2.971,00	2.196,00
B	2	1	2	9	4	Tingkat stabilitas Harga Pangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	9	5	Tingkat cadangan pangan daerah	%	27,77	27,77	48,53	60,31	60,00
B	2	1	2	9	6	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/ kapita/ hari	2.311,60	2.291,40	2.305,40	2.254,20	2.230,80
B	2	1	2	9	7	Rasio rekomendasi SKPG dan FSVA yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	9	8	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan daerah	%	80,00	87,00	90,50	94,41	93,03
B	2	1	2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan						
B	2	1	2	10	1	Rasio tanah milik pemda bersertifikat	%	10,00	11,11	21,05	24,87	40,61
B	2	1	2	10	2	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	10	3	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	10	4	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	10	5	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urutan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	2	1	2	10	6	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan	%	5,76	32,93	34,18	66,63	85,71
B	2	1	2	10	7	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dan drainase	%	5,76	32,93	34,18	89,95	2,60
B	2	1	2	10	8	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas lingkungan	%	0,00	1,14	0,00	7,18	45,51
B	2	1	2	11		Urutan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
B	2	1	2	11	1	Tingkat pelaksanaan evaluasi dokumen lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	11	2	Persentase titik pantau udara, kebisingan, air sungai, air situ dan air tanah yang sesuai baku mutu	%	N/A	64,80	35,68	100,00	57,80
B	2	1	2	11	3	Tingkat penurunan emisi gas karbon	%	20,00	20,00	20,10	99,50	20,29
B	2	1	2	11	4	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang dikembangkan	%		4,13	4,13	4,14	4,19
B	2	1	2	11	5	Tingkat pengelolaan limbah B3	%	70,00	70,00	75,00	85,00	89,97
B	2	1	2	11	6	Persentase badan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	11	7	Persentase sekolah adhywiyata	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	11	8	Persentase RW yang dibina menjadi kampung iklim	%	N/A	10,00	15,00	23,00	25,00
B	2	1	2	11	9	Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	11	10	Persentase volume sampah yang tertangani	%	76,00	84,00	90,19	81,67	78,00
B	2	1	2	11	11	Persentase volume sampah yang berkurang melalui mekanisme 3R	%	15,00	16,00	9,03	18,33	22,00
B	2	1	2	11	12	Peningkatan luas taman untuk RTH	%	100,00	98,01	98,48	98,96	99,53

Kode						Aspek/Fokus/Urutan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						dan ruang terbuka non hijau publik yang tersedia						
B	2	1	2	11	13	Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya	%	107,96	88,73	91,55	94,36	97,18
B	2	1	2	12		Urutan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
B	2	1	2	12	1	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang terverifikasi sesuai standar	%	99,33	99,83	99,84	99,85	99,86
B	2	1	2	12	2	Persentase peningkatan pengajuan permohonan dokumen administrasi kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	12	3	Persentase dokumen pencatatan sipil yang terverifikasi sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	12	4	Persentase peningkatan pengajuan permohonan dokumen pencatatan sipil	%	100,00	89,50	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	12	5	Cakupan layanan SIAK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	12	6	Cakupan database kependudukan yang akurat dan valid	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	12	7	Tingkat pemanfaatan data kependudukan	%	N/A	0,00	19,51	21,00	31,00
B	2	1	2	13		Urutan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						
B	2	1	2	13	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	14		Urutan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
B	2	1	2	14	1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	14	2	Persentase kelompok masyarakat (RW) yang berperan aktif dalam program pengendalian penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	14	3	Persentase peserta KB aktif	%	77,12	77,17	77,21	77,26	77,30

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	2	1	2	14	4	Cakupan keluarga sakinah mawadah warahmah (samawa)	%	N/A	N/A	22,76	45,52	8,00
B	2	1	2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
B	2	1	2	15	1	Persentase hasil kajian, analisa dan evaluasi pengembangan sistem transportasi	%	100,00	17,24	37,93	58,62	79,31
B	2	1	2	15	2	Jumlah titik kemcetan yang tertangani	Titik	26,00	5,00	10,00	15,00	20,00
B	2	1	2	15	3	Jumlah beroperasinya koridor/trayek angkutan umum sistem transit	Koridor	2,00	3,00	8,00	12,00	13,00
B	2	1	2	15	4	Prosentase PJU keselamatan jalan dalam kondisi baik	%	100,00	11,67	27,66	47,85	72,00
B	2	1	2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika						
B	2	1	2	16	1	Persentase pengembangan diseminasi informasi dan komunikasi publik	%	20,00	24,65	96,67	60,00	80,00
B	2	1	2	16	2	Presentase konten saluran media informasi sesuai kebutuhan	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	2	1	2	16	3	Presentase informasi yang terpublikasi	%	20,00	20,00	40,00	60,20	80,29
B	2	1	2	16	4	Presentase kecamatan yang memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM) yang aktif	%	0,00	7,69	23,08	38,46	53,84
B	2	1	2	16	5	Presentase penyelenggaraan pelayanan informasi	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
B	2	1	2	16	6	Persentase pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	%	20,00	24,65	96,67	97,03	98,83
B	2	1	2	16	7	Persentase pengembangan, integrasi aplikasi layanan publik	%	20,00	28,00	56,00	66,00	71,00
B	2	1	2	16	8	Presentase peningkatan pemahaman TIK	%	0,00	19,58	33,65	53,22	70,04
B	2	1	2	16	9	Persentase pengembangan, integrasi dan layanan eGovernment	%	20,00	19,92	39,45	59,76	79,68
B	2	1	2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah						
B	2	1	2	17	1	Presentase koperasi yang patuh	%	100,00	29,28	33,56	38,59	50,33

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						terhadap peraturan terhadap total jumlah koperasi aktif						
B	2	1	2	17	1	Presentase koperasi yang sehat terhadap total jumlah koperasi aktif	%	100,00	6,71	10,07	16,77	33,55
B	2	1	2	17	2	Presentase koperasi yang melakukan RAT terhadap total jumlah koperasi aktif	%	100,00	36,91	43,62	50,34	60,40
B	2	1	2	17	3	Presentase koperasi yang dibina kapasitas dan kompetensi SDMnya terhadap total jumlah koperasi aktif	%	34,22	45,06	55,90	62,60	74,21
B	2	1	2	17	4	Pertambahan jumlah usaha mikro	%		7,90	15,80	5,00	5,00
B	2	1	2	17	5	Presentase jumlah usaha mikro yang meningkat daya saingnya (berdaya saing)	%		7,90	15,80	3,00	3,00
B	2	1	2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						
B	2	1	2	18	1	Tingkat pelaksanaan kebijakan daerah mengenai perizinan dan penanaman modal	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
B	2	1	2	18	2	Presentase promosi yang menarik investor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	18	3	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pelayanan penanaman modal	%	94,30	94,34	95,24	100,00	100,00
B	2	1	2	18	4	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pemerintahan dan kesra	%	94,85	94,34	95,85	100,00	100,00
B	2	1	2	18	5	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pembangunan	%	94,30	94,34	95,24	100,00	100,00
B	2	1	2	18	6	Tingkat penyelesaian pengaduan perijinan dan penanaman modal dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	18	7	Tingkat pengendalian pelaporan penanaman modal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	18	8	Tingkat pemanfaatan sistem terhadap pelayanan perizinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	19		Urusan Pemerintahan Bidang						

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						Kepemudaan Dan Olahraga						
B	2	1	2	19	1	Prosentase SDM kepemudaan yang berprestasi	%	100,00	20,00	40,00	90,55	95,00
B	2	1	2	19	2	Persentase jumlah wirausaha muda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	19	3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan	%	66,70	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	19	4	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	atlet	560,00	150,00	350,00	14,00	675,00
B	2	1	2	19	5	Prosentase SDM keolahragaan yang berkompeten	%	100,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	2	1	2	19	6	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	%	100,00	90,63	90,63	93,75	96,88
B	2	1	2	19	7	Prosentase SDM pramuka yang berprestasi	%	100,00	100,00	100,00	90,00	95,00
B	2	1	2	19	8	Tingkat ketersediaan fasilitasi kegiatan kepramukaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	19	9	Tingkat keterlibatan kepramukaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
B	2	1	2	20	1	Persentase layanan statistik daerah dan sektoral	%	18,00	18,92	37,84	56,76	75,67
B	2	1	2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
B	2	1	2	21	1	Persentase pengelolaan keamanan informasi dan persandian	%	14,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	2	1	2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
B	2	1	2	22	1	Cakupan kajian seni dan budaya	%	100,00	42,86	57,14	71,43	85,71
B	2	1	2	22	2	Cakupan fasilitasi seni dan budaya	%	100,00	33,33	50,00	66,67	83,33
B	2	1	2	22	3	Cakupan pembinaan sejarah	%	N/A	N/A	N/A	25,00	50,00
B	2	1	2	22	4	Cakupan perlindungan seni dan budaya	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	2	1	2	22	5	Tingkat pengelolaan museum	%	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00
B	2	1	2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	2	1	2	23	1	Cakupan pelayanan perpustakaan kecamatan sesuai standar nasional dari aspek layanan	%	N/A	7,69	38,46	53,85	76,92
B	2	1	2	23	2	Persentase perpustakaan kecamatan yang mengaplikasikan pelayanan otomasi	%	N/A	7,69	38,46	30,77	69,23
B	2	1	2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
B	2	1	2	24	1	Tingkat arsip yang memiliki nilai guna	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	2	1	2	24	2	Tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	2	1	2	24	3	Persentase digitalisasi arsip	%	N/A	20,00	40,00	60,00	40,00
B	1	1	3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
B	1	1	3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan						
B	1	1	3	25	1	Produktivitas perikanan	Kg/m2	5,77	5,81	5,85	8,00	6,25
B	1	1	3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
B	1	1	3	26	1	Tingkat perkembangan objek wisata daerah	%	100,00	10,00	20,00	30,00	60,00
B	1	1	3	26	2	Persentase wisatawan yang datang karena promosi	%	11,58	25,03	25,03	25,64	16,38
B	1	1	3	26	3	Tingkat kepatuhan usaha jasa pariwisata terhadap peraturan kepariwisataan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
B	1	1	3	27	1	Produktivitas pertanian	Kwintal Per Ha	45,02	45,10	45,72	64,89	60,75
B	1	1	3	27	2	Persentase pendistribusian bibit ternak dan ikan	%	9,00	10,00	12,00	17,00	16,00
B	1	1	3	27	3	Angka prevalensi penyakit hewan	Point	0,73	1,00	1,00	1,00	0,00
B	1	1	3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
B	1	1	3	30	1	Persentase jumlah pasar tradisional	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						yang difasilitasi sarana distribusi perdagangan						
B	1	1	3	30	2	Persentase jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	30	3	Persentase pelaku usaha yang terlibat dalam promosi dagang produk ekspor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	30	4	Persentase jumlah kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	30	5	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	%	68,22	96,30	96,30	96,29	97,76
B	1	1	3	30	6	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
B	1	1	3	31	1	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	%	N/A	0,00	0,00	3,35	3,35
B	1	1	3	31	2	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki sertifikasi	%	41,54	0,00	0,00	3,35	3,35
B	1	1	3	31	3	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100,00	3,35	3,35	3,35	3,35
B	1	1	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
B	1	1	4	1		Sekretariat Daerah						
B	1	1	4	1	1	Prosentase OPD dengan struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi	%	100,00	90,70	97,56	100,00	100,00
B	1	1	4	1	2	Prosentase OPD yang memiliki peta proses bisnis yang lengkap dan sesuai aturan	%	0,00	0,00	2,44	50,00	100,00
B	1	1	4	1	3	Prosentase OPD yang memiliki SOP yang baik	%	23,26	46,51	73,17	87,50	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	1	1	4	1	4	Prosentase OPD/UPT dengan pelayanan publik kategori baik	%	85,07	88,06	91,04	100,00	97,01
B	1	1	4	1	5	Prosentase pemberitaan yang terpublikasi	%	19,94	32,97	65,94	98,65	87,67
B	1	1	4	1	6	Prosentase pembinaan anggota Korpri	%	100,00	82,69	90,38	100,00	0,00
B	1	1	4	1	7	Tingkat kepuasan kepala daerah/wakil kepala daerah/sekretaris daerah terhadap kegiatan humas	Kategori	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
B	1	1	4	1	8	Prosentase kecamatan dan kelurahan dengan nilai IKM kategori baik	%	100,00	93,16	93,16	100,00	97,44
B	1	1	4	1	9	Prosentase SDM keagamaan yang dibina	%	100,00	22,73	39,39	57,57	80,26
B	1	1	4	1	10	Prosentase organisasi keagamaan yang dibina	%	100,00	25,00	31,25	40,63	81,25
B	1	1	4	1	11	Prosentase organisasi sosial budaya keagamaan yang dibina	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
B	1	1	4	1	12	Prosentase peraturan daerah/perwal/kepwal yang harmonis	%	100,00	8,59	17,18	39,26	80,98
B	1	1	4	1	13	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin	Perkara Litigasi	20,00	20,00	20,00	60,00	60,00
B	1	1	4	1	14	Persentase naskah kerjasama aktif yang ditindaklanjuti	%	67,16	65,00	65,00	100,00	85,00
B	1	1	4	1	15	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	%	100,00	18,75	37,50	60,00	80,00
B	1	1	4	1	16	Prosentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	%	100,00	100,00	28,39	100,00	97,25
B	1	1	4	1	17	Tingkat pengendalian kegiatan perangkat daerah tepat waktu	%	91,56	92,23	100,93	99,86	97,22
B	1	1	4	2		Sekretariat DPRD						
B	1	1	4	2	1	Persentase rapat-rapat DPRD tepat waktu dan sesuai rencana	%	N/A	95,00	95,00	90,00	100,00
B	1	1	4	2	2	Presentase kegiatan kehumasan dan	%	N/A	90,00	90,00	90,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urutan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						publikasi terhadap kinerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah						
B	1	1	4	2	3	Presentase realisasi dukungan pembahasan peraturan daerah/non peraturan daerah sesuai rencana	%	N/A	70,00	70,00	70,00	100,00
B	1	1	4	2	4	Presentase dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sesuai rencana dan tepat waktu	%	N/A	90,00	90,00	90,00	100,00
B	1	1	4	2	5	Presentase dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sesuai rencana dan tepat waktu	%	N/A	90,00	90,00	90,00	100,00
B	1	1	4	2	6	Persentase aspirasi dan aduan masyarakat yang terfasilitasi dan tertindaklanjuti	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
B	1	1	5	1		Perencanaan						
B	1	1	5	1	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	2	Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diverifikasi	%	68,89	70,25	71,65	100,00	100,00
B	1	1	5	1	3	Persentase indikator sasaran dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	4	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	5	Persentase keselarasan RKPD dengan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						renja OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup						
B	1	1	5	1	6	Persentase keselarasan Renstra dengan Renja OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	7	Persentase indikator sasaran dan program yang Tercapai oleh OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	2		Keuangan						
B	1	1	5	2	1	Tingkat penyelesaian berkas yang masuk sesuai standar (tepat waktu)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	2	2	Tingkat kenaikan potensi pendapatan daerah dari PBB dan BPHTB	%	10,00	11,97	33,49	60,07	76,06
B	1	1	5	2	3	Tingkat penyelesaian penetapan PBB dan BPHTB	%	15,00	15,64	33,13	53,96	78,20
B	1	1	5	2	4	Tingkat penyelesaian laporan Evaluasi Penerimaan PAD, keberatan dan pengendalian PBB dan BPHTB	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urutan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
B	1	1	5	2	5	Tingkat ketersediaan dokumen anggaran daerah	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	1	1	5	2	6	Tingkat ketersediaan dokumen penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	1	1	5	2	7	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan aset daerah	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	1	1	5	2	8	Tingkat pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	1	1	5	3		Kepegawaian						
B	1	1	5	3	1	Persentase keterisian jabatan	%	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00
B	1	1	5	3	2	Persentase penempatan sesuai kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	3	3	Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	%	5,00	15,00	20,00	25,00	30,00
B	1	1	5	3	4	Persentase rata-rata Kehadiran kerja Pegawai	%	81,00	81,00	82,00	83,00	84,00
B	1	1	5	3	5	Nilai rata-rata SKP aparatur	Point	88,86	87,00	87,00	87,50	87,50
B	1	1	5	4		Pendidikan Dan Pelatihan						
B	1	1	5	4	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi aparatur sesuai jabatan	%	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
B	1	1	5	5		Penelitian Dan Pengembangan						
B	1	1	5	5	1	Tingkat ketersediaan data base yang akurat untuk perencanaan pembangunan	%	71,56	79,00	80,00	81,00	82,00
B	1	1	5	5	2	Tingkat penelitian yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
B	1	1	6	1		Inspektorat Daerah						
B	1	1	6	1	1	Tingkat pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP level 3 penuh	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 Penuh
B	1	1	6	1	2	Tingkat Pemenuhan Infrastruktur	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3 (2,739)

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						Maturitas SPIP						
B	1	1	6	1	1	Persentase OPD dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Minimal BB	%	53,49	83,72	88,37	100,00	100,00
B	1	1	7			UNSUR KEWILAYAHAN						
B	1	1	7	1		Kecamatan						
B	1	1	7	1	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	7	1	2	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	7	1	3	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	7	1	4	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	7	1	5	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
B	1	1	8	1		Kesatuan Bangsa Dan Politik						
B	1	1	8	1	1	Tingkat pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	8	1	2	Tingkat pembinaan partai politik dalam pendidikan politik masyarakat	%	40,00	100,00	100,00	100,00	83,33
B	1	1	8	1	3	Tingkat pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	40,00	100,00	100,00	84,61	100,00
B	1	1	8	1	4	Tingkat pengawasan penyakit masyarakat (pekat)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	87,12
B	1	1	8	1	5	Tingkat pencegahan konflik melalui mediasi	%	100,00	10,45	22,12	100,00	100,00
C						ASPEK DAYA SAING DAERAH						
C	1					Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
C	1	1				Urusan Wajib						
C	1	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	1	1	2	3		Urusan Pangan						

Kode						Aspek/Fokus/Urutan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
C	1	1	2	3	1	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	Gram/ kapita/ hari	72,26	72,26	71,50	71,80	70,70
C	1	1	2	3	2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan	Gram/ kapita/ hari	133,60	56,70	85,90	57,33	57,65
C	1	1	2	3	3	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Kkal/ kapita/ hari	2.490,00	2.160,00	2.959,00	2.971,00	2.196,00
C	1	1	2	3	4	Tingkat stabilitas harga pangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	1	2	3	5	Tingkat cadangan pangan daerah	%	27,77	27,77	48,53	60,31	60,00
C	1	1	2	3	6	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/ kapita/ hari	2.311,60	2.291,40	2.305,40	2.254,20	2.230,80
C	1	1	2	3	7	Rasio rekomendasi SKPG dan FSVA yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	1	2	3	8	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan daerah	%	80,00	87,00	90,50	94,41	93,03
C	1	2				Urutan Pilihan						
C	1	2	0	3		Urutan Pertanian						
C	1	2	0	3	1	Produktivitas pertanian	Kwintal Per Ha	45,02	45,10	45,72	64,89	60,75
C	1	2	0	3	2	Persentase pendistribusian bibit ternak dan ikan	%	9,00	10,00	12,00	17,00	16,00
C	1	2	0	3	3	Angka prevalensi penyakit hewan	Point	0,73	1,00	1,00	0,00	0,00
C	1	2	0	6		Urutan Perdagangan						
C	1	2	0	6	1	Persentase jumlah pasar tradisional yang difasilitasi sarana distribusi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	2	Persentase jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	3	Persentase pelaku usaha yang terlibat dalam promosi dagang produk ekspor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	4	Persentase jumlah kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	5	Persentase alat ukur, takar, timbang	%	68,22	96,30	96,30	96,29	97,76

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah						
C	1	2	0	6	6	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	7		Urusan Perindustrian						
C	1	2	0	7	1	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	%	N/A	0,00	0,00	3,35	3,35
C	1	2	0	7	2	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki sertifikasi	%	41,54	0,00	0,00	3,35	3,35
C	1	2	0	7	3	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100,00	3,35	3,35	3,35	3,35
C	2					Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
C	2	1				Urusan Wajib						
C	2	1	1			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	2	1	1	3		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
C	2	1	1	3	1	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	83,52	86,23	86,96	96,84	95,95
C	2	1	1	4		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
C	2	1	1	4	1	Persentase permukiman kumuh	%	0,16	0,12	0,12	0,12	0,07
C	2	1	1	4	2	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	4	3	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,63	99,73	99,79	99,79	99,80
C	2	1	1	5		Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
C	2	1	1	5	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	2	Tingkat pembinaan kewaspadaan dini	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						masyarakat						
C	2	1	1	5	3	Tingkat pembinaan satlinmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	4	Tingkat penyelesaian penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	5	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
C	2	1	1	5	6	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	7	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	8	Tingkat ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	9	Rata-rata waktu tanggap penanganan bencana kebakaran di daerah layanan WMK	Menit	15,00	14,91	14,10	12,99	14,65
C	2	1	1	5	10	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	11	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana non kebakaran (banjir)	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	2			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	2	1	2	5		Urusan Lingkungan Hidup						
C	2	1	2	5	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	54,10	60,32	57,33	62,15	62,80
C	2	1	2	5	2	Tingkat pengelolaan sampah	%	91,00	100,00	99,22	100,00	100,00
C	2	1	2	9		Urusan Perhubungan						
C	2	1	2	9	1	Kecepatan rata-rata perjalanan	Km/jam	20,00	21,00	22,00	23,91	24,33

Kode						Aspek/Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
						kendaraan						
C	3					Fokus Iklim Berinvestasi						
C	3	1				Urusan Wajib						
C	3	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	3	1	2	12		Penanaman Modal						
C	3	1	2	12	1	Tingkat pertumbuhan investasi daerah	%	5,00	17,38	4,77	51,26	-13,06
C	3	1	2	12	2	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	6,79	7,97	8,35	12,63	10,98
C	4					Fokus Sumber Daya Manusia						
C	4	1				Urusan Wajib						
C	4	1	1			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	4	1	2			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
C	4	1	2	16		Urusan Kebudayaan						
C	4	1	12	16	1	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Pemerintah Kota Tangerang, Tahun 2023

2.6. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023

Berikut ini diuraikan evaluasi terhadap hasil capaian indikator makro pembangunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 untuk pelaksanaan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022.

Tabel 2.32. Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 Untuk Pelaksanaan Tahun 2019-2022

No.	Indikator	Satuan Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD pada RKPD					Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD (Realisasi)				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)			
			2018	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	77,92	79,13 - 80,05	78,11	78,67	78,53 - 78,73	78,82 - 79,05	79,13 - 80,05	78,43	78,25	78,50	78,90	100,41%	99,47%	99,96%	100,00%
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,95	4,86 - 5,30	6,20	6,35	3,15 - 4,15	4,13 - 5,01	4,86 - 5,30	4,05	-7,36	3,90	5,98	65,32%	-115,91%	100,00%	119,36%
3	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	%	4,76	4,01 - 4,39	4,53	4,41	4,60 - 4,93	4,35 - 4,65	4,01 - 4,39	4,43	5,22	5,93	5,77	102,21%	81,63%	79,72%	75,91%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,41	6,45 - 7,54	6,84	6,62	7,55 - 8,24	6,90 - 7,87	6,45 - 7,54	7,13	8,63	9,07	7,16	95,76%	69,64%	89,93%	100,00%
5	Indeks Gini (Gini Rasio)	Point	0,330	0,305 - 0,316	0,350	0,335	0,325 - 0,333	0,315 - 0,325	0,305 - 0,316	0,328	0,339	0,343	0,343	106,29%	98,81%	97,00%	94,46%
Rata-Rata Capaian Kinerja														94,00%	46,73%	93,32%	97,95%
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Provinsi Banten, BPS Kota Tangerang Tahun 2023 dan Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian indikator makro pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2022 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Aspek		Permasalahan		Rekomendasi	
1	Perekonomian (Pertumbuhan, Kualitas dan Ketimpangan Perekonomian)				
		1	Sektor Perekonomian Terdampak dan Belum Pulih dari Pandemi Covid-19 dan Resesi Ekonomi : Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Jasa Lainnya	1	Mendorong peningkatan pemulihan sektor perekonomian terdampak dan belum pulih melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas produk, pemberian insentif dan perluasan akses pemasaran produk usaha
		2	Pengeluaran Perekonomian Terdampak dan Belum Pulih dari Pandemi Covid-19 dan Resesi Ekonomi : Konsumsi dan Ekspor	2	Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif dan subsidi untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat.
		3	Kualitas dan Kapasitas Investasi Belum Optimal	3	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan, promosi dan kerjasama dengan pihak pengelola investasi
		4	Gejolak Stabilitas Harga Komoditas (Pangan, Energi) Global, Nasional, Regional Memicu Kenaikan Inflasi	4	Mengendalikan stabilitas ketersediaan bahan pangan strategis yang berkualitas dan terjangkau serta mengembangkan kerjasama penyediaan bahan pangan strategis
		5	Akses pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif Terhadap Sumber Daya Produktif (SDM, Manajemen, Permodalan, Pasar, Pemasaran) Masih Belum Memadai serta Belum Memadainya Kualitas dan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif	5	Memantapkan dan mengoptimalkan kualitas pemberdayaan kapasitas kelembagaan dan SDM, fasilitasi sarana prasarana produksi, kualitas produk yang kreatif dan inovatif, promosi dan pemasaran usaha UMKM dan ekonomi kreatif
		6	Pelemahan dan Perlambatan Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat serta Ketimpangan Ekonomi Masyarakat Semakin Meningkat	6	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat melalui fasilitasi dan stimulan pemulihan konsumsi, daya beli masyarakat dan ketimpangan pendapatan masyarakat
2	Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat				
		1	Akses dan kualitas pendidikan masyarakat belum memadai	1	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kurikulum, manajemen kelembagaan, sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, minat, bakat, prestasi peserta didik, serta penguatan pendidikan

Aspek		Permasalahan		Rekomendasi	
					karakter akhlak mulia, kesusilaan, budaya, kreatif dan inovatif serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP serta pendidikan kesetaraan dan non formal
			- Daya tampung SMP/MTs/Sederajat belum memadai dan merata		
			- Kualitas sarana pendidikan (PAUD/TK/RA; SD/MI; SMP/MTs) belum sepenuhnya memadai, layak dan sesuai dengan standar		
			- Tingkat kompetensi pendidik belum sepenuhnya sesuai standar ideal		
			- Tingkat pelayanan pengelolaan pendidikan (manajemen, kurikulum) belum memadai		
			- Pendidikan kesetaraan dan non formal belum optimal		
		2	Derajat kesehatan masyarakat yang belum memadai	2	Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, produksi pangan (makanan minuman), serta kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
			- Kualitas gizi masyarakat belum sepenuhnya baik		
			- Kualitas kesehatan lingkungan belum memadai		
			- Kematian ibu melahirkan masih terjadi		
			- Pelayanan kesehatan belum optimal		
3	Kemiskinan dan Pengangguran				
		1	Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi dan Meningkat	1	Memantapkan, memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, rumah, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan) serta pemberdayaan masyarakat miskin secara terintegrasi dan berkelanjutan
			- Akses terhadap lapangan dan kesempatan kerja		

Aspek		Permasalahan		Rekomendasi	
			terbatas		
			- Keberlanjutan penghasilan dan mata pencaharian belum memadai		
			- Akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan pokok terbatas		
			- Akses terhadap perumahan yang layak huni terbatas		
			- Akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas belum memadai		
			- Implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH, KUBE, JKN KIS, KIP, PSKS, dll) belum optimal berjalan		
			- Pemutakhiran data kemiskinan belum optimal		
			- Upaya perlindungan dan jaminan sosial belum memadai		
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka Masih Tinggi dan Meningkat	2	Memantapkan perluasan bursa tenaga kerja dan wirausaha serta memantapkan kapasitas dan kualitas kelembagaan, pelatihan, serifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja
			- Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dan kesempatan berusaha yang belum memadai		
			- Kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum memadai		

Berikut ini diuraikan evaluasi terhadap hasil capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 untuk pelaksanaan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022.

Tabel 2.33. Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 Untuk Pelaksanaan Tahun 2019-2022

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD pada RKPD					Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD (Realisasi)				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)			
				2018	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	MISI 1 : BERSAMA MENGEMBANGKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS																	
1.1	Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia																	
		1 Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	73,45	75,14 - 76,74	73,81	74,94	74,49 - 74,73	74,82 - 74,93	75,14 - 76,74	73,94	74,11	74,63	74,69	100,18 %	98,89%	100,00 %	99,83%
		2 Indeks	Point	79,15	79,66 -	79,22	79,30	79,43 -	79,48 -	79,66	79,34	79,38	79,38	79,86	100,15	100,10	99,94%	100,34

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD pada RKPD					Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD (Realisasi)				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)			
				2018	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		kesehatan (Indeks harapan hidup)			79,69			79,49	79,59	- 79,69					%	%		%
1.1. 1	Sasaran 1.1.1 :																	
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat																	
		1. 1 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,48	97,72	97,53	97,58	97,63	97,67	97,72	98,46	97,51	97,91	97,93	100,95 %	99,93%	100,29 %	100,27 %
		1. 2 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Pak et B	%	98,97	99,00	98,97	98,98	98,99	98,99	99,00	98,99	87,23	99,00	99,10	100,02 %	88,13%	100,01 %	100,11 %
1.1. 2	Sasaran 1.1.2 :																	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																	
		2. 1 Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	1,25	1,07	2,99	2,90	1,13	1,10	1,07	1,15	1,14	1,03	1,09	161,54 %	160,69 %	108,85 %	100,91 %
		2. 2 Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	15,31	12,13	24,67	23,93	12,90	12,51	12,13	15,66	12,92	15,47	12,67	136,52 %	146,01 %	80,08%	98,72%
		2. 3 Angka kesakitan	Orang per 100.000 pendudu k	N/A	182	344	319	186	184	182	223	186	171,14	183,94	135,17 %	141,62 %	107,90 %	100,03 %
1.2	Tujuan 1.2 :																	
	Meningkatkan kualitas kesejahteraan																	

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD pada RKPD					Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD (Realisasi)				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)			
				2018	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	sosial masyarakat																	
		1. Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,76	4,01 - 4,39	4,53	4,41	4,60 - 4,93	4,35 - 4,65	4,01 - 4,39	4,43	5,22	5,93	5,77	102,21 %	81,63%	79,72%	75,91%
1.2.1	Sasaran 1.2.1 : Menurunnya kemiskinan dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)																	
		1.1. Jumlah penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	117.318	95.403	113.717	109.063	104.910	100.579	95.403	113.525	109.070	104.910	100.551	100,17 %	99,99%	100,00 %	100,03 %
1.2.2	Sasaran 1.2.2 : Meningkatnya kesempatan kerja																	
		2.1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	7,41	6,45 - 7,54	6,84	6,62	7,55 - 8,24	6,90 - 7,87	6,45 - 7,54	7,13	8,63	9,07	7,16	95,76%	69,64%	89,93%	100,00 %
1.3	Tujuan 1.3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik																	
		1. Indeks reformasi birokrasi	Point	57,49	70,00	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00	61,61	62,89	62,91	67,14	102,68 %	101,44 %	96,78%	100,21 %
1.3.1	Sasaran 1.3.1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik																	
		1.1. Nilai evaluasi AKIP	A, BB, B, CC, C, D	B	BB	B	BB	BB	BB	BB	B	B	B	B	100,00 %	80,00%	80,00%	95,89%

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD pada RKPD					Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD (Realisasi)				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)			
				2018	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		Pemerintah Daerah																
		1. Opini BPK 2 terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/TM P	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		1. Indeks 3 kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	82,54	85,83	82,60	82,64	84,83	85,33	85,83	82,62	84,25	84,84	85,35	100,02 %	101,95 %	100,01 %	100,02 %
2	MISI 2 :																	
	BERSAMA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN																	
2.1	Tujuan 2.1 :																	
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan																	
		1 Indeks pembangunan sarana prasarana perkotaan	Point	74,97	86,31	78,12	79,76	82,40	84,38	86,31	78,68	79,46	84,56	86,10	100,72 %	99,62%	102,62 %	102,04 %
2.1. 1	Sasaran 2.1.1 :																	
	Meningkatnya																	

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaa n	Target RPJMD pada RKPD					Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD (Realisasi)				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)				
				2018	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	kualitas pelayanan transportasi perkotaan																		
		1.1	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	83,52	94,26	85,67	87,81	89,96	92,11	94,26	86,23	86,96	96,84	95,95	100,65 %	99,03%	107,65 %	104,17 %
		1.2	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	20	25	21	22	23	24	25	21	22	23,91	24,33	100,00 %	100,00 %	103,96 %	101,38 %
2.1.2	Sasaran 2.1.2 :																		
	Meningkatnya kualitas permukiman																		
		2.1	Persentase permukiman kumuh	%	0,16	0,08	0,14	0,11	0,10	0,09	0,08	0,12	0,12	0,12	0,007	117,39 %	94,86%	80,00%	192,34 %
		2.2	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		2.3	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,63	99,81	100,00	100,00	99,79	99,80	99,81	99,73	99,79	99,79	99,80	99,73%	99,79%	100,00 %	100,00 %
2.1.3	Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air																		

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD pada RKPD					Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD (Realisasi)				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)			
				2018	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		3.1 Luas banjir dan genangan	Ha	429,38	195,88	382,98	334,18	286,38	239,68	195,88	395,16	376,88	289,68	217,79	96,82%	87,22%	98,85%	109,13%
2.1.4	Sasaran 2.1.4 :																	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup																	
		4.1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	54,10	57,93	54,42	54,74	57,33	57,63	57,93	60,32	57,33	62,15	63,80	110,84%	104,73%	108,42%	110,71%
		4.2 Tingkat pengelolaan sampah	%	91,00	100,00	100,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,22	100,00	100,00	100,00%	102,29%	100,00%	100,00%
3	MISI 3 :																	
	BERSAMA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN																	
3.1	Tujuan 3.1 :																	
	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang berdaya saing																	
		1 Nilai PDRB ADHK	Rp. Triliyun	106,28	115,94 - 118,57	114,12	121,37	106,18 - 107,22	110,57 - 112,59	115,94 - 118,57	110,59	102,42	106,41	112,78	96,91%	84,39%	100,00%	100,17%
		2 Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	81,37	82,73 - 83,91	81,50	81,92	81,79 - 82,20	82,22 - 82,94	82,73 - 83,91	82,24	81,46	81,65	82,34	100,91%	99,44%	99,83%	100,00%
3.1.1	Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya investasi daerah																	
		1.1 Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	6,79	9,67	7,13	7,49	8,77	9,21	9,67	7,97	8,35	12,63	13,05	111,78%	111,48%	144,01%	141,69%
3.1.2	Sasaran 3.1.2 :																	

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD pada RKPD					Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD (Realisasi)				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)			
				2018	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya perekonomian masyarakat																	
		2.1	Laju inflasi	%	3,46	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,30	1,18	1,81	4,56	77,14%	166,29 %	148,29 %	69,71%
		2.2	Indeks gini (gini rasio)	Point	0,330	0,305 - 0,316	0,350	0,335	0,325 - 0,333	0,315 - 0,325 - 0,316	0,328	0,339	0,343	0,343	106,29 %	98,81%	97,00%	94,46%
	Rata-Rata Capaian Kinerja														105,52 %	104,21 %	101,22 %	103,50 %
	Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2023

2.7. Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)

A. URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan SPM Bidang Pendidikan pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM Bidang Pendidikan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Pendidikan daerah Kabupaten/Kota mencakup 3 (tiga) pelayanan dasar yaitu :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama); dan
- c. pendidikan kesetaraan.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Sedangkan Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan yaitu:

- A. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- B. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- C. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Bidang Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2020-2022 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34. Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR / INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	278.996	278.996	100%	293.391	293.391	100%	294.046	294.046	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5.385	5.385	100%	5.249	5.249	100%	5.222	5.222	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	66.108	66.108	100%	65.072	65.072	100%	65.087	65.087	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2022

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan telah didukung oleh alokasi anggaran yang memadai sesuai mandatory agar dapat memberikan pencapaian SPM sesuai dengan target, namun demikian pencapaian target pada pelaksanaannya masih ditemui kendala. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang antara lain :

- Adanya siswa usia sekolah dibawah 7 tahun (pada tingkat Sekolah Dasar) dan di atas 15 tahun (pada jenjang SMP)
- Terdapat siswa yang rumahnya berada di perbatasan dengan kota/kabupaten lain lebih memilih bersekolah di luar Kota Tangerang
- Banyak orang tua siswa yang terkena dampak ekonomi sehingga lebih memilih pulang ke kampung halamannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan Kota Tangerang terus memberikan bantuan operasional Sekolah mulai jenjang PAUD melalui BOP
- memberikan bantuan kepada siswa miskin melalui Tangerang Cerdas,
- memberikan beasiswa untuk masuk sekolah SMP Swasta bagi siswa tidak mampu

B. URUSAN KESEHATAN

Penerapan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah

Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM Bidang Bidang Kesehatan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. SPM Bidang Kesehatan Kota Tangerang terdiri dari :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia Kesehatan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human ImmunodeficiencyVirus), yang bersifat peningkatan /promotif dan pencegahan/preventif.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Bidang Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2020-2022 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.35. Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR / INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	40.533	40.533	100%	40.119	40.119	100%	40.520	40.520	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	38.691	38.691	100%	38.773	38.773	100%	39.468	39.468	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	38.691	38.691	100%	38.773	38.773	100%	39.468	39.468	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah balita 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	95.564	89.866	94,04%	89.925	88.166	98,04%	89.925	89.925	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	238.826	238.826	100%	231.986	231.986	100%	231.986	231.986	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	43.334	43.334	100%	61.422	61.422	100%	62.036	62.036	100%
7	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	31.417	31.417	100%	30.400	30.400	100%	31.843	31.843	100%
8	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun	7.302	7.302	100%	12.144	65.072	100%	17.524	17.524	100%
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	449.050	449.050	100%	515.880	515.880	100%	586.330	586.330	100%
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	124.700	124.700	100%	138.000	138.000	100%	152.000	152.000	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2022

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan telah didukung oleh alokasi anggaran yang memadai sesuai mandatory agar dapat memberikan pencapaian SPM sesuai dengan target, namun demikian pencapaian target pada pelaksanaannya masih ditemui

kendala. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang antara lain :

- Jumlah sasaran berbeda antara sasaran Pusdatin, sasaran Proyeksi BPS, sasaran proyeksi disdukcapil
- Aplikasi ekohort dari Kemenkes dalam pencatatan ibu hamil sering bermasalah dan data sulit dianalisa
- Jumlah sasaran berbeda antara sasaran Pusdatin, sasaran Proyeksi BPS, sasaran proyeksi disdukcapil
- Masih ada sekolah/madrasah yang menolak untuk dilakukan skrining kesehatan peserta didik
- Aplikasi Pencatatan pelaporan berbasis digital namun teknisnya tidak efisien (Banyak dan tidak terintegrasi) dalam pelaporan sehingga SDM yang tersedia sangat terbatas
- Masih ada lansia dengan keterbatasan fisik sulit untuk datang ke fasilitas kesehatan
- Adanya stigma dan keterbatasan SDM terlatih keswa (penggantian petugas), serta keterbatasan obat-obatan keswa
- Kerusakan pada modul alat TCM
- Proses penginputan laporan melalui sistem informasi , akan tetapi layanannya sering terlambat dan perlu rutin diberikan umpan balik
- Deteksi dini ibu hamil di layanan swasta belum optimal

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- Penetapan sasaran target SPM dalam satu tahun menggunakan data riil yang diyakini benar (hasil pendataan Puskemas) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- Pertemuan evaluasi dengan mengundang Kemenkes
- Penetapan sasaran ibu bersalin dalam satu tahun menggunakan data riil yang diyakini benar (hasil pendataan Puskemas) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- melakukan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag
- Integrasi Sistem Informasi dan menambah tenaga IT
- Meningkatkan sosialisasi keswa dan pembentukan Tim Pembina Kesehatan Jiwa di Masyarakat (TPKJM) dan untuk logistik obat mengusulkan ke propinsi/pusat serta menguatkan jejaring rujukan
- Mengusulkan penggantian Alkes ke kemenkes
- Pendampingan triple eliminasi bagi faskes swasta

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah Pekerjaan Umum berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM Bidang Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM bidang Pekerjaan Umum Kota Tangerang mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Menjamin ketersediaan akses Air Limbah Domestik. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum mencakup:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Bidang Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2020-2022 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR / INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah rumah tangga yang memperoleh kebutuhan	590.624	590.624	100%	593.226	593.226	100%	608.025	608.025	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	423.378	423.378	100%	424.732	424.732	100%	426.016	426.016	100%

Sumber Dinas PUPR 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum sub bidang Bidang Air Minum dan Air Limbah adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) masih dalam tahap konstruksi, sehingga pembangunan jaringan perpipaan air minum belum merata di seluruh wilayah Kota Tangerang.
- Kuantitas dan kualitas air tanah dirasa masih cukup baik masyarakat mengandalkan air tanah sebagai sumber air minum sehingga belum mau beralih ke jaringan perpipaan.
- Sebagian masyarakat memenuhi kebutuhan air minumnya secara swadaya, baik menggunakan air tanah maupun air minum kemasan sebagai sumber air minum utamanya.
- Sebagian masyarakat masih nyaman dengan sistem air limbah setempat dibandingkan dengan sistem air limbah perpipaan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum dan Air Limbah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan dan revisi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) serta Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum.
2. Menyusun Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan air limbah.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Perumahan Rakyat merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tangerang:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat mencakup:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi:

Standar Jumlah Barang/ Jasa Pelayanan dasar yang ada merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/ atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kualitas barang/ jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- a. Rehabilitasi rumah korban bencana
Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- b. Pembangunan Kembali Rumah bagi korban bencana
Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- c. Pembangunan Baru di lokasi baru/ relokasi bagi korban bencana
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak/ ringan memenuhi kriteria rusak ringan,

sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/ Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam.

- d. Bantuan akses rumah/ sewa layak huni bagi korban bencana
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa (dengan spesifikasinya sesuai NSPK).

- 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

Standar Jumlah Barang/ Jasa Pelayanan pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Kualitas barang/ jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- a. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/ atau Bangunan
Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/ atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku.
- b. Subsidi Uang Sewa.
Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/ atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak.
- c. Penyediaan Rumah Layak Huni
Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup massif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyelesaian dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi bencana gempa yang sesuai dengan NSPK.

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Bidang Perumahan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2020-2022 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2022

NO	JENIS PELAYANAN BASIS / INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1	1	100%	12	12	100%	14	14	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang	1	1	100%	1	1	100%	30	30	100%

Sumber: Dinas Perkimtan 2022

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat diantaranya tidak adanya regulasi dan tata cara pelaksanaan terkait dengan kebencanaan menjadi tumpang tindih kewenangan penanganan. sehingga solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- Perlu diadakan perencanaan kegiatan untuk Penanganan Rumah Korban Bencana dan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang dan untuk tahun berikutnya dengan konsep dan rencana yang lebih matang, sehingga saat anggaran sudah tersedia, kegiatan dapat langsung berjalan;
- Perlu dibuat juga pendataan area rawan bencana di wilayah Kota Tangerang, sosialisasi kegiatan, perencanaan dan koordinasi sehingga dapat mempermudah kegiatan Penanganan Rumah Korban Bencana dalam waktu yang cepat dan dapat segera ditangani, baik di dalam Dinas sendiri maupun dengan OPD lainnya dan instansi maupun sektor lainnya.

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA DAN KEBAKARAN

Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Satpol-PP dan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban umum dan mengacu dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang dengan Jenis Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Pencapaian SPM Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perwal.

Mutu Pelayanan Dasar untuk SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Adapun Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Kebakaran pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kebencanaan dan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun

2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan antara lain :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

Jenis Pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Kota Tangerang meliputi:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Jenis Pelayanan dasar Sub Urusan Kebakaran Kota Tangerang yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Realisasi pencapaian indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Tahun 2020-2022 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR / INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten / Kota	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	101.723	101.723	100%	62.788	62.788	100%	14.626	14.626	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	101.723	101.723	100%	62.788	62.788	100%	14.626	14.626	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	101.939	101.939	100%	62.882	62.882	100%	3.715	3.715	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	175	175	100%	167	167	100%	100	100	100%

Sumber : Satpol PP dan BPBD 2022

Dalam pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- Tidak adanya efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, Peraturan Daerah Kota Tangerang.
- Belum ada penataan / Alokasi tempat untuk berjualan yang jelas.
- Masih banyaknya kegiatan sosial masyarakat yang tidak melihat peraturan yang berlaku dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dan perlunya peningkatan kinerja pelayanan kantramtibmas

- belum tersedianya dokumen kebencanaan yang wajib dimiliki daerah , diantaranya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sudah disusun namun belum disahkan, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontigensi (Renkon) yang baru dapat dilaksanakan tahun 2023.
- belum tersedianya layanan Pos Damkar di setiap Kecamatan dan Kelurahan

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan diatas sebagai berikut :

- Perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam menegakan/memaksimalkan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, dan diterapkannya peraturan daerah
- Bekerja sama dengan OPD terkait untuk menyelesaikan penataan tempat/lokasi berdagang bagi Pedagang Kaki Lima
- Penyuluhan/sosialisasi perda terhadap masyarakat serta kerjasama dengan aparat lain yang berkepentingan
- mengupayakan pemenuhan terhadap dokumen kebencanaan yaitu KRB, RPB dan Renkon pada tahun 2023
- mengoptimalkan pelayanan kebencanaan dan kebakaran pada BPBD, 4 UPT dan 3 Pos

F. BIDANG SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Sosial pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah Sosial dalam target pencapaiannya mengacu peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Kota Tangerang terdiri dari :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial mencakup:

- a. Standar dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar dan jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap jenis layanan dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan untuk Pelayanan Dasar yang diberikan berdasarkan kewenangan Kota Tangerang adalah :

- a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti;
- b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar panti;
- c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti;
- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
- e. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Bidang Sosial Kota Tangerang Tahun 2020-2022 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39. Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR / INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara penyanggah disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	236	760	322,03%	105	105	100%	628	628	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.488	1.488	100%	11	11	100%	515	515	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.743	3.742	214,69%	39	39	100%	1.366	1.366	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	119	117	98,32%	232	232	100%	47	47	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	1.650	1.650	100%	1.000	1.000	100%	2.998	2.998	100%

Sumber : Dinas Sosial 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pencapaian SPM Bidang Sosial Kota Tangerang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Belum adanya panti sosial bagi disabilitas fisik dan mental yang terlantar milik pemerintah Provinsi Banten sehingga menyulitkan Dinas Sosial Kota Tangerang dalam melakukan layanan lanjutan/rujukan
- Belum adanya tenaga psikososial yang profesional atau terakreditasi (bersertifikat)
- Keterbatasan kapasitas di Panti Sosial Lanjut Usia / Werdha milik Provinsi berdampak pada layanan/rujukan klien lanjut usia terlantar di RPS
- Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya mengembangkan pelayanan, antara lain masih adanya keterbatasan kapasitas ruangan pada Rumah Singgah
- Belum adanya tenaga psikososial yang profesional atau terakreditasi (bersertifikat)

Terhadap permasalahan penerapan SPM Bidang Sosial diupayakan solusi untuk mengatasinya sebagai berikut :

- Menambah jumlah Panti Rehabilitasi Sosial khususnya bagi penyandang disabilitas fisik dan mental di masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten untuk memudahkan aksesibilitas layanan lanjut/rujukan
- Meminta Pekerja Sosial Kota Tangerang untuk melaksanakan kegiatan psikososial kepada klien
- Melakukan advokasi, koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten agar menambah kapasitas penghuni Panti Sosial Lanjut Usia / Werdha
- Memperluas Rumah Singgah atau membangun Rumah Singgah yang Representatif dan terstandar
- Melibatkan Relawan Sosial Kota Tangerang (TAGANA) dalam memberikan dukungan psikososial kepada korban bencana

2.8. Gambaran Kerjasama Daerah

Dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh urusan Pemerintahan Daerah, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan Kerja Sama daerah. Kerja Sama daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 363 tentang Pemerintahan Daerah mencakup: a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain; b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga

non pemerintah lainnya); c. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Selama tahun 2022, telah dilakukan kerjasama daerah dengan daerah lain diantaranya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.40. Daftar Kerjasama Daerah

NO	TANGGAL	NOMOR	PERIHAL
1	27/05/2022	147.54/125-Bag.Tapem/2022	MOU KSB KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DENGAN PEMKAB SERANG
2	03/06/2022	147.54/143-Bag.Tapem/2022	PKS SMART CITY DENGAN PEMKAB SERANG
3	18/07/2022	503/190-Bag.Tapem/2022	PKS MPP DENGAN BAPENDA PROVINSI BANTEN
4	24/10/2022	147.54/280-Bag.Tapem/2022	MOU DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT (APLIKASI PORPROV)
5	24/10/2022	147.54/285-Bag.Tapem/2022	PKS DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT (APLIKASI PORPROV)
6	03/11/2022	147.54/295-Bag.Tapem/2022	KERJA SAMA ANTAR DAERAH DENGAN KABUPATEN GARUT
7	07/11/2022	147.54/299-Bag.Tapem/2022	PKS PENINGKATAN MANAJEMEN ASN KAB GARUT BERDASARKAN SISTEM MERIT DENGAN KABUPATEN GARUT
8	20/12/2022	147.54/321-Bag.Tapem/2022	MOU PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN PEMPROV DKI

2.9. Gambaran Usaha Milik Daerah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi, Pemerintah Kota Tangerang membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai wadah untuk menciptakan dan mendorong perkembangan perekonomian daerah, yang berorientasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, bisnis yang mandiri serta berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang diarahkan untuk menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan, menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kota

Tangerang, sehingga dapat berperan sebagai lokomotif pembangunan Kota Tangerang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan perusahaan berskala nasional, regional hingga internasional.

A. PERUMDA PASAR KOTA TANGERANG

Perumda Pasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 10 April 2003 atas dasar Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang juncto Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang. Perumda Pasar Kota Tangerang mulai beroperasi pada awal Februari 2004. Dalam menjalankan usahanya, Perumda Pasar melaksanakan fungsi :

1. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana Pasar;
2. Penataan dan pengelolaan pasar beserta fasilitasnya;
3. Pembinaan pelaku usaha di Perumda Pasar;
4. Penciptaan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Selain fungsi-fungsi diatas, Perumda Pasar melaksanakan fungsi sosial sebagai pendorong dan penciptaan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

Berikut beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Perumda Pasar Kota Tangerang :

- kegiatan pasar sembako dan produk UMKM di Pasar Lingkungan Kelurahan
- elektronifikasi Jasa Pengelolaan Pasar (JPP) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan transaksi
- Operasi Bersih dan pengecatan Pasar

B. PERUMDA TIRTA BENTENG

Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng merupakan perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola air minum di Kota Tangerang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Dalam perjalanannya telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota

Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng.

Tujuan strategis dari Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang yaitu menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, pelayanan umum, serta melaksanakan kebijakan umum yang digariskan oleh Walikota Tangerang. fungsi dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang meliputi :

1. Pelayanan Umum dan Jasa
2. Penyelenggara kepentingan umum
3. peningkatan pendapatan daerah

C. PT. TNG (TANGERANG NUSANTARA GLOBAL)

PT. Tangerang Nusantara Global dibentuk pada tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam perkembangannya, PT. Tangerang Nusantara Global (Persero) yang selanjutnya disebut PT. TNG yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

PT. TNG memiliki motto “Kami Ada Untuk Anda (*We are Here for You*) sebagai landasan perseroan untuk memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dengan melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang.

Tugas dan fungsi PT. TNG adalah sebagai berikut :

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah;
3. memperoleh laba atau keuntungan

Sejak dibentuk sebagai BUMD Kota Tangerang, PT. TNG telah melakukan kegiatan dengan bekerjasama dengan para investor dan berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Infrastruktur

Kota Tangerang saat ini sedang gencar dan bersemangat dalam hal pembangunan, pemerataan ekonomi dan pelayanan masyarakat. tidak lepas dari itu semua, masalah yang dihadapi Kota Tangerang tersebut antara lain kemacetan, sampah, banjir dan masih banyak lagi. oleh karena itu PT. TNG selaku BUMD Kota Tangerang bekerja sama dengan para investor yang terpercaya dan kompeten dalam pengelolaan

infrastruktur yang memiliki solusi untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang.

2. Jasa Keuangan

Jasa Keuangan dan Permodalan ini tidak terlepas dari UMKM. UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. tentu saja UMKM membutuhkan modal yang tidak sedikit dan PT. TNG hadir untuk mengelola dan membangun BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang menjadi sumber permodalan bagi usaha kelas bawah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama golongan menengah ke bawah.

3. Komunikasi

PT. TNG akan bekerja sama dalam pengelolaan pembangunan fasilitas umum yang salah satunya yaitu jaringan komunikasi. seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan Fiber Optic (Ducting) menjadi sarana infrastruktur jaringan komunikasi yang dapat digunakan bersama oleh seluruh penyelenggara layanan komunikasi untuk mendukung perwujudan Smart City di Kota Tangerang

4. Perparkiran

Perparkiran merupakan masalah yang harus ditangani secara baik, terperinci dan teliti dikarenakan lahan parkir dapat menjadi sumber pemasukan pendapatan daerah. Oleh karena itu PT. TNG bekerjasama dengan pihak ketiga dan berusaha mengelola lahan parkir dengan sebaik mungkin untuk tercapainya ketertiban di Kota Tangerang

5. Perdagangan dan Jasa

demikian memajukan perekonomian masyarakat Kota Tangerang khususnya dalam sektor perdagangan dengan pihak ketiga agar menjadikan sektor perdagangan Kota Tangerang yang mandiri dan berdaya saing. salah satu yang sudah dilaksanakan adalah pembangunan SPBU Poris Plawad.

6. Pariwisata

saat ini Kota Tangerang sedang mengembangkan sektor pariwisata. PT. TNG memiliki strategi dan solusi dalam mempromosikan dan mengelola wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Tangerang.

7. Jasa Konsultasi

PT. TNG senantiasa memberikan solusi untuk bisnis yang ingin dikembangkan. Dengan SDM yang terpercaya dan profesional sesuai bidang usaha, PT TNG tidak hanya mempelajari dan memberikan solusi tetapi memberikan kritik dan saran yang bermutu kepada pebisnis yang bertujuan untuk menjalankan usahanya dengan baik dan benar.

8. Properti

PT. TNG sangat membuka peluang perkembangan properti untuk Kota Tangerang bagi para pengembang untuk melakukan investasi sebagai Pihak Ketiga yang akan bekerja sama dengan PT. TNG.

9. Bidang Komoditi Beras

dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, PT. TNG bersinergi meningkatkan kontribusi dalam mewujudkan ketersediaan dan ketahanan pangan khususnya beras di Kota Tangerang.

10. Transportasi

melihat perkembangan kebutuhan akan transportasi untuk memenuhi aktivitas masyarakat, PT. TNG memberikan solusi tepat dengan menyediakan transportasi angkutan perkotaan (Si Tayo dan Si Benteng) yang bertujuan untuk memudahkan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan segala aktivitas di Kota Tangerang.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah; dan (7) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD mencerminkan perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkan perkembangan dari aset pemerintah daerah, kewajiban pemerintah daerah, dan ekuitas dana yang tersedia.

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Analisis Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pada periode Tahun Anggaran 2018-2022, tingkat capaian realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang hampir selalu mencapai target setiap tahunnya kecuali pada Tahun Anggaran 2019. Pada Tahun Anggaran 2018, target pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 3,946 Triliun dan terealisasi sebesar Rp. 3,971 Triliun (tingkat capaian realisasi mencapai 100,63%). Namun pada Tahun Anggaran 2019, tingkat capaian realisasi hanya mencapai 95,18% yaitu dari Rp. 4,494 Triliun yang ditargetkan sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 4,277 Triliun. Pada Tahun Anggaran 2020, target pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 3,609 Triliun dan terealisasi sebesar Rp. 3,648 Triliun (tingkat capaian realisasi mencapai 101,09%). Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2021, target pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 4,168 Triliun dan terealisasi sebesar Rp. 4,213 Triliun (tingkat capaian realisasi mencapai 101,07%). Pada Tahun Anggaran 2022, target pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 4,247 Triliun dan terealisasi sebesar Rp. 4,274 Triliun (tingkat capaian realisasi mencapai 100,63%). Rata-rata tingkat capaian realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 mencapai 99,60%. Berikut ini diuraikan anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	
2018	3.946.762.480.077	3.971.571.451.402	100,63
2019	4.494.321.924.384	4.277.659.353.829	95,18
2020	3.609.275.478.525	3.648.663.446.803	101,09
2021	4.168.381.644.532	4.213.054.524.430	101,07
2022	4.247.762.351.884	4.274.447.298.143	100,63
Jumlah	20.466.503.879.402	20.385.396.074.607	99,60

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun Anggaran 2018, pendapatan daerah mencapai Rp. 3,971 Triliun dan meningkat

sebesar 7,71% menjadi Rp. 4,277 Triliun pada Tahun Anggaran 2019. Pandemi Covid 19 yang memicu terjadinya krisis kesehatan dan resesi ekonomi yang terjadi sejak Tahun 2020 telah berdampak pada menurunnya pendapatan daerah. Kondisi ini tercermin dari menurunnya pendapatan daerah sebesar -14,70% yaitu dari Rp. 4,277 Triliun pada Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp. 3,648 Triliun pada Tahun Anggaran 2020. Seiring dengan meredanya Pandemi Covid 19 dan mulai pulihnya perekonomian pada Tahun Anggaran 2021, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 15,47% yaitu dari Rp. 3,648 Triliun pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp. 4,213 Triliun pada Tahun Anggaran 2021. Pada Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 1,46% yaitu dari Rp. 4,213 Triliun pada Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp. 4,274 Triliun pada Tahun Anggaran 2022. Rata-rata laju pertumbuhan pendapatan daerah pada periode Tahun Anggaran 2018-2022 mencapai 2,20% per tahun. Berikut ini diuraikan perkembangan realisasi dan pertumbuhan pendapatan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.2
Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Tangerang
Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah	Laju Pertumbuhan (%)
2018	3.971.571.451.402	1,05
2019	4.277.659.353.829	7,71
2020	3.648.663.446.803	-14,70
2021	4.213.054.524.430	15,47
2022	4.274.447.298.143	1,46
Rata-Rata		2,20

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

Struktur pendapatan daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian
4	PENDAPATAN DAERAH
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.01	Pajak Daerah
4.1.02	Retribusi Daerah
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah
4.2	PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.01	Pendapatan Hibah
4.3.02	Dana Darurat

4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
--------	---

Berikut ini diuraikan perkembangan realisasi dan pertumbuhan komponen pendapatan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.3
Realisasi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2018-2022

Kode	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
		Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)	Realisasi (LRA)	Rata-Rata Laju Pertumbuhan
4	PENDAPATAN DAERAH	3.971.571.451.402	4.277.659.353.829	3.648.663.446.803	4.213.054.524.430	4.274.447.298.143	2,20%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.864.385.584.947	2.027.112.805.905	1.649.002.723.454	1.869.216.636.384	2.012.215.328.325	2,37%
4.1.01	Pajak Daerah	1.551.439.325.839	1.760.354.444.860	1.364.323.174.430	1.489.544.695.770	1.737.097.335.762	3,16%
4.1.02	Retribusi Daerah	77.364.791.149	54.134.890.177	62.933.916.205	48.190.611.670	54.676.438.313	-3,42%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.504.112.426	12.179.498.355	14.064.131.359	12.930.117.665	14.068.451.042	-2,15%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.077.355.533	200.443.972.513	207.681.501.460	318.551.211.279	206.373.103.208	5,16%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.105.511.866.455	2.249.764.307.924	1.947.326.463.349	2.343.745.890.663	2.261.562.033.794	2,30%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.518.016.405.655	1.583.213.776.133	1.589.490.431.234	1.586.141.196.224	1.517.098.158.222	0,07%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	587.495.460.800	666.550.531.791	357.836.032.115	757.604.694.439	744.463.875.572	16,21%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.674.000.000	782.240.000	52.334.260.000	91.997.383	669.936.024	1766,36%
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.674.000.000	782.240.000	52.334.260.000	0	0	
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	91.997.383	669.936.024	

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 1,864 Triliun.
- Tahun 2019 = Rp. 2,027 Triliun.
- Tahun 2020 = Rp. 1,649 Triliun.
- Tahun 2021 = Rp. 1,869 Triliun.
- Tahun 2022 = Rp. 2,012 Triliun.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 2,37% per tahun.

Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari komponen : (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Berikut ini diuraikan realisasi dan pertumbuhan komponen pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

1. Pajak Daerah

Realisasi dan pertumbuhan pajak daerah Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 1,551 Triliun.
- Tahun 2019 = Rp. 1,760 Triliun.
- Tahun 2020 = Rp. 1,364 Triliun.
- Tahun 2021 = Rp. 1,489 Triliun.
- Tahun 2022 = Rp. 1,737 Triliun.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 3,16% per tahun.

2. Retribusi Daerah

Realisasi dan pertumbuhan retribusi daerah Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 77,364 Miliar.
- Tahun 2019 = Rp. 54,134 Miliar.
- Tahun 2020 = Rp. 62,933 Miliar.
- Tahun 2021 = Rp. 48,190 Miliar.
- Tahun 2022 = Rp. 54,676 Miliar.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai -3,42% per tahun.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi dan pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 16,504 Miliar.
- Tahun 2019 = Rp. 12,179 Miliar.
- Tahun 2020 = Rp. 14,064 Miliar.
- Tahun 2021 = Rp. 12,930 Miliar.
- Tahun 2022 = Rp. 14,068 Miliar.

- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai -2,15% per tahun.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi dan pertumbuhan lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 219,077 Miliar.
- Tahun 2019 = Rp. 200,443 Miliar.
- Tahun 2020 = Rp. 207,681 Miliar.
- Tahun 2021 = Rp. 318,551 Miliar.
- Tahun 2022 = Rp. 206,373 Miliar.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 5,16% per tahun.

B. Pendapatan Transfer

Realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 2,105 Triliun.
- Tahun 2019 = Rp. 2,249 Triliun.
- Tahun 2020 = Rp. 1,947 Triliun.
- Tahun 2021 = Rp. 2,343 Triliun.
- Tahun 2022 = Rp. 2,261 Triliun.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 2,30% per tahun.

Pendapatan transfer terdiri dari komponen : (1) pendapatan transfer pemerintah pusat, dan (2) pendapatan transfer antar daerah. Berikut ini diuraikan realisasi dan pertumbuhan komponen pendapatan transfer Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 1,518 Triliun.
- Tahun 2019 = Rp. 1,583 Triliun.
- Tahun 2020 = Rp. 1,589 Triliun.
- Tahun 2021 = Rp. 1,586 Triliun.
- Tahun 2022 = Rp. 1,517 Triliun.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 0,07% per tahun.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer antar daerah Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 587,495 Miliar.
- Tahun 2019 = Rp. 666,550 Miliar.
- Tahun 2020 = Rp. 357,836 Miliar.
- Tahun 2021 = Rp. 757,604 Miliar.
- Tahun 2022 = Rp. 744,463 Miliar.

- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 16,21% per tahun.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi dan pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 1,674 Miliar.
- Tahun 2019 = Rp. 0,782 Miliar.
- Tahun 2020 = Rp. 52,334 Miliar.
- Tahun 2021 = Rp. 0,091 Miliar.
- Tahun 2022 = Rp. 0,669 Miliar.

Berikut ini diuraikan analisis pendapatan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah diukur dengan rasio realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sendiri pembangunan daerahnya.

Perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah dari 46,94% pada Tahun Anggaran 2018 menjadi 47,08% pada Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang dari tahun ke tahun selama periode waktu tersebut. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2018-2022 mencapai 46,22%. Berikut diuraikan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
	Realisasi	Realisasi	
2018	1.864.385.584.947	3.971.571.451.402	46,94
2019	2.027.112.805.905	4.277.659.353.829	47,39
2020	1.649.002.723.454	3.648.663.446.803	45,19
2021	1.869.216.636.384	4.213.054.524.430	44,37
2022	2.012.215.328.325	4.274.447.298.143	47,08
Jumlah	9.421.933.079.015	20.385.396.074.607	46,22

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

B. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah diukur dengan menggunakan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah dari 109,01% pada Tahun Anggaran 2018 menjadi 105,51% pada Tahun Anggaran 2022. Rata-rata rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2018-2022 mencapai 103,57%. Berikut ini diuraikan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah (rasio realisasi PAD terhadap target PAD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.5
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2018	1.710.362.495.379	1.864.385.584.947	109,01
2019	2.195.868.939.559	2.027.112.805.905	92,31
2020	1.464.562.583.407	1.649.002.723.454	112,59
2021	1.819.161.827.246	1.869.216.636.384	102,75
2022	1.907.095.449.818	2.012.215.328.325	105,51
Jumlah	9.097.051.295.409	9.421.933.079.015	103,57

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

C. Rasio Elastisitas Pendapatan Daerah

Rasio elastisitas pendapatan daerah menggambarkan hubungan antara pertumbuhan pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah,

yang mencerminkan pengaruh perekonomian daerah terhadap pendapatan daerah. Rasio elastisitas pendapatan daerah ini diukur dengan perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah pada periode Tahun Anggaran 2018-2022 dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara keseluruhan. Kondisi ini tercermin dari keterkaitan hubungan pola pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan pendapatan daerah, dimana pada saat perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka pendapatan daerah pun tumbuh positif dan begitupun sebaliknya. Rata-rata rasio elastisitas pendapatan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 mencapai 1,67 Point. Kondisi ini mencerminkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 1,67 kali. Berikut ini diuraikan perkembangan rasio elastisitas pendapatan daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.6
Rasio Elastisitas Pendapatan Daerah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah	Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Rasio Elastisitas Pendapatan Daerah (Point)
2018	3.971.571.451.402	1,05	4,95	0,21
2019	4.277.659.353.829	7,71	4,02	1,92
2020	3.648.663.446.803	-14,70	-7,36	2,00
2021	4.213.054.524.430	15,47	3,90	3,97
2022	4.274.447.298.143	1,46	5,98	0,24
Rata-Rata				1,67

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

3.1.1.2. Analisis Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada periode Tahun Anggaran 2018-2022, realisasi belanja daerah Kota Tangerang mengalami fluktuasi. Pada Tahun Anggaran 2018, belanja daerah mencapai Rp. 4,288 Triliun dan meningkat menjadi Rp. 4,371 Triliun pada Tahun Anggaran 2019 (mengalami peningkatan sebesar 1,94% dari Tahun Anggaran 2018). Pandemi Covid 19 yang memicu terjadinya krisis kesehatan dan resesi ekonomi yang terjadi sejak Tahun 2020 telah berdampak pada menurunnya belanja daerah. Kondisi ini tercermin dari menurunnya belanja daerah yaitu dari Rp. 4,371 Triliun pada Tahun Anggaran 2019

menjadi Rp. 3,511 Triliun pada Tahun Anggaran 2020 (mengalami penurunan sebesar -19,67% dari Tahun Anggaran 2019). Seiring dengan meredanya Pandemi Covid 19 dan mulai pulihnya perekonomian pada Tahun 2021, belanja daerah mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya belanja daerah yaitu dari Rp. 3,511 Triliun pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp. 4,127 Triliun pada Tahun Anggaran 2021 (mengalami peningkatan sebesar 17,55% dari Tahun Anggaran 2020). Pada Tahun Anggaran 2022, belanja daerah mencapai Rp. 4,435 Triliun (mengalami peningkatan sebesar 7,46% dari Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp. 4,127 Triliun). Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2018-2022 mencapai 3,47% per tahun.

Tingkat penyerapan belanja daerah yang diukur dengan tingkat capaian realisasi belanja daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan belanja daerah sebagaimana yang telah dianggarkan (ditargetkan). Pada periode Tahun Anggaran 2018-2022, perkembangan tingkat capaian realisasi belanja daerah Kota Tangerang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya tingkat capaian realisasi belanja daerah dari 88,97% pada Tahun Anggaran 2018 menjadi 90,32% pada Tahun Anggaran 2022. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah Kota Tangerang dalam merealisasikan belanja daerah semakin membaik. Rata-rata tingkat capaian realisasi belanja daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2018-2022 mencapai 87,89%. Berikut ini diuraikan anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)	Laju Pertumbuhan (%)
	Belanja Daerah	Belanja Daerah		
2018	4.819.502.559.996	4.288.007.523.239	88,97	10,06
2019	5.039.952.537.109	4.371.084.765.016	86,73	1,94
2020	4.061.484.660.063	3.511.434.248.531	86,46	-19,67
2021	4.757.820.003.689	4.127.780.205.111	86,76	17,55
2022	4.910.705.325.360	4.435.538.246.975	90,32	7,46
Jumlah	23.589.465.086.217	20.733.844.988.872	87,89	3,47

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

Struktur belanja daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian
5	BELANJA DAERAH
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.01	Belanja Pegawai
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.03	Belanja Bunga
5.1.04	Belanja Subsidi
5.1.05	Belanja Hibah
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial
5.2	BELANJA MODAL
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA
5.4	BELANJA TRANSFER

Berikut ini diuraikan perkembangan realisasi dan pertumbuhan komponen belanja daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.8
Realisasi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2018-2022

Kode	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
		Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)	Realisasi (LRA)	Rata-Rata Laju Pertumbuhan
5	BELANJA DAERAH	4.288.007.523.239	4.371.084.765.016	3.511.434.248.531	4.127.780.205.111	4.435.538.246.975	3,47%
5.1	BELANJA OPERASI	3.262.044.997.037	3.429.688.543.026	3.147.357.742.439	3.485.492.467.043	3.770.033.198.954	5,82%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.409.820.361.786	1.451.645.616.203	1.375.906.414.013	1.410.431.592.403	1.521.789.519.475	3,25%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.765.938.610.251	1.939.364.962.863	1.683.063.937.951	2.002.915.011.561	2.070.662.089.034	7,25%
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	33.189.146.424	36.307.225.374	
5.1.05	Belanja Hibah	86.286.025.000	38.677.963.960	88.387.390.475	28.330.516.655	123.616.079.071	73,37%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	10.626.200.000	17.658.286.000	
5.2	BELANJA MODAL	1.024.531.835.683	880.363.219.623	278.145.148.771	555.016.076.281	651.994.145.914	7,12%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.144.727	58.665.053.367	83.193.114.321	87.271.661.787	13.510.902.107	37625,35%
5.4	BELANJA TRANSFER	1.399.545.792	2.367.949.000	2.738.243.000	0	0	

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Tahun 2023

A. Belanja Operasi

Realisasi dan pertumbuhan belanja operasi Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 3,262 Triliun.
- Tahun 2019 = Rp. 3,429 Triliun.
- Tahun 2020 = Rp. 3,147 Triliun.
- Tahun 2021 = Rp. 3,485 Triliun.
- Tahun 2022 = Rp. 3,770 Triliun.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 5,82% per tahun.

Belanja operasi terdiri dari komponen : (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja bunga, (4) belanja subsidi, (5) belanja hibah, dan (6) belanja bantuan sosial. Berikut ini diuraikan realisasi dan pertumbuhan komponen belanja operasi Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

1. Belanja Pegawai

Realisasi dan pertumbuhan belanja pegawai Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 1,409 Triliun.
- Tahun 2019 = Rp. 1,451 Triliun.
- Tahun 2020 = Rp. 1,375 Triliun.
- Tahun 2021 = Rp. 1,410 Triliun.
- Tahun 2022 = Rp. 1,521 Triliun.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 3,25% per tahun.

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi dan pertumbuhan belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 1,765 Triliun.
- Tahun 2019 = Rp. 1,939 Triliun.
- Tahun 2020 = Rp. 1,683 Triliun.
- Tahun 2021 = Rp. 2,002 Triliun.
- Tahun 2022 = Rp. 2,070 Triliun.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 7,25% per tahun.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dianggarkan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018-2022.

4. Belanja Subsidi

Realisasi dan pertumbuhan belanja subsidi Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 0,000 Miliar.
- Tahun 2019 = Rp. 0,000 Miliar.
- Tahun 2020 = Rp. 0,000 Miliar.
- Tahun 2021 = Rp. 33,189 Miliar.
- Tahun 2022 = Rp. 36,307 Miliar.

5. Belanja Hibah

Realisasi dan pertumbuhan belanja hibah Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 86,286 Miliar.
- Tahun 2019 = Rp. 38,677 Miliar.
- Tahun 2020 = Rp. 88,387 Miliar.
- Tahun 2021 = Rp. 28,330 Miliar.
- Tahun 2022 = Rp. 123,616 Miliar.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 73,37% per tahun.

6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi dan pertumbuhan belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 0,000 Miliar.
- Tahun 2019 = Rp. 0,000 Miliar.
- Tahun 2020 = Rp. 0,000 Miliar.
- Tahun 2021 = Rp. 10,626 Miliar.
- Tahun 2022 = Rp. 17,658 Miliar.

B. Belanja Modal

Realisasi dan pertumbuhan belanja modal Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 1,024 Triliun.
- Tahun 2019 = Rp. 0,880 Triliun.
- Tahun 2020 = Rp. 0,278 Triliun.
- Tahun 2021 = Rp. 0,555 Triliun.
- Tahun 2022 = Rp. 0,651 Triliun.
- Rata-rata laju pertumbuhan mencapai 7,12% per tahun.

C. Belanja Tidak Terduga

Realisasi dan pertumbuhan belanja tidak terduga Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 0,031 Miliar.
- Tahun 2019 = Rp. 58,665 Miliar.
- Tahun 2020 = Rp. 83,193 Miliar.
- Tahun 2021 = Rp. 87,271 Miliar.
- Tahun 2022 = Rp. 13,510 Miliar.

D. Belanja Transfer

Realisasi dan pertumbuhan belanja transfer Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 = Rp. 1,399 Miliar.
- Tahun 2019 = Rp. 2,367 Miliar.
- Tahun 2020 = Rp. 2,738 Miliar.
- Tahun 2021 = Rp. 0,000 Miliar.
- Tahun 2022 = Rp. 0,000 Miliar.

Berikut ini diuraikan analisis belanja daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2018-2022.

A. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah sering digunakan untuk mengukur keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap kepentingan pelayanan masyarakat. Semakin rendah proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah terhadap total pengeluaran dalam APBD menunjukkan semakin tinggi keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap kepentingan pelayanan masyarakat. Berikut ini diuraikan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah (belanja pegawai) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.9
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah
Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Belanja Aparatur (Pegawai)	Belanja Daerah	Proporsi Belanja Aparatur (Pegawai) Terhadap Belanja Daerah (%)
	Realisasi	Realisasi	
2018	1.409.820.361.786	4.288.007.523.239	32,88
2019	1.451.645.616.203	4.371.084.765.016	33,21
2020	1.375.906.414.013	3.511.434.248.531	39,18
2021	1.410.431.592.403	4.127.780.205.111	34,17
2022	1.521.789.519.475	4.435.538.246.975	34,31
Jumlah	7.169.593.503.880	20.733.844.988.872	34,58

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah atau belanja pegawai terhadap belanja daerah Kota Tangerang dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Kondisi tercermin dari meningkatnya proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah atau belanja pegawai terhadap belanja daerah dari 32,88% pada Tahun Anggaran 2018 menjadi 34,31% pada Tahun Anggaran 2022. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kota Tangerang dari sisi proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak lagi mendominasi terhadap total belanja daerah dalam APBD. Rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah atau belanja pegawai terhadap belanja daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 mencapai 34,58% per tahun.

3.1.1.3. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Adapun komponen pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan, meliputi:
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - Pencairan Dana Cadangan.
 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 - Penerimaan Pinjaman Daerah.
 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
 - Penerimaan Piutang Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:
 - Pembentukan Dana Cadangan.
 - Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.
 - Pembayaran Pokok Utang.
 - Pemberian Pinjaman Daerah.

A. Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah

Berikut ini diuraikan perkembangan realisasi dan pertumbuhan pembiayaan daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.10
Realisasi dan Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022

Kode	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
		Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)	Realisasi (LRA)	Rata-Rata Laju Pertumbuhan
	SURPLUS (DEFISIT)	-316.436.071.837	-93.425.411.187	137.229.198.272	85.274.319.319	-161.090.948.832	-334,35%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	877.066.684.562	545.634.592.725	452.209.160.887	589.431.699.180	662.940.604.675	-1,99%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	892.734.325.762	560.634.592.725	452.209.160.887	589.431.699.180	674.703.644.225	-1,67%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	892.734.325.762	560.634.592.725	452.209.160.887	589.431.699.180	674.703.644.225	-1,67%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.667.641.200	15.000.000.000	0	0	11.763.039.550	104,62%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.667.641.200	15.000.000.000	0	0	11.763.039.550	104,62%
	PEMBIAYAAN NETTO	877.066.684.562	545.634.592.725	452.209.160.887	589.431.699.180	662.940.604.675	-1,99%
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	560.630.612.725	452.209.181.538	589.438.359.159	674.706.018.499	501.849.655.843	-7,47%

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

Perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dimana pada Tahun Anggaran 2018 realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp. 877,066 Milyar menurun menjadi Rp. 662,940 Milyar pada Tahun Anggaran 2022. Salah satu sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang mengalami penurunan dari Rp. 892,734 Milyar pada Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 674,703 Milyar pada Tahun Anggaran 2022.

B. Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran dalam menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah yang dilakukan. Berikut ini diuraikan defisit riil anggaran daerah dan komposisi penutup defisit riil anggaran daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.11
Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	3.971.571.451.402	4.277.659.353.829	3.648.663.446.803	4.213.054.524.430	4.274.447.298.143
	Dikurangi realisasi :					
2.	Belanja Daerah	4.288.007.523.239	4.371.084.765.016	3.511.434.248.531	4.127.780.205.111	4.435.538.246.975
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.667.641.200	15.000.000.000	0	0	11.763.039.550
A	Defisit riil	-332.103.713.037	-108.425.411.187	137.229.198.272	85.274.319.319	-161.090.948.832
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	892.734.325.762	560.634.592.725	452.209.160.887	589.431.699.180	674.703.644.225
5.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
9.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	892.734.325.762	560.634.592.725	452.209.160.887	589.431.699.180	662.940.604.675
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	560.630.612.725	452.209.181.538	589.438.359.159	674.706.018.499	501.849.655.843

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	Defisit Riil	-332.103.713.037	-108.425.411.187	137.229.198.272	85.274.319.319	-161.090.948.832
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	892.734.325.762	560.634.592.725	452.209.160.887	589.431.699.180	674.703.644.225
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan daerah	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
7.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	560.630.612.725	452.209.181.538	589.438.359.159	674.706.018.499	501.849.655.843

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan kedua tabel tersebut, pada periode Tahun Anggaran 2018-2022 menunjukkan bahwa defisit riil anggaran tersebut ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Pemerintah Kota Tangerang lebih memanfaatkan penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dalam upaya menutup defisit anggaran yang terjadi.

C. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Komponen sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022 terdiri atas : (a) Pelampauan Penerimaan PAD; (b) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; (c) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (d) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan; (e) Penghematan Belanja, (f) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terealisasi; (g) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan (h) Sisa Belanja Lainnya.

Analisis terhadap Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Berikut ini diuraikan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.13
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah SILPA	892.734.325.762	560.634.592.725	452.209.160.887	589.431.699.180	674.703.644.225
1.	Pelampauan Penerimaan PAD				142.443.926.796	-76.550.250.321
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer				-92.177.911.833	-5.611.869.757
3.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				-52.874.259.936	91.997.383
4.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan				0	0
5.	Penghematan Belanja				515.788.887.613	598.489.866.858
6.	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan				0	0
7.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan				0	-14.704.640.668
8.	Sisa Belanja Lainnya				76.251.056.540	172.988.540.730

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

D. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan Kota Tangerang selama Tahun Anggaran 2018-2022 bersumber dari Saldo Kas Neraca Daerah. Analisis terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk mengetahui gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 3.14
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Saldo Kas Neraca Daerah	560.630.612.725	452.209.181.538	589.438.359.159	674.706.018.499	501.849.655.843
	Dikurangi					
2	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	0	0	0	0	0
3.	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	560.630.612.725	452.209.181.538	589.438.359.159	674.706.018.499	501.849.655.843

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

3.2.2. Neraca Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai tingkat rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Berikut ini diuraikan perkembangan neraca keuangan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018-2021.

Tabel 3.15
Perkembangan Neraca Keuangan Daerah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2018-2021

No.	Uraian	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)
1	ASET				
1.1	ASET LANCAR				
1.1.1	Kas dan Setara Kas	561.015.406.551	452.808.287.891	588.687.275.588	674.680.134.189
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0
1.1.3	Piutang	212.518.274.231	218.880.259.742	467.062.731.008	355.512.971.510
1.1.4	Beban Dibayar di Muka	405.488.281	6.252.208.199	6.373.086.735	896.761.940
1.1.5	Persediaan	88.351.331.784	78.455.721.699	72.627.464.751	92.409.955.181
	Jumlah Aset Lancar	862.290.500.847	756.396.477.531	1.134.750.558.082	1.123.499.822.820
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1.2.1	Investasi jangka Panjang Permanen	133.447.552.859	151.305.294.570	241.617.280.041	236.693.473.715
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	133.447.552.859	151.305.294.570	241.617.280.041	236.693.473.715
1.3	ASET TETAP				
1.3.1	Tanah	3.309.229.865.530	3.648.653.782.155	4.111.734.667.449	10.621.161.000.349
1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.335.429.086.209	1.522.345.431.808	1.581.549.609.167	1.636.876.387.058
1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.101.507.177.912	2.194.784.198.382	2.261.375.828.255	2.279.250.461.299
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.078.432.713.088	4.568.483.094.609	4.807.596.419.504	5.120.738.702.368
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	89.471.064.560	102.099.276.589	115.582.874.797	127.714.190.344
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.311.224.839	71.167.922.713	7.416.894.970	53.325.561.366
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-4.223.904.656.391	-4.929.982.408.983	-5.130.985.464.775	-5.721.570.705.710
	Jumlah Aset Tetap	6.734.476.475.746	7.177.551.297.272	7.754.270.829.367	14.117.495.597.074
1.4	ASET LAINNYA				
1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	18.745.833	6.154.167	22.775.067	9.776.677
1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.272.000.000	11.272.000.000	11.272.000.000	11.272.000.000
1.4.3	Aset Tak Berwujud	18.226.570.939	18.907.035.024	19.355.435.025	21.472.727.025
1.4.4	Amortisasi	-15.577.114.095	-17.133.101.752	-18.321.180.275	-19.455.183.025
1.4.5	Aset Lain-lain	100.526.800.224	96.797.698.112	91.572.158.064	96.573.711.773
	Jumlah Aset Lainnya	114.467.002.902	109.849.785.550	103.901.187.880	109.873.032.450
	JUMLAH ASET	7.844.681.532.354	8.195.102.854.924	9.234.539.855.370	15.587.561.926.060
2	KEWAJIBAN				
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				

No.	Uraian	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.022.002.556	599.106.353	606.598.704	12.212.374
2.1.2	Utang Bunga	0	0	0	0
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0
2.1.4	Pendapatan Diterima di Muka	1.520.230.148	1.135.734.513	1.821.627.205	7.948.796.801
2.1.5	Utang Belanja	6.909.510.155	7.023.472.951	6.663.245.577	6.286.391.338
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	150.000.000	150.000.000
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	9.451.742.859	8.758.313.817	9.241.471.486	14.397.400.513
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	9.451.742.859	8.758.313.817	9.241.471.486	14.397.400.513
3	EKUITAS				
3.1	EKUITAS				
3.1.1	Ekuitas	7.835.229.789.495	8.186.344.541.108	9.225.298.383.885	15.573.164.525.547
	JUMLAH EKUITAS	7.835.229.789.495	8.186.344.541.108	9.225.298.383.885	15.573.164.525.547
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.844.681.532.354	8.195.102.854.925	9.234.539.855.370	15.587.561.926.060

Sumber: BPKD Kota Tangerang, Tahun 2023

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTN), dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan. Untuk Hasil Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah langkah yang dilakukan antara lain:

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD; dan
4. Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional.

Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2014-2020, untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan berbagai langkah dan upaya berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

A. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

Intensifikasi pajak dan/atau retribusi daerah merupakan upaya memperbesar penerimaan yang dilakukan dengan cara melakukan pemungutan lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi yang telah dilakukan antara lain adalah:

1. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha);
2. Melakukan pendataan untuk memperoleh data Subjek/Objek Pajak yang belum terdaftar;
3. Melakukan pemanggilan secara terus menerus terhadap Subjek Pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak;
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak dan Wajib retribusi agar yang bisa memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya;
5. Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya;
6. Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran;
7. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan SKPD pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah;
8. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan cara peningkatan, pengendalian, dan pengawasan;
9. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana;
10. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;
11. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan; dan
12. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu.

B. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

Ekstensifikasi pajak dan/atau retribusi daerah merupakan upaya menggali sumber-sumber PAD yang baru dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Jenis dan kriteria pajak dan retribusi daerah yang dikembangkan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Obyek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan

3.2.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelompokkan belanja daerah Tahun Anggaran 2018-2022 meliputi : belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan tetap mengacu pada pengelompokan belanja berdasarkan struktur program, yang dibagi ke dalam bidang pembangunan, fungsi, program, dan kegiatan.

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan, yaitu:

1. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;
2. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
3. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*); dan
4. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (*urgensitas*) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah Daerah Kota Tangerang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program/kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan yang dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya.

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari :

- urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
- urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
- urusan pemerintahan pilihan
- unsur pendukung urusan pemerintahan
- unsur penunjang urusan pemerintahan
- unsur pengawasan urusan pemerintahan
- unsur kewilayahan
- unsur pemerintahan umum

Adapun kebijakan alokasi belanja daerah Kota Tangerang pada Tahun 2024-2026 diarahkan pada skala prioritas sebagai berikut:

- Peningkatan daya saing sumber daya manusia.
- Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- Peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur kota.
- Peningkatan daya saing tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.

Pemerintah Daerah Kota Tangerang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, OPD, maupun program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program/kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan yang dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis prediksi pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja daerah, dan kapasitas penerimaan pembiayaan daerah Kota Tangerang untuk lima tahun mendatang.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi Tahun Anggaran 2024-2026 untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Pendapatan daerah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mencapai Rp. 4.731.968.247.168 (meningkat sekitar 3,75% dari APBD Tahun Anggaran 2023) serta diharapkan meningkat menjadi Rp. 4.948.642.896.384 pada Tahun Anggaran 2025 (meningkat sekitar 4,58% dari proyeksi Tahun Anggaran 2024) dan Rp. 5.170.685.155.439 pada Tahun Anggaran 2026 (meningkat sekitar 4,49% dari proyeksi Tahun Anggaran 2025).

Berikut ini diuraikan proyeksi pendapatan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024-2026.

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024-2026

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi (LRA)	Anggaran (APBD)	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
4	PENDAPATAN DAERAH	4.274.447.298.143	4.560.974.298.091	4.731.968.247.168	4.948.642.896.384	5.170.685.155.439
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.012.215.328.325	2.295.294.341.258	2.363.435.216.254	2.542.345.477.240	2.723.561.606.082
4.1.01	Pajak Daerah	1.737.097.335.762	1.978.098.757.658	2.057.575.022.289	2.218.368.849.279	2.373.531.726.894
4.1.02	Retribusi Daerah	54.676.438.313	104.375.800.000	81.514.388.263	89.510.790.359	98.497.956.449
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.068.451.042	25.167.335.649	23.467.177.212	25.270.141.179	33.344.853.377
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	206.373.103.208	187.652.447.951	200.878.628.491	209.195.696.423	218.187.069.361
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.261.562.033.794	2.265.679.956.833	2.368.533.030.914	2.406.297.419.144	2.447.123.549.357
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.517.098.158.222	1.607.618.457.000	1.596.255.153.000	1.596.255.153.000	1.596.255.153.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	744.463.875.572	658.061.499.833	772.277.877.914	810.042.266.144	850.868.396.357
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	669.936.024	0	0	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	669.936.024	0	0	0	0

Sumber : BPKD, BAPENDA Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

Keterangan :

- Tahun 2022 : Realisasi LRA
- Tahun 2023 : Anggaran APBD Tahun 2023
- Tahun 2024-2026 : Hasil Analisis Tahun 2023
- Tahun 2023 (APBD) : Bantuan Keuangan Pada Pendapatan Transfer Antar Daerah Tidak Diproyeksikan
- Tahun 2024-2026 : Bantuan Keuangan Pada Pendapatan Transfer Antar Daerah Tidak Diproyeksikan; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pada Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Tidak Diproyeksikan

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Belanja daerah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mencapai Rp. 5.242.108.989.388 (meningkat sekitar 2,76% dari APBD Tahun Anggaran 2023) dan diharapkan menjadi Rp. 5.420.432.705.429 pada Tahun Anggaran 2025 (meningkat sekitar 3,40% dari proyeksi Tahun Anggaran 2024) dan Rp. 5.604.319.771.873 pada Tahun 2026 Anggaran (meningkat sekitar 3,39% dari proyeksi Tahun Anggaran 2025).

Berikut ini diuraikan proyeksi belanja daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024-2026.

Tabel 3.17
Proyeksi Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024-2026

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi (LRA)	Anggaran (APBD)	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
5	BELANJA DAERAH	4.435.538.246.975	5.101.407.422.199	5.242.108.989.388	5.420.432.705.429	5.604.319.771.873
5.1	BELANJA OPERASI	3.770.033.198.954	4.128.367.600.616	4.158.104.516.949	4.165.252.672.146	4.167.657.154.344
5.1.01	Belanja Pegawai	1.521.789.519.475	1.797.104.971.372	1.797.104.971.372	1.797.104.971.372	1.797.104.971.372
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.662.089.034	2.120.677.709.394	2.199.120.397.795	2.241.268.552.992	2.243.673.035.190
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	36.307.225.374	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	123.616.079.071	171.022.919.850	122.317.147.782	87.317.147.782	87.317.147.782
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.658.286.000	2.562.000.000	2.562.000.000	2.562.000.000	2.562.000.000
5.2	BELANJA MODAL	651.994.145.914	937.457.147.022	1.048.421.797.878	1.219.597.358.721	1.401.079.942.968
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.510.902.107	35.582.674.561	35.582.674.561	35.582.674.561	35.582.674.561
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0

Sumber : BPKD, BAPENDA Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

Keterangan :

- Tahun 2022 : Realisasi LRA
- Tahun 2023 : Anggaran APBD Tahun 2023
- Tahun 2024-2026 : Hasil Analisis Tahun 2023

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung proyeksi kapasitas penerimaan pembiayaan daerah pada masa mendatang.

Berikut ini diuraikan proyeksi pembiayaan daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024-2026.

Tabel 3.18
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Anggaran Tahun 2024-2026

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi (LRA)	Anggaran (APBD)	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
	SURPLUS (DEFISIT)	(662,942,973,476.00)	(540,433,124,108.00)	(510,140,742,220.00)	(471,789,809,045.00)	(433,634,616,434.00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	662,942,973,476.00	540,433,124,108.00	510,140,742,220.00	471,789,809,045.00	433,634,616,434.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	674,706,018,499.00	540,433,124,108.00	510,140,742,220.00	476,789,809,045.00	438,634,616,424.00
6.1.0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	674,706,018,499.00	540,433,124,108.00	510,140,742,220.00	471,789,809,045.00	433,634,616,434.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11,763,045,023.00	-	-	-	-
6.2.0	Penyertaan Modal Daerah	11,763,045,023.00	-	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	662,942,973,476.00	540,433,124,108.00	510,140,742,220.00	471,789,809,045.00	433,634,616,434.00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-	-

Sumber : BPKD, BAPENDA Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2023

Keterangan :

- Tahun 2022 : Realisasi LRA
- Tahun 2023 : Anggaran APBD Tahun 2023
- Tahun 2024-2026 : Hasil Analisis Tahun 2023



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Potensi Pembangunan Daerah

Potensi pembangunan daerah merupakan kondisi yang menjadi kekuatan pembangunan daerah yang mencakup : aspek fisik (geografi, topografi, hidrologi), aspek sumber daya manusia (demografi), aspek perekonomian, serta aspek infrastruktur, pengembangan kawasan dan wilayah. Berikut ini diuraikan potensi pembangunan Kota Tangerang.

4.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Potensi pembangunan daerah pada aspek geografi dan demografi adalah sebagai berikut:

- **Kondisi topografi wilayah yang landai**
Sebagian besar wilayah Kota Tangerang memiliki kondisi topografi yang landai (0-3%) yang mendukung bagi pengembangan kegiatan perkotaan.
- **Ketersediaan potensi sumber air baku**
Kota Tangerang memiliki potensi sumber air baku yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri, yaitu dengan terdapatnya banyak sungai di wilayah Kota Tangerang, seperti Sungai Cisadane, Sungai Cirarab, Kali Angke, dan beberapa anak sungainya.
- **Jumlah penduduk yang besar**
Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu 1.930.556 jiwa pada Tahun 2022 yang dapat menjadi potensi pembangunan.
- **Kelompok usia produktif yang tinggi**
Struktur penduduk Kota Tangerang menurut kelompok umur pada Tahun 2022 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu 1.364.631 jiwa (70,69%).

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Potensi pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- **Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan semakin membaik**

Kondisi perekonomian Kota Tangerang semakin membaik yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi (LPE), yaitu dari terkontraksi -6,93% pada Tahun 2020 menjadi 3,70% pada Tahun 2021. Kondisi ini mencerminkan mulai terjadinya proses pemulihan perekonomian semenjak terjadinya Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan resesi ekonomi pada Tahun 2020.

- **Derajat kesehatan masyarakat semakin membaik**

Derajat kesehatan masyarakat Kota Tangerang yang tinggi dan semakin membaik tercermin dari meningkatnya indeks kesehatan (indeks harapan hidup), yaitu dari 79,38 point (umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,60 tahun) pada Tahun 2021 menjadi 79,86 point (umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,91 tahun) pada Tahun 2022.

- **Kualitas pendidikan masyarakat semakin membaik**

Kualitas pendidikan masyarakat Kota Tangerang yang cukup tinggi dan semakin baik tercermin dari meningkatnya indeks pendidikan, yaitu dari 74,63 point (harapan lama sekolah (HLS) mencapai 13,87 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 10,83 tahun) pada Tahun 2021 menjadi 74,69 point (harapan lama sekolah (HLS) mencapai 13,88 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 10,84 tahun) pada Tahun 2022.

- **Daya beli masyarakat semakin membaik**

Daya beli masyarakat Kota Tangerang yang tinggi dan semakin baik tercermin dari meningkatnya indeks daya beli masyarakat, yaitu dari 81,65 point (pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PKP) mencapai Rp. 14.575 ribu) pada Tahun 2021 menjadi 82,34 point (pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PKP) mencapai Rp. 14.909 ribu) pada Tahun 2022.

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Potensi pembangunan daerah pada aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut:

- **Keberadaan kawasan industri, pusat perdagangan dan jasa**

Perekonomian Kota Tangerang didominasi oleh kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang merupakan sektor basis dan unggulan kota yang mampu membangkitkan dan menggerakkan sektor-sektor perekonomian lainnya.

- **Infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang cukup memadai**
Kota Tangerang didukung oleh ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dalam mendukung aktivitas masyarakat. Kondisi ini tercermin dengan tersedianya sistem transportasi umum perkotaan, pelayanan air bersih dan minum, pengolahan air limbah domestik, persampahan, energi, fasilitas Pendidikan, Kesehatan, olah raga, taman, dan lain-lain.
- **Letak geografis yang strategis**
Kota Tangerang memiliki nilai geostrategis yang sangat penting dalam konstelasi nasional karena letaknya yang berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (berjarak ±27 km).
- **Aksesibilitas yang baik**
Kota Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik terhadap kota Jakarta dan kota-kota penting di Provinsi Banten dan Jawa Barat serta terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, yaitu dengan adanya Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak, jalan rel kereta api double track Tangerang-Jakarta, perpanjangan koridor IV Busway Kalideres-Tangerang, serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
- **Ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)**
Kota Tangerang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu dalam RTRW Nasional yang diprioritaskan pengembangannya dalam skala nasional.
- **Ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**
Kota Tangerang ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi dalam RTRW Provinsi Banten yang diprioritaskan pengembangannya dalam skala Provinsi Banten.
- **Dukungan kebijakan transportasi Provinsi DKI Jakarta**
Adanya rencana pengembangan sistem transportasi massal terpadu dengan daerah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta.

4.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah mencakup permasalahan pembangunan daerah pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

4.2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan daerah pada aspek geografi dan demografi adalah sebagai berikut:

- **Kemacetan**

Kemacetan yang masih sering terjadi di Kota Tangerang antara lain disebabkan oleh:

- 1) Ketersediaan kapasitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan sesuai standar belum memadai.
- 2) Ketersediaan, kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan belum memadai serta pengelolaan sistem transportasi umum belum terintegrasi secara keseluruhan dan belum memenuhi sepenuhnya standar keselamatan.

- **Banjir dan genangan**

Banjir dan genangan masih sering terjadi di Kota Tangerang sehingga sampai dengan Tahun 2021 masih terdapat 581,27 Ha luasan banjir dan genangan yang terjadi, kondisi ini antara lain disebabkan oleh:

- 1) Ketersediaan, kapasitas dan kualitas sistem jaringan sumber daya air dan drainase perkotaan belum memadai.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pengendali banjir belum memadai.

- **Permukiman kumuh**

Penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Tangerang belum tertangani sepenuhnya sehingga sampai dengan Tahun 2021 masih terdapat 19,3 Ha kawasan permukiman kumuh, kondisi ini antara lain disebabkan oleh:

- 1) Rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tertangani sepenuhnya.
- 2) Ketersediaan dan kualitas prasarana sarana dasar permukiman belum memadai.

- **Ketersediaan, cakupan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana, dan fasilitas kota belum memadai dan optimal**

Ketersediaan, cakupan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana, dan fasilitas kota di Kota Tangerang masih belum memadai dan optimal, kondisi ini antara lain disebabkan oleh:

- 1) Cakupan dan kualitas pelayanan air minum perpipaan belum memadai.
- 2) Kapasitas pengelolaan IPAL air limbah belum memadai.
- 3) Kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan belum optimal.

- **Kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan resiko bencana belum memadai**

Kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan resiko bencana di Kota Tangerang belum memadai, kondisi ini antara lain disebabkan oleh:

- 1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum optimal.
- 2) Perubahan iklim (pemanasan global) dan alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan yang mengakibatkan turunnya daya dukung lingkungan hidup.
- 3) Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) belum memadai.
- 4) Ketersediaan dokumen rencana tata ruang belum memadai dan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.
- 5) Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal.

- **Kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan dunia usaha**

Kualitas sumber daya manusia Kota Tangerang belum sepenuhnya mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

4.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- **Tingkat kemiskinan cukup tinggi**

Tingkat kemiskinan masyarakat Kota Tangerang pada Tahun 2022 mencapai 5,77% termasuk di dalamnya masih ditemukan *miskin ekstrim*. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pemerataan kesejahteraan ekonomi dan upaya penanganan kemiskinan yang belum terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan struktur permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin. kondisi ini antara lain disebabkan oleh:

- 1) Akses masyarakat miskin terhadap lapangan dan kesempatan kerja terbatas.

- 2) Keberlanjutan penghasilan dan mata pencaharian masyarakat miskin belum memadai.
 - 3) Akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan pokok terbatas.
 - 4) Akses masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak huni terbatas.
 - 5) Akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas belum memadai.
 - 6) Implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH, KUBE, JKN KIS, KIP, PSKS, dll) belum optimal.
 - 7) Pemutakhiran data kemiskinan belum optimal.
 - 8) Upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin belum memadai.
- **Tingkat pengangguran cukup tinggi**
Tingkat pengangguran masyarakat Kota Tangerang pada Tahun 2022 mencapai 7,16% yang mencerminkan belum optimalnya pembangunan ketenagakerjaan. kondisi ini antara lain disebabkan oleh:
 - 1) Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dan kesempatan berusaha belum memadai.
 - 2) Kualitas dan produktivitas tenaga kerja belum memadai.
 - **Pembangunan pendidikan belum optimal**
Pembangunan pendidikan di Kota Tangerang masih belum optimal. kondisi ini antara lain disebabkan oleh:
 - 1) Akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas belum optimal.
 - 2) Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar belum memadai.
 - 3) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum memadai.
 - 4) Literasi dan gemar membaca masyarakat belum memadai.
 - 5) Pengelolaan, Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah Belum Optimal
 - **Pengelolaan kesehatan belum optimal**
Pembangunan kesehatan di Kota Tangerang masih belum optimal. Dimana masih terdapat gizi buruk, *stunting* dan permasalahan kesehatan lainnya. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh:
 - 1) Kualitas gizi masyarakat belum sepenuhnya baik.
 - 2) Kualitas kesehatan lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat yang belum memadai.
 - 3) Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas belum memadai dan optimal.
 - 4) Prestasi dan pemasyarakatan olahraga belum optimal.

- **Pembangunan kesejahteraan sosial belum optimal**

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Tangerang masih belum optimal. kondisi ini antara lain disebabkan oleh:

- 1) Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Tahun 2021 sebanyak 104.910 jiwa, yang menunjukkan belum optimalnya upaya perlindungan dan pemberdayaan PMKS.
- 2) Kerawanan dan ketahanan pangan masyarakat.
- 3) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal.
- 4) Pengendalian penduduk serta peningkatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera belum optimal.

- **Daya saing perekonomian belum memadai**

Daya saing perekonomian Kota Tangerang belum memadai. kondisi ini antara lain disebabkan oleh:

- 1) Pelayanan Perijinan dan Investasi Belum Optimal.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Perdagangan Belum Optimal.
- 3) Kualitas Produk Industri dan IKM Belum Berdaya Saing.
- 4) Peran Koperasi Sebagai Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan Belum Berkembang dengan Baik.
- 5) Kualitas Produk UMKM Belum Memadai.
- 6) Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum Optimal.
- 7) Produktivitas Pertanian dan Perikanan Belum Optimal.

4.2.3. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut bidang urusan pemerintahan. Berikut ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum.

4.2.3.1. Fokus Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan fasilitas PAUD, fasilitas pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs yang memadai dan terjangkau masih perlu ditingkatkan.
2. Ketersediaan tenaga pendidik non formal masih terbatas.

3. Penerapan RPP, KTSP, dan MBS untuk satuan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih perlu ditingkatkan.
4. Layanan Pendidikan berkualitas belum Optimal.
5. Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum Optimal
6. Tingkat kelulusan dan kualitas pendidikan belum optimal
7. Jalinan kerjasama Pendidikan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri belum optimal.
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan belum optimal

1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Akses masyarakat terhadap tingkat pelayanan kesehatan yang bermutu perlu ditingkatkan untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Masih beredarnya bahan-bahan berbahaya dan mudahnya memperoleh bahan-bahan berbahaya tersebut serta belum adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur secara jelas peredaran bahan-bahan tersebut.
3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat belum sepenuhnya menjadi budaya hidup masyarakat, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang:
 - a. Bahan berbahaya.
 - b. Kesehatan lingkungan.
 - c. Pemeriksaan kesehatan pra usila dan usila.
 - d. Kunjungan ibu hamil K4.
 - e. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
4. Tingkat ketersediaan data dasar kesehatan masih perlu ditingkatkan.
5. Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas SDM aparatur sesuai dengan standar kompetensi.
6. Belum memadainya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan untuk mendukung pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
7. Belum semua unit Dinas Kesehatan memiliki Standar Operasional Prosedur, dan belum tersusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) pada unit-unit yang memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat).
8. Belum sesuaiya kebutuhan obat dengan perencanaannya.
9. Masih rendahnya tingkat pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan obat dan bahan berbahaya
10. Masih rendahnya rumah tangga yang berperilaku hidup sehat (PHBS).
11. Masih rendahnya persentase posyandu purnama & mandiri.
12. Masih rendahnya persentase posyandu aktif.
13. Cukup tingginya persentase balita gizi buruk.

14. Masih banyaknya prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi.
15. Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang.
16. Masih rendahnya persentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif.
17. Masih adanya rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan.
18. Masih adanya keluarga yang belum memiliki jamban yang memenuhi syarat kesehatan.
19. Tingkat prevalensi TB Paru yang relatif besar.
20. Masih rendahnya persentase penderita diare ditemukan.
21. Masih rendahnya persentase penemuan dan penanganan Pneumonia Balita.
22. Meningkatnya Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) (per 100.000 penduduk).
23. Rasio dokter umum per satuan penduduk masih dibawah standar yang telah ditetapkan
24. Rasio bidan per satuan penduduk masih dibawah standar yang telah ditetapkan
25. Rasio perawat per satuan penduduk masih dibawah standar yang telah ditetapkan
26. Kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana Puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling yang ada.
27. Belum memiliki Puskesmas perawatan dan masih kurangnya Puskesmas PONED.
28. Kurangnya kesiapan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS).
29. Rendahnya Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila.
30. Belum optimalnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
31. Masih adanya kematian ibu.
32. Masih adanya kematian bayi.
33. Belum optimalnya cakupan pelayanan nifas.
34. Rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani.
35. Masih adanya kematian Balita.
36. Kurangnya pelayanan tumbuh kembang anak dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas.
37. Kurangnya jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan di RS.
38. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana RS.
39. Terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan RS.
40. Belum optimalnya pelayanan RS.

1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Sub Urusan Pekerjaan Umum di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas saluran drainase.
3. Belum optimalnya upaya peningkatan pemeliharaan saluran drainase.
4. Belum optimalnya upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah.
5. Masih adanya titik-titik genangan banjir.
6. Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD untuk melaksanakan kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan.
7. Belum optimalnya upaya pengembangan sistem jaringan air limbah skala komunitas/kawasan belum optimal.
8. Belum optimalnya upaya pengembangan IPLT harus jauh dari lingkungan permukiman.
9. Belum optimalnya upaya pengembangan sistem air limbah setempat yang memadai terkendala oleh ancaman pencemaran air tanah, karena jarak sumur warga dengan septictank (>10 m) tidak memenuhi syarat.
10. Belum optimalnya upaya pengembangan pelayanan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan harus didahului oleh kegiatan pendataan, kajian dan penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum.
11. Belum optimalnya upaya peningkatan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari diperlukan kegiatan pendataan, kajian, monitoring, pemantauan dan sosialisasi.
12. Belum optimalnya upaya pengembangan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU harus didahului oleh kegiatan pendataan, pemetaan dan pengadaan lahan.
13. Belum optimalnya upaya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni, terkendala oleh melambungnya harga rumah flat yang tidak terjangkau oleh MBR.
14. Belum optimalnya upaya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau, terkendala oleh harga tanah yang sangat tinggi.
15. Belum optimalnya upaya pengurangan luasan permukiman kumuh harus didahului oleh kegiatan survey, perencanaan teknis dan rehabilitasi.
16. Ketersediaan Jalan Kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota terkendala karena terbatasnya lebar damija.

17. Ketersediaan Jalan Kota yang memudahkan masyarakat per-individu melakukan perjalanan terkendala karena terbatasnya lebar damija.
18. Masih perlu ditingkatkannya kemantapan kondisi jalan.
19. Kapasitas sungai tidak memadai.
20. Kapasitas resapan air tidak memadai.
21. Kapasitas tandon air tidak mencukupi.
22. Kapasitas drainase tidak memadai.
23. Jaringan drainase belum terhubung dengan optimal.
24. Permasalahan kewenangan penanganan yang merupakan kewenangan pusat dan propinsi.
25. Kapasitas sungai tidak memadai.
26. Kapasitas tandon air tidak mencukupi.
27. Kapasitas resapan air tidak memadai.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Sub Urusan Penataan Ruang di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya RDTR Kecamatan dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang dan ijin mendirikan bangunan.
2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
2. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh di beberapa kelurahan, hal tersebut disebabkan sulitnya lahan terutama untuk menunjang kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (pembangunan MCK komunal dan Sumur Dalam) karena tidak ada biaya pengganti lahan.
3. Belum terjalinnya koordinasi yang intens dan terpadu antar instansi dalam penanggulangan banjir.

1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda Kantramtibmas.
2. Kurang optimalnya hasil pengawasan Kantramtibmas di wilayah.
3. Masih tingginya jumlah pelanggar Perda.
4. Kurangnya aparatur personil Tramtib dan hasil pengawasan Kantramtibmas di wilayah.
5. Kurangnya sarana Prasarana Tramtib.
6. Kurangnya jumlah personil dan minimnya kemampuan SDM dalam pemahaman tentang Perda.
7. Luasnya jangkauan wilayah penertiban yang kurang didukung oleh sarana-prasarana penunjang kegiatan.
8. Belum memadainya tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan.
9. Lemahnya SDM dan sarana prasarana untuk meminimalisir akibat bencana.
10. Belum memadainya kompetensi pegawai dan gedung kantor yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
11. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang peraturan daerah di Kota Tangerang.
12. Masih adanya penyalahgunaan lahan/tempat/usaha, perijinan tertentu yang tidak sesuai dengan Perda.
13. Belum optimalnya pelaksanaan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.
14. Masih terbatasnya sarana-prasarana pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.
15. Belum optimalnya tingkat keterampilan petugas penyelamatan korban bencana.
16. Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
17. Masih kurangnya pemahaman pemilik atau pengguna bangunan melaksanakan sistem proteksi kebakaran.
18. Kompetensi aparatur pemadam kebakaran belum sepenuhnya sesuai standar kualifikasi.
19. Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban.
20. Belum terjalinnya koordinasi yang intens dan terpadu antar instansi dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
21. Belum adanya sistem komunikasi dalam upaya sosialisasi dan penyebaran informasi kebakaran dan bencana lainnya.

1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Sosial di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS.
2. Pengentasan kemiskinan belum tuntas dan belum fokus sesuai dengan struktur permasalahan masyarakat miskin.
3. Belum optimalnya upaya pemanfaatan sumberdaya untuk peningkatan kesejahteraan sosial dalam masyarakat dalam pemberdayaan.
4. Belum optimalnya pelayanan panti yang sejalan dengan Standar Mutu Panti Sosial.
5. Belum tersedianya panti rehabilitasi sosial milik pemerintah daerah.
6. Belum optimalnya pembinaan terhadap Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
7. Belum optimalnya pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial.
8. Belum optimalnya Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3).
9. Belum optimalnya pemberian bantuan sosial korban bencana pada masa tanggap darurat.
10. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam melakukan evakuasi korban bencana.

4.2.3.2. Fokus Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum memadai dengan spesifikasi kebutuhan pembangunan dan dunia kerja.
2. Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi.
3. Terbatasnya akses dan daya saing tenaga kerja lokal terhadap kesempatan kerja.
4. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja.
5. Rawan perselisihan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
6. Masih rendahnya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja.
7. Belum berkualitasnya penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
8. Masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam rangka penyelenggaraan penempatan tenaga kerja.

9. Masih terbatasnya lapangan kerja formal.
10. Masih adanya kasus unjuk rasa/mogok kerja.
11. Terdapatnya perusahaan yang tidak mengikutsertakan perusahaan dan pekerjanya dalam program Jamsostek.
12. Banyaknya kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dicatatkan dan harus diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial.
13. Terdapatnya perusahaan yang melanggar peraturan perundang undangan ketenagakerjaan.
14. Terdapatnya peralatan produksi yang tidak dilaporkan untuk diuji secara periodik.

2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan terhadap kekerasan.
2. Belum optimalnya upaya perlindungan anak terhadap kekerasan dan eksploitasi kerja.
3. Belum optimalnya upaya peranserta dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah.
4. Terbatasnya fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka peran serta pembangunan.

2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pangan di Kota Tangerang adalah:

1. Belum adanya keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan.

2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pertanian di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya mencari lahan yang ideal sesuai kebutuhan OPD yang memerlukan.
2. Belum tercapai kesepakatan harga.
3. Belum lengkapnya surat-surat bukti kepemilikan tanah.

2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat pencemaran air sungai dan situ/danau.
2. Masih tingginya tingkat pencemaran air tanah.
3. Masih tingginya tingkat pencemaran udara dan kebisingan.
4. Belum optimalnya upaya pelayanan pengelolaan persampahan.
5. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap pentingnya Dokumen/Ijin lingkungan, (Air, Udara dan Tanah).
7. Masih sdanya pengelolaan air limbah (IPAL) dari sektor industri dan rumah tangga yang masih melebihi BML.
8. Adanya Pengelolaan limbah sumber tidak Bergerak (cerobong) dari sektor industri dan Kendaraan yang melintas (Sumber Bergerak) yang masih melebihi BML.
9. Luasan lahan dan/atau tanah kritis dan tanah untuk produksi biomassa belum ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.
10. Adanya usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 belum mentaati persyaratan administratif dan teknis pengelolaan limbah B3.
11. Masih kurangnya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
12. Masih kurangnya sistem penanganan sampah di perkotaan.
13. Masih kurangnya lokasi RTH yang tersedia di Kota Tangerang.

2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tangerang adalah:

1. Kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dikarenakan keterbatasan Pengembangan Aplikasi SIAK dan kendala jaringan komunikasi data serta belum optimalnya pengembangan aplikasi SIAK.
2. Masih adanya penduduk wajib KTP yang belum terekam dan tercetak.
3. Belum optimalnya jaringan internet dari Disdukcapil, kurangnya sarana prasarana dan SDM aparatur yang menangani administrasi kependudukan.
4. Masih terbatasnya penyediaan Sarana-Prasarana yang dimiliki yang mendukung pelayanan dinas.
5. Kurangnya implementasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan.
6. Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM aparatur pada Dinas.

2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat dalam pembangunan belum diberdayakan secara optimal.
2. Terbatasnya fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka peran serta pembangunan.
3. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD untuk melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan.

2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi dan pelayanan Posyandu.
2. Belum terjangkaunya tingkat pelayanan KB yang berkualitas pada seluruh lapisan masyarakat.
3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan kapasitas dan potensi ekonomi keluarga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga.
4. Masih terbatasnya akses keluarga pra sejahtera terhadap sistem ekonomi formal.
5. Masih rendahnya kepesertaan akseptor KB Metode Jangka Panjang.
6. Terbatasnya tenaga penyuluh KB di lapangan.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga sejahtera.
8. Adanya kekurang-mampuan calon peserta KB dari keluarga miskin mendapatkan pelayanan KB.
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga sejahtera.
10. Belum optimalnya penggunaan data miskin keluarga sebagai sasaran program.

2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Makin meningkatnya kepadatan lalu lintas yang menimbulkan masih terjadinya titik rawan kemacetan di beberapa bagian wilayah kota.
2. Masih belum memadainya kualitas layanan angkutan umum yang belum mampu mengakomodir kebutuhan mobilitas masyarakat

menyebabkan kecenderungan kegiatan transportasi masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan sarana transportasi pribadi dibanding dengan angkutan umum.

3. Masih belum memadainya tingkat kebersihan di lingkungan terminal.
4. Belum optimalnya pemanfaatan terminal penumpang umum sebagai titik transfer moda angkutan yang disebabkan oleh minimnya fasilitas penunjang terminal yang tersedia.
5. Belum memadainya kapasitas fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mendukung keselamatan, keteraturan, ketertiban lalu lintas orang dan kendaraan.
6. Masih terbatasnya kapasitas alat uji kendaraan bermotor.
7. Masih kurangnya titik PJU di sepanjang jalan di Kota Tangerang.

2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika.
2. Belum optimalnya kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media.
3. Belum terintegrasinya sepenuhnya aplikasi pelayanan yang terkait fasilitasi dalam website kota Tangerang.
4. Belum optimalnya upaya pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut adanya sistem yang cepat, tepat dan mudah diakses.

2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kemampuan SDM dan kelembagaan UMKM.
2. Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana produksi UMKM.
3. Kualitas produk UMKM masih perlu ditingkatkan agar lebih kompetitif.
4. Terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan.
5. Terbatasnya akses UMKM terhadap pasar.
6. Kemampuan SDM dan kelembagaan koperasi belum memadai.
7. Pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar belum optimal.
8. Peran dan kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi belum optimal.
9. Belum memadainya akses UKMK terhadap sumber daya produktif.

2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Kota Tangerang adalah:

1. Pelayanan dan regulasi penanaman modal masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya promosi investasi (penanaman modal).

2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya standar mutu organisasi kepemudaan dari berbagai organisasi kepemudaan di Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
2. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran untuk meningkatkan peran serta kepemudaan.
3. Masih rendahnya peranserta pemuda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan narkoba, dan HIV/AIDS.
4. Belum terpenuhinya standar mutu organisasi olahraga dari berbagai organisasi olahraga daerah.
5. Belum optimalnya prestasi cabang olahraga.
6. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.
7. Manajemen organisasi yang belum baik dan rapi.
8. Masih lemahnya peran lembaga kepemudaan.
9. Belum terstandarnya manajemen organisasi kepemudaan.
10. Belum optimalnya peranserta masyarakat terhadap olahraga rekreasi.
11. Masih adanya pemuda dari keluarga miskin yang menganggur atau belum memiliki pekerjaan layak.
12. Belum optimalnya upaya penyediaan sarana pemuda dan olah raga bagi seluruh masyarakat di kota Tangerang hingga tingkat kelurahan.
13. Belum memadainya tersedianya *mess* atlit dan *sport centre* untuk melakukan pemusatan latihan jangka panjang terhadap atlit dalam mengikuti kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional.

2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Statistik di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan kelengkapan data statistik yang mutakhir belum memadai.
2. Belum idealnya laporan/publikasi data statistik.
3. Minimnya aparatur yang memiliki latar belakang kompetensi, pengalaman, dan pendidikan di bidang statistika.

2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Persandian di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan upaya persandian dalam mengamankan informasi pemerintah daerah.

2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
2. Masih rendahnya kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
3. Belum optimalnya upaya inventarisasi yang baik terhadap lembaga adat dan budaya.
4. Belum optimalnya upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya.
5. Belum optimalnya upaya pengiriman misi kesenian.
6. Belum optimalnya kegiatan pengelolaan kekayaan budaya.
7. Belum optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman budaya.
8. Masih minimnya sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya.

2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat secara menyeluruh sehingga belum bisa menjadi budaya hidup masyarakat.
2. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan daerah.
3. Masih belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola perpustakaan.
4. Belum optimalnya upaya peningkatan manajemen layanan diberbagai jenis Perpustakaan.
5. Belum optimalnya kualitas layanan perpustakaan daerah.
6. Belum optimalnya pelayanan eksistensi perpustakaan.
7. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kepustakaan.
8. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas koleksi bahan pustaka.
9. Belum optimalnya upaya pengembangan koleksi bahan pustaka.
10. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membaca.

2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kearsipan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Arsip OPD belum tertata dengan baik karena kurang optimalnya pengolahan dan penataan arsip di setiap OPD.
2. Pengelolaan arsip di OPD belum menggunakan sistem informasi kearsipan daerah yang terintegrasi dan terstandarisasi.
3. Depo Arsip belum memenuhi standar.
4. Kualitas pelayanan informasi kearsipan masih perlu ditingkatkan.
5. Kurangnya dukungan dan ketersediaan jasa layanan kearsipan untuk arsip-arsip strategis dan/atau bernilai guna sejarah dan kebudayaan.
6. Belum membudayanya arsip pada aparatur dan masyarakat berakibat pada rendahnya budaya tertib arsip.
7. Masih kurangnya tingkat kompetensi aparatur di bidang kearsipan yang berakibat pada lemahnya pemahaman dan apresiasi aparatur terhadap arti penting arsip dalam pelaksanaan tupoksi.

4.2.3.3. Fokus Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan

3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya minat masyarakat dalam budidaya perikanan.
2. Nilai tambah usaha perikanan budidaya lebih rendah dari aktivitas perkotaan menyebabkan alih profesi dari petani perikanan ke aktivitas perkotaan.
3. Keterbatasan lahan untuk budidaya perikanan.
4. Penurunan kualitas sumber daya air yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan produktivitas hasil perikanan budidaya.

3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pariwisata di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah.
2. Belum optimalnya upaya pengembangan pemasaran pariwisata daerah.
3. Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata.
4. Belum optimalnya keikutsertaan swasta dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Semakin sempitnya areal lahan pertanian garapan petani sehingga nilai ekonomis kegiatan pertanian semakin menurun.
2. Kepemilikan lahan pertanian umumnya tidak dikuasai oleh pelaku usaha pertanian sehingga tidak ada jaminan untuk mempertahankan kegiatan budidaya pertanian.
3. Masih kurangnya minat masyarakat dalam budidaya tanaman.
4. Terbatasnya jumlah penyuluh dalam mendampingi kegiatan pertanian di masyarakat.
5. Semakin berkurangnya lahan pertanian.
6. Pemanfaatan potensi lahan pertanian belum optimal.
7. Pemeliharaan tanaman belum intensif.
8. Komoditi yang dapat dipromosikan masih terbatas.
9. Rendahnya posisi tawar petani dalam memasarkan produk pertanian.
10. Keterbatasan petugas kesehatan hewan dalam mengendalikan penyakit ternak.
11. Semakin terbatasnya lahan untuk budidaya ternak.
12. Masih rendahnya produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.
13. Masih rendahnya kualitas produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Perdagangan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan.
2. Belum optimalnya perlindungan konsumen karena terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan.
3. Belum optimalnya upaya peningkatan usaha mikro bagi penduduk miskin.
4. Semakin kompetitifnya tingkat persaingan usaha dan kualitas produk perdagangan.
5. Belum optimalnya upaya kemitraan usaha antar pelaku usaha perdagangan.
6. Belum optimalnya pengembangan e-commerce perdagangan.

3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Perindustrian di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya industri yang berwawasan lingkungan.
2. Belum memadainya kualitas dan kapasitas SDM dan kelembagaan IKM.
3. Terbatasnya akses IKM pada permodalan.

4. Daya saing produk IKM yang kurang kompetitif di pasar regional dan nasional.
5. Kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar belum terjalin dengan baik.
6. Terbatasnya akses IKM terhadap pasar.
7. Terbatasnya pangsa pasar industri pengolahan.

4.2.3.4. Fokus Penyelenggaraan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan Serta Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

A. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum terstandarnya sarana-prasarana seperti: perlengkapan-peralatan kantor, ruang kerja, ATK, kendaraan operasional, yang memadai sesuai dgn perkembangan dan tuntutan kinerja/pelayanan.
2. Belum optimalnya penerapan SOP pelayanan.
3. Belum optimalnya updating data aset.
4. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kinerja aparatur yang lebih lengkap dan memanfaatkan teknologi terbaru.
5. Masih kurangnya pemahaman hukum dikalangan masyarakat dan Aparatur.
6. Belum memadainya kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD.
7. Belum memadainya kapasitas Lembaga Sekretariat DPRD.
8. Ketersediaan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan DPRD yang belum optimal.
9. Belum optimlnya pelaksanaan fungsi DPRD.

B. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

B.1. Urusan Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Perencanaan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Tingkat ketersediaan data yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan perencanaan belum lengkap.
2. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses Musrenbang belum optimal.
3. Mekanisme pengumpulan data dari OPD yang belum optimal.
4. Kompetensi aparatur perencana yang belum merata.

5. Belum memadainya ketersediaan peraturan, SOP yang digunakan sebagai standar acuan perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
6. Tingkat akurasi data perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang kurang optimal.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang.
8. Kurangnya pemahaman aparat perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan serta masih kurangnya pemahaman masyarakat secara menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan.

B.2. Urusan Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Keuangan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan pajak daerah yang disebabkan karena kurangnya tenaga pendataan dan pemeriksaan pajak daerah.
3. Kondisi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada resesi ekonomi menyebabkan belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah.

B.3. Urusan Kepegawaian

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kepegawaian di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum meratanya persebaran pegawai di setiap OPD dari segi jumlah maupun kualitas.
2. Belum meratanya kemampuan/kompetensi/kapasitas aparat, kebijakan, teknis, serta administrasi.
3. Kurang optimalnya kinerja aparat terhadap pelayanan masyarakat.
4. Masih banyak tenaga operator yang berstatus Non PNS.
5. Kurangnya aparat dan minimnya kinerja aparat terhadap pelayanan masyarakat.
6. Belum optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas SDM.
7. Pelayanan publik saat ini belum menggambarkan sikap pegawai yang profesional.
8. Belum memadainya disiplin aparat.
9. Belum memadainya kualitas mental dan pola pikir aparat.
10. Kurang memadainya SDM aparat baik dari kuantitas (jumlah) maupun dari kualitas (kompetensi).
11. Belum terstandarnya ketersediaan pegawai, kompetensi pegawai dan kebutuhan tenaga untuk melaksanakan tupoksinya.
12. Belum meratanya pemahaman pegawai atas Tupoksi.

13. Belum terpenuhinya jumlah pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
14. Belum optimalnya penataan dan pelaksanaan jabatan fungsional.

B.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pendidikan tugas belajar bagi pegawai pemerintah.
2. Belum meratanya tingkat kompetensi aparatur.

B.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Tingkat ketersediaan kajian penelitian dan pengembangan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan belum lengkap.
2. Dokumen kajian yang kurang aplikatif.
3. Masih tersebarunya berbagai hasil hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan inovasi daerah di masing-masing OPD.

C. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Inspektorat Daerah di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya pengawasan pegawai (pemeriksa) dan pengawas yang kompeten mandiri dan profesional, dengan hasil LHP yang berkualitas.
2. Belum maksimalnya sistem pengendalian Internal yang dilakukan secara prosedural.

D. Unsur Kewilayahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kecamatan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kualitas pegawai kecamatan dan kelurahan.
2. Belum optimalnya pelayanan PATEN.
3. Belum memadainya kualitas sarana prasarana wilayah kelurahan.
4. Belum optimlnya pengembangan UMKM di kecamatan dan kelurahan.
5. Belum optimalnya kinerja RT dan RW.
6. Belum memdainya dukungan fasilitas pendukung bagi peningkatan ketertiban umum.
7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.

E. Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya untuk meningkatkan kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan ajaran dalam beragama terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
2. Masih terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.
3. Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, serta masih banyaknya pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.
4. Belum optimalnya pendidikan ideologi asing, pengawasan orang asing, dan pengendalian organisasi sosial politik masyarakat.

4.2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kota Tangerang pada aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut:

- **Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah**

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang belum memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang mencapai 4826% pada Tahun 2022. Hal ini tentu menjadi tantangan di masa mendatang untuk menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan PAD.

- **Kemacetan**

Kota Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik ke kota Jakarta dan kota-kota penting di Provinsi Banten dan Jawa Barat, yaitu dengan adanya Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak sepanjang 100 km, jalan rel kereta api *double track* Tangerang-Jakarta, perpanjangan koridor IV Busway Kalideres-Tangerang, serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aksesibilitas yang baik akan membangkitkan semakin banyak pergerakan, baik pergerakan dari dan ke Kota Tangerang maupun pergerakan di dalam Kota Tangerang yang ditandai dengan semakin tingginya volume lalu lintas. Di sisi lain, peningkatan volume lalu lintas ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan ketersediaan jaringan jalan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya kemacetan pada beberapa ruas jalan di Kota Tangerang. Hasil identifikasi terhadap penyebab permasalahan tersebut kemacetan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Volume lalu lintas melebihi kapasitas, yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan rendahnya pertumbuhan jalan.
2. Geometri jalan (*layout* simpang tidak memadai).
3. Hambatan samping, seperti banyaknya akses keluar masuk lahan di sisi jalan, banyaknya PKL yang berjualan di bahu jalan atau bahkan di badan jalan, angkutan umum yang berhenti di badan jalan mencari penumpang, pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya, dan sebagainya.
4. Adanya bandara internasional Soekarno Hatta menyebabkan banyak arus perjalanan darat di Kota Tangerang dari dan ke bandara merupakan lalu lintas menerus.
5. Konflik lalu lintas, seperti perlintasan kereta api sebidang, jarak antar persimpangan terlalu pendek, banyak tercampurnya lalu lintas menerus dan lalu lintas lokal.
6. Perambuan, seperti APILL tidak aktif / tidak optimal.

▪ **Banjir dan Genangan**

Kondisi topografi Kota Tangerang yang cenderung datar, cakupan pelayanan sistem drainase yang belum memadai dan kondisi saluran drainase yang ada belum memadai serta minimnya area resapan air. Kondisi tersebut menyebabkan banjir dan genangan masih selalu terjadi di Kota Tangerang, dimana hal ini merupakan permasalahan yang cukup mengkhawatirkan dan menjadi tantangan untuk segera diantisipasi di masa mendatang. Hasil identifikasi terhadap penyebab permasalahan banjir dan genangan adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas sungai sebagai saluran pembuang yang tidak memadai, termasuk di dalamnya adalah berkurangnya situ-situ yang seharusnya berfungsi sebagai kolam retensi alami.
2. Kapasitas saluran drainase yang tidak memadai, di mana cakupan drainase di Kota Tangerang masih rendah, dan juga drainase yang sudah banyak yang sudah mengalami pendangkalan.
3. Tanggul yang rusak/jebol.
4. Banjir kiriman dari daerah hulu.

• **Keamanan dan Kriminilitas**

Kriminalitas dan gangguan keamanan masih rawan terjadi di Kota Tangerang. Hasil identifikasi terhadap penyebab permasalahan kriminalitas adalah sebagai berikut:

1. Degradasi moral masyarakat, yang salah satunya disebabkan tingkat kedewasaan masyarakat untuk menyerap informasi media masih rendah.

2. Perlu peningkatan pembinaan moral melalui pembinaan keagamaan dan kebudayaan.
3. Perlu peningkatan sistem keamanan berbasis masyarakat.
4. Perlu penyediaan sarana prasarana untuk mengurangi wilayah rawan keamanan, seperti peningkatan sarana penerangan jalan dan taman.

- **Sumber Daya Manusia**

Kota Tangerang memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya penduduk usia produktif yang siap bekerja. Namun demikian, terdapat permasalahan terkait dengan sumber daya manusia Kota Tangerang, yaitu:

1. Tingkat pengangguran masih tinggi.
2. Kualitas sumber daya manusia Kota Tangerang masih belum memadai.

4.3. Tantangan Pembangunan Daerah

Tantangan pembangunan daerah merupakan kondisi internal (cita-cita) yang ingin diwujudkan serta kondisi eksternal yang bersifat global, nasional, regional yang mempengaruhi upaya untuk mewujudkan cita-cita. Berikut ini diuraikan tantangan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

4.3.1. Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025. Penelaahan terhadap kebijakan RPJPD Kota Tangerang melalui analisis arah kebijakan pembangunan Kota Tangerang ini difokuskan pada prioritas pembangunan Kota Tangerang pada periode tahun yang berkenaan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026, maka tahapan pembangunan jangka panjang Kota Tangerang yang berkenaan adalah RPJMD periode Tahun 2024-2025.

Pembangunan pada periode Tahun 2024-2025 menekankan pada upaya pemantapan daya saing kompetitif perekonomian secara nasional dan

global. pembentukan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan. pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Tangerang periode Tahun 2024-2025 ditujukan pada upaya sebagai berikut.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2025

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, maju dan berdaya saing	Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan bermartabat	Meningkatnya kualitas implementasi norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, sosial dan kebudayaan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
			Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sarana keagamaan, sosial dan kebudayaan		
		Terpeliharanya kerukunan hidup beragama dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya	Pembinaan kerukunan hidup beragama		Implementasi dan aktualisasi nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat sebagai faktor penyeimbang perkembangan IPTEK
			Pelestarian tata nilai sosial dan budaya		
	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berdaya saing	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan		Penuntasan wajib belajar dua belas tahun
			Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		Perintisan wajib belajar lima belas tahun
			Optimalisasi manajemen pelayanan pendidikan		Peningkatan kualitas lembaga PAUD formal dan non formal
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan		Pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal berskala nasional dan internasional

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan pendidikan swasta		Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional
			Optimalisasi minat dan budaya baca masyarakat		Peningkatan pendidikan keterampilan dan penguasaan IPTEK bagi masyarakat
	Terwujudnya masyarakat yang sehat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Optimalisasi daya saing kompetensi pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan		
			Optimalisasi dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan		Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
			Peningkatan mutu tenaga kesehatan		Pengembangan dan penguatan sistem kesehatan
			Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat dan makanan		Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan
			Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan		Pemberdayaan profesi kesehatan (institusi)
			Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat		Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan
			Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan		

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		
			Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat		
	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Peningkatan kapasitas dan kualitas kesejahteraan sosial	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan advokasi, pemberdayaan dan perlindungan PMKS
			Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan PMKS		
		Meningkatnya keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap sumber daya produktif (pelatihan keterampilan, modal dan manajemen usaha)		
			Perlindungan dan rehabilitasi PMKS		
			Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS		
	Terwujudnya keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak		Jaminan sosial pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan		Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat
		Membaiknya tingkat kesejahteraan keluarga	Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sejahtera		Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan keluarga
	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan terkelolanya administrasi kependudukan	Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Peningkatan kapasitas kelembagaan keluarga berencana		Pengendalian pertumbuhan penduduk
		Tertibnya administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana		Penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar daerah
			Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan		
			Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan		
	Terwujudnya peran aktif pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan		
			Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda		
	Terwujudnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olah raga	Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga	Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga		

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana olah raga		
Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing	Terwujudnya perekonomian yang merata, maju dan berdaya saing	Meningkatnya investasi	Optimalisasi kualitas dan daya saing pelayanan investasi	Peningkatan Daya Saing Perekonomian	Pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi
			Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi		
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Jaminan kepastian hukum berusaha		
		Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat	Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha		Peningkatan kehandalan UMKM dan Koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah
			Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha		Pengembangan jaringan kelembagaan UMKM dan Koperasi
			Peningkatan fasilitasi modal usaha bagi pelaku usaha		
			Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha		
			Penguatan kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah		
			Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk		

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
	Terwujudnya agribisnis pertanian dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk agribisnis pertanian dan perikanan	Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM		Pemantapan sistem agribisnis pertanian
			Pembinaan manajemen usaha		Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian
			Fasilitasi modal usaha		
			Fasilitasi aksesibilitas pasar		
			Fasilitasi kerjasama perdagangan		
			Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk		
	Terwujudnya industri yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri	Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan		Perkuatan potensi industri strategis
			Fasilitasi aksesibilitas pasar		Penumbuhkembangan hubungan industrial untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja
			Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah		

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
	Terwujudnya perdagangan yang maju (modern) dan berdaya saing	Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan	Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar		
			Fasilitasi kerjasama perdagangan		Pengoptimalan pendayagunaan potensi lokal
			Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah		Perluasan jaringan perdagangan luar negeri
			Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar		
	Terwujudnya pelayanan jasa pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata	Fasilitasi pemasaran dan kerjasama pariwisata		Pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata
			Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata		Penataan destinasi pariwisata
			Pengembangan dan peningkatan sarana pelayanan pariwisata		Penciptaan daya tarik wisata
			Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah		Pengembangan kelembagaan pariwisata

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang kokoh	Memadainya ketersediaan pangan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan		
			Peningkatan kerjasama antardaerah dalam penyediaan pangan		
			Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan		
	Terwujudnya kesempatan kerja yang luas	Meningkatnya kesempatan kerja	Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri		Penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar
		Menurunnya tingkat pengangguran			
	Meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi, kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja dan wirausaha		Pemantapan kompetensi, daya saing dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja
			Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial		
			Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum		
			Peningkatan kapasitas dan pelayanan lembaga ketenagakerjaan		

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha		
Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari	Terwujudnya tata ruang kota yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan dan kelengkapan rencana tata ruang	Penataan dan peningkatan kualitas rencana tata ruang wilayah kota	Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang
		Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan dan optimalisasi fungsi pelayanan, struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang kota		
			Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota		
			Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota		
			Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang		
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang		
	Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam	Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam	Penataan dan optimalisasi pengelolaan fungsi lahan pada kawasan budi daya		Peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup
			Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung		Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan daya dukung lingkungan

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air		Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Terjaganya daya dukung ruang terbuka hijau	Penataan dan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau		Pemantapan sistem pemantauan, pengendalian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
		Menurunnya tingkat pencemaran	Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya		Peningkatan konsistensi penegakan hukum dalam pengendalian lingkungan
			Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup		Pembudayaan perilaku ramah lingkungan di kalangan masyarakat
			Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup		
Mewujudkan pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota yang memadai dan berdaya saing	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, handal, ramah lingkungan dan terjangkau	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Penataan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota	Pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			Peningkatan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan		Pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah
		Meningkatnya kualitas pelayanan sistem jaringan terminal dan angkutan umum masal	Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan sistem jaringan, peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal		Pemantapan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah
			Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan sistem jaringan dan moda angkutan umum masal darat dan sungai yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan		Revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada
	Terwujudnya pelayanan drainase yang memadai untuk meminimalkan kerawanan banjir	Meningkatnya kualitas pelayanan drainase	Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan sistem jaringan drainase		Pengembangan sistem transportasi massal (<i>Mass Rapid Transport</i>)
		Menurunnya lokasi rawan banjir			Pemantapan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana
	Terwujudnya pelayanan air bersih yang merata, berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan air bersih	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengolahan air bersih		
			Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan sistem jaringan air bersih		

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
	Terwujudnya pelayanan persampahan yang memadai dan berkualitas untuk menciptakan kebersihan kota	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan persampahan	Peningkatan dan optimalisasi pendayagunaan sarana dan teknologi persampahan		
			Peningkatan kapasitas dan optimalisasi manajemen persampahan		
	Terwujudnya pelayanan pengelolaan limbah yang memadai, berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah	Peningkatan kualitas dan optimalisasi sistem dan teknologi pengelolaan limbah terpadu		
			Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengelolaan limbah terpadu		
	Terwujudnya pelayanan pemadam kebakaran yang memadai dan berkualitas untuk meminimalkan kerawanan kebakaran	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran	Penataan dan pengembangan sistem jaringan prasarana pemadam kebakaran		
			Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi pemadam kebakaran		
	Terwujudnya pelayanan telekomunikasi, telematika dan informatika yang memadai, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya pelayanan telekomunikasi, telematika dan informatika	Penataan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, telematika dan informatika		

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
	Terwujudnya pelayanan fasilitas perdagangan yang maju dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas perdagangan	Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi telekomunikasi, telematika dan informatika		
			Optimalisasi dan peningkatan kualitas layanan pasar tradisional		
			Penataan dan pengembangan sistem dan fasilitas perdagangan modern		
	Terwujudnya pelayanan fasilitas jasa yang maju dan berdaya saing	Meningkatnya daya saing pelayanan fasilitas jasa	Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran		
			Penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan		
	Terwujudnya perumahan yang layak huni dan terjangkau	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau	Pengendalian pengembangan perumahan horizontal yang layak huni dan terjangkau		
			Peningkatan pengembangan perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau		
			Fasilitasi rehabilitasi rumah layak huni		
			Fasilitasi dan kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha		

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pengembang perumahan		
	Terwujudnya lingkungan permukiman yang tidak kumuh	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Peningkatan daya dukung dan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman		
			Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman		
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur	Optimalisasi tata kerja kelembagaan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik didukung sistem, prosedur, serta standarisasi kualitas pelayan serta budaya organisasi
			Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur		
			Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur		
		Meningkatnya kualitas data, informasi, perencanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah		
			Peningkatan kualitas kearsipan daerah		

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan publik	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah		Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
			Penataan dan optimalisasi penyelenggara-an standar pelayanan minimal pelayanan publik		
			Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik		
			Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan		
			Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah		
			Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan		
	Terwujudnya kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah yang memadai dan akuntabel	Meningkatnya pendapatan daerah	Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah		Peningkatan daya guna dan hasil guna kekayaan dan aset daerah
		Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah	Peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik		

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah		
		Meningkatnya kontribusi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta	Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat		
			Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah		
	Terwujudnya masyarakat yang demokratis	Meningkatnya penerapan prinsip demokrasi masyarakat	Peningkatan implementasi tata nilai demokrasi		Pemantapan peran masyarakat madani (<i>civil society</i>)
			Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik		
	Terwujudnya masyarakat yang sadar, patuh dan taat hukum	Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan penegakan supremasi hukum	Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum		Penanaman budaya taat hukum di masyarakat
			Penataan produk hukum daerah		Harmonisasi produk hukum
					Perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat

Jangka Panjang (2005-2025)				Periode Tahun 2024-2025	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			Penegakan supremasi hukum		Pemantapan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)
	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tenteram dan tertib	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tenteram dan tertib		Optimalisasi potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
	Terkelolanya penanganan bencana secara cepat dan tepat	Meningkatnya penanganan bencana	Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		
			Mitigasi bencana		
			Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana		
			Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
			Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana		

Sumber: RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025

Berikut ini diuraikan tantangan pembangunan daerah pada **aspek sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan sosial masyarakat**.

Fokus	Tantangan
Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
• Tata nilai sosial budaya dan norma agama	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Aktualisasi norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat • Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan pengaruh dan dampak negatif tata nilai sosial dan budaya dari luar yang bertentangan dengan norma agama dan tata nilai sosial budaya masyarakat
• Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
• Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tingkat persaingan kualitas SDM • Kualitas SDM yang selalu adaptif terhadap kemajuan IPTEK • Pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau
• Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkat secara berkelanjutan derajat kesehatan masyarakat • Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau • Meningkatnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat
• Kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Perlindungan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Tertanganinya Kerawanan sosial • Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial • Menurunnya penduduk miskin
• Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Meluasnya kesempatan kerja • Meningkatnya kualitas tenaga kerja • Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
• Pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat • Meningkatnya secara berkelanjutan peran perempuan, perlindungan anak • Menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak • Meningkatkan perlindungan anak
• Pengendalian kependudukan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pengendalian pertumbuhan penduduk • Meningkatnya Pelayanan dan penegakan administrasi dan manajemen kependudukan • Meningkatkan kesejahteraan keluarga
• Pemuda dan olah raga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas dan peran pemuda dalam pembangunan • Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga
Aspek Perekonomian Daerah dan Masyarakat	
• Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya persaingan iklim investasi yang semakin tinggi • Meningkatnya iklim investasi

Fokus	Tantangan
	<ul style="list-style-type: none"> Reorientasi investasi pada kelompok sektor tersier
<ul style="list-style-type: none"> Usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi Meningkatnya Reorientasi dan pengembangan produk berorientasi pasar Meningkatnya Kemitraan dengan pelaku usaha besar
<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas, kualitas dan daya saing perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya persaingan usaha dan kualitas produk yang semakin kompetitif. Meningkatnya Reorientasi dan pengembangan pasar produk berorientasi pasar Meningkatnya Kemitraan usaha antar pelaku usaha perdagangan
<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengendalian distribusi bahan pangan Meningkatnya Pengaturan dan pengawasan tata niaga perdagangan bahan pangan
Aspek Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
<ul style="list-style-type: none"> Penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penataan dan optimalisasi fungsi, struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang Meningkatnya penegakan pengendalian pemanfaatan ruang
<ul style="list-style-type: none"> Sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian sumber daya lahan Meningkatnya pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya air
<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan Meningkatnya pendayagunaan teknologi ramah lingkungan
Aspek Infrastruktur dan Fasilitas Kota	
<ul style="list-style-type: none"> Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan Meningkatnya secara berkelanjutan upaya pengendalian kemacetan Berkembang dan Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> Air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
<ul style="list-style-type: none"> Persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan volume penanganan persampahan
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya volume penanganan limbah
<ul style="list-style-type: none"> Energi dan kelistrikan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan teknologi hemat energi Peningkatan promosi hemat energi
<ul style="list-style-type: none"> Telekomunikasi, telematika dan informatika 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kebutuhan telekomunikasi, telematika dan informatika Berkembangnya teknologi telekomunikasi, telematika dan informatika yang pesat
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya persaingan usaha dan kualitas produk yang semakin kompetitif. Meningkatnya reorientasi dan pengembangan pasar produk berorientasi pasar. Meningkatnya kemitraan usaha antar pelaku usaha perdagangan

Fokus	Tantangan
• Fasilitas jasa	• Meningkatnya pelayanan fasilitas jasa
• Fasilitas industri	• Meningkatnya pelayanan fasilitas industri
• Perumahan dan permukiman	• Meningkatnya penyediaan kebutuhan perumahan • Meningkatnya penanganan kawasan kumuh
Aspek Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Kualitas Ketentraman, Ketertiban, Demokrasi dan Hukum	
• Pemerintahan	• Meningkatnya secara berkelanjutan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur
• Pelayanan publik	• Meningkatnya daya saing pelayanan publik
• Keuangan daerah	• Meningkatnya secara berkelanjutan kapasitas keuangan daerah
• Kehidupan demokrasi	• Meningkatnya secara berkelanjutan kualitas kehidupan demokrasi yang bertanggungjawab
• Hukum	• Meningkatnya penataan dan supremasi hukum
• Ketenteraman dan ketertiban masyarakat	• Meningkatnya secara berkelanjutan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dalam mendukung lingkungan kota yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan
• Penanggulangan bencana	• Meningkatnya secara berkelanjutan upaya pengendalian banjir • Terkendalinya daerah rawan bencana kebakaran

4.3.2. Tantangan Pembangunan Tata Ruang Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032. Penelaahan terhadap RTRW Kota Tangerang dalam perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tangerang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang (spasial) Kota Tangerang dalam periode tahun berkenaan yang difokuskan pada indikasi program pemanfaatan ruang.

Dalam kaitannya dengan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang tahun 2024-2026, maka tahapan waktu pelaksanaan indikasi program pemanfaatan ruang wilayah Kota Tangerang yang berkenaan adalah berada dalam Tahap Ketiga (Periode 2023-2027). Berikut ini diuraikan indikasi program pemanfaatan ruang wilayah Kota Tangerang pada periode Tahun 2023-2027.

Tabel 4.2
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2013-2032
Pada Periode Tahun 2023-2027

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
A. Perwujudan Struktur Ruang																	
1. Sistem Pusat Pelayanan																	
a. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	13 kecamatan																
b. Penyusunan Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	13 kecamatan																
2. Sistem Jaringan Jalan																	
a. Jaringan Jalan																	
1) Pengembangan Jalan Arteri Primer	Ruas jalan Batas Kota dengan DKI Jakarta–Jalan Daan Mogot–Jalan Merdeka–Jalan Gatot Subroto–Batas Kota dengan Kabupaten Tangerang																
2) Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Ruas Jalan KH. Hasyim Ashari–Jalan HOS. Cokroaminoto–Batas Kota dengan DKI Jakarta, ruas Jalan Raden Fatah–Jalan Jombang Raya–Batas Kota dengan Kota Tangerang Selatan																
3) Peningkatan Fungsi dan Pelebaran Jalan Arteri Sekunder	Jalan Benteng Betawi, Jalan Imam Bonjol, ruas Jalan Oto Iskandardinata–Jalan KS. Tubun, Jalan M. Toha, Jalan Prabu Kiansantang, Jalan Prabu Siliwangi, Jalan Pajajaran, ruas Jalan Teuku Umar–Jalan Proklamasi, ruas Jalan Soebandi–Jalan Galeong–Jalan Benua Indah, Jalan Bouraq (Lio Baru), Jalan Pembangunan 3, ruas Jalan Juanda–Jalan Merpati–Jalan Garuda, Jalan Halim Perdanakusuma, ruas Jalan Husein Sastranegara–Jalan AMD, Jalan Raden Saleh																

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
4) Peningkatan Fungsi dan Pelebaran Jalan Kolektor Sekunder dan Jalan Lokal	Tersebar di seluruh wilayah																
5) Pengembangan Jalan Strategis Nasional	Ruas Jalan Jenderal Sudirman–Jalan M.H. Thamrin–Batas Kota dengan Kota Tangerang Selatan																
6) Pembangunan Jalan	Jalan Ciledug–Bandara (STA 11), Jalan Sepanjang Sisi kanan kiri Tol Jakarta–Tangerang (Frontage Tol), Jalan Sepanjang Sisi Kanan Kiri Sungai Cisadane (Promenade), Jalan Sisi Utara Rel Kereta Api, Jalan Sisi Selatan Mookervart, Jalan Cadas Kedaung, Jalan Tembus Jalan Prabu Kiansantang–Jalan Pajajaran, Jalan Lingkar Selatan terdiri dari ruas Jalan Adam Malik–Jalan Taman Asri Lama– Jalan Cipto Mangunkusumo–Jalan Raden Fatah–Jalan Puri Kartika–Jalan Graha Raya																
7) Pembangunan Simpang Tidak Sebidang	Simpang Jalan Jenderal Sudirman–Jalan Pembangunan 3, simpang Benda, simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Gajah Tunggal, simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Siliwangi, simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Telesonik, simpang Jalan Ciledug–Bandara (STA 11) dengan Jalan Daan Mogot, simpang Jalan Ciledug–Bandara (STA 11) dengan Jalan Benteng Betawi dan rel kereta api																
8) Optimalisasi Simpang Tidak Sebidang	Simpang Cikokol, simpang Ciledug, simpang Jalan Jenderal Sudirman–Jalan Hasyim Ashari, simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Taman Cibodas																

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
9) Pembangunan Jembatan	Jembatan yang menghubungkan Kedaung dengan Sepatan (eretan), jembatan yang menghubungkan Jalan M.H. Thamrin dengan Jalan Imam Bonjol, jembatan yang menghubungkan Jalan Pembangunan 3 dengan Cadas, jembatan yang menghubungkan Jalan K.S. Tubun dengan Jalan Lio Baru																
b. Angkutan Umum dan Terminal																	
1) Pengembangan Terminal Poris Plawad	Poris Plawad																
2) Pembangunan Terminal Tipe A	Jatiuwung																
3) Pembangunan Terminal Tipe B	Ciledug atau Larangan, Periuk, Imam Bonjol																
4) Penataan Terminal Eksisting	Terminal Cimone, Terminal Cibodas																
5) Pembangunan Terminal Tipe C	Tersebar di seluruh wilayah																
6) Pembangunan Terminal Angkutan Barang	Jatiuwung																
7) Pengembangan Sistem Angkutan Massal dalam Kota	Koridor cadas-Terminal Poris Plawad, koridor Jatiuwung-Terminal Poris Plawad, koridor Karawaci-Terminal Poris Plawad, koridor Bandara-Tangerang, koridor yang menghubungkan antara koridor dalam kota																
8) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Jabodetabek	Koridor Kalideres-Tangerang, koridor Blok M-Ciledug, koridor Tangerang-Harmoni																
c. Kereta Api																	
1) Peningkatan Jalur Kereta <i>Double Track</i>	Tangerang-Jakarta																
2) Pembangunan Kereta Bandara	Bandara-Jakarta, Bandara-Serpong																
3) Pengembangan Jaringan Kereta dalam Kota	Menghubungkan PPK dengan SPPK																
4) Penataan Stasiun Eksisting	Stasiun Tangerang, Stasiun Tanah Tinggi, Stasiun Batucapeper, Stasiun Poris																
5) Pembangunan Stasiun Baru	Lokasi di PPK dan SPPK																
d. Angkutan Udara																	

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
1) Pengembangan dan Pembangunan Bandara Soekarno Hatta	Bandara Internasional Soekarno Hatta																
3. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan																	
a. Pengadaan Stasiun BBG	Pada jalan arteri dan kolektor di seluruh wilayah kota																
b. Mengembangkan Pipa Distribusi Gas	Tersebar di seluruh wilayah																
c. Pengembangan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik	Tersebar di seluruh wilayah																
d. Pengembangan Jaringan Transmisi Bawah Tanah	Tersebar di seluruh wilayah																
e. Pemerataan Pelayanan PJU	Tersebar di seluruh wilayah																
f. Mengembangkan Energi Listrik Alternatif	Tersebar di seluruh wilayah																
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi																	
a. Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi	Tersebar di seluruh wilayah																
b. Pengembangan Jaringan Bawah Tanah	Tersebar di seluruh wilayah																
c. Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Tersebar di seluruh wilayah																
d. Pengaturan Penggunaan Frekuensi Pemancar Radio	Tersebar di seluruh wilayah																
5. Sistem Jaringan Sumberdaya Air																	
a. Penataan Wilayah Sungai	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Pembuang Mookervart, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Saluran Pembuang Perancis dan/atau Dadap, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Cipondoh																
b. Revitalisasi Situ	Situ Cipondoh, Situ Bulakan, Situ Gede, Situ Cangkring, Situ Bojong, Situ Kunci																

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
c. Penataan Jaringan Irigasi	Saluran Induk Irigasi Cisadane Utara, Saluran Induk Irigasi Cisadane Barat, Saluran Induk Irigasi Cisadane Timur, Saluran Induk Tanah Tinggi																
d. Pengembangan Sistem Jaringan Air Baku	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Induk Cisadane Timur, Saluran Induk Cisadane Barat, Saluran Induk Tanah Tinggi, Situ Cipondoh, Situ Bulakan, dan tandon air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan																
e. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir	Tersebar di seluruh wilayah																
6. Sistem Infrastruktur Perkotaan																	
a. Air Minum																	
1) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan	Tersebar di seluruh wilayah																
2) Pengembangan Unit Air Baku	Sungai Cisadane, Saluran Induk Cisadane Timur di Kecamatan Benda dan Batuceper, Saluran Induk Tanah Tinggi, Suplesi Bendung Nerogtog Kali Angke, dan Situ Cipondoh di Kecamatan Cipondoh dan Saluran Induk Cisadane Barat dan Situ Bulakan di Kecamatan Periuk																
3) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan	Tersebar di seluruh wilayah																
b. Air Limbah																	
1) Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dengan Sistem Setempat	Tersebar di seluruh wilayah																

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
2) Peningkatan Sistem Air Limbah Domestik dengan Sistem Terpusat	IPAL Tanah Tinggi, IPLT Bawang, dan Kolam Oksidasi Perumnas 1																
3) Pengembangan Pengolahan Limbah Industri dengan Sistem Setempat	Tersebar di seluruh wilayah																
4) Pengembangan Prasarana Limbah Industri Sistem Terpusat	Kawasan peruntukan industri																
c. Persampahan																	
1) Optimalisasi TPA Rawa Kucing	Kecamatan Neglasari																
2) Pengadaan Lokasi TPS	Di setiap kelurahan																
3) Pengembangan 3R pada TPS	Di setiap kelurahan																
4) Penyusunan Masterplan Persampahan	Kota Tangerang																
d. Drainase																	
1) Penataan kembali sempadan sungai dan situ	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Pembuang Mookervart, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Saluran Pembuang Perancis dan/atau Dadap, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Cipondoh, Situ Cipondoh, Situ Bulakan, Situ Gede, Situ Cangkring, Situ Bojong, Situ Kunciran																
2) Pembangunan, peningkatan, dan pengembangan fungsi situ, tandon air, kolam dan sumur resapan	Tersebar di seluruh wilayah																
3) Penyusunan masterplan drainase	Kota Tangerang																
e. Jalan Pejalan Kaki																	
1) Penyediaan Trotoar	Tersebar di seluruh wilayah																

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
2) Penyediaan Penyeberangan Sebidang	Tersebar di seluruh wilayah																
3) Penyediaan Penyeberangan Tidak Sebidang	Tersebar di seluruh wilayah																
4) Pengembangan Kawasan Khusus Pejalan Kaki	Tersebar di seluruh wilayah																
f. Jalur Sepeda																	
1) Pengembangan Jalur Sepeda	Koridor primer yang meliputi koridor Sungai Cisadane, koridor Hasyim Ashari – Cisadane – Sudirman dan koridor Gatot Subroto – Merdeka – Cisadane dan koridor sekunder yang meliputi koridor Daan Mogot – Cisadane, koridor Ciledug – Hasyim Ashari, koridor Cikokol – Cisadane dan koridor Kian Santang – Gandasari																
g. Jalur Evakuasi Bencana																	
1) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Banjir	Kecamatan Periuk, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas																
h. Proteksi Kebakaran																	
1) Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kebakaran	Tersebar di seluruh wilayah																
2) Penempatan Lokasi Hidran	Tersebar di seluruh wilayah																
3) Penyusunan Masterplan Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Tangerang																
i. Perparkiran																	
1) Penyediaan Parkir Off Street	Tersebar di seluruh wilayah																
2) Pembatasan Parkir On Street	Tersebar di seluruh wilayah																
3) Pengembangan Konsep Park and Ride	Di setiap stasiun dan terminal																

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
B. Perwujudan Pola Ruang																	
1. Kawasan Lindung																	
a. Kawasan Perlindungan Setempat																	
1) Penataan Kawasan Sempadan Situ	Situ Cipondoh, Situ Bulakan, Situ Gede, Situ Cangkring, Situ Bojong, Situ Kunci																
2) Penataan Kawasan Sempadan Sungai/Kali/Saluran Pembuang	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Pembuang Mookervart, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Saluran Pembuang Perancis dan/atau Dadap, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Cipondoh																
3) Penataan Kawasan Sempadan Saluran Irigasi	Saluran Induk Irigasi Cisadane Utara, Saluran Induk Irigasi Cisadane Barat, Saluran Induk Irigasi Cisadane Timur, Saluran Induk Tanah Tinggi																
b. Ruang Terbuka Hijau																	
1) Pembebasan dan Pengadaan Lahan Untuk RTH	Tersebar di seluruh wilayah																
2) Pengembangan dan Penataan Taman Perumahan, Kelurahan, dan Kecamatan	Tersebar di seluruh wilayah																
3) Pengembangan dan Penataan Taman Kota	Pusat Pelayanan Kota																
4) Pengembangan RTH Hutan Kota	Saluran Mookervart																
5) Pengembangan RTH Sabuk Hijau	Kawasan peruntukan industri																
6) Pengembangan RTH Jalur Hijau	Tersebar di seluruh wilayah																
7) Penataan Pemakaman sebagai RTH	Tersebar di seluruh wilayah																
8) Penataan dan Pengembangan Lapangan Olah Raga sebagai RTH	Tersebar di seluruh wilayah																
c. Kawasan Cagar Budaya																	

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
1) Penataan dan Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya	Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Neglasari																
d. Kawasan Rawan Bencana																	
1) Perbaikan Sistem Drainase	Tersebar di seluruh wilayah																
2) Penataan Kawasan Permukiman yang Terkena Banjir	Kecamatan Periuk, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas																
2. Kawasan Budidaya																	
a. Kawasan Perumahan																	
1) Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi, Sedang, dan Rendah	Tersebar di seluruh wilayah																
2) Regenerasi Kawasan Perumnas	Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Cibodas																
3) Pengembangan dan Pembangunan Hunian Vertikal	Tersebar di seluruh wilayah																
4) Penataan Permukiman Kumuh	Tersebar di seluruh wilayah																
5) Pembangunan utilitas, prasarana dan sarana kawasan perumahan	Tersebar di seluruh wilayah																
b. Kawasan Perdagangan dan Jasa																	
1) Pengembangan dan Pembangunan Pasar Tradisional	Di setiap kecamatan																
2) Pengembangan dan Penataan Pusat Perbelanjaan	PPK dan SPPK																
3) Pengembangan dan Penataan Toko Modern	Tersebar di seluruh wilayah																
4) Pengembangan Kawasan Perdagangan Khusus	Kecamatan Larangan																
5) Pengembangan Kegiatan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, and Event/Exhibition</i>)	Kawasan penunjang bandara, PPK, dan SPPK																
6) Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa dengan Konsep Superblok atau Mix Use	Jalan Arteri, PPK, dan SPPK																

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
c. Kawasan Perkantoran Pemerintahan																	
1) Perbaikan dan Pembangunan Kantor Pemerintahan	Tersebar di seluruh wilayah																
2) Pengadaan Lahan untuk Kantor Pemerintahan	Tersebar di seluruh wilayah																
d. Kawasan Peruntukan Industri																	
1) Pengembangan dan Penataan Industri Rumah Tangga	Tersebar di seluruh wilayah																
2) Mempertahankan Keberadaan Industri Sedang dan Industri Besar	Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Periuk																
3) Membatasi Perkembangan Industri Eksisting	Kecamatan Karawaci, Kecamatan Tangerang, dan Kecamatan Cibodas																
4) Penataan Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Jatiuwung																
5) Pengembangan Kegiatan Industri Kreatif	Tersebar di seluruh wilayah																
e. Kawasan Pariwisata																	
1) Pengembangan rekreasi dan wisata alam	Sungai Cisadane, Situ Cipondoh, dan Situ Bulakan																
2) Revitalisasi kota lama	Kecamatan Tangerang																
3) Penataan dan pengembangan wisata belanja	Kecamatan Larangan																
4) Pengembangan wisata berbasis budaya lokal	Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Pinang																
5) Pengembangan kegiatan agro wisata	Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah																
f. Ruang Terbuka Non Hijau																	
1) Pembangunan dan Pengembangan Lahan Parkir	Tersebar di seluruh wilayah																

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
2) Pembangunan dan Pengembangan Trotoar/ Pedestrian	Tersebar di seluruh wilayah																
3) Pembangunan dan Pengembangan Lapangan	Tersebar di seluruh wilayah																
g. Ruang Evakuasi Bencana																	
1) Pengembangan ruang untuk evakuasi bencana pada wilayah rawan banjir																	
h. Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal																	
1) Penataan Sektor Informal	Jalan Kisamaun dan Jalan Kiasnawi																
2) Pengembangan Sektor Informal	Tersebar di seluruh wilayah																
i. Kawasan Pertanian																	
1) Mempertahankan Lahan Pertanian	Kecamatan Neglasari, Kecamatan Periuk, Kecamatan Benda																
2) Pengembangan Hortikultura	Kecamatan Neglasari, Kecamatan Periuk, Kecamatan Benda, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Pinang, Kecamatan Cipondoh																
3) Pengembangan Kawasan Peternakan	Kecamatan Periuk																
4) Pengembangan Kegiatan Perikanan	Tersebar di seluruh wilayah																
j. Kawasan Pelayanan Umum																	
1) Pengembangan dan Pembangunan Sarana Pendidikan	Tersebar di seluruh wilayah																
2) Pengembangan dan Pembangunan Sarana Peribadatan	Tersebar di seluruh wilayah																
3) Pengembangan dan Pembangunan Sarana Kesehatan	Tersebar di seluruh wilayah																

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan															
		2013-2017				2018-2022				2023-2027				2028-2032			
4) Pengembangan dan Pembangunan Sarana Pemerintahan	Tersebar di seluruh wilayah																
5) Pengembangan dan Penataan TPA	TPA Rawa Kucing																
k. Kawasan Penunjang Bandar Udara																	
1) Pengembangan dan Pembangunan Kegiatan Penunjang Bandara	Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari																
2) Pembangunan Kampung Haji	Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari																
3) Penataan Kegiatan di Sekitar Bandara	Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari																
l. Kawasan Bandar Udara																	
1) Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara	Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari																
m. Kawasan Pertahanan dan Keamanan																	
1) Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Komplek Bataliyon Infantri 203 di Kecamatan Jatiuwung, Komplek Satuan Rudal (Satrudal) di Kecamatan Neglasari, Komando Distrik Militer (Kodim) 0506 dan Kepolisian Resort (Polres) Tangerang di Kecamatan Tangerang																
C. Perwujudan Kawasan Strategis																	
1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota	Pusat Kota Baru, Kota Lama, Sepanjang sisi jalan tol, Kawasan Peruntukan Industri, Sepanjang Sungai Cisadane, dan Penataan Situ																
2. Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota	Pusat Kota Baru, Kota Lama, Sepanjang sisi jalan tol, Kawasan Peruntukan Industri, Sepanjang Sungai Cisadane, dan Penataan Situ																

Sumber: RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032


4.3.3. Tantangan Pembangunan Global


Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat, yang dihadiri oleh 193 pemimpin negara termasuk Indonesia, secara resmi telah mengesahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Mulai tahun 2016, SDGs 2015-2030 secara resmi menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs) 2000-2015.


Sustainable Development Goals (SDGs) berisi 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 target. Seluruh tujuan SDGs merupakan satu kesatuan sistem pembangunan, tidak mementingkan satu isu tertentu. SDGs ini perlu diterjemahkan dan diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Tabel di bawah ini menguraikan 17 tujuan dan 169 target SDGs 2015-2030.



Salah satu tantangan pembangunan internasional yang menjadi kesepakatan negara-negara di dunia adalah pencapaian tujuan dan target Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2015-2030. Berikut ini diuraikan **tujuan dan target Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2015-2030**.


Tabel 4.3
Tujuan dan Target Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Tahun 2030



Tujuan	Target
 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	<ol style="list-style-type: none">1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang di manapun, dimana ukuran yang digunakan sekarang adalah mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$ 1,25 perhari. (1.1)2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya separuh proporsi dari laki-laki, perempuan dan anak-anak segala umur yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensi menurut definisi nasional. (1.2)3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level, dan pada tahun 2030 sudah mencapai cakupan yang cukup substansial terhadap yang miskin dan rentan. (1.3)4. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, juga terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial, termasuk keuangan mikro. (1.4)5. Pada tahun 2030, membangun daya tahan mereka yang miskin dan yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi situasi tanpa perlindungan dan kerentanan terhadap kejadian-kejadian ekstrim yang berhubungan dengan perubahan iklim, juga kejutan dan


Tujuan	Target
	<p>bencana ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya. (1.5)</p> <p>6. Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas, dalam rangka menyediakan alat-alat yang cukup dan mudah diprediksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya. (1.a)</p> <p>7. Menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan. (1.b)</p>
<div data-bbox="217 651 331 763">  <p>2 ZERO HUNGER</p> </div> <p>Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan</p>	<p>8. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi dan berkecukupan sepanjang tahun. (2.1)</p> <p>9. Pada tahun 2030, mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil dan menyusui dan manula. (2.2)</p> <p>10. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja bukan pertanian. (2.3)</p> <p>11. Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktek-praktek agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah. (2.4)</p> <p>12. Pada tahun 2020, memelihara keanekaragaman genetika benih, mengolah tanaman dan persawahan serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dipelihara dengan baik keragamannya pada level nasional, regional dan internasional, dan mendukung akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional, seperti yang telah disepakati secara internasional. (2.5)</p> <p>13. Menaikkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang diperluas, dalam hal infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan perluasan pelayanan, pengembangan teknologi dan tanaman serta bank genetik ternak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi agrikultur di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara kurang berkembang. (2.a)</p> <p>14. Memperbaiki dan mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar agrikultur dunia, termasuk melalui penghilangan bersamaan dari segala bentuk subsidi ekspor agrikultur dan semua ukuran ekspor lainnya yang memiliki efek yang sama, sesuai dengan mandat Putaran Pembangunan Doha (2.b)</p> <p>15. Mengadopsi ukuran-ukuran yang dapat memastikan fungsi yang</p>



Tujuan	Target
	layak bagi pasar komoditi pangan dan turunannya dan memfasilitasi akses terhadap informasi pasar, termasuk persediaan pangan, dalam rangka untuk membatasi pergolakan ekstrim harga bahan pangan. (2.c)
<div data-bbox="217 398 331 510"> 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING  </div> <p>Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia</p>	<p>16. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. (3.1)</p> <p>17. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, dimana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran. (3.2)</p> <p>18. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya. (3.3)</p> <p>19. Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan. (3.4)</p> <p>20. Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan yang berbahaya dari alkohol. (3.5)</p> <p>21. Pada tahun 2020, secara global mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. (3.6)</p> <p>22. Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional. (3.7)</p> <p>23. Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua. (3.8)</p> <p>24. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah. (3.9)</p> <p>25. Memperkuat implementasi dari Kerangka Kerja Konvensi WHO mengenai Kontrol terhadap Tembakau di semua negara, sebagaimana layaknya. (3.a)</p> <p>26. Mendukung riset dan pengembangan dari vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular, yang secara khusus mempengaruhi negara-negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat-obatan dasar dan vaksin yang terjangkau, sesuai dengan Deklarasi Doha mengenai Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Publik, yang menegaskan hak dari negara-negara berkembang untuk menggunakan secara penuh provisi dalam Perjanjian Aspek Terkait Perdagangan Hak Properti Intelektual mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan publik, dan terutama akses terhadap obat-obatan untuk semua (3.b)</p> <p>27. Secara substansial meningkatkan pendanaan dan untuk perekrutan, pengembangan, training dan daya serap tenaga kerja kesehatan di negara-negara berkembang, terutama di negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. (3.c)</p> <p>28. Memperkuat kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang untuk peringatan dini, pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional dan global. (3.d)</p>


Tujuan	Target
<div data-bbox="217 282 331 387">  </div> <p data-bbox="352 282 600 488">Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang</p>	<p data-bbox="616 282 1418 398">29. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. (4.1)</p> <p data-bbox="616 405 1418 521">30. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar. (4.2)</p> <p data-bbox="616 528 1418 613">31. Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas. (4.3)</p> <p data-bbox="616 620 1418 739">32. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha. (4.4)</p> <p data-bbox="616 745 1418 896">33. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan. (4.5)</p> <p data-bbox="616 902 1418 987">34. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca-tulis dan kemampuan berhitung. (4.6)</p> <p data-bbox="616 994 1418 1176">35. Pada tahun 2030, memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan. (4.7)</p> <p data-bbox="616 1182 1418 1301">36. Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. (4.a)</p> <p data-bbox="616 1308 1418 1518">37. Pada 2020, secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, program teknik dan sains, di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya. (4.b)</p> <p data-bbox="616 1525 1418 1671">38. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. (4.c)</p>
<div data-bbox="217 1686 331 1792">  </div> <p data-bbox="352 1686 600 1832">Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan</p>	<p data-bbox="616 1686 1418 1742">39. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja. (5.1)</p> <p data-bbox="616 1749 1418 1868">40. Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (<i>trafficking</i>) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya. (5.2)</p> <p data-bbox="616 1874 1418 1960">41. Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan. (5.3)</p> <p data-bbox="616 1966 1418 1984">42. Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak</p>



Tujuan	Target
	<p>dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional. (5.4)</p> <p>43. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik. (5.5)</p> <p>44. Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya. (5.6)</p> <p>45. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. (5.a)</p> <p>46. Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan. (5.b)</p> <p>47. Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level. (5.c)</p>
<div data-bbox="217 1055 331 1167">  </div> <p>Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang</p>	<p>48. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. (6.1)</p> <p>49. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air di tempat terbuka, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan. (6.2)</p> <p>50. Pada tahun 2030, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global. (6.3)</p> <p>51. Pada tahun 2030, secara substantif meningkatkan penggunaan air secara efisien di semua sektor dan memastikan pengambilan dan suplai air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air. (6.4)</p> <p>52. Pada tahun 2030, mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi (IWRM) pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antarbatas selayaknya. (6.5)</p> <p>53. Pada tahun 2020, melindungi dan memperbaiki ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, resapan air dan danau. (6.6)</p> <p>54. Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas kepada negara-negara berkembang dalam aktivitas dan program terkait air dan sanitasi, termasuk water harvesting, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan penggunaan ulang. (6.a)</p> <p>55. Mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam</p>


Tujuan	Target
<div data-bbox="217 304 331 421">  </div> <p data-bbox="352 304 600 488">Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang</p>	<p data-bbox="667 271 1166 297">memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi. (6.b)</p> <p data-bbox="616 304 1410 831"> 56. Pada tahun 2030, memastikan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern. (7.1) 57. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substantif proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global. (7.2) 58. Pada tahun 2030, menggandakan laju perbaikan efisiensi energi. (7.3) 59. Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih, dan mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. (7.a) 60. Pada tahun 2030, menambah infrastruktur dan meningkatkan mutu teknologi untuk supply pelayanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan bantuan program masing-masing. (7.b) </p>
<div data-bbox="217 842 331 958">  </div> <p data-bbox="352 842 600 1144">Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang</p>	<p data-bbox="616 842 1410 1984"> 61. Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan situasi nasional dan, khususnya, setidaknya mempertahankan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara-negara kurang berkembang. (8.1) 62. Mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui disertifikasi, peningkatan mutu teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya. (8.2) 63. Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan. (8.3) 64. Memperbaiki secara progresif, sampai tahun 2030, efisiensi sumberdaya global dalam hal konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja 10 tahun program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan dipelopori negara-negara maju. (8.4) 65. Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama. (8.5) 66. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan atau terlatih. (8.6) 67. Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menegakkan larangan dan eliminasi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan pemanfaatan serdadu anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak. (8.7) 68. Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting. (8.8) 69. Pada tahun 2030, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat </p>


Tujuan	Target
	<p>menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal. (8.9)</p> <p>70. Memperkuat kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan layanan pendanaan untuk semua. (8.10)</p> <p>71. Meningkatkan Bantuan untuk Perdagangan (Aid for Trade) untuk negara-negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Kerja Terintegrasi yang Diperluas untuk Bantuan Teknis Terkait Perdagangan bagi Negara-negara Kurang Berkembang. (8.a)</p> <p>72. Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global bagi angkatan kerja muda dan mengimplementasikan Pakta Kerja Global milik Organisasi Buruh Internasional (ILO). (8.b)</p>
<div data-bbox="217 685 331 792">  </div> <p>Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi</p>	<p>73. Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua. (9.1)</p> <p>74. Mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan, pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan bagian industri terhadap penciptaan lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan situasi nasional, dan menggandakan bagian industri di negara kurang berkembang. (9.2)</p> <p>75. Meningkatkan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil lainnya, khususnya di negara-negara berkembang terhadap layanan pendanaan, termasuk kredit yang terjangkau dan digabungkan dengan value chains dan pasar. (9.3)</p> <p>76. Pada tahun 2030, meningkatkan mutu infrastruktur dan menambahkan komponen pada industri agar dapat berkelanjutan, dengan ditambahkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengadopsi teknologi bersih dan ramah lingkungan dan proses industrial, dimana semua negara melakukan aksi ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. (9.4)</p> <p>77. Menambah penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara, khususnya negara berkembang, termasuk, pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substantif meningkatkan jumlah riset dan tenaga pembangunan per 1 juta orang dan juga riset publik dan swasta serta pengeluaran pembangunan. (9.5)</p> <p>78. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang tahan lama dan berkelanjutan di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi dan teknis yang diperbanyak untuk negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang terkungkung daratan dan negara berkembang kepulauan kecil. (9.a)</p> <p>79. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan kondisi kebijakan yang kondusif untuk, diantaranya, diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditi. (9.b)</p> <p>80. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan berupaya untuk menyediakan akses yang universal dan terjangkau terhadap internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. (9.c)</p>


Tujuan	Target
<div data-bbox="217 282 331 387">  </div> <p data-bbox="352 282 600 360">Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara</p>	<p data-bbox="616 282 1414 360">81. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi yang paling bawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. (10.1)</p> <p data-bbox="616 371 1414 488">82. Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi atau status lainnya. (10.2)</p> <p data-bbox="616 499 1414 645">83. Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan/outcome, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan dan aksi yang sepantasnya untuk hal ini. (10.3)</p> <p data-bbox="616 656 1414 701">84. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan. (10.4)</p> <p data-bbox="616 712 1414 768">85. Memperbaiki regulasi dan memonitor pasar dan institusi keuangan global dan menguatkan implementasi dari regulasi tersebut. (10.5)</p> <p data-bbox="616 779 1414 896">86. Memastikan representasi yang lebih banyak dan suara untuk negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di institusi-institusi ekonomi dan keuangan global internasional agar dapat menjadi institusi yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan sah. (10.6)</p> <p data-bbox="616 907 1414 985">87. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. (10.7)</p> <p data-bbox="616 996 1414 1075">88. Mengimplementasikan prinsip perlakuan khusus dan diferensial untuk negara-negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, sesuai dengan perjanjian WTO. (10.a)</p> <p data-bbox="616 1086 1414 1265">89. Mendorong bantuan pembangunan resmi (ODA) dan aliran finansial, termasuk investasi asing langsung (FDI), untuk negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang kepulauan kecil dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional masing-masing. (10.b)</p> <p data-bbox="616 1276 1414 1355">90. Pada tahun 2030, mengurangi sampai dengan kurang dari 3 persen dari biaya transaksi pengiriman migran dan menghilangkan koridor pengiriman yang berbiaya lebih dari 5 persen. (10.c)</p>
<div data-bbox="217 1373 331 1478">  </div> <p data-bbox="352 1373 600 1518">Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan</p>	<p data-bbox="616 1373 1414 1451">91. Pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh. (11.1)</p> <p data-bbox="616 1462 1414 1641">92. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi publik, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas dan manula. (11.2)</p> <p data-bbox="616 1653 1414 1765">93. Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatoris, terintegrasi dan berkelanjutan di setiap negara. (11.3)</p> <p data-bbox="616 1776 1414 1832">94. Menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia. (11.4)</p> <p data-bbox="616 1843 1414 1977">95. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan</p>

Tujuan	Target
	<p>yang berada di situasi rentan. (11.5)</p> <p>96. Pada tahun 2030, mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan perkapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya dan manajemen limbah lainnya. (11.6)</p> <p>97. Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas. (11.7)</p> <p>98. Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif diantara area urban, peri-urban dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional. (11.a)</p> <p>99. Pada tahun 2020, secara substantif meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusif, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tahan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Resiko Pengurangan Bencana 2015-2030, dan manajemen resiko bencana yang holistic pada semua level. (11.b)</p> <p>100. Mendukung negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui bantuan finansial dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tahan lama dengan memanfaatkan bahan material lokal. (11.c)</p>
 <p>Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan</p>	<p>101. Mengimplementasikan Kerangka Kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, di mana seluruh negara melakukan aksi, dengan dipelopori negara-negara maju, dengan melihat pembangunan dan kemampuan dari negara-negara berkembang. (12.1)</p> <p>102. Pada tahun 2030, mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam. (12.2)</p> <p>103. Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian pasca panen. (12.3)</p> <p>104. Pada tahun 2020, meraih manajemen ramah lingkungan dari bahan kimia dan limbah lainnya sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan tersebut ke udara, air dan tanah dalam rangka meminimalisir dampak buruk bahan tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. (12.4)</p> <p>105. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali. (12.5)</p> <p>106. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan skala besar dan transnasional untuk mengadopsi praktek-praktek yang berkelanjutan dan untuk memasukkan informasi yang berkelanjutan didalam siklus laporan mereka. (12.6)</p> <p>107. Mendukung praktek-praktek pengadaan barang publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. (12.7)</p> <p>108. Pada tahun 2030, memastikan bahwa setiap orang di manapun mendapatkan informasi yang relevan dan kesadaran untuk pembangunan dan gaya hidup yang berkelanjutan secara harmonis dengan alam. (12.8)</p> <p>109. Mendukung negara-negara berkembang untuk menguatkan kapasitas</p>

Tujuan	Target
	<p>ilmiah dan teknologi agar dapat bergerak menuju pola-pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. (12.a)</p> <p>110. Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal. (12.b)</p> <p>111. Merasionalisasikan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang justru mendorong konsumsi berlebih dengan cara menghilangkan penyimpangan pasar, sesuai dengan situasi nasional, termasuk dengan merestrukturisasi pajak dan secara bertahap mengurangi subsidi yang berbahaya, dimana adanya, untuk merefleksikan dampaknya terhadap lingkungan, dengan melihat pada kebutuhan spesifik dan kondisi dari negara-negara berkembang dan meminimalisir dampak buruk terhadap pembangunan negara-negara tersebut dengan cara yang melindungi kaum miskin dan masyarakat terkena dampak. (12.c)</p>
 <p>Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya</p>	<p>112. Memperkuat daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya alam yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara. (13.1)</p> <p>113. Mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. (13.2)</p> <p>114. Memperbaiki pendidikan, kesadaran dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini. (13.3)</p> <p>115. Mengimplementasikan komitmen yang dibuat oleh pihak negara-negara maju kepada Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim dengan tujuan untuk memobilisasikan secara bersama \$100 milyar pertahunnya pada tahun 2020 dari segala sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi dan transparansi terhadap implementasinya dan secara penuh mengoperasionalkan Dana Iklim Hijau (GCF) melalui kapitalisasi secepat mungkin. (13.a)</p> <p>116. Mendukung mekanisme untuk peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, dengan berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan marjinal. (13.b)</p>
 <p>Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan</p>	<p>117. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi kelautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpihan sisa barang laut dan polusi bahan makanan. (14.1)</p> <p>118. Pada tahun 2020, secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya, dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif. (14.2)</p> <p>119. Meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut, termasuk memperbanyak kerjasama ilmiah pada setiap level. (14.3)</p> <p>120. Pada tahun 2020, secara efektif meregulasi panen dan pengambilan ikan secara berlebihan, pemancingan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teregulasi, juga praktek-praktek pemancingan yang destruktif serta mengimplementasikan perencanaan manajemen berbasis ilmiah agar dapat mengembalikan persediaan ikan secepat mungkin, setidaknya pada level dimana dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sebagaimana karakteristik biologis masing-masing</p>

Tujuan	Target
	<p>ikan. (14.4)</p> <p>121. Pada tahun 2020, mengkonservasi setidaknya 10 persen dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. (14.5)</p> <p>122. Pada tahun 2020, melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kapasitas berlebih dan pengambilan ikan yang berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak melaporkan dan tidak teregulasi dan menahan diri dari memperkenalkan bentuk subsidi yang demikian, dengan kesadaran bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang layak dan efektif untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi WTO2. (14.6)</p> <p>123. Pada tahun 2030, meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan, budidaya pariwisata perairan. (14.7)</p> <p>124. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas riset dan transfer teknologi kelautan, dengan melihat pada Kriteria dan Panduan Komisi Antar Pemerintah Oceanografi mengenai Transfer Teknologi Kelautan, agar dapat meningkatkan kesehatan laut dan memperbanyak kontribusi keanekaragaman hayati laut terhadap pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang. (14.a)</p> <p>125. Menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil. (14.b)</p> <p>126. Memperbanyak konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap laut dan sumber dayanya, seperti yang tertera di paragraf 158 dari "The Future We Want" (Masa Depan yang Kami Inginkan). (14.c)</p>
 <p>Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati</p>	<p>127. Pada tahun 2020, memastikan bahwa konservasi, restorasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terrestrial dan air daratan dan pelayanannya, khususnya hutan, rawa, pegunungan dan daratan, sejalan dengan kewajiban dibawah perjanjian internasional. (15.1)</p> <p>128. Pada tahun 2020, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua tipe hutan, menghambat deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global. (15.2)</p> <p>129. Pada tahun 2030, memerangi desertifikasi, merestorasi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang kena dampak desertifikasi, kekeringan, banjir, dan berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral. (15.3)</p> <p>130. Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayati, agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan. (15.4)</p> <p>131. Melakukan aksi segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi natural habitat, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam/langka. (15.5)</p> <p>132. Mendorong pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetika dan mendukung akses yang layak terhadap sumber-sumber tersebut, sebagaimana</p>

Tujuan	Target
	<p>disepakati secara internasional. (15.6)</p> <p>133. Melakukan aksi segera untuk mengakhiri perburuan dan penjualan spesies flora dan fauna yang dilindungi dan mengatasi baik penawaran maupun permintaan produk satwa liar ilegal. (15.7)</p> <p>134. Pada tahun 2020, mengenalkan upaya-upaya yang dapat mencegah pengenalan dan secara signifikan mengurangi dampak dari invasi spesies asing terhadap ekosistem tanah dan air yang dapat mengurangi jumlah spesies prioritas. (15.8)</p> <p>135. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan, dan strategi pengentasan kemiskinan. (15.9)</p> <p>136. Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial dari segala macam sumber untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. (15.a)</p> <p>137. Memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber dan semua level untuk mendanai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif yang sesuai kepada negara-negara berkembang untuk dapat melaksanakan model pengelolaan tersebut, termasuk untuk konservasi dan reforestasi. (15.b)</p> <p>138. Memperbanyak dukungan global untuk upaya-upaya memerangi perburuan dan penjualan spesies dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang berkelanjutan. (15.c)</p>
<div data-bbox="217 1025 331 1137">  </div> <p>Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan</p>	<p>139. Secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak. (16.1)</p> <p>140. Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak. (16.2)</p> <p>141. Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua. (16.3)</p> <p>142. Pada 2030, secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian asset yang dicuri dan memerangi semua jenis tindak kejahatan kriminal yang terorganisir. (16.4)</p> <p>143. Secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk. (16.5)</p> <p>144. Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level. (16.6)</p> <p>145. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level. (16.7)</p> <p>146. Memperlebar dan menguatkan partisipasi dari negara-negara berkembang dalam institusi dan tata-kelola global. (16.8)</p> <p>147. Pada tahun 2030, menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran. (16.9)</p> <p>148. Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional. (16.10)</p> <p>149. Memperkuat institusi nasional yang terkait, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk pengembangan kapasitas pada semua level, khususnya di negara-negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan. (16.a)</p> <p>150. Mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. (16.b)</p>

Tujuan	Target
<div data-bbox="217 282 331 387">  </div> <p data-bbox="347 282 600 517">Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (<i>means of implementation</i>) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan</p>	<p data-bbox="616 282 1418 394">151. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui bantuan internasional kepada negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik dalam hal pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya. (17.1)</p> <p data-bbox="616 405 1418 640">152. Negara-negara maju mengimplementasikan secara penuh komitmen ODA mereka, termasuk komitmen yang dibuat oleh banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari ODA/GNI bagi negara-negara berkembang dan 0,15 – 0,20 persen dari ODA/GNI bagi negara-negara kurang berkembang. pemberi ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk dapat memberikan setidaknya 0,20 persen dari ODA/GNI kepada negara-negara kurang berkembang. (17.2)</p> <p data-bbox="616 651 1418 707">153. Memobilisasi tambahan sumber daya finansial untuk negara berkembang dari berbagai sumber. (17.3)</p> <p data-bbox="616 719 1418 898">154. Membantu negara berkembang dalam mencapai pengelolaan hutang jangka-panjang yang berkelanjutan melalui kebijakan yang terkoordinir yang ditujukan untuk membantu perkembangan pendanaan hutang, penghapusan hutang dan restrukturisasi hutang, sebagaimana layaknya, dan mengatasi hutang dari negara miskin berutang banyak untuk mengurangi beban hutang. (17.4)</p> <p data-bbox="616 909 1418 965">155. Mengadopsi dan mengimplementasikan regim yang mendukung investasi bagi negara kurang berkembang. (17.5)</p> <p data-bbox="616 976 1418 1178">156. Memperbanyak kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan segitiga regional dan internasional mengenai akses terhadap sains, teknologi dan inovasi dan memperbanyak berbagi pengetahuan mengenai syarat yang disepakati bersama, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik diantara mekanisme yang sudah ada, khususnya pada level PBB, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. (17.6)</p> <p data-bbox="616 1189 1418 1301">157. Mendukung perkembangan, transfer, diseminasi dan difusi teknologi ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang dengan syarat lunak, termasuk syarat konsesi dan preferensial, sebagaimana yang telah disepakati bersama. (17.7)</p> <p data-bbox="616 1312 1418 1458">158. Secara penuh mengoperasionalisasi bank teknologi dan sains, mekanisme pengembangan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan memperbanyak penggunaan teknologi yang memungkinkan, terutama teknologi informasi dan komunikasi. (17.8)</p> <p data-bbox="616 1469 1418 1648">159. Meningkatkan dukungan internasional untuk mengimplementasikan pengembangan kapasitas yang efektif dan mengena di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk mengimplementasikan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama segitiga. (17.9)</p> <p data-bbox="616 1659 1418 1771">160. Mendorong system perdagangan multilateral yang universal, berdasarkan aturan, non-diskriminatif dan setara di bawah WTO, termasuk melalui konklusi negosiasi dibawah Agenda Pembangunan Doha. (17.10)</p> <p data-bbox="616 1783 1418 1861">161. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara-negara berkembang, dengan pandangan untuk menggandakan porsi ekspor global negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. (17.11)</p> <p data-bbox="616 1872 1418 1984">162. Menyadari implementasi yang tepat waktu dari akses terhadap pasar bebas-bea dan bebas-quota untuk seterusnya, bagi negara-negara kurang berkembang, konsisten dengan keputusan WTO, termasuk dengan memastikan bahwa aturan asal (<i>rules of origin</i>) yang</p>

Tujuan	Target
	<p>preferensial yang diterapkan bagi import dari negara kurang berkembang bersifat transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar. (17.12)</p> <p>163. Memperbaiki stabilitas ekonomi makro global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan. (17.13)</p> <p>164. Meningkatkan koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan. (17.14)</p> <p>165. Menghargai ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. (17.15)</p> <p>166. Memperluas kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan multi-pihak yang dapat memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial, untuk mendukung pencapaian Tujuan di semua negara, terutama negara berkembang. (17.16)</p> <p>167. Mendorong dan mendukung kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif, yang dibangun dari pengalaman dan strategi dalam bermitra. (17.17)</p> <p>168. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas ke negara-negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, untuk secara signifikan meningkatkan ketersediaan data yang bermutu tinggi, tepat waktu dan dapat diandalkan, diagregat menurut pendapatan, gender, usia, suku, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dalam konteks nasional. (17.18)</p> <p>169. Pada tahun 2030, membangun dari inisiatif-inisiatif yang ada untuk mengembangkan ukuran kemajuan terhadap pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara berkembang. (17.19)</p>

Sumber: Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030

4.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang dihadapi maka dapat diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan **isu strategis pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026** yang dihadapi.

Tabel 4.4

Isu Strategis Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026

Isu Strategis		Permasalahan Pokok	
1	DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA		
		1.1	Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat Belum Memadai
		1.2	Literasi dan Gemar Membaca Masyarakat Belum Optimal
		1.3	Pengelolaan, Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah Belum Optimal
		1.4	Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Memadai
		1.5	Prestasi dan Pemasarakatan Olahraga Belum Optimal
		1.6	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) dan Kemiskinan Belum Optimal
		1.7	Kerawanan dan Ketahanan Pangan
		1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belum Optimal
		1.9	Pengendalian Penduduk serta Peningkatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Belum Optimal
		1.10	Kesempatan Kerja, Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Belum Memadai
		1.11	Pengembangan Kewirausahaan Belum Optimal
2	DAYA SAING PEREKONOMIAN		
		2.1	Pelayanan Perijinan dan Investasi Belum Optimal
		2.2	Pengelolaan dan Pengembangan Perdagangan Belum Optimal
		2.3	Kualitas Produk Industri dan IKM Belum Berdaya Saing
		2.4	Peran Koperasi Sebagai Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan Belum Berkembang dengan Baik
		2.5	Kualitas Produk UMKM Belum Memadai
		2.6	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum Optimal

Isu Strategis		Permasalahan Pokok	
		2.7	Produktivitas Pertanian dan Perikanan Belum Optimal
3	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
		3.1	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Belum Optimal
		3.2	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Belum Memadai
		3.3	Kualitas Penataan Ruang Belum Memadai dan Optimal
		3.4	Rawan Bencana dan Penanggulanagn Bencana Belum Optimal
4	DAYA SAING INFRASTRUKTUR KOTA		
		4.1	Kemacetan
		4.2	Pengembangan Sistem Transportasi Umum yang Terintegrasi, Handal dan Berkeselamatan Belum Memadai dan Optimal
		4.3	Banjir dan Genangan
		4.4	Penataan Kawasan Kumuh serta Pengembangan Permukiman Layak Huni dan Terjangkau Belum Memadai dan Optimal
		4.5	Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Air Bersih (Minum) Perpipaan Belum Memadai dan Optimal
		4.6	Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Belum Memadai dan Optimal
		4.7	Pengelolaan dan Pelayanan Persampahan Belum Optimal
5	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK		
		5.1	Kapasitas Bangunan Pemerintah Daerah dan Fasilitas Pelayanan Publik Belum Memadai dan Optimal
		5.2	Pengelolaan Komunikasi dan Informatika Belum Optimal
		5.3	Ketersediaan dan Kualitas Data Statistik Daerah Belum Memadai dan Optimal
		5.4	Pendayagunaan Persandian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal
		5.5	Keserasian Kebijakan Pemerintahan Daerah Belum Optimal
		5.6	Pelayanan Kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan Belum Optimal

Isu Strategis		Permasalahan Pokok	
		5.7	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belum Optimal
		5.8	Kualitas Perencanaan Pembangunan Belum Optimal
		5.9	Dukungan Penelitian Berbasis Inovasi Pembangunan Belum Memadai
		5.10	Kualitas Pengawasan Belum Optimal
		5.11	Kapasitas Keuangan Daerah Belum Optimal
		5.12	Kualitas Tata Kelola Administrasi Keuangan Daerah Belum Optimal
		5.13	Kinerja Aparatur Belum Optimal
		5.14	Pengelolaan Administrasi Pertanahan Belum Optimal
		5.15	Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan Belum Optimal
		5.16	Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belum Optimal
		5.17	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Belum Optimal
		5.18	Pemeliharaan Kesatuan Bangsa dan Politik Belum Optimal



BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan

Perumusan tujuan pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026 juga didasarkan pada cita-cita seluruh masyarakat pada masa mendatang dan merupakan kelanjutan dari hasil pembangunan pada periode sebelumnya. Dalam kaitan tersebut maka Tahap V (Tahun 2024-2025) RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 menekankan pada perwujudan kemajuan dan daya saing daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berakhlakul kharimah (akhlak mulia).

Berikut ini diuraikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang, arah kebijakan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan Tahap V (Tahun 2024-2025) RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025.

5.1.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025

A. Visi dan Misi Pembangunan

Visi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

**“KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN
LESTARI BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH”**

Kota Industri, Perdagangan dan Jasa dimaksudkan sebagai karakter kewilayahan serta perekonomian wilayah yang akan melekat pada Kota Tangerang hingga tahun 2025. Karakter tersebut sejalan dengan identitas ‘Kota Seribu Industri’ yang disandang Kota Tangerang hingga saat ini, sekaligus didasarkan pada potensi pengembangannya dimasa mendatang. Industri, perdagangan dan jasa selain sebagai basis perekonomian Kota Tangerang, juga akan menjadi tempat bergantungnya sebagian besar masyarakat dalam memenuhi hajat hidupnya.

Maju, dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Kota Tangerang untuk termasuk dalam jajaran kota-kota dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi Kota Tangerang yang maju pada tahun 2025 ditandai dari: Sosial ditandai dengan sumberdaya manusia berpendidikan yang tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, serta produktivitas yang makin tinggi; Perekonomian ditandai dengan struktur ekonomi berbasis industri dan jasa yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; Pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya peran serta rakyat secara nyata dan aktif dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya supremasi hukum dan terpeliharanya budaya demokrasi.

Lestari, dimaksudkan sebagai kondisi dimana penyelenggaraan pembangunan tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian, namun juga harus berpijak pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung kota berdasarkan berbagai sumberdaya yang tersedia, sehingga pembangunan secara lestari dan berkelanjutan merupakan orientasi yang harus sejalan. Untuk itu, kedepan pembangunan Kota Tangerang dilaksanakan dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, baik fisik dan non fisik. Dengan kata lain pembangunan diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Selain itu pembangunan yang berwawasan lingkungan juga mengharuskan dipenuhinya kebutuhan dasar dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, maka **'Akhlakul Karimah' (Akhlak Mulia)** menjadi prinsip dasar yang merupakan landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang selama periode 2005-2025. Akhlakul Karimah diharapkan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 tersebut maka akan ditempuh melalui 5 (lima) **Misi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025** yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing

Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing adalah pembangunan yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya.

2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing

Misi Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing adalah pembangunan yang diarahkan untuk mengembangkan dan memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan komparatif dan kompetitif dengan berbasis pada potensi yang dimiliki daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari

Misi Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari adalah pembangunan yang diarahkan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan maju dan kawasan tertinggal.

4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing

Misi Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing adalah pembangunan yang diarahkan pada perwujudan kota yang bersih, indah, tertib dan aman. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada pelaksanaan

otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang

B.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing

Adapun **tujuan** dan **sasaran jangka panjang pembangunan** pada misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran Jangka Panjang	
1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, berbudaya dan bermartabat	1.1.1	Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan bermartabat
1.2	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	1.2.1	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berdaya saing
1.3	Meningkatkan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat	1.3.1	Terwujudnya masyarakat yang sehat
1.4	Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.4.1	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
1.5	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	1.5.1	terwujudnya keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga
1.6	Mengendalikan perkembangan penduduk	1.6.1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan terkelolanya administrasi kependudukan
1.7	Meningkatkan peran dan kualitas pemuda dalam pembangunan dan olah raga	1.7.1	Terwujudnya peran aktif pemuda dalam pembangunan
		1.7.2	Terwujudnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olah raga

B.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing

Adapun **tujuan** dan **sasaran jangka panjang pembangunan** pada misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran Jangka Panjang	
2.1	Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas perekonomian	2.1.1	Terwujudnya perekonomian yang merata, maju dan berdaya saing
2.2	Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar	2.2.1	Terwujudnya agribisnis pertanian dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing
		2.2.2	Terwujudnya industri yang berkualitas dan berdaya saing
		2.2.3	Terwujudnya perdagangan yang maju (modern) dan berdaya saing
		2.2.4	Terwujudnya pelayanan jasa pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing
2.3	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	2.3.1	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang kokoh
2.4	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.4.1	Terwujudnya kesempatan kerja yang luas
		2.4.2	Meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja

B.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari

Adapun **tujuan** dan **sasaran jangka panjang pembangunan** pada misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran Jangka Panjang	
3.1	Meningkatkan kualitas penataan ruang	3.1.1	Terwujudnya tata ruang kota yang berkualitas
		3.1.2	Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3.2	Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam	3.2.1	Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam
3.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	3.3.1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

B.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi 4 : Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing

Adapun **tujuan** dan **sasaran jangka panjang pembangunan** pada misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran Jangka Panjang	
4.1	Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar kota	4.1.1	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, handal, ramah lingkungan dan terjangkau
		4.1.2	Terwujudnya pelayanan drainase yang memadai untuk meminimalkan kerawanan banjir
		4.1.3	Terwujudnya pelayanan air bersih yang merata, berkualitas dan terjangkau
		4.1.4	Terwujudnya pelayanan persampahan yang memadai dan berkualitas untuk menciptakan kebersihan kota
		4.1.5	Terwujudnya pelayanan pelayanan pemadam kebakaran yang memadai dan berkualitas untuk meminimalkan kerawanan kebakaran
		4.1.6	Terwujudnya pelayanan informasi dan komunikasi yang memadai, berkualitas dan berdaya saing
4.2	Meningkatkan pelayanan fasilitas ekonomi kota	4.2.1	Terwujudnya pelayanan fasilitas perdagangan dan jasa yang maju dan berdaya saing
4.3	Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman	4.3.1	Terwujudnya perumahan yang layak huni dan terjangkau
		4.3.2	Terwujudnya lingkungan permukiman yang tidak kumuh

B.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 Pada Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Adapun **tujuan** dan **sasaran jangka panjang pembangunan** pada misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran Jangka Panjang	
5.1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	5.1.1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
5.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	5.2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang prima
5.3	Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah	5.3.1	Terwujudnya kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah yang memadai dan akuntabel
5.4	Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi	5.4.1	Terwujudnya masyarakat yang demokratis
5.5	Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat	5.5.1	Terwujudnya masyarakat yang sadar, patuh dan taat hukum

Tujuan		Sasaran Jangka Panjang	
5.6	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	5.6.1	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram dan tertib
5.7	Meningkatkan pengelolaan bencana	5.7.1	Terkelolanya penanganan bencana secara cepat dan tepat

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap V (Tahun 2024-2025)

C.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap V (Tahun 2024-2025)

Berikut ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap V (Tahun 2024-2025) pada setiap misi pembangunan.

C.1.1. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap V (Tahun 2024-2025) Pada Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Maju Dan Berdaya Saing

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERMORAL, BERBUDAYA DAN BERMARTABAT		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan bermartabat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas implementasi norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat • Terpeliharanya kerukunan hidup beragama dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, sosial dan kebudayaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sarana keagamaan, sosial dan kebudayaan • Pembinaan kerukunan hidup beragama • Pelestarian tata nilai sosial dan budaya • Pengelolaan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya
MENINGKATKAN AKSESIBILITAS, KUALITAS DAN DAYA SAING PENDIDIKAN MASYARAKAT		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan • Optimalisasi manajemen pelayanan pendidikan • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan pendidikan swasta • Optimalisasi minat dan budaya baca masyarakat • Optimalisasi daya saing kompetensi pendidikan yang berwawasan IPTEK dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan
MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya masyarakat yang sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan mutu tenaga kesehatan • Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat dan makanan • Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Meningkatnya keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan PMKS • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan PMKS • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap sumber daya produktif (pelatihan keterampilan, modal dan manajemen usaha) • Perlindungan dan rehabilitasi PMKS • Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA KESEJAHTERAAN KELUARGA		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Membaiknya tingkat kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sejahtera
MENGENDALIKAN PERKEMBANGAN PENDUDUK		
<ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan keluarga berencana • Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan • Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan • Peningkatan kerjasama kependudukan antardaerah
MENINGKATKAN PERAN DAN KUALITAS PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DAN OLAH RAGA		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peran aktif pemuda dalam pembangunan • Terwujudnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olah raga 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan • Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana olah raga

C.1.2. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap V (Tahun 2024-2025) Pada Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN KUALITAS PEREKONOMIAN		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya perekonomian yang merata, maju dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya investasi • Meningkatnya pertumbuhan ekonomi • Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kualitas dan daya saing pelayanan investasi • Jaminan kepastian hukum berusaha • Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi • Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha • Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha • Peningkatan fasilitasi modal usaha bagi pelaku usaha • Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha • Penguatan kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PEREKONOMIAN YANG BERBASIS PADA SUMBER DAYA LOKAL, KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN BERORIENTASI PASAR		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya agribisnis pertanian dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk agribisnis pertanian dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
		pengembangan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya industri yang berkualitas dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya perdagangan yang maju (modern) dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (masyarakat) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelayanan jasa pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana pelayanan pariwisata • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang kokoh 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya stok persediaan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas tanaman pangan • Peningkatan kerjasama antardaerah dalam penyediaan pangan • Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesempatan kerja yang luas • Meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesempatan kerja • Menurunnya tingkat pengangguran • Meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

C.1.3. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap V (Tahun 2024-2025) Pada Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri Dan Lestari

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
MENINGKATKAN KUALITAS PENATAAN RUANG		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya tata ruang kota yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnyaketersediaan dan kelengkapan rencana tata ruang • Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan peningkatan kualitas rencana tata ruang wilayah kota • Penataan dan optimalisasi fungsi pelayanan, struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang kota • Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota • Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota • Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM		
<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi pengelolaan fungsi lahan pada kawasan budi daya • Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung • Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah • Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air • Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya lingkungan hidup yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya daya dukung ruang terbuka hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pendayagunaan teknologi

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya tingkat pencemaran 	ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budi daya <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau • Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup • Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

C.1.4. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap V (Tahun 2024-2025) Pada Misi 4 : Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana Dan Fasilitas Kota Yang Memadai Dan Berdaya Saing

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
MENINGKATKAN PELAYANAN PRASARANA DAN SARANA DASAR KOTA		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, handal, ramah lingkungan dan terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ketersediaan dan kualitas jaringan jalan dan jembatan • Meningkatnya kualitas pelayanan sistem jaringan terminal dan angkutan umum masal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan • Peningkatan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan • Peningkatan kualitas g layanan sistem jaringan, peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal • Peningkatan kualitas layanan sistem jaringan dan moda angkutan umum masal darat dan sungai yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelayanan drainase yang memadai untuk meminimalkan kerawanan bannjir 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pelayanan drainase • Menurunnya lokasi rawan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kualitas layanan sistem jaringan drainase
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelayanan air bersih yang merata, berkualitas dan terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kapasitas dan kualitas sarana pengolahan air bersih • Optimalisasi layanan sistem jaringan air bersih
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelayanan persampahan yang memadai dan berkualitas untuk menciptakan kebersihan kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pendayagunaan sarana dan teknologi persampahan • Optimalisasi manajemen persampahan
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelayanan pengelolaan limbah yang memadai, berkualitas dan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi sistem dan teknologi pengelolaan limbah terpadu • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengelolaan limbah terpadu
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelayanan pelayanan pemadam kebakaran yang memadai dan berkualitas untuk meminimalkan kerawanan kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan sistem jaringan prasarana pemadam kebakaran • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi pemadam kebakaran
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelayanan telematika yang memadai, berkualitas dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan telekomunikasi, telematika dan informatika 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, telematika dan informatika

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi telekomunikas, telematika dan informatika
MENINGKATKAN PELAYANAN FASILITAS EKONOMI KOTA		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelayanan fasilitas perdagangan yang maju dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dan dan peningkatan kualitas layanan pasar tradisional • Penataan dan pengembangan sistem dan fasilitas perdagangan modern
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelayanan fasilitas jasa yang maju dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya daya saing pelayanan fasilitas jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran • Penataan, pengembangan, dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan
MENINGKATKAN PELAYANAN PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya perumahan yang layak huni dan terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ketersediaan dan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pengembangan perumahan horizontal yang layak huni dan terjangkau • Perluasan dan peningkatan perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau • Fasilitas rehabilitasi rumah layak huni • Fasilitas dan kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha • Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pengembang perumahan
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya lingkungan permukiman yang tidak kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kawasan kumuh permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung dan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman • Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman

C.1.5. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap V (Tahun 2024-2025) Pada Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas data, informasi, perencanaan, dan pengawasan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Peningkatan kualitas kearsipan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan
MENINGKATKAN KAPASITAS KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pendapatan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah

Tujuam/Sasaran Jangka Panjang	RPJMD KE-5 (2024-2025)	
	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah • Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kontribusi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN DEMOKRASI		
Terwujudnya masyarakat yang demokrtais	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penerapan prinsip demokrasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
MENINGKATKAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT		
Terwujudnya masyarakat yang sadar, patuh dan taat hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan penegakan supremasi hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum
MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram dan tertib	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

C.2. Tahapan Dan Prioritas Pembangunan Tahap V (Tahun 2024-2025)

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Tangerang dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Untuk itu diperlukan adanya tahapan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan prioritas pembangunan dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang.

Pembangunan jangka menengah periode tahun 2024-2025 merupakan **perwujudan Kota Tangerang sebagai ‘Kota yang Maju dan Lestari’**. Prioritas pembangunan pada periode tahun 2024-2025 menekankan pada upaya pemantapan kualitas dan daya saing kompetitif perekonomian secara nasional dan global; pemantapan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; pemantapan kualitas dan daya dukung pelayanan infrastruktur wilayah; pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta pemantapan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2024-2025 ditujukan pada upaya sebagai berikut:

1. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan daya saing sumber daya manusia ditekankan pada : Penuntasan wajib belajar lima belas tahun; Pemantapan lembaga PAUD sebagai media penyiapan menuju jenjang pendidikan dasar; Pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal berskala nasional dan internasional; Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional; Peningkatan pendidikan keterampilan dan penguasaan IPTEK bagi masyarakat; Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi); Implementasi dan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat; Pemantapan ketahanan budaya lokal/daerah dalam kehidupan global.

2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ditekankan pada: Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; Peningkatan advokasi, pemberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Pengendalian pertumbuhan penduduk; Peningkatan keluarga kecil berkualitas; Penataan persebaran penduduk yang mandiri dan berkualitas.

3. Pemantapan Daya Saing Perekonomian

Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan daya saing perekonomian ditekankan pada : Penguatan keunggulan kompetitif produk pertanian; Penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbarukan, Penanganan industri ramah lingkungan; Penguatan jaringan antar industri; Perluasan jaringan perdagangan dalam dan luar negeri; Pemantapan kehandalan UMKM dan Koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah; Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia; Pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi; Pemantapan kompetensi, daya saing dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja; Pembudayaan hubungan industrial untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota

Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota ditekankan pada : Pemantapan infrastruktur wilayah yang telah terbangun; Pemantapan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah; Pemantapan sistem transportasi massal (*Mass Rapid Transport*); Pemantapan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana.

5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Prioritas pembangunan dalam rangka pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ditekankan pada : Pemantapan koordinasi yang sistematis dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang; Perbaikan terus menerus pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup; Pemantapan perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat; Pemantapan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Prioritas pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditekankan pada : Pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik didukung sistem, prosedur, serta standarisasi kualitas pelayan; Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik; Pemantapan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di semua bidang; Peningkatan daya guna dan hasil guna kekayaan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel; Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat; Perwujudan fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Pemantapan budaya taat hukum di masyarakat; Pemantapan peran masyarakat madani (*civil society*).

5.1.2. Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berikut ini diuraikan mengenai **tujuan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026** dan keterkaitannya dengan misi RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025.

Tabel 5.1

Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026

Misi RPJPD		Tujuan	
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing	1.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
		1.2	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat
2	Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing
3	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri Dan Lestari	3.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
		3.2	Meningkatkan ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap resiko bencana
4	Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana Dan Fasilitas Kota Yang Memadai Dan Berdaya Saing	4.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan
5	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	5.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

5.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu pada masa depan. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Berikut ini diuraikan mengenai **sasaran pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026**.

Tabel 5.2

Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026

Misi RPJPD		Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing				
		1.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		
				1.1.1	Meningkatnya kualitas dan daya

Misi RPJPD		Tujuan		Sasaran	
					saing pendidikan masyarakat
				1.1.2	Meningkatnya kualitas membaca masyarakat
				1.1.3	Meningkatnya kebudayaan daerah
				1.1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				1.1.5	Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga
		1.2	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat		
				1.2.1	Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan PPKS
				1.2.2	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat
				1.2.3	Meningkatnya keberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga
				1.2.4	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha
				1.2.5	Meningkatnya kreatifitas dan potensi pemuda
2	Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing		
				2.1.1	Meningkatnya investasi
				2.1.2	Meningkatnya keberdayaan dan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi

Misi RPJPD		Tujuan		Sasaran	
				2.1.3	Meningkatnya perdangan dan industri
				2.1.4	Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif
				2.1.5	Meningkatnya produktifitas perikanan dan pertanian
3	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri Dan Lestari				
		3.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
				3.1.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
				3.1.2	Meningkatnya kualitas penataan ruang
		3.2	Meningkatkan ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap resiko bencana		
				3.1.1	Meningkatnya ketahanan bencana
4	Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana Dan Fasilitas Kota Yang Memadai Dan Berdaya Saing	4.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan		
				4.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan
				4.1.2	Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air
				4.1.3	Meningkatnya kualitas permukiman
5	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	5.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		
				5.1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik

Misi RPJPD		Tujuan		Sasaran	
				5.1.2	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur
				5.1.3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta kesatuan bangsa

Berpijak pada pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut maka indikasi keberhasilannya diwujudkan dalam rencana (target) kinerja indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan **rencana (target) kinerja indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026**.

Tabel 5.3

Rencana (Target) Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
1	MISI 1 RPJPD :							
	MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, MAJU DAN BERDAYA SAING							
1.1	Tujuan 1.1 :							
	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia							
	1 Indeks Pendidikan (Pengetahuan)	Point	74.69	74.75	74.81	74.87	74.93	74.93
	2 Indeks Kesehatan	Point	79.86	79.94	80.02	80.09	80.17	80.17
1.1.1	Sasaran 1.1.1 :							
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat							
	1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.88	13.89	13.90	13.91	13.92	13.92
	2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.84	10.85	10.86	10.87	10.88	10.88
1.1.2	Sasaran 1.1.2 :							
	Meningkatnya literasi membaca masyarakat							
	1 Tingkat Kegemaran Membaca	Point	66.12	68.00	71.00	72.00	73.00	73.00

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
				2022	2023				
				Realisasi	Proyeksi				
1.1.3	Sasaran 1.1.3 :								
	Meningkatnya kebudayaan daerah								
		1 Tingkat Pemajuan Kebudayaan Daerah	%	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
1.1.4	Sasaran 1.1.4 :								
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
		1 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	71.91	71.96	72.01	72.06	72.11	72.11
1.2	Tujuan 1.2 :								
	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat								
		1 Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	%	5.77	5.66	5.54	5.43	5.32	5.32
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7.16	6.90	6.64	6.39	6.14	6.14
1.2.1	Sasaran 1.2.1 :								
	Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan PPKS								
		1 Persentase PMKS/PPKS yang mendapat pelayanan sosial	%	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi				
1.2.2	Sasaran 1.2.2 :							
	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat							
	1 Skor PPH Konsumsi	Point	89.40	89.50	89.60	89.80	89.90	89.90
1.2.3	Sasaran 1.2.3 :							
	Meningkatnya keberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga							
	1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	64.86	64.87	64.87	64.88	64.89	64.89
	2 Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.05	2.08	2.05	2.04	2.03	2.03
1.2.4	Sasaran 1.2.4 :							
	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha							
	1 Jumlah Lowongan Kerja	Orang	19,107	19,680	20,000	20,000	20,000	60,000
	2 Tingkat Penempatan Tenaga Kerja (TPTK)	%	80.94	81.88	82,00	83,00	84,00	84,00
1.2.5	Sasaran 1.2.5 :							

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
				2022	2023				
				Realisasi	Proyeksi				
	Meningkatnya Pemuda Kreatif serta Sportainment Daerah	1 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	47	50	52	53	55	55
		2 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Point	0.47	0.50	0.53	0.55	0.58	0.58
2	MISI 2 RPJPD :								
	MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING								
2.1	Tujuan 2.1 :								
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing								
		1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.98	4.48	4.58	4.73	4.89	4.89
		2 Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB Per Kapita)	Rp. Juta/Jiwa	94.38	99.21	104.66	110.65	117.24	117.24
		3 Indeks Daya Beli (IDB)	Point	82.34	82.55	82.77	82.99	83.22	83.22
		4 Indeks Gini (Gini Rasio)	Point	0,343*	0.341	0.339	0.337	0.335	0.335
		5 Laju Inflasi	%	4.56	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2.1.1	Sasaran 2.1.1 :								
	Meningkatnya investasi								
		1 Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliun	13.05	13.70	14.39	15.11	15.86	15.86

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi				
2.1.2	Sasaran 2.1.2 :							
	Meningkatnya keberdayaan dan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi							
	1 Jumlah UMKM	Unit Usaha	700	700	1,150	1,437	1,725	1,725
	2 Jumlah Koperasi yang Akuntabel	Unit Usaha	85	85	95	105	115	115
2.1.3	Sasaran 2.1.3 :							
	Meningkatnya perdangan dan industri							
	1 Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	Rp. Triliun	15.14	15.47	16.14	16.85	17.60	17.60
	2 Nilai Ekspor	Rp. Triliun	185.99	190.92	195.98	201.17	206.50	206.50
	3 Nilai PDRB ADHK Sektor Perindustrian (Industri Pengolahan)	Rp. Triliun	39.05	40.08	41.19	42.36	43.59	43.59
	4 Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Unit Usaha	4,542	4,542	4,542	4,642	4,742	4,742
2.1.4	Sasaran 2.1.4 :							
	Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif							

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
				2022	2023				
				Realisasi	Proyeksi				
		1 Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Triliun	1.77	1.83	1.90	1.98	2.07	2.07
		2 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisatawan Nusantara/Domestik dan Wisatawan Mancanegara/Asing)	Orang	1,165,536	1,652,147	2,120,676	2,208,942	2,297,208	2,297,208
		3 Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Unit Usaha	895	939	940	980	1,040	1,040
2.1.5	Sasaran 2.1.5 :								
	Meningkatnya produktifitas perikanan dan pertanian								
		1 Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp. Triliun	1.81	1.85	1.90	1.94	1.99	1.99
		2 Nilai Produksi Perikanan	Rp. Miliar	8,44	8,71	8,75	8,77	8,80	8,80
		3 Nilai Produksi Pertanian	Rp. Miliar	18.99	18.38	17.76	17.22	16.67	16.67
3	MISI 3 RPJPD :								
	MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI								
3.1	Tujuan 3.1 :								
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup								

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
				2022	2023				
				Realisasi	Proyeksi				
		1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	53.36	53.76	54.15	54.54	54.93	54.93
3.1.1	Sasaran 3.1.1 :								
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup								
		1 Indeks Kualitas Air (IKA)	Point	45.48	45.98	46.48	46.98	47.48	47.48
		2 Indeks Kualitas Udara (IKU)	Point	69.43	69.93	70.43	70.93	71.43	71.43
		3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Point	37.19	37.19	37.19	37.19	37.20	37.20
3.1.2	Sasaran 3.1.2 :								
	Meningkatnya kualitas penataan ruang								
		1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Tingkat Ketaatan terhadap RTRW)	%	87,00	87,50	88.00	88.50	89.00	89.00
3.2	Tujuan 3.2 :								
	Meningkatkan ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap resiko bencana								
		1 Indeks Resiko Bencana (IRB)	Point	116.80	115.30	113.80	112.30	110.80	110.80
3.2.1	Sasaran 3.2.1 :								

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
				2022	2023				
				Realisasi	Proyeksi				
	Meningkatnya ketahanan bencana								
		1 Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	%	0.55	0.58	0.61	0.64	0.67	0.67
4	MISI 4 RPJPD :								
	MEWUJUDKAN PELAYANAN PRASARANA, SARANA DAN FASILITAS KOTA YANG MEMADAI DAN BERDAYA SAING								
4.1	Tujuan 4.1 :								
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan								
		1 Indeks Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Point	73.41	74.48	76.19	77.96	79.73	79.73
4.1.1	Sasaran 4.1.1 :								
	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan								
		1 Tingkat Ketersediaan dan Kualitas Jalan dan Jembatan	%	95.95	96.95	97.45	97.95	98.45	98.45
		2 Kecepatan Rata-rata Perjalanan Kendaraan	Km/Jam	24.91	25.00	26.00	27.00	28.00	28.00
4.1.2	Sasaran 4.1.2 :								
	Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya								

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
				2022	2023				
				Realisasi	Proyeksi				
	air								
		1 Luas Banjir dan Genangan	Ha	509.38	487.47	437.47	387.47	337.47	337.47
4.1.3	Sasaran 4.1.3 :								
	Meningkatnya kualitas permukiman								
		1 Persentase Permukiman Kumuh	%	0.007	0.001	0.406	0.345	0.293	0.293
		2 Persentase Jumlah Penduduk yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		3 Persentase Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	99.80	99.81	99.82	99.83	99.84	99.84
		4 Tingkat Pengelolaan Sampah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	MISI 5 RPJPD :								
	MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH								
5.1	Tujuan 5.1 :								
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik								

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
				2022	2023				
				Realisasi	Proyeksi				
					Target	Target	Target	Target	
		1 Indeks Reformasi Birokrasi	Point	67.14	70.00	71.00	72.00	73.00	73.00
5.1.1	Sasaran 5.1.1 :								
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik								
		1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	Point	85.35	85.83	86.08	86.33	86.58	86.58
5.1.2	Sasaran 5.1.2 :								
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur								
		1 Indeks Profesional ASN	Point	90.00	91.00	80.00	81.00	82.00	82.00
5.1.3	Sasaran 5.1.3 :								
	Meningkatnya kualitas pemerintahan, perencanaan, keuangan, pengawasan dan inovasi pembangunan								
		1 Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Point	67.12	70.00	71.00	72.00	73.00	73.00
		2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

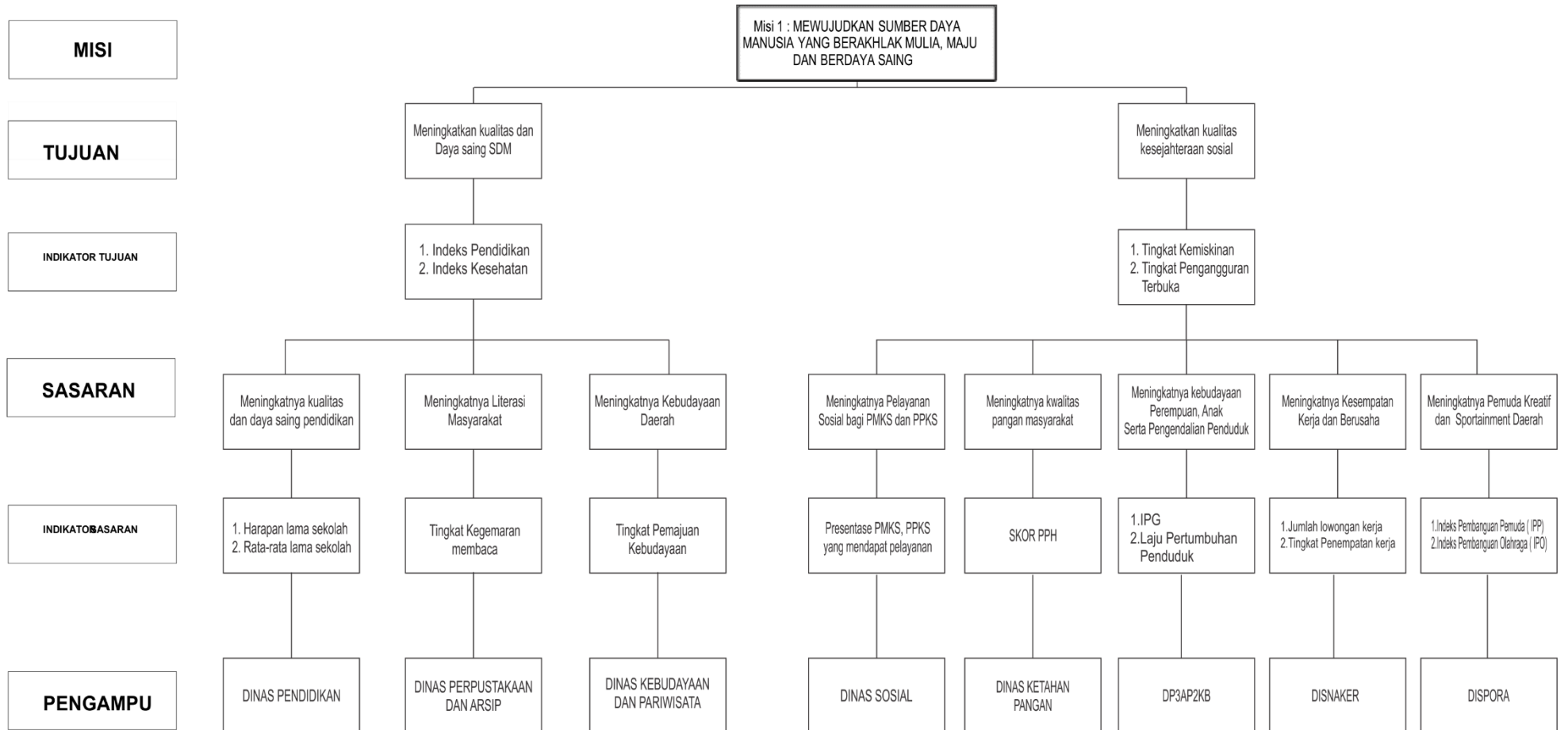
Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
				2022	2023				
				Realisasi	Proyeksi				
		3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah)	%	48.26	50.32	49.95	51.37	52.67	52.67
		4 Nilai Maturitas SPIP	Point	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		5 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Point	81.93	71.18	71,30	72,30	73,30	73,30
		6 Indeks Daya Saing Daerah (Penilaian Mandiri)	Point	3.00	3.10	3.12	3.13	3.14	3.14
		7 Rasio Tanah Milik Pemda Bersertifikat	%	3.92	2.61	4.58	5.88	6.54	6.54
		8 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point	2,60 (Baik)	3,40 (Baik)	3,41 (Baik)	3,42 (Baik)	3,41 (Baik)	3,41 (Baik)
		9 Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Point	62.92	80.00	80.00	81.00	81.00	81.00
5.1.4	Sasaran 5.1.4 :								
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta kesatuan bangsa								
		1 Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Jumlah Kasus Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/ Golongan (SARA)	Kasus	18.00	16.00	14.00	12.00	12.00	12.00

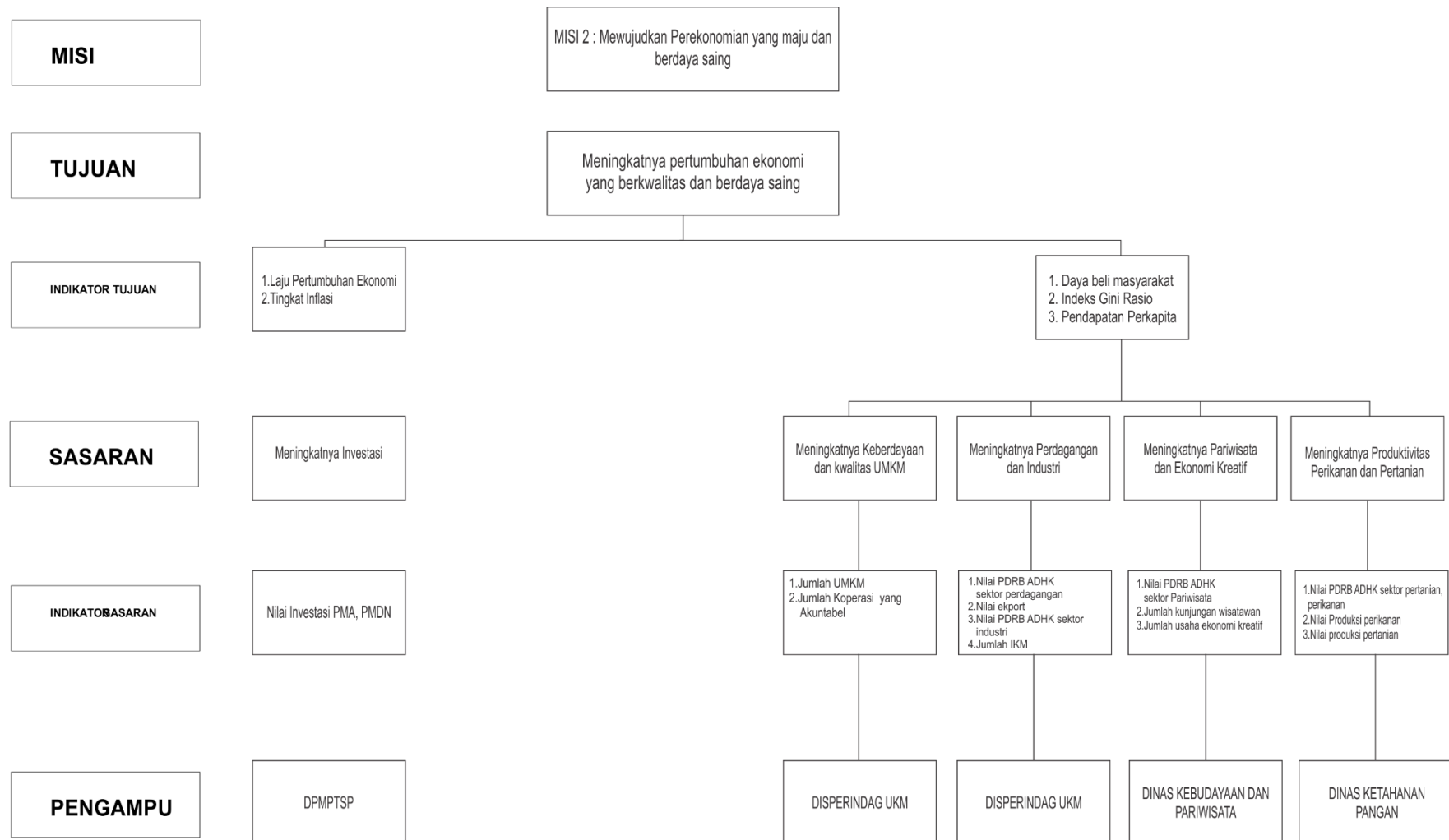
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

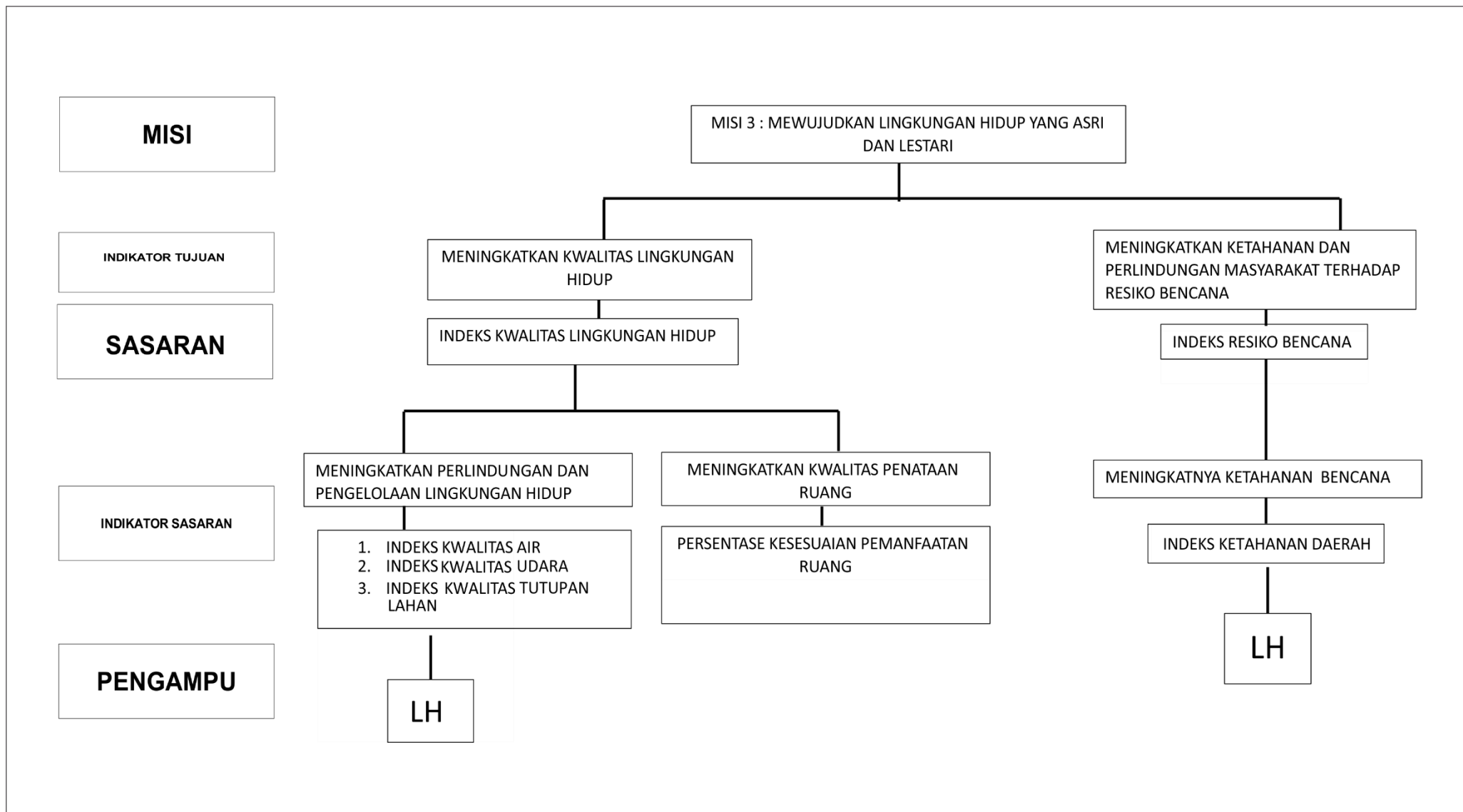
5.3. Cascading Kinerja

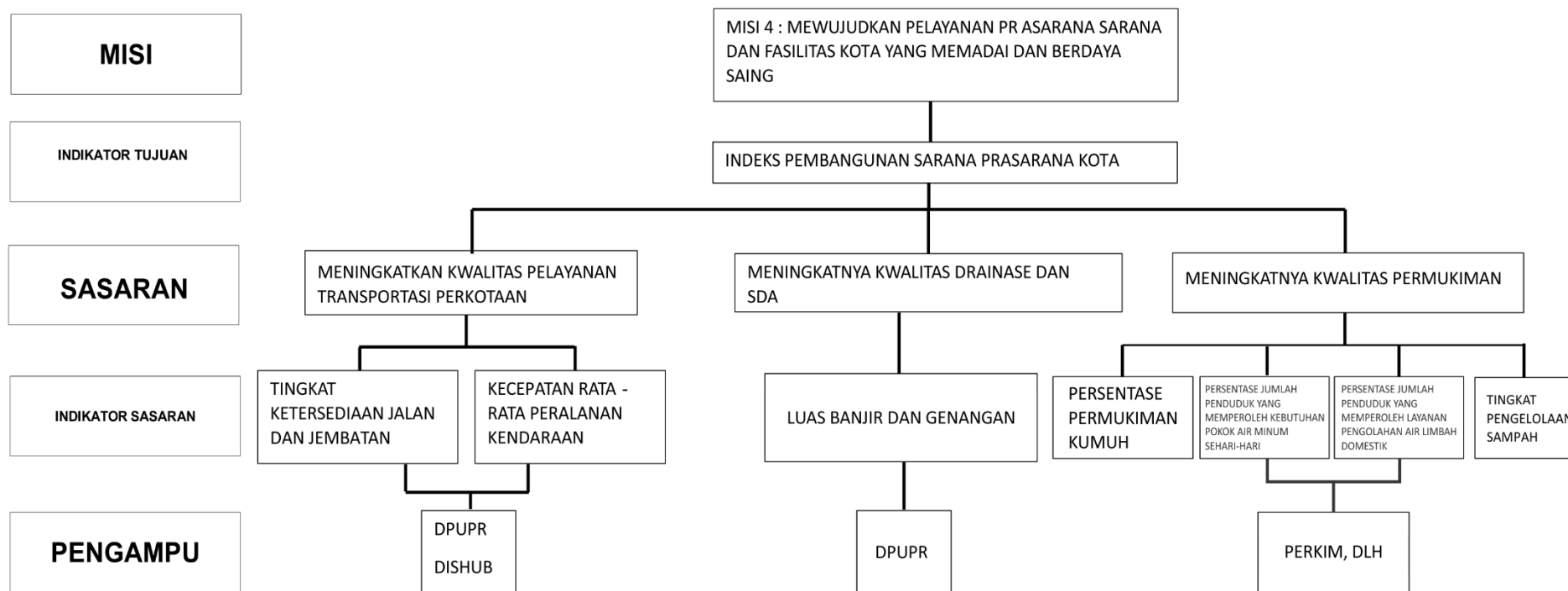
Cascading disebut juga penjabaran kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Konsep *cascading* dalam dokumen ini dilakukan dengan penjabaran tujuan ke dalam sasaran serta program prioritas untuk mencapai target kinerja di atasnya. Penjabaran kinerja turut mencantumkan Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab program dan urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Di bawah ini disajikan cascading kinerja tujuan, sasaran sampai dengan outcome. **Di bawah ini disajikan tabel cascading kinerja tahun 2024-2026.**

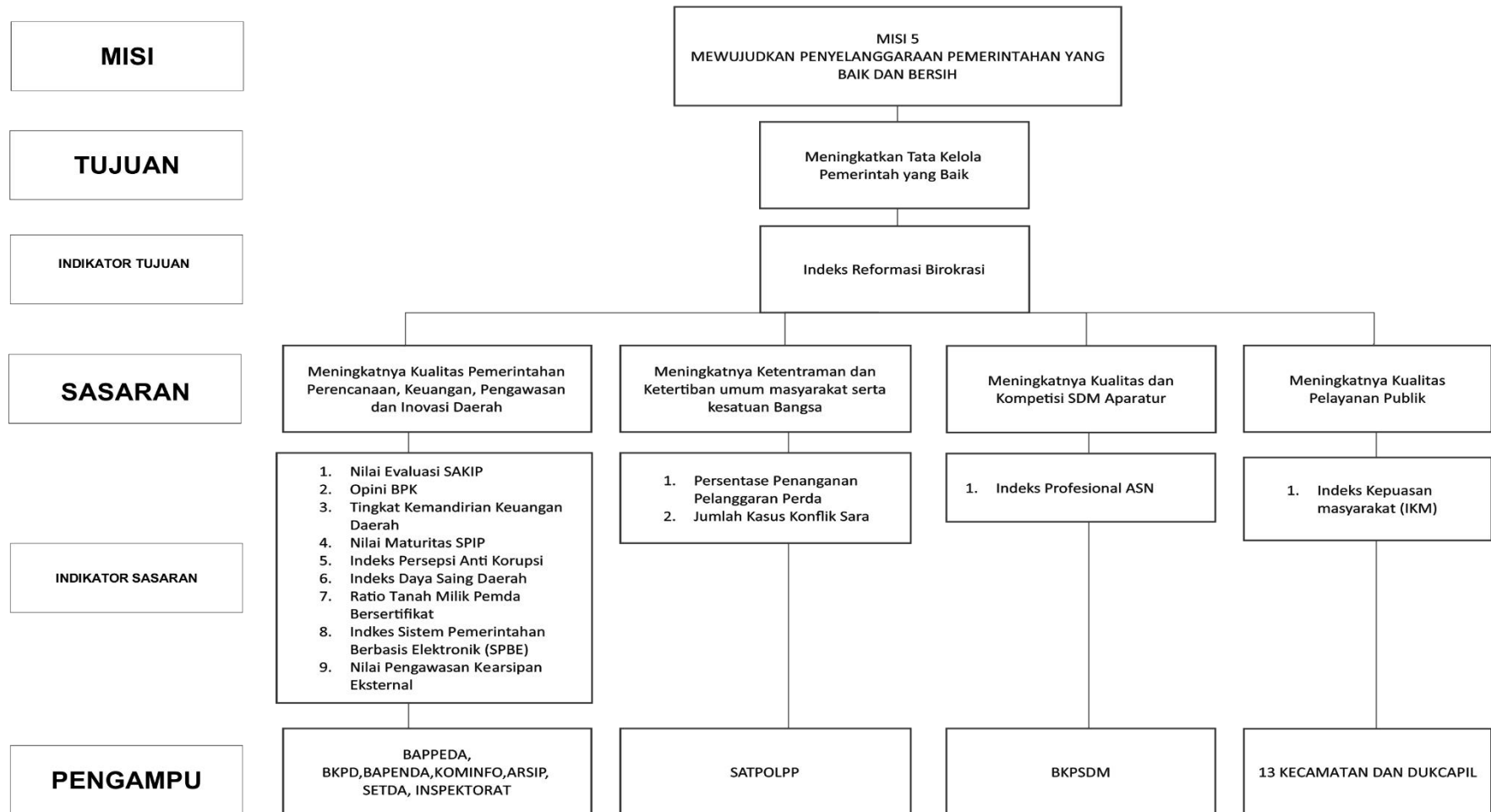
Tabel 5.4
Tabel Cascading Kinerja Tahun 2024-2026













BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan alternatif strategi dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT yang diawali dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor strategis internal maupun faktor-faktor strategis eksternal.

A. Analisis Faktor Strategis Internal

Faktor strategis internal adalah faktor-faktor dominan dari kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan analisis lingkungan internal dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan kekuatan dan kelemahan Kota Tangerang.

1. Faktor-faktor yang menjadi **kekuatan** adalah sebagai berikut:

a. Kondisi topografi wilayah yang landai

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang memiliki kondisi topografi yang landai (0-3%) yang mendukung bagi pengembangan kegiatan perkotaan.

b. Ketersediaan potensi sumber air baku

Kota Tangerang memiliki potensi sumber air baku yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri, yaitu dengan terdapatnya banyak sungai di wilayah Kota Tangerang, seperti Sungai Cisadane, Sungai Cirarab, Kali Angke, dan beberapa anak sungainya.

c. Jumlah penduduk yang besar

Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu 1.911.914 jiwa pada Tahun 2021 yang dapat menjadi potensi pembangunan.

d. Kelompok usia produktif tinggi

Struktur penduduk Kota Tangerang menurut kelompok umur pada Tahun 2021 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu 1.284.084 jiwa (67,16%).

e. Kondisi perekonomian semakin baik

Kondisi perekonomian Kota Tangerang semakin membaik yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi (LPE), yaitu dari terkontraksi -6,93% pada Tahun 2020 menjadi 3,70% pada Tahun 2021. Kondisi ini mencerminkan mulai terjadinya proses pemulihan perekonomian semenjak terjadinya Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan resesi ekonomi pada Tahun 2020.

f. Kesehatan masyarakat semakin baik

Kesehatan masyarakat Kota Tangerang semakin baik yang tercermin dari meningkatnya indeks kesehatan (indeks harapan hidup), yaitu dari 79,38 point (umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,60 tahun) pada Tahun 2021 menjadi 79,86 point (umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,91 tahun) pada Tahun 2022.

g. Pendidikan masyarakat semakin baik

Pendidikan masyarakat Kota Tangerang semakin baik yang tercermin dari meningkatnya indeks pendidikan, yaitu dari 74,63 point (harapan lama sekolah (HLS) mencapai 13,87 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 10,83 tahun) pada Tahun 2021 menjadi 74,69 point (harapan lama sekolah (HLS) mencapai 13,88 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 10,84 tahun) pada Tahun 2022.

h. Daya beli masyarakat semakin baik

Daya beli masyarakat Kota Tangerang semakin baik yang tercermin dari meningkatnya indeks daya beli masyarakat, yaitu dari 81,65 point (pengeluaran per kapita yang

disesuaikan (PKP) mencapai Rp. 14.575 ribu) pada Tahun 2021 menjadi 82,34 point (pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PKP) mencapai Rp. 14.909 ribu) pada Tahun 2022.

2. Faktor-faktor yang menjadi **kelemahan** adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Pendidikan belum optimal

Pembangunan pendidikan di Kota Tangerang masih belum optimal yang ditandai dengan:

- 1) Akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas belum optimal.
- 2) Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar belum memadai.
- 3) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum memadai.
- 4) Literasi dan Gemar Membaca Masyarakat Belum Optimal
- 5) Pengelolaan, Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah Belum Optimal

b. Pembangunan Kesehatan belum optimal

Pembangunan kesehatan di Kota Tangerang masih belum optimal yang ditandai dengan:

- 1) Kualitas gizi masyarakat belum sepenuhnya baik.
- 2) Kualitas kesehatan lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat yang belum memadai.
- 3) Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas belum memadai dan optimal.
- 4) Prestasi dan pemasyarakatan olahraga belum optimal.

c. Tingkat kemiskinan cukup tinggi

Tingkat kemiskinan masyarakat Kota Tangerang pada Tahun 2022 mencapai 5,77% yang mencerminkan belum optimalnya pemerataan kesejahteraan ekonomi dan upaya penanganan kemiskinan yang belum fokus sesuai dengan struktur permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, yang ditandai dengan:

- 1) Akses terhadap lapangan dan kesempatan kerja terbatas.
- 2) Keberlanjutan penghasilan dan mata pencaharian belum memadai.
- 3) Akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan pokok terbatas.
- 4) Akses terhadap perumahan yang layak huni terbatas.
- 5) Akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas belum memadai.

- 6) Implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH, KUBE, JKN KIS, KIP, PSKS, dll) belum optimal berjalan.
- 7) Pemutakhiran data kemiskinan belum optimal.
- 8) Upaya perlindungan dan jaminan sosial belum memadai.

d. Tingkat pengangguran cukup tinggi

Tingkat pengangguran masyarakat Kota Tangerang pada Tahun 2022 mencapai 7,15% yang mencerminkan belum optimalnya pembangunan ketenagakerjaan, yang ditandai dengan:

- 1) Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dan kesempatan berusaha belum memadai.
- 2) Kualitas dan produktivitas tenaga kerja belum memadai.

e. Pembangunan kesejahteraan sosial belum optimal

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Tangerang masih belum optimal, yang ditandai dengan:

- 1) Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Tahun 2021 sebanyak 104.910 jiwa, yang menunjukkan belum optimalnya upaya perlindungan dan pemberdayaan PMKS.
- 2) Kerawanan dan ketahanan pangan masyarakat.
- 3) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal.
- 4) Pengendalian penduduk serta peningkatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera belum optimal.

f. Daya saing perekonomian belum memadai

Daya saing perekonomian Kota Tangerang belum memadai, yang ditandai dengan:

- 1) Pelayanan Perijinan dan Investasi Belum Optimal.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Perdagangan Belum Optimal.
- 3) Kualitas Produk Industri dan IKM Belum Berdaya Saing.
- 4) Peran Koperasi Sebagai Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan Belum Berkembang dengan Baik.
- 5) Kualitas Produk UMKM Belum Memadai.
- 6) Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum Optimal.
- 7) Produktivitas Pertanian dan Perikanan Belum Optimal.

g. Kemacetan dan pengembangan sistem transportasi umum yang terintegrasi, handal dan berkeselamatan belum memadai dan optimal

- 1) Ketersediaan kapasitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan sesuai standar belum memadai.

- 2) Ketersediaan, kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan belum memadai serta pengelolaan sistem transportasi umum belum terintegrasi dan belum memenuhi sepenuhnya standar keselamatan.

h. Rawan banjir dan genangan

Banjir dan genangan masih sering terjadi di Kota Tangerang sehingga sampai dengan Tahun 2021 masih terdapat 581,27 Ha luasan banjir dan genangan yang terjadi, kondisi ini antara lain disebabkan oleh:

- 1) Ketersediaan, kapasitas dan kualitas sistem jaringan sumber daya air dan drainase perkotaan belum memadai.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pengendali banjir belum memadai.

i. Kawasan permukiman kumuh

Penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Tangerang belum tertangani sepenuhnya sehingga sampai dengan Tahun 2021 masih terdapat 19,3 Ha kawasan permukiman kumuh, kondisi ini antara lain disebabkan oleh:

- 1) Rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tertangani sepenuhnya.
- 2) Ketersediaan dan kualitas prasarana sarana dasar permukiman belum memadai.

j. Ketersediaan, cakupan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana, dan fasilitas kota belum memadai dan optimal

Ketersediaan, cakupan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana, dan fasilitas kota di Kota Tangerang masih belum memadai dan optimal, yang ditandai dengan:

- 1) Cakupan dan kualitas pelayanan air minum perpipaan belum memadai.
- 2) Kapasitas pengelolaan IPAL air limbah belum memadai.
- 3) Kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan belum optimal.

k. Kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan resiko bencana belum memadai

Kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan resiko bencana di Kota Tangerang belum memadai, yang ditandai dengan:

- 1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum optimal.
- 2) Ketersedian ruang terbuka hijau (RTH) belum memadai.

3) Ketersediaan dokumen rencana tata ruang belum memadai dan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.

4) Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal.

1. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik belum optimal dan berdaya saing

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik di Kota Tangerang masih belum optimal dan berdaya saing, yang ditandai dengan:

1) Kapasitas Bangunan Pemerintah Daerah dan Fasilitas Pelayanan Publik Belum Memadai dan Optimal.

2) Pengelolaan Komunikasi dan Informatika Belum Optimal.

3) Ketersediaan dan Kualitas Data Statistik Daerah Belum Memadai dan Optimal.

4) Pendayagunaan Persandian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal.

5) Keserasian Kebijakan Pemerintahan Daerah Belum Optimal.

6) Pelayanan Kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan Belum Optimal.

7) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belum Optimal

8) Kualitas Perencanaan Pembangunan Belum Optimal.

9) Dukungan Penelitian Berbasis Inovasi Pembangunan Belum Memadai.

10) Kualitas Pengawasan Belum Optimal.

11) Kapasitas Keuangan Daerah Belum Optimal.

12) Kualitas Tata Kelola Administrasi Keuangan Daerah Belum Optimal.

13) Kinerja Aparatur Belum Optimal.

14) Pengelolaan Administrasi Pertanahan Belum Optimal.

15) Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan Belum Optimal.

16) Pengelolaam dan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belum Optimal.

17) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Belum Optimal.

18) Pemeliharaan Kesatuan Bangsa dan Politik Belum Optimal.

Tabel 6.1
Identifikasi Faktor Strategis Internal Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Tahun 2024-2026

Kekuatan (+)	Kelemahan (-)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi topografi wilayah yang landai ▪ Ketersediaan potensi sumber air baku ▪ Jumlah penduduk yang besar ▪ Kelompok usia produktif tinggi ▪ Kondisi perekonomian semakin baik ▪ Kesehatan masyarakat semakin baik ▪ Pendidikan masyarakat semakin baik ▪ Daya beli masyarakat semakin baik ▪ Infrastruktur dan fasilitas kota semakin baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pendidikan belum optimal ▪ Pembangunan kesehatan belum optimal ▪ Tingkat kemiskinan cukup tinggi ▪ Tingkat pengangguran cukup tinggi ▪ Pembangunan kesejahteraan sosial belum optimal ▪ Daya saing perekonomian belum memadai ▪ Kemacetan dan Pengembangan Sistem Transportasi Umum yang Terintegrasi, Handal dan Berkeselamatan Belum Memadai dan Optimal ▪ Rawan banjir dan genangan ▪ Kawasan permukiman kumuh ▪ Kualitas pelayanan sarana, prasarana dan fasilitas kota belum memadai ▪ Kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan resiko bencana belum memadai dan optimal ▪ Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik belum optimal

B. Analisis Faktor Strategis Eksternal

Faktor strategis eksternal adalah faktor-faktor dominan dari peluang dan ancaman. Berdasarkan analisis lingkungan eksternal dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan peluang dan ancaman Kota Tangerang.

1. Faktor-faktor yang menjadi **peluang** adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis yang strategis

Kota Tangerang memiliki nilai geostrategis yang sangat penting dalam konstelasi nasional karena letaknya yang berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (berjarak ±27 km).

b. Aksesibilitas yang baik

Kota Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik terhadap kota Jakarta dan kota-kota penting di Provinsi Banten dan Jawa Barat serta terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, yaitu dengan adanya Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak sepanjang 100 km, jalan rel kereta api double track Tangerang-Jakarta, perpanjangan koridor IV Busway Kalideres-Tangerang, serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

c. Ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kota Tangerang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu dalam RTRW Nasional yang diprioritaskan pengembangannya dalam skala nasional.

d. Ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Kota Tangerang ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi dalam RTRW Provinsi Banten yang diprioritaskan pengembangannya dalam skala Provinsi Banten.

e. Dukungan kebijakan transportasi Provinsi DKI Jakarta

Adanya rencana pengembangan sistem transportasi massal terpadu dengan daerah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta.

2. Faktor-faktor yang menjadi **ancaman** adalah sebagai berikut:

a. Perpindahan ibu kota negara (IKN)

Perpindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi menurunkan aktivitas perekonomian bagi wilayah sekitar Jakarta termasuk Kota Tangerang.

b. Pandemi Covid-19 memicu krisis kesehatan

Pandemi Covid-19 yang memicu krisis Kesehatan global belum reda sepenuhnya.

c. Resesi dan stagflasi perekonomian global

Resesi dan stagflasi perekonomian global berpotensi menurunkan aktivitas perekonomian Kota Tangerang.

d. Tingkat persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif

MEA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kerja sama bidang perekonomian yang

diberlakukan pada tahun 2015. Pemberlakuan MEA 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasi kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Pemberlakuan MEA 2015 menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Tangerang karena akan meningkatkan persaingan di bidang perekonomian.

Tabel 6.2
Identifikasi Faktor Strategis Eksternal Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Tahun 2024-2026

Peluang (+)	Ancaman (-)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Letak geografis yang strategis ▪ Aksesibilitas yang baik ▪ Ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) ▪ Ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ▪ Dukungan kebijakan transportasi Provinsi DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perpindahan ibu kota negara (IKN) ▪ Pandemi Covid-19 memicu krisis Kesehatan ▪ Resesi dan stagflasi Memiliki keterbatasan lahan ▪ Tingkat persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif

C. Rancangan Strategi Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal di atas, maka dilakukan perumusan alternatif rancangan strategi pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dengan menggunakan matriks SWOT sebagai berikut:

Tabel 6.3

Matriks SWOT Perumusan Alternatif Strategi Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026

<p>Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Letak geografis yang strategis Aksesibilitas yang baik Ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Dukungan kebijakan transportasi Provinsi DKI Jakarta 	<p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perpindahan ibu kota negara (IKN) Pandemi Covid-19 memicu krisis Kesehatan Resesi dan stagflasi Memiliki keterbatasan lahan Tingkat persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif
	<p>Faktor Internal</p>	
<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kondisi topografi wilayah yang landai Ketersediaan potensi sumber air baku Jumlah penduduk yang besar Kelompok usia produktif tinggi Kondisi perekonomian semakin baik Kesehatan masyarakat semakin baik Pendidikan masyarakat semakin baik Daya beli masyarakat semakin baik Infrastruktur dan fasilitas kota semakin baik 	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperkuat daya saing perekonomian daerah Meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan kota 	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperkuat daya saing perekonomian daerah Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pendidikan belum optimal Pembangunan kesehatan belum optimal Tingkat kemiskinan cukup tinggi Tingkat pengangguran cukup tinggi Pembangunan kesejahteraan sosial belum optimal Daya saing perekonomian belum memadai Kemacetan dan Pengembangan Sistem Transportasi Umum yang Terintegrasi, Handal dan Berkeselamatan Belum 	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Meningkatkan keberdayaan dan perlindungan masyarakat miskin Memperluas lapangan kerja dan berusaha Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Memperkuat daya saing perekonomian Meningkatkan kapasitas, kualitas jalan, jembatan dan optimalisasi pengelolaan sistem transportasi umum 	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperkuat daya saing perekonomian daerah Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Letak geografis yang strategis ▪ Aksesibilitas yang baik ▪ Ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) ▪ Ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ▪ Dukungan kebijakan transportasi Provinsi DKI Jakarta 	<p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perpindahan ibu kota negara (IKN) ▪ Pandemi Covid-19 memicu krisis Kesehatan ▪ Resesi dan stagflasi Memiliki keterbatasan lahan ▪ Tingkat persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif
<p>Memadai dan Optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rawan banjir dan genangan ▪ Kawasan permukiman kumuh ▪ Kualitas pelayanan sarana, prasarana dan fasilitas (air minum, air limbah, persampahan) kota belum memadai ▪ Kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan resiko bencana belum memadai dan optimal ▪ Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan sumber daya air dan drainase perkotaan ▪ Penataan kawasan kumuh ▪ Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan air minum, pengolahan limbah domestik dan persampahan ▪ Meningkatkan pengendalian pencemaran dan peanganan kerusakan lingkungan hidup ▪ Mengembangkan ketersediaan ruang terbuka hijau ▪ Meningkatkan kualitas penataan ruang ▪ Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana ▪ Meningkatkan kualitas dan daya saing penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik 	

Berdasarkan alternatif rancangan strategi pembangunan daerah hasil analisis SWOT sebagaimana ditunjukkan tabel di atas, maka dirumuskan rancangan strategi pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026. Berikut ini diuraikan strategi pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 menurut tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 6.4
Strategi Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 RPJPD :		
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, MAJU DAN BERDAYA SAING		
1.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		
	1.1.1 Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	1.1.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pendidikan karakter, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal
	1.1.2 Meningkatnya kualitas membaca masyarakat	1.1.2.1 Pengembangan dan pemasyarakatan budaya baca masyarakat serta peningkatan pelayanan perpustakaan
	1.1.3 Meningkatnya kebudayaan daerah	1.1.3.1 Pengelolaan, Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah
	1.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.4.1 Peningkatan kemandirian kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan
	1.1.5 Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga	1.1.5.1 Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olahraga
1.2 Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat		
	1.2.1 Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan PPKS	1.2.1.1 Perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin
	1.2.2 Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	1.2.2.1 Peningkatan ketahanan dan kualitas pangan
	1.2.3 Meningkatnya keberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan kesejahteraan	

Tujuan	Sasaran	Strategi
keluarga		
		1.2.3.1 Penguatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak
		1.2.3.2 Peningkatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga
	1.2.4 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	1.2.4.1 Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan kualitas tenaga kerja
	1.2.5 Meningkatnya kreatifitas dan potensi pemuda	1.2.5.1 Pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan
MISI 2 RPJPD :		
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING		
2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing		
	2.1.1 Meningkatnya investasi	2.1.1.1 Peningkatan iklim investasi yang kondusif
	2.1.2 Meningkatnya keberdayaan dan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi	
		2.1.2.1 Pengembangan dan peningkatan produk UMKM yang berkualitas, kompetitif, kreatif dan inovatif
		2.1.2.2 Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kinerja koperasi
	2.1.3 Meningkatnya perdagangan dan industri	
		2.1.3.1 Optimalisasi pengelolaan fasilitas perdagangan dan perluasan akses pelaku usaha perdagangan terhadap sumber daya produktif (kapasitas

Tujuan	Sasaran	Strategi
		SDM, manajemen, sarana prasarana produksi, pasar dan pemasaran, permodalan) serta perlindungan konsumen
		2.1.3.2 Pengembangan dan peningkatan produk industri kecil menengah (IKM) yang berkualitas, kompetitif, kreatif dan inovatif
	2.1.4 Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif	2.1.4.1 Pengembangan dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata serta ekonomi kreatif
	2.1.5 Meningkatnya produktifitas perikanan dan pertanian	2.1.5.1 Optimalisasi produktivitas dan kualitas produk pertanian, perikanan dan peternakan
MISI 3 RPJPD :		
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI		
3.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
	3.1.1 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
		3.1.1.1 Peningkatan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		3.1.1.2 Optimalisasi dan pengembangan ruang terbuka hijau publik
	3.1.2 Meningkatnya kualitas penataan ruang	3.1.2.1 Peningkatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
3.2 Meningkatkan ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap resiko bencana		
	3.2.1 Meningkatnya ketahanan bencana	3.2.1.1 Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana
MISI 4 RPJPD :		

Tujuan	Sasaran	Strategi
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRASARANA, SARANA DAN FASILITAS KOTA YANG MEMADAI DAN BERDAYA SAINGI		
4.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan		
	4.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan	
		4.1.1.1 Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan
		4.1.1.2 Optimalisasi pengelolaan transportasi umum dan peningkatan sistem transportasi yang berkeselamatan
	4.1.2 Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air	4.1.2.1 Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan drainase dan sumber daya air
	4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman	
		4.1.3.1 Penataan kawasan permukiman kumuh dan fasilitasi pengembangan perumahan yang layak huni dan terjangkau
		4.1.3.2 Peningkatan kapasitas jasa konstruksi
		4.1.3.3 Pengembangan dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih
		4.1.3.4 Pengembangan dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah domestik
		4.1.3.5 Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah dan pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah
MISI 5 RPJPD :		
MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH		
5.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		

Tujuan	Sasaran	Strategi
	5.1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	
		5.1.1.1 Pembangunan gedung pemerintah daerah dan pelayanan publik
		5.1.1.2 Harmonisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah
		5.1.1.3 Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
		5.1.1.4 Optimalisasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
		5.1.1.5 Peningkatan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		5.1.1.6 Peningkatan sistem dan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		5.1.1.7 Optimalisasi kapasitas pendapatan daerah dan peningkatan sistem tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah
		5.1.1.8 Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
		5.1.1.9 Peningkatan sistem dan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan
		5.1.1.10 Penataan status kepemilikan tanah pemerintah daerah
		5.1.1.11 Pengembangan dan peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan

Tujuan		Sasaran	Strategi		
			pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik		
			5.1.1.12 Pengembangan ketersediaan dan pengelolaan data statistik daerah yang memadai, berkualitas dan mutakhir		
			5.1.1.13 Peningkatan sistem persandian daerah		
			5.1.1.14 Pengembangan dan pengelolaan sistem kearsipan		
	5.1.2	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur	5.1.2.1 Peningkatan kualitas SDM apartur yang profesional, kreatif, inovatif dan berintegritas		
	5.1.3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta kesatuan bangsa	5.1.3.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, kerukunan hidup masyarakat dan ketahanan bangsa		
7	Tujuan	24	Sasaran	46	Strategi

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode perencanaan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Berikut ini diuraikan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

Tabel 6.5
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Tahun 2024-2026

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
MISI 1 RPJPD :					
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, MAJU DAN BERDAYA SAING					
1.1.1	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	1.1.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pendidikan karakter, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal	1.1.1.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kurikulum, manajemen kelembagaan, sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, minat, bakat, prestasi peserta didik, serta penguatan pendidikan karakter akhlak mulia, kesusilaan, berbudaya, kreatif dan inovatif serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal
1.1.2	Meningkatnya kualitas membaca masyarakat	1.1.2.1	Pengembangan dan pemasyarakatan budaya baca masyarakat serta peningkatan pelayanan perpustakaan	1.1.2.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sistem, sarana, prasarana, fasilitas dan SDM perpustakaan
1.1.3	Meningkatnya kebudayaan daerah	1.1.3.1	Pengelolaan, Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	1.1.3.1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya (fasilitas, peralatan, sanggar, SDM) kebudayaan serta mengembangkan festival budaya dan pagelaran kesenian daerah, taman budaya, museum kota dan kawasan cagar budaya
1.1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
		1.1.4.1	Peningkatan kemandirian kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	1.1.4.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, produksi pangan (makanan minuman), serta kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
1.1.5	Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga	1.1.5.1	Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olahraga	1.1.5.1.1	Mengembangkan dan mengelola sarana, prasarana dan fasilitas olah raga serta meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga
1.2.1	Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah	1.2.1.1	Perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang	1.2.1.1.1	Meningkatkan perlindungan, jaminan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
kesejahteraan sosial (PMKS) dan PPKS		masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin	sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin
1.2.2 Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	1.2.2.1 Peningkatan ketahanan dan kualitas pangan	1.2.2.1.1	Mengendalikan stabilitas ketersediaan bahan pangan strategis yang berkualitas dan terjangkau serta mengembangkan kerjasama penyediaan bahan pangan strategis
1.2.3 Meningkatnya keberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga			
	1.2.3.1 Penguatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak	1.2.3.1.1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	1.2.3.2 Peningkatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga	1.2.3.2.1	Meningkatkan advokasi dan pendayagunaan PLKB dan kader KB serta memperkuat kesertaan KB dan ketahanan kesejahteraan keluarga
1.2.4 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	1.2.4.1 Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan kualitas tenaga kerja	1.2.4.1.1	Memperluas bursa tenaga kerja dan wirausaha serta mengembangkan kelembagaan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja
1.2.5 Meningkatnya kreatifitas dan potensi pemuda	1.2.5.1 Pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan	1.2.5.1.1	Mengembangkan, meningkatkan dan membina kualitas SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana kepemudaan serta fasilitasi kepramukaan
MISI 2 RPJPD :			
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING			
2.1.1 Meningkatnya investasi	2.1.1.1 Peningkatan iklim investasi yang kondusif	2.1.1.1.1	Menyederhanakan sistem dan mempermudah pelayanan investasi, pelayanan perizinan dan non peizinan, serta mengembangkan insentif dan disinsentif investasi

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.1.2 Meningkatnya keberdayaan dan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi	2.1.2.1 Pengembangan dan peningkatan produk UMKM yang berkualitas, kompetitif, kreatif dan inovatif	2.1.2.1.1 Memberdayakan meningkatkan kualitas produk UMKM serta memperluas akses pelaku UMKM terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, pasar dan pemasaran, permodalan)
	2.1.2.2 Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kinerja koperasi	2.1.2.2.1 Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
2.1.3 Meningkatnya perdangan dan industri	2.1.3.1 Optimalisasi pengelolaan fasilitas perdagangan dan perluasan akses pelaku usaha perdagangan terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, sarana prasarana produksi, pasar dan pemasaran, permodalan) serta perlindungan konsumen	2.1.3.1.1 Mengembangkan, meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan pasar tradisional, perluasan akses pasar dan pemasaran bagi pelaku usaha perdagangan, stabilisasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta standarisasi dan perlindungan konsumen
	2.1.3.2 Pengembangan dan peningkatan produk industri kecil menengah (IKM) yang berkualitas, kompetitif, kreatif dan inovatif	2.1.3.2.1 Memperluas akses pelaku industri kecil menengah (IKM) terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, sarana prasarana produksi, pasar dan pemasaran, permodalan) serta meningkatkan fasilitasi dan pengendalian izin usaha industri
2.1.4 Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif	2.1.4.1 Pengembangan dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata serta ekonomi kreatif	2.1.4.1.1 Mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata serta ekonomi kreatif
2.1.5 Meningkatnya produktifitas perikanan dan pertanian	2.1.5.1 Optimalisasi produktivitas dan kualitas produk pertanian, perikanan dan peternakan	2.1.5.1.1 Memberdayakan meningkatkan kualitas produk pertanian, perikanan dan peternakan serta memperluas akses pelaku pertanian, perikanan dan peternakan terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, pasar dan pemasaran, permodalan)
MISI 3 RPJPD :		
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI		
3.1.1 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		

Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
3.1.2 Meningkatkan kualitas penataan ruang	3.1.1.1	Peningkatan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3.1.1.1.1 Meningkatkan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pemantauan kualitas, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	3.1.1.2	Optimalisasi dan pengembangan ruang terbuka hijau publik	3.1.1.2.1 Mengembangkan ketersediaan ruang terbuka hijau publik
	3.1.2.1	Peningkatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	3.1.2.1.1 Menyusun dan mensosialisasikan rencana tata ruang serta mengendalikan pemanfaatan ruang
3.2.1 Meningkatkan ketahanan bencana	3.2.1.1	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana	3.2.1.1.1 Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana
MISI 4 RPJPD :			
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRASARANA, SARANA DAN FASILITAS KOTA YANG MEMADAI DAN BERDAYA SAINGI			
4.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan			
	4.1.1.1	Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	4.1.1.1.1 Mengembangkan ketersediaan dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar
	4.1.1.2	Optimalisasi pengelolaan transportasi umum dan peningkatan sistem transportasi yang berkeselamatan	4.1.1.2.1 Mengembangkan, mengintegrasikan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana transportasi umum serta meningkatkan penerangan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan penertiban angkutan jalan
4.1.2 Meningkatkan kualitas drainase dan sumber daya air	4.1.2.1	Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan drainase dan sumber daya air	4.1.2.1.1 Mengembangkan ketersediaan, kapasitas dan merehabilitasi sistem jaringan drainase dan sumber daya air
4.1.3 Meningkatkan kualitas permukiman			
	4.1.3.1	Penataan kawasan permukiman kumuh dan fasilitasi pengembangan perumahan yang layak huni dan terjangkau	4.1.3.1.1 Merehabilitasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas sarana sarana dasar permukiman serta mengembangkan rumah susun layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
	4.1.3.2	Peningkatan kapasitas jasa konstruksi	4.1.3.2.1 Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pelayanan bangunan serta kapasitas jasa konstruksi
	4.1.3.3	Pengembangan dan	4.1.3.3.1 Mengembangkan jaringan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih	penyediaan air minum perpipaan
4.1.3.4	Pengembangan dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah domestik	4.1.3.4.1 Mengembangkan kapasitas IPAL
4.1.3.5	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah dan pengembangan pembangkit listrik tenaga samapah	4.1.3.5.1 Meningkatkan pengurangan dan pengangkutan sampah serta pengembangan pembangkit listrik melalui pengelolaan sampah
MISI 5 RPJPD :		
MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH		
5.1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	
5.1.1.1	Pembangunan gedung pemerintah daerah dan pelayanan publik	5.1.1.1.1 Membangun dan memelihara gedung pemerintah daerah dan pelayanan publik
5.1.1.2	Harmonisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah	
		5.1.1.2.1 Meningkatkan pembinaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat
		5.1.1.2.2 Meningkatkan dukungan kapasitas dan kinerja DPRD
5.1.1.3	Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	5.1.1.3.1 Meningkatkan pelayanan paten kecamatan dan kelurahan, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan
5.1.1.4	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	5.1.1.4.1 Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayan masyarakat di kelurahan
5.1.1.5	Peningkatan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	5.1.1.5.1 Mengembangkan dan meningkatkan sistem online dan mobile dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan
5.1.1.6	Peningkatan sistem dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.1.1.6.1 Mengembangkan dan meningkatkan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, komunikatif, dan berkualitas
5.1.1.7	Optimalisasi kapasitas pendapatan daerah dan peningkatan sistem tata kelola administrasi keuangan dan	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	aset daerah	
		5.1.1.7.1 Mengembangkan dan meningkatkan intensifikasi potensi sumber pendapatan, kualitas sistem dan pelayanan pendapatan daerah
		5.1.1.7.2 Meningkatkan sistem pengelolaan anggaran dan akuntansi keuangan daerah serta pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah
5.1.1.8 Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	5.1.1.8.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
5.1.1.9 Peningkatan sistem dan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan	5.1.1.9.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta mendayagunakan penelitian dan pengembangan pembangunan yang inovatif
5.1.1.10 Penataan status kepemilikan tanah pemerintah daerah	5.1.1.10.1	Mengembangkan sistem penataan dan status kepemilikan tanah pemerintah daerah serta meningkatkan advokasi dan pengawasan tanah milik pemerintah daerah
5.1.1.11 Pengembangan dan peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	5.1.1.11.1	Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur data center, layanan internet/intranet, standarisasi dan integrasi aplikasi sistem informasi pelayanan publik dan pemerintahan serta meningkatkan desiminasi dan kemitraan komunikasi publik untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dan smart city
5.1.1.12 Pengembangan ketersediaan dan pengelolaan data statistik daerah yang memadai, berkualitas dan mutakhir	5.1.1.12.1	Mengembangkan kelengkapan ketersediaan konten , meningkatkan kapasitas, kualitas SDM dan sistem pengelolaan serta pelayanan dan publikasi data statistik daerah
5.1.1.13 Peningkatan sistem persandian daerah	5.1.1.13.1	Meningkatkan kualitas keamanan sistem persandian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
5.1.1.14 Pengembangan dan pengelolaan sistem kearsipan	5.1.1.14.1	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem kearsipan online dan tata kelola kearsipan yang baku

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				sesuai standar	
5.1.2	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur	5.1.2.1	Peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional, kreatif, inovatif dan berintegritas	5.1.2.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan SDM aparatur
5.1.3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta kesatuan bangsa	5.1.3.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan hidup masyarakat dan ketahanan bangsa		
				5.1.3.1.1	Meningkatkan penegakan hukum, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
				5.1.3.1.2	Meningkatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan ketahanan bangsa
24	Sasaran	46	Strategi	48	Arah Kebijakan

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berpijak pada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan maka selanjutnya dirumuskan program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas dimaknai sebagai program yang memberikan daya ungkit secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan serta memberikan kontribusi yang besar untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah. Program lainnya adalah program penunjang yang dimaknai sebagai penunjang penyelenggaraan pelayanan pada masing-masing perangkat daerah. Berikut ini diuraikan program pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

Tabel 6.6
Program Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2022-2026

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
MISI 1 RPJPD :										
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, MAJU DAN BERDAYA SAING										
1.1.1	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	1.1.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pendidikan karakter, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal	1.1.1.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kurikulum, manajemen kelembagaan, sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, minat, bakat, prestasi peserta didik, serta penguatan pendidikan karakter akhlak mulia, kesusilaan, berbudaya, kreatif dan inovatif serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal					
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
						1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan
						1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
						1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan
1.1.2	Meningkatnya kualitas membaca masyarakat	1.1.2.1	Pengembangan dan pemasyarakatan budaya baca masyarakat serta peningkatan pelayanan perpustakaan	1.1.2.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sistem, sarana, prasarana, fasilitas dan SDM perpustakaan					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
									YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
						2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.1.3	Meningkatnya kebudayaan daerah	1.1.3.1	Pengelolaan, Pengembangam dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	1.1.3.1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya (fasilitas, peralatan, sanggar, SDM) kebudayaan serta mengembangkan festival budaya dan pagelaran kesenian daerah, taman budaya, museum kota dan kawasan cagar budaya					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
						2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat									
		1.1.4.1	Peningkatan kemandirian kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	1.1.4.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan,					

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
					kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, produksi pangan (makanan minuman), serta kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat					
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
						1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan
						1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
						1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
						1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
						1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
1.1.5	Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga	1.1.5.1	Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olahraga	1.1.5.1.1	Mengembangkan dan mengelola sarana, prasarana dan fasilitas olah raga serta meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
						2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Dinas Kepemudaan dan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program			Perangkat Daerah
								PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Olahraga
						2	19	03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.2.1	Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan PPKS	1.2.1.1	Perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin	1.2.1.1.1	Meningkatkan perlindungan, jaminan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin				
						1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
						1	06	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial
						1	06	02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
						1	06	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
						1	06	05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
						1	06	06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
						1	06	07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
1.2.2	Meningkatnya kualitas pangan	1.2.2.1	Peningkatan ketahanan dan kualitas pangan	1.2.2.1.1	Mengendalikan stabilitas ketersediaan bahan				

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
	masyarakat				pangan strategis yang berkualitas dan terjangkau serta mengembangkan kerjasama penyediaan bahan pangan strategis					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
						2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Ketahanan Pangan
						2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
						2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
						2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
						2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
1.2.3	Meningkatnya keberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga									
		1.2.3.1	Penguatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak	1.2.3.1.1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
						2				
						2	08		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
						2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
						2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
						2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
						2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		1.2.3.2	Peningkatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga	1.2.3.2.1	Meningkatkan advokasi dan pendayagunaan PLKB dan kader KB serta memperkuat kesertaan KB dan ketahanan kesejahteraan keluarga					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
						2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
						2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
						2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
1.2.4	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	1.2.4.1	Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan kualitas tenaga kerja	1.2.4.1.1	Memperluas bursa tenaga kerja dan wirausaha serta mengembangkan kelembagaan, pelatihan, serifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
						2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Ketenagakerjaan
						2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
						2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
						2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
						2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan
1.2.5	Meningkatnya kreatifitas dan potensi pemuda	1.2.5.1	Pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan	1.2.5.1.1	Mengembangkan, meningkatkan dan membina kualitas SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana kepemudaan serta fasilitasi kepramukaan					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program			Perangkat Daerah
						2	19		
						2	19	02	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						2	19	04	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
MISI 2 RPJPD :									
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING									
2.1.1	Meningkatnya investasi	2.1.1.1	Peningkatan iklim investasi yang kondusif	2.1.1.1.1	Menyederhanakan sistem dan mempermudah pelayanan investasi, pelayanan perizinan dan non peizinan, serta mengembangkan insentif dan disinsentif investasi				
						2			
						2	18		
						2	18	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						2	18	02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						2	18	03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						2	18	04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						2	18	05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						2	18	06	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
2.1.2	Meningkatnya keberdayaan dan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi									
		2.1.2.1	Pengembangan dan peningkatan produk UMKM yang berkualitas, kompetitif, kreatif dan inovatif	2.1.2.1.1	Memberdayakan meningkatkan kualitas produk UMKM serta memperluas akses pelaku UMKM terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, pasar dan pemasaran, permodalan)					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
						2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.1.2.2	Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kinerja koperasi	2.1.2.2.1	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
						2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
						2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.1.3	Meningkatnya perdangan dan industri									
		2.1.3.1	Optimalisasi pengelolaan fasilitas perdagangan dan perluasan akses pelaku usaha perdagangan terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, sarana prasarana produksi, pasar dan pemasaran, permodalan) serta perlindungan konsumen	2.1.3.1.1	Mengembangkan, meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan pasar tradisional, perluasan akses pasar dan pemasaran bagi pelaku usaha perdagangan, stabilisasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta standarisasi dan perlindungan konsumen					
						3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
						3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
						3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.1.3.2	Pengembangan dan peningkatan produk industri kecil menengah (IKM) yang berkualitas.	2.1.3.2.1	Memperluas akses pelaku industri kecil menengah (IKM) terhadap sumber daya produktif (kapasitas					

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program			Perangkat Daerah
			kompetitif, kreatif dan inovatif		SDM, manajemen, sarana prasarana produksi, pasar dan pemasaran, permodalan) serta meningkatkan fasilitasi dan pengendalian izin usaha industri				
						3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
						3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
						3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
						3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
						3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
2.1.4	Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif	2.1.4.1	Pengembangan dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata serta ekonomi kreatif	2.1.4.1.1	Mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata serta ekonomi kreatif				
						3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
						3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
						3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
						3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
						3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.1.5	Meningkatnya produktifitas perikanan dan pertanian	2.1.5.1	Optimalisasi produktivitas dan kualitas produk pertanian, perikanan dan peternakan	2.1.5.1.1	Memberdayakan meningkatkan kualitas produk pertanian, perikanan dan peternakan serta memperluas akses pelaku pertanian, perikanan dan				

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
					peternakan terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, pasar dan pemasaran, permodalan)					
						3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
						3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
						3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan
						3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
						3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
						3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
						3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Ketahanan Pangan
MISI 3 RPJPD :										
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI										
3.1.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup									
		3.1.1.1	Peningkatan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3.1.1.1.1	Meningkatkan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pemantauan kualitas, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
						2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
						2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
						2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
						2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
						2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
						2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
						2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		3.1.1.2	Optimalisasi dan pengembangan ruang terbuka hijau publik	3.1.1.2.1	Mengembangkan ketersediaan ruang terbuka hijau publik					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
						2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
						2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Lingkungan Hidup
3.1.2	Meningkatnya kualitas penataan	3.1.2.1	Peningkatan perencanaan tata	3.1.2.1.1	Menyusun dan mensosialisasikan					

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
	ruang		ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang		rencana tata ruang serta mengendalikan pemanfaatan ruang					
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.1	Meningkatnya ketahanan bencana	3.2.1.1	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana	3.2.1.1.1	Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana					
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
						1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 4 RPJPD :										
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRASARANA, SARANA DAN FASILITAS KOTA YANG MEMADAI DAN BERDAYA SAINGI										
4.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan									

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
		4.1.1.1	Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	4.1.1.1.1	Mengembangkan ketersediaan dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar					
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
						2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4.1.1.2	Optimalisasi pengelolaan transportasi umum dan peningkatan sistem transportasi yang berkeselamatan	4.1.1.2.1	Mengembangkan, mengintegrasikan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana transportasi umum serta meningkatkan penerangan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan penertiban angkutan jalan					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
						2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Dinas Perhubungan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
									PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
4.1.2	Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air	4.1.2.1	Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan drainase dan sumber daya air	4.1.2.1.1	Mengembangkan ketersediaan, kapasitas dan merehabilitasi sistem jaringan drainase dan sumber daya air					
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
						2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.3	Meningkatnya kualitas permukiman									
		4.1.3.1	Penataan kawasan permukiman kumuh dan fasilitasi pengembangan perumahan yang layak huni dan terjangkau	4.1.3.1.1	Merehabilitasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas parasana sarana dasar permukiman serta mengembangkan rumah susun layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah					

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
					(MBR)					
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
						2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		4.1.3.2	Peningkatan kapasitas jasa konstruksi	4.1.3.2.1	Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pelayanan bangunan serta kapasitas jasa konstruksi					
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		4.1.3.3	Pengembangan dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih	4.1.3.3.1	Mengembangkan jaringan penyediaan air minum perpipaan					
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		4.1.3.4	Pengembangan dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah domestik	4.1.3.4.1	Mengembangkan kapasitas IPAL					
						1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		4.1.3.5	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah dan pengembangan pembangkit listrik tenaga samapah	4.1.3.5.1	Meningkatkan pengurangan dan pengangkutan sampah serta pengembangan pembangkit listrik melalui pengelolaan sampah					

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
						2				
						2	11			
						2	11	11		Dinas Lingkungan Hidup
MISI 5 RPJPD :										
MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH										
5.1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik									
		5.1.1.1	Pembangunan gedung pemerintah daerah dan pelayanan publik	5.1.1.1.1	Membangun dan memelihara gedung pemerintah daerah dan pelayanan publik					
						1				
						1	03			
						1	03	08		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						2				
						2	10			
						2	10	05		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		5.1.1.2	Harmonisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah							
				5.1.1.2.1	Meningkatkan pembinaan kebijakan penyelenggaraan					

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
					pemerintahan, perekonomian dan pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat					
						4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
						4	01		SEKRETARIAT DAERAH	
						4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
						4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
						4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
				5.1.1.2.2	Meningkatkan dukungan kapasitas dan kinerja DPRD					
						4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
						4	02		SEKRETARIAT DPRD	
						4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD
						4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
		5.1.1.3	Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	5.1.1.3.1	Meningkatkan pelayanan paten kecamatan dan kelurahan, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan					
						7			UNSUR KEWILAYAHAN	
						7	01		KECAMATAN	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
						7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan
						7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
						7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan
		5.1.1.4	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	5.1.1.4.1	Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayan masyarakat di kelurahan					
						7			UNSUR KEWILAYAHAN	
						7	01		KECAMATAN	
						7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kecamatan
		5.1.1.5	Peningkatan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	5.1.1.5.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem online dan mobile dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
									ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
						2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5.1.1.6	Peningkatan sistem dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.1.1.6.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, komunikatif, dan berkualitas					
						5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
						5		01	PERENCANAAN	
						5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.1.7	Optimalisasi kapasitas pendapatan daerah dan peningkatan sistem tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah							
				5.1.1.7.1	Mengembangkan dan meningkatkan intensifikasi potensi sumber pendapatan,					

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
					kualitas sistem dan pelayanan pendapatan daerah					
						5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
						5	02		KEUANGAN	
						5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pendapatan Daerah
						5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
						5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
						5	02		KEUANGAN	
						5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				5.1.1.7.2	Meningkatkan sistem pengelolaan anggaran dan akuntansi keuangan daerah serta pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah					
						5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
						5	02		KEUANGAN	
						5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		5.1.1.8	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	5.1.1.8.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah					
						6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
						6	01		INSPEKTORAT DAERAH	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
						6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat
						6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
						6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
		5.1.1.9	Peningkatan sistem dan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan	5.1.1.9.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta mendayagunakan penelitan dan pengembangan pembangunan yang inovatif					
						5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
						5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
						5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.1.10	Penataan status kepemilikan tanah pemerintah daerah	5.1.1.10.1	Mengembangan sistem penataan dan status kepemilikan tanah pemerintah daerah serta meningkatkan advokasi dan pengawasan tanah milik pemerintah daerah					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
						2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		5.1.1.11	Pengembangan dan peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam	5.1.1.11.1	Mengembangan dan meningkatkan infrastruktur data center, layanan internet/intranet,					

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
			penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik		standarisasi dan integrasi aplikasi sistem informasi pelayanan publik dan pemerintahan serta meningkatkan desiminasi dan kemitraan komunikasi publik untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dan smart city					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
						2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika
						2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
						2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5.1.1.12	Pengembangan ketersediaan dan pengelolaan data statistik daerah yang memadai, berkualitas dan mutakhir	5.1.1.12.1	Mengembangkan kelengkapan ketersediaan konten , meningkatkan kapasitas, kualitas SDM dan sistem pengelolaan serta pelayanan dan publikasi data statistik daerah					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
						2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5.1.1.13	Peningkatan sistem persandian daerah	5.1.1.13.1	Meningkatkan kualitas keamanan sistem persandian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah					

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
						2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5.1.1.14	Pengembangan dan pengelolaan sistem kearsipan	5.1.1.14.1	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem kearsipan online dan tata kelola kearsipan yang baku sesuai standar					
						2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
						2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
5.1.2	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur	5.1.2.1	Peningkatan kualitas SDM apartur yang profesional, kreatif, inovatif dan berintegritas	5.1.2.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan SDM apartur					
						5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
						5	03		KEPEGAWAIAN	
						5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
						5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
						5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN	Badan Kepegawaian dan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program			Perangkat Daerah
								SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.1.3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta kesatuan bangsa	5.1.3.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan hidup masyarakat dan ketahanan bangsa						
				5.1.3.1.1	Meningkatkan penegakan hukum, ketenteraman dan ketertiban masyarakat				
						1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
						1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
						1	05	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja
						1	05	02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
				5.1.3.1.2	Meningkatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan ketahanan bangsa				
						8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
						8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						8	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						8	01	02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						8	01	03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program				Perangkat Daerah
									POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
						8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	Sasaran	46	Strategi	48	Arah Kebijakan	147			Program	

Tabel 6.7
Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Uursan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PN 1	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN												
	pp	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	org	13000	13000	13000
	pp	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	Ketahanan Pangan	Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan	Gram/kapita/hari	63	63	63
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	Ketahanan Pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/kapita/hari	2100	2100	2100
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0	Ketahanan Pangan	Rasio rekomendasi SKPG dan FSVA yang dimanfaatkan	%	100	100	100
	PP	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5		Persentase koperasi mandiri	%	5,5	5,2	5,0

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Ursan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	Bidang urusan UMKM dan Koperasi	Jumlah usaha mikro yang berkembang	unit	4612	4848	5085
	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	Bidang Urusan Penanaman Modal	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Triliun Rp	13,08	14,13	15,18
	PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Laju pertumbuhan ekspor	%	3,18	3,21	3,24
	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1	Urusan Pemerintahan Bidang Industri	Kontribusi Industri Pengolahan	%	36	36	36
1	PN 3	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING												
	PP	PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8.75	8.85	8.95	9.06	9.16	Urusan Bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,86 - 11,06	10,87 - 11,17	10,88 - 11.28
	PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,0	217,0	205,0	194,0	183,0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
			Angka kematian neonatal (per 1.000	12,9	12,2	11,6	11,0	10,0		Persentase bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Uursan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			kelahiran hidup)							yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	18,6	16,0		Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	94,04	100,00
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4		Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0		Cakupan pembinaan lingkungan sehat	%	89,95	56,45	89,00
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,19		jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes	orang	37088	42332	47562
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000	272,0	272,0	231,0	231,0	190,0		Jumlah orang terduga TBC	orang	100,00	100,00	100,00

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Uursan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			penduduk)							yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar				
			Persentase tekanan darah tinggi	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1		Jumlah Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standardlm kurun waktu 1 tahun	orang	228	285	342
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar	%	83,33	75,71	80,00
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar	%	87,50	50,00	55,00
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100		Persentase ketersediaan alat kesehatan dan alat laboratorium puskesmas	%	100,00	100,00	100,00
	PP	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78.7				98	Urusan Kesehatan	Cakupan penduduk Kota	%	95	95	95

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Uursan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		KEPENDUDUKAN	(%)							Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan				
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2.26	2.24	2.21	2.19	2.1	Urusan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,07	2,06	2,05
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65.2				80		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	orang	91,587	87,923	84,406
	PP	PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98		Persentase pelayanan jaminan sosial	%	102,05	100,00	100,00
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah 65,2 80 KP : Sistem jaminan sosial nasiona	65,2				80		Persentase pelayanan perlindungan sosial	%	108,64	77,60	100,00
	PP	PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27.9				40		Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100,00	100,00	100,00
			Persentase rumah tangga miskin dan	25.6				50		Persentase wahana	%	102,43	70,39	71,90

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Uursan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			rentan yang mengakses pendanaan usaha							kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				
	PP	PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66.34	68.1	69.87	71.66	73.49	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	100	100	100
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%))	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase layanan Konsultasi dan konseling	%	100	100	100
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.24481017	73.5005	73.740519	73.96592	74.177476	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Pembedayaan Gender	Point	64,87	64,88	64,89
			Tingkat Partisipasi	52.512	53.134	53.756	54.378	55	Ketenagakerjaan	Jumlah	orang	20000	20000	20000

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Uursan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan							Lowongan Kerja				
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100	100
	PP	PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55.33	56.5	56.5	58.17	57.67	Bidang Urusan Kepemudaan dan olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	%	150	200	500
			Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan						Bidang Kebudayaan	Tingkat pelestarian budaya tak benda	%	100	100	100
									Bidang Urusan Pendukung Setda	Prosentase organisasi sosial budaya keagamaan yang dibina	%	100	100	100
3	PN 5	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan												

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Uursan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		DASAR												
	PP	INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	Urusan Perumahan dan Permukiman	Jumlah rumah miskin yang dibedah/rehab	unit	300	300	300
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	-	Rasio tanah milik pemda bersertifikat	%	10,42	11,72	11,72
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	-	Cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik	%	6,33	6,75	6,75
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan			%	84,00	90,19	82,00
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6% , BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9% , BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4% , BJP: 69.5%)			%	24,00	24,91	21,64
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15			%	100,00	100,00	100,00
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	114,325	114,325	114,325	114,325	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan air minum perpipaan	%	25,29	30,34	36,24
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan	53	55	57	60	65	Bidang Perhubungan	Prosentase pemenuhan fasilitas	%	66,67	100	100

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Uursan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			(terhadap informasi dasar 2010) (persen)							perlengkapan jalan pada ruas jalan				
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3	Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Ruang Publik yang terhubung dengan internet	%	62,07	82,76	100
4	PN 6	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	PP	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Point	82,14	82,64	83,14
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Point	53,3	53,8	54,3
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50	Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Point	44,01	44,02	44,03
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap	8,5	9,0	9,3	9,4	9,4	Bidang Lingkungan	Tingkat Fasilitasi	%	100	100	100

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Uursan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			baseline pada sektor limbah (persen)						Hidup	Pengelolaan Limbah B3				
	PP	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Ke atas	70	75	80	85	85	Semua Urusan Penunang dan Urusan Pendukung	Indeks Reformasi Birokrasi	%	68,72	70,72	72,72
										Indeks Profesional ASN	Point	80	81	82
										Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Point	71	72	73



BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Analisis pendanaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas kerangka pendanaan (belanja) program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Adapun proyeksi belanja daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	2024	2025	2026
		Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
5	BELANJA DAERAH	5.242.108.989.388	5.420.432.705.429	5.604.319.771.873
5.1	BELANJA OPERASI	4.158.104.516.949	4.165.252.672.146	4.167.657.154.344
5.1.01	Belanja Pegawai	1.797.104.971.372	1.797.104.971.372	1.797.104.971.372
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.199.120.397.795	2.241.268.552.992	2.243.673.035.190
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	122.317.147.782	87.317.147.782	87.317.147.782
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.562.000.000	2.562.000.000	2.562.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.048.421.797.878	1.219.597.358.721	1.401.079.942.968
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.582.674.561	35.582.674.561	35.582.674.561
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0

Belanja daerah Kota Tangerang pada Tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp. 5.242.108.989.388 (meningkat sekitar 2,76% dari APBD Tahun 2023) dan diharapkan menjadi Rp. 5.420.432.705.429 pada Tahun 2025 (meningkat sekitar 3,40% dari proyeksi Tahun 2024) dan Rp. 5.604.319.771.873 pada Tahun 2026 (meningkat sekitar 3,39% dari proyeksi Tahun 2025).

7.2. Program Perangkat Daerah

Rincian Program Perangkat Daerah beserta Kerangka Pendanaannya dalam pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1. Kebutuhan Pendanaan Kota Tangerang Tahun 2024-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN /KOTA					597,103,69 7,400		597,103,69 7,400		597,103,69 7,400		1,791,311,0 92,200	Dinas Pendidika n	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					2 Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						3 Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						4 Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	5,663	5,663	5,663		5,663		5,663		16,989		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	5,663	5,663	5,663		5,663		5,663		16,989		
						5 Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						6 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	150	150	150		150		150		450		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggung Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						9 Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Barang	1	1	1		1		1		3		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang	1	1	1		1		1		3		
						1 0 Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
	1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLA AN PENDIDIKA N						707,471,73 2,000		717,313,75 6,051		755,591,01 6,186		2,180,376,5 04,237	Dinas Pendidika n
					1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Siswa	65,08 7	66,08 7	67,08 7		68,08 7		69,08 7		69,08 7		
					Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan	Siswa	65,08 7	66,08 7	67,08 7		68,08 7		69,08 7		69,08 7		
					2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS Pendidikan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Dasar)												
						Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Siswa	294,0 46	295,0 46	296,0 46		297,0 46		298,0 46		298,0 46		
						Jumlah anak usia 7-15 tahun pada kota yang bersangkutan	Siswa	294,0 46	295,0 46	296,0 46		297,0 46		298,0 46		298,0 46		
						3 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Siswa	5,222	5,722	6,222		6,722		7,222		7,722		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	1	0	0	PROGRAM PENGEMBA NGAN KURIKULUM					130,000,00 0		135,408,00 0		141,217,00 3		406,625,003	Dinas Pendidika n	
					1 Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Dasar	%	N/A	N/A	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah dokumen/pelapor an Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar yang tersedia	Dokumen / Pelaporan	N/A	N/A	2		2		2		2		
					Jumlah dokumen/pelapor an Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar yang seharusnya tersedia	Dokumen / Pelaporan	N/A	N/A	2		2		2		2		
					2 Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Dokumen/lapora n yang seharusnya tersedia	Dokumen / Pelaporan			2		2		2		2			
	1				URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1	0 2			URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KESEHATAN													
					Dinas Kesehatan													
	1	0 2	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				686,661,60 4,702		686,661,60 4,702		686,661,60 4,702		2,059,984,8 14,106		Dinas Kesehata n	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
						2 Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						3 Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Perangkat Daerah												
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
					4	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	1,206	1,206	2,132		2,231		2,329		6,692		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	1,206	1,206	2,132		2,231		2,329		6,692		
					5	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	
								2022	2023	2024		2025		2026					
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7			7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7			7		7		21		
						8 Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0			100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4			4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4			4		4		12		
						9 Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0			100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Seharusnya Tersedia												
						1 1 Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	90	90	90		90		90		270		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	90	90	90		90		90		270		
						1 2 Tingkat Pelayanan BLUD/UPT Kategori Baik	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah BLUD/UPT yang Menyelenggarakan Pelayanan Berkategori Baik	BLUD/UP T	39	40	42		42		42		126			
					Jumlah Keseluruhan BLUD/UPT yang Ada	BLUD/UP T	39	40	42		42		42		126			
	1	0 2	0 2		PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T					266,097,12 7,458		292,790,76 7,960		305,351,49 1,906		864,239,387 ,325	Dinas Kesehata n	
					1 Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	40,52 0	40,92 5	40,92 5		40,92 5		40,92 5		122,7 76			
					Jumlah seluruh ibu hamil yang datang ke Puskesmas dan RS	orang	40,52 0	40,92 5	40,92 5		40,92 5		40,92 5		122,7 76			
					2 Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						standar												
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	39,468	39,863	39,073		39,464		39,859		118,396		
						Jumlah seluruh ibu yang bersalin di Puskesmas dan RS	orang	39,468	39,863	39,073		39,464		39,859		118,396		
						3 Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
						Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	39,468	39,863	39,073		39,464		39,859		118,396		
						Jumlah seluruh bayi yang lahir di Puskesmas dan RS	orang	39,468	39,863	39,073		39,464		39,859		118,396		
						4 Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	89,925	90,826	89,925		89,925		89,925		269,775		
						Jumlah seluruh balita	orang	89,925	90,826	89,925		89,925		89,925		269,775		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	orang	231,9 86	231,9 86	231,9 86		231,9 86		231,9 86		695,9 58		
						Jumlah semua anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu satu tahun ajaran	orang	231,9 86	231,9 86	231,9 86		231,9 86		231,9 86		695,9 58		
					6	Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas sesuai standar	orang	62,03 6	62,65 6	62,65 6		62,65 6		62,65 6		187,9 69		
						Jumlah seluruh lansia yang berkunjung ke Puskesmas	orang	62,03 6	62,65 6	62,65 6		62,65 6		62,65 6		187,9 69		
					7	Cakupan balita gizi buruk mendapat	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					10	Persentase orang dengan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00		
						Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Orang	17,524	17,895	36,985			36,615			36,249		109,849
						Jumlah orang terduga TBC yang ada di wilayah kerja	Orang	17,524	17,895	36,985			36,615			36,249		109,849
					11	Persentase kasus berpotensi KLB yang ditangani	%	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00		
						Jumlah Puskesmas yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%	Puskesmas	37	5	37			37			37		111
						Jumlah Puskesmas yang ada	Puskesmas	37	5	37			37			37		111
					12	Persentase jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00		
						Jumlah Pengunjung Usia 15 -59 Tahun Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai	Orang	586,330	660,890	745,520			931,910			1,118,290		2,795,720

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Tahun												
						Jumlah ODGJ Berat yang ada di wilayah kerja Kota dalam kurun waktu satu Tahun yang sama	Orang	898	902	1,720		1,590		1,458		4,768		
						16 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang memenuhi standar	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer	898	902	1,720		1,590		1,458		4,768		
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer	898	902	1,720		1,590		1,458		4,768		
						17 Cakupan masyarakat yang mendapat kunjungan rumah oleh petugas kesehatan sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Tangerang												
	1	0 2	0 4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					98,898,800		103,012,99 0		107,432,24 7		309,344,037	Dinas Kesehata n	
					1	Persentase IRTP yang memenuhi syarat	%	55.00	55.00	55.00		58.33		66.67		66.67		
						Jumlah Sarana IRTP yang memenuhi syarat	Sarana	66	66	66		70		80		80		
						Jumlah Sarana IRTP yang dibina	Sarana	120	120	120		120		120		120		
					1	Pemeriksaan Post Market IRTP yang Memenuhi Syarat	%	55.00	55.00	55.00		58.33		66.67		66.67		
						Jumlah post market IRTP yang memenuhi syarat	Sampel	66	66	66		70		80		80		
						Jumlah Pemeriksaan Post Market IRTP yang dibina	Sampel	120	120	120		120		120		120		
					3	Persentase fasilitas kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) dan alat kesehatan (Toko Alat Kesehatan dan Optikal) yang memenuhi syarat	%	80.00	80.00	80.00		81.11		86.67		86.67		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggung Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Bersih dan Sehat)												
						Jumlah Rumah Tangga Yang Disurvei PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Rumah	10,400	10,400	10,400		10,400		10,400		10,400		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					55,283,277,427		55,283,277,427		55,283,277,427		165,849,832,282	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15	47			
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15	47			
					2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0	100.0 0			
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32	96			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						3 Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						4 Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Daerah yang Disediakan												
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang	10	10	10		10		10		30		
						9 Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1 0	Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	2	2	2		2		2		6	
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	2	2	2		2		2		6	
	1	0 3	0 2	PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA AIR (SDA)						130,153,65 8,568		135,568,05 0,764		141,383,92 0,142		407,105,629 ,474	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sumber Daya Air yang Disusun	Dokumen	3	6	6		6		6		18		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sumber Daya Air yang Seharusnya Tersedia	Dokumen	3	6	6		6		6		18		
					2	Tingkat Pembangunan dan Peningkatan Sarana Sumber Daya Air	%	44.12	100.0 0	30.77		64.10		100.0 0		100		
						Jumlah Sarana (Bangunan) Sumber Daya Air yang Terbangun dan Ditingkatkan	Unit	30	68	36		75		117		117		
						Jumlah Sarana (Bangunan) Sumber Daya Air yang Seharusnya Terbangun dan Ditingkatkan	Unit	68	68	117		117		117		117		
					3	Tingkat Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Sumber Dava Air	%	48.78	100.0 0	31.72		65.03		100.0 0		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Sarana (Bangunan) Sumber Daya Air yang Seharusnya Terehabilitasi, Terpelihara dan Beroperasional	Unit	185	185	245			245		245			
					6 Tingkat Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air	%	0.00	0.00	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100		
					Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	25			25		25		75	
					Jumlah Peserta yang Seharusnya Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	25			25		25		75	
1	0 3	0 6		PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE						110,685,04 5,508		115,289,54 3,402		120,235,46 4,813		346,210,053 ,723	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Reh abilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100		
						Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/Pe ningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Disusun	Dokumen	4	1	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/Pe ningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Seharusnya Tersedia	Dokumen	4	1	4		4		4		12		
					2	Tingkat Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Drainase Perkotaan	%	50.00	100.0 0	30.56		63.89		100.0 0		100		
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Terbangun dan Ditingkatkan	Km	5,000	10,00 0	550		1,150		1,800		1,800		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Seharusnya Terbangun dan Ditingktkan	Km	10,00 0	10,00 0	1,800		1,800		1,800				
					3	Tingkat Penyediaan Sarana Drainase Perkotaan	%	50.00	100.0 0	30.21		63.44		100.0 0		100		
						Jumlah Sarana Drainase Perkotaan yang Tersedia	Unit	6	12	7		14		22		22		
						Jumlah Sarana Drainase Perkotaan yang Seharusnya Tersedia	Unit	12	12	22		22		22		22		
					4	Tingkat Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Perkotaan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100		
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Terpelihara dan Beroperasi	M	157,0 00	200,0 00	200,0 00		200,0 00		200,0 00		200,0 00		
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Seharusnya Terpelihara dan Beroperasi	M	157,0 00	200,0 00	200,0 00		200,0 00		200,0 00		200,0 00		
					5	Tingkat Pemeliharaan Jaringan Drainase	%	39.58	100.0 0	30.21		63.44		100.0 0		100		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jalan dan Jembatan yang Disusun												
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis, Data Leger, Data Informasi Kondisi, Pengawasan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Seharusnya Tersedia	Dokumen	16	7	9		9		9		27		
					2	Tingkat Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan	%	54.28	100.0 0	32.63		61.99		100.0 0		100		
						Panjang Jalan (Kolektor) yang Terbangun dan Terekonstruksi	Km	13	24	11		21		34		33.62		
						Panjang Jalan (Kolektor) yang Seharusnya Terbangun dan Terekonstruksi	Km	24	24	34		34		34		33.62		
					3	Tingkat Pemeliharaan Rutin Jalan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100		
						Panjang Jalan (Arteri dan Kolektor) yang Terpelihara Secara Rutin	Km	4	6	7		7		7		19.50		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan PBG		9	53	100		130		155		155		
						Jumlah bangunan gedung yang ditilik		462	171	280		532		585		585		
						3 Persentase ketersediaan gedung dan bangunan milik pemerintah dalam kondisi baik	%	100.0 0	100.0 0	65.81		82.91		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara		44	73	77		97		117		117		
						Jumlah Bangunan Gedung yang seharusnya dipelihara		44	73	117		117		117		117		
	1	0 3	1 1		PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUKSI						247,000,00 0		257,275,20 0		268,312,30 6		772,587,506	Dinas Perkimta n
					1 Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	60.57	60.00	21.67		24.23		26.79		26.79			
					Jumlah Jasa konstruksi yang tersertifikasi	orang	149	150	169		189		209		209			
					Jumlah jasa konstruksi yang seharusnya tersertifikasi	orang	246	250	780		780		780		780			

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	1			URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1	0 4		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERUMAHA N DAN KAWASAN PERMUKIMA N													
				Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan													
	1	0 4	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				30,607,291, 773		30,607,291, 773		30,607,291, 773		91,821,875, 319		Dinas Perkimta n	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Perangkat Daerah												
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
					4	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					5	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
					6	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Daerah yang Seharusnya Tersedia												
					7	Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
	1	0 4	0 2		PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN					5,250,000,0 00		6,000,000,0 00		7,500,000,0 00		18,750,000, 000	Dinas Perkimta n	
					1	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	% per Tahun	#DIV /0!	#DIV /0!	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	Rumah	0	0	25		25		25		25		
						Jumlah rumah korban bencana yang seharusnya direhabilitasi	Rumah	0	0	25		25		25		25		
						2 Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	% per Tahun	#DIV /0!	#DIV /0!	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah warga terkena relokasi memperoleh rumah layak huni	KK	0	0	0		0		0		0		
						Jumlah warga terkena relokasi yang seharusnya memperoleh rumah layak huni	KK	0	0	0		0		0		0		
	1	0 4	0 3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMA N					15,000,000, 000		17,000,000, 000		20,000,000, 000		52,000,000, 000		Dinas Perkimta n
					1	Persentase rumah layak huni	%	99.82	99.78	33.33		66.67		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah rumah yang dibedah/rehab	Unit Rumah	426,1 04	515,0 03	300		600		900		900		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah rumah yang seharusnya dibedah/rehab	Unit Rumah	426,8 70	516,1 19	900		900		900		900		
	1	0 4	0 5	PROGRAM PENINGKAT AN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						2,782,930,4 00		2,898,700,3 05		3,023,054,5 48		8,704,685,2 52	Dinas Perkimta n
					1 Persentase perumahan yang memiliki PSU	%	50.75	54.73	56.72		58.71		60.70		60.70		
					Jumlah serah terima dan perolehan PSU	Perumah an	102	110	114		118		122		122		
					Jumlah Perumahan yang terdata	Perumah an	201	201	201		201		201		201		
	1			URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1	0 5		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KETENTERA MAN DAN KETERTIBA N UMUM SERTA PERLINDUN GAN MASYARAKA													

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					T													
					Satuan Polisi Pamong Praja													
	1	0 5	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				40,527,479, 217		42,213,422, 352		44,024,378, 171		126,765,279 ,740	Satuan Polisi Pamong Praja		
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	10	10		10		10		30			
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnva	Jenis Dokumen (Laporan)	15	10	10		10		10		30			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penangu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Peningkatan Kapasitas SDM												
						6 Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	5	5		5		5		15		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	5	5		5		5		15		
						7 Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	2	2		2		2		6		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	2	2		2		2		6		
						8 Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Barang	12	10	10		9		14		33		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang	12	10	10		9		14		33		
						9 Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	2	2		2		2		6		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	2	2		2		2		6		
						Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	1	4	4		4		4		12		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jenis Jasa	1	4	4		4		4		12		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah pembinaan dan penyuluhan produk-produk hukum daerah dalam rangka kewaspadaan dini ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	orang	240	450	470		470		470		1,410		
					Jumlah pembinaan dan penyuluhan produk-produk hukum daerah dalam rangka kewaspadaan dini kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang seharusnya dilakukan	orang	240	450	470		470		470		1,410		
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				SERTA PERLINDUN GAN MASYARAKA T													
				Badan Penanggulan gan Bencana Daerah													
	1	0 5	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN /KOTA					32,506,126, 122		32,506,126, 122		32,506,126, 122		97,518,378, 366	Badan Penanggu langan Bencana Daerah	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Daerah yang Seharusnya Tersedia												
						2 Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						3 Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					6	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	5	5	5		5		5		15		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	5	5	5		5		5		15		
					7	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					8	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
					9	Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Barang	8	8	8		8		8		24		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya	Jenis Barang	8	8	8		8		8		24		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	3	4		4		4		12		
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	3	4		4		4		12		
	1	05	03	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA						1,453,252,000		1,513,707,283		1,578,645,326		4,545,604,609	Badan Penanggu ngan Bencana Daerah
					1 Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	641,828	673,920	707,616		742,997		780,147		780,147		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
						Jumlah total target warga negara yang wajib memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	641,8 28	673,9 20	707,6 16		742,9 97		780,1 47		780,1 47						
						2 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	627,5 02	658,8 78	691,8 22		726,4 14		762,7 35		762,7 35						
						Jumlah total target warga negara yang wajib memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	627,5 02	658,8 78	691,8 22		726,4 14		762,7 35		762,7 35						
						2 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	Orang	5,395	5,395	5,395		5,395		5,395		5,395						

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
						dan evakuasi korban bencana																
						Jumlah total target warga negara yang wajib memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	5,395	5,395	5,395		5,395		5,395		5,395						
	1	0 5	0 4		PROGRAM PENCEGAH AN, PENANGGU LANGAN, PENYELAMA TAN KEBAKARAN DAN PENYELAMA TAN NON KEBAKARAN					2,164,258,2 00		2,254,291,3 41		2,351,000,4 40		6,769,549,9 81	Badan Penanggu langan Bencana Daerah					
					1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	64.10	67.00	70.00		74.00		78.00		78.00						
						Jumlah layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap	Kejadian	100	67	70		74		78		78						
						Jumlah seluruh kejadian kebakaran	Kejadian	156	100	100		100		100		100						

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					2	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	14.63	15.00	15.00		15.00		15.00		15.00		
						Jumlah waktu tanggap penanganan kebakaran	Menit	2,283	1,500	1,500		1,500		1,500		1,500		
						Jumlah seluruh kejadian kebakaran	Kejadian	156	100	100		100		100		100		
	1				URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1	0 6			URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG SOSIAL													
					Dinas Sosial													
	1	0 6	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					19,756,096, 745		19,756,096, 745		19,756,096, 745		59,268,290, 235	Dinas Sosial	
					1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					3	Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
					4	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						5	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21	
							Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21	
						6	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12	

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Daerah yang Seharusnya Tersedia												
					7 Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
					Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
	1	0 6	0 2	PROGRAM PEMBERDA YAN SOSIAL						9,500,000,0 00		9,500,000,0 00		12,500,000, 000		31,500,000, 000	Dinas Sosial
					1 Persentase kegiatan Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang sesuai dengan ketentuan	%	0.00	60.00	70.00		80.00		90.00		90.00		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah PSKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan pembinaan	orang	1,270	1,289	1,427		1,427		1,427		1,427		
						jumlah PSKS skala kota yang harus menerima program pemberdayaan sosial melalui peningkatan kapasitas dan pembinaan	orang	1,510	1,289	1,427		1,427		1,427		1,427		
	1	0 6	0 4	PROGRAM REHABILITA SI SOSIAL						628,496,85 6		654,642,32 5		682,726,48 1		1,965,865,6 62	Dinas Sosial	
					1	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis,dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh pelayanan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis,dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial yang seharusnya dilayani	orang	969	948	920		920		920		920		
	1	0	6	0	5	PROGRAM PERLINDUN GAN DAN JAMINAN SOSIAL					3,898,658,4 00		4,060,842,5 89		4,235,052,7 37		12,194,553, 726	Dinas Sosial
						1 Persentase Pelayanan Perlindungan Sosial	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah PMKS yang menerima pelayanan perlindungan sosial	orang	2,050	3,250	3,975		4,000		4,050		4,050		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						jumlah korban bencana alam dan sosial yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya	orang	1,800	1,800	1,500		1,500		1,500		1,500		
	1	06	07	PROGRAM PENGELOLA AN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						39,007,500		40,630,212		42,373,248		122,010,960	Dinas Sosial	
					1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah sarana dan prasarana TMP yang dipelihara	unit (makam)	1	1	1		1		1		1		
						Jumlah sarana dan prasarana TMP yang seharusnya dipelihara	unit (makam)	1	1	1		1		1		1		
	2			URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2	07		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG TENAGA KERJA														

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Dinas Ketenagakerj aan													
	2	0 7	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN /KOTA					20,405,190, 124		20,405,190, 124		20,405,190, 124		61,215,570, 372	Dinas Ketenaga kerjaan	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					2 Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						4	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3			
						5	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21	
							Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia												
						6 Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						7 Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
	2	0 7	0 2	PROGRAM PERENCANA AN TENAGA KERJA			0.00	0.00		150,428,46 0		156,686,28 4		163,408,12 6		470,522,869	Dinas Ketenaga kerjaan
					1 Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	%	100	100	100		100		100		100.0 0		
					Jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang disusun	Dokumen	2	2	2		2		2		2		
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang direncanakan	Dokumen	2	2	2		2		2		2		
	2	0 7	0 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVI TAS TENAGA KERJA			0	0		3,190,965,6 38		3,323,709,8 08		3,466,296,9 59		9,980,972,4 05	Dinas Ketenaga kerjaan
					1 Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi	%	98.89	100.0 0	75.00		82.14		85.71		85.71		
					Jumlah Tenaga Kerja Yang Lulus Uji Sertifikat	Orang	178	190	210		230		240		240		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Kompetensi												
					Jumah Tenaga Kerja Yang mengikuti uji sertifikasi kompetensi	Orang	180	190	280		280		280		280		
	2	0 7	0 4	PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA					1,974,218,7 00		2,056,346,1 98		2,144,563,4 50		6,175,128,3 48	Dinas Ketenaga kerjaan	
					1 Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	%	85.00	98.45	98.84		98.46		99.24		99.24		
					Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	10,96 5	12,70 0	12,75 0		12,80 0		13,00 0		13,00 0		
					Jumlah tenaga kerja yang terdaftar	Orang	12,90 0	12,90 0	12,90 0		13,00 0		13,10 0		13,10 0		
	2	0 7	0 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1,084,906,0 56		1,130,038,1 48		1,178,516,7 84		3,393,460,9 88	Dinas Ketenaga kerjaan	
					1 Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	67.67	71.43	70.37		70.37		70.37		70.37		
					Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Perusaha an	90	95	95		95		95		95		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah pengaduan perselisihan hubungan industrial	Perusaha an	133	133	135		135		135		135		
						1 Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	8.08	8.08	23.03		23.03		23.03		23.03		
						Jumlah Perusahaan Yang Dibina	Perusaha an	120	120	342		342		342		342		
						Jumlah Perusahaan	Perusaha an	1,485	1,485	1,485		1,485		1,485		1,485		
	2				URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	08			URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK													

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak, Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana													
	2	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					19,904,382, 139		19,904,382, 139		19,904,382, 139		59,713,146, 417	DP3AP2K B	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47			
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					6	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	9	9	50		50		50		150		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	9	9	50		50		50		150		
					7	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						8	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4	12		
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4	12		
						9	Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0	100.0 0		
							Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Barang	16	16	5		5		5	15		
							Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya	Jenis Barang	16	16	5		5		5	15		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Tersedia												
						10 Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	2	2	2		2		2		6		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	2	2	2		2		2		6		
						11 Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	28		28		28		84		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	28		28		28		84		
	2	08	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N					3,659,156,488		3,811,377,398		3,974,885,488		11,445,419,374	DP3AP2KB	
					1	Tingkat partisipasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemberdayaan perempuan	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggung Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah OPD yang mendukung Indikator APE (GAP, GBS, SK Focal Point PUG tingkat SKPD)	OPD	41	41	41		41		41				
						Jumlah OPD yang seharusnya mendukung indikator APE (GAP, GBS, SK Focal Point PUG tingkat SKPD)	OPD	41	41	41		41		41				
						2 Cakupan perempuan yang mendapatkan pelatihan bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial dalam pemberdayaan perempuan	%	48.03	33.33	33.33		33.33		33.33				
						Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial	Orang	3,050	3,050	3,050		3,050		3,050				
						Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial	Orang	6,350	9,150	9,150		9,150		9,150				

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					3	Cakupan organisasi perempuan yang mendapatkan pendampingan	%	100.00	100.00	11.54		11.54		11.54		11.54		
						Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pendampingan	Organisasi	3	3	3		3		3		3		
						Jumlah organisasi perempuan di kota tangerang	Organisasi	3	3	26		26		26		26		
	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					1,851,873,400		1,928,911,333		2,011,661,630		5,792,446,363		DP3AP2KB
					1	Persentase Penanganan Kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
						Jumlah korban kekerasan Perempuan yang dilayani	Orang	83	100	100		100		100		100		
						Jumlah total pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan	Orang	83	100	100		100		100		100		
	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					1,453,357,000		1,513,816,651		1,578,759,386		4,545,933,037		DP3AP2KB

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Persentase layanan Konsultasi dan konseling	%	0.00	0.00	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
						Jumlah klien konsultasi dan konseling yang dilayani	Orang	0	0	80		80		80		80	
						Jumlah total konsultasi dan konseling yang terlayani	Orang	0	0	80		80		80		80	
	2	0 8	0 7	PROGRAM PERLINDUN GAN KHUSUS ANAK						104,720,72 0		109,077,10 2		113,756,51 0		327,554,332	DP3AP2K B
					1	Persentase Penanganan Kasus kekerasan terhadap anak	%	0.00	0.00	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
						Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani	Korban	76	100	100		100		100		100	
						Jumlah total pengaduan korban kekerasan terhadap anak	Korban	76	100	100		100		100		100	
	2			URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	0 9		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG													

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					PANGAN													
					Dinas Ketahanan Pangan													
	2		0 9	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA					19,055,827, 344		19,055,827, 344		19,055,827, 344		57,167,482, 032	Dinas Ketahana n Pangan	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47			
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96	
						3	Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					4	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	50	50	32		50		50	132			
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	50	50	32		50		50	132			
					5	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0	100.0 0			
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3	9			
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3	9			
					6	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0	100.0 0			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	9	9	9		9		9		27						
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	9	9	9		9		9		27						
						Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	6		6		6		18						
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	6		6		6		18						
						Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						10 Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	2	2	2		2		2		6		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	2	2	2		2		2		6		
						11 Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Jenis Jasa	49	53	53		53		53		159		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					yang seharusnya tersedia												
	2	0 9	0 3	PROGRAM PENINGKAT AN DIVERSIFIK ASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKA T					1,778,629,6 11		1,852,620,6 03		1,932,098,0 27		5,563,348,2 41	Dinas Ketahana n Pangan	
					1 Tingkat stabilitas Harga Pangan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah komoditas dengan harga yang stabil	Komodita s	12	12	12		12		12		12		
					Banyaknya komoditas	Komodita s	12	12	12		12		12		12		
					2 Tingkat cadangan pangan daerah	%	N/a	N/a	69.95		72.01		73.98		73.98		
					Jumlah cadangan pangan beras yang dimiliki pemerintah Kota Tangerang	ton	0	0	710		746		782		782		
					Jumlah kebutuhan cadangan pangan Kota Tangerang yang seharusnya tersedia	ton	0	0	1,015		1,036		1,057		1,057		
					3 Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/kapi ta/hari	2,416 .24	2,208 .00	2,400. 00		2,400. 00		2,400. 00		2,400. 00		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					N													
					Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan													
		2	1 0	1 0	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH					257,837,00 8		268,563,02 8		280,084,38 1		806,484,417	Dinas Perkimta n	
						1	Persentase pemetaan tanah milik pemda bersertifikat	%	3.92	2.61	4.58		5.88		6.54		6.54	
							Tanah milik pemda bersertifikat yang dipetakan	lokasi	60	40	70		90		100		100	
							Tanah milik pemda yang bersertifikat	lokasi	1,530	1,530	1,530		1,530		1,530		1,530	
		2	1 0	0 5	PROGRAM PENYELESAI AN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGU NAN						20,000,000, 000		22,000,000, 000		35,000,000, 000		77,000,000, 000	Dinas Perkimta n
						1	Tingkat penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%			100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Luas Lahan yang Seharusnya Diberikan Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan	Ha	0.31	0.32	0.05		0.10		0.20		0.35		
						2 Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100		
						Luas Lahan yang Diberikan Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase	Ha	0.10	0.50	0.20		0.10		0.20		0.50		
						Luas Lahan yang Seharusnya Diberikan Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase	Ha	0.10	0.50	0.20		0.10		0.20		0.50		
					Dinas Lingkungan Hidup													

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	2	1 0	0 5	PROGRAM PENYELESAI AN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGU NAN						20,000,000, 000		20,000,000, 000		45,000,000, 000		85,000,000, 000	Dinas Lingkung an Hidup
					1 Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas lingkungan	%	13.39	21.48	32.12		32.12		35.75		100.0 0		
					Luas lahan dan bangunan yang diganti rugi	m2	2,183	3,500	3,000		3,000		3,339		9,339		
					Jumlah target luasan lahan dan bangunan yang diganti rugi	m3	16,29 8	16,29 8	9,339		9,339		9,339		9,339		
	2			URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	1 1		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG LINGKUNGA N HIDUP													

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Dinas Lingkungan Hidup													
	2	1	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					67,332,410, 602		67,332,410, 602		67,332,410, 602		201,997,231 ,806	Dinas Lingkung an Hidup
						1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
						2 Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					4	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	138	138	139		139		139				
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	138	138	139		139		139				
					5	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3				
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3				
					6	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	#DIV /0!	#DIV /0!	100.0 0		100.0 0		100.0 0				

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	0	0	15		15		15		45		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	0	0	15		15		15		45		
						7 Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						8 Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah parameter yang seharusnya diukur	paramete r	976	976	976		976		976		976		
					3	Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca	%	20.30	20.40	20.50		20.60		20.70		20.70		
						Jumlah penurunan emisi gas karbon	ton	9,870	9,919	9,968		10,01 6		10,06 5		10,06 5		
						Jumlah emisi karbon yang dihasilkan	ton	48,62 3	48,62 3	48,62 3		48,62 3		48,62 3		48,62 3		
	2	1 1	0 4	PROGRAM PENGELOLA AN KEANEKARA GAMAN HAYATI (KEHATI)						27,312,480		28,448,679		29,669,128		85,430,287		Dinas Lingkung an Hidup
					1	Cakupan penghijauan di area RTH	%			0.023		0.044		0.064		0.131		
						luas ruang terbuka hijau (RTH) yang dilakukan penanaman pohon	M2			3,500		6,500		9,500		9,500		
						luas ruang terbuka hijau (RTH) yang dikembangkan dan dikelola	M2			14,91 2,282		14,91 5,282		14,91 8,282		14,91 8,282		
	2	1 1	0 5	PROGRAM PENGENDAL IAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN						151,961,68 0		158,283,28 6		165,073,63 9		475,318,605		Dinas Lingkung an Hidup

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
					1 Tingkat Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3 yang Terfasilitasi	dokumen	3	3	10		10		10		10			
					Jumlah Dokumen Pengajuan Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3	dokumen	3	3	10		10		10		10			
	2	1	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN TERHADAP IZIN LINGKUNGA N DAN IZIN PERLINDUN GAN DAN PENGELOLA AN LINGKUNGA N HIDUP (PPLH)				158,602,68 5		165,200,55 7		172,287,66 1		496,090,903	Dinas Lingkung an Hidup		
					1 Persentase badan usaha dan /atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	%	100.0 0	100.0 0	93.63		93.85		93.85		93.85			

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang taat izin lingkungan	Perusaha an/ Kegiatan	135	135	426		427		427		427		
					Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Perusaha an/ Kegiatan	135	135	455		455		455		455		
	2	1	0	8	PROGRAM PENINGKAT AN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					655,404,818		682,669,658		711,956,186		2,050,030,662	Dinas Lingkungan hidup
					1 Cakupan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	%	62.29	72.71	79.31		85.90		92.50		92.50		
					Jumlah kelompok masyarakat/ lembaga/instansi yang diberikan peningkatan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	kelompok	1,171	1,367	1,491		1,615		1,739		1,739		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah target kelompok masyarakat/lemb aga/instansi yang akan diberikan peningkatankapa sitas dan kompetensinya terkait PPLH	kelompok	1,880	1,880	1,880		1,880		1,880		1,880		
	2	1	1	0	PROGRAM PENANGANA N PENGADUA N LINGKUNGA N HIDUP					210,220,00 0		218,965,15 2		228,358,75 7		657,543,909	Dinas Lingkung an Hidup
					1 Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditangani	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani	Kasus	25	25	25		25		25		75		
					Jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi	Kasus	25	25	25		25		25		75		
					2 Persentase usaha/kegiatan yang dikenakan sanksi administrasi	%	100.0 0	100.0 0	18.71		18.06		18.06		18.06		
					Jumlah usaha yang mendapat sanksi administrasi	Usaha/ Kegiatan	30	30	29		28		28		28		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	Usaha/ Kegiatan	30	30	155		155		155		155		
	2	1	1	PROGRAM PENGELOLA AN PERSAMPAH AN						168,291,38 5,400		203,542,62 7,032		214,001,78 5,732		585,835,798 ,164	Dinas Lingkung an Hidup
					1 Persentase Pembatasan Timbunan Sampah	%			22.55		24.16		24.16		24.16		
					Volume Pembatasan Timbunan Sampah	ton/th			180,0 44		197,1 69		201,4 33		201,4 33		
					Total timbunan Sampah	ton/th			798,4 06		816,0 55		833,7 04		833,7 04		
					2 Persentase Pemanfaatan Kembali Sampah	%			0.28		0.29		0.29		0.29		
					Volume Pemanfaatan Kembali Sampah	ton/th			2,197		2,406		2,458		2,458		
					Total timbunan Sampah	ton/th			798,4 06		816,0 55		833,7 04		833,7 04		
					3 Persentase Pendauran Ulang Sampah	%			5.17		5.54		5.54		5.54		
					Volume Pendauran Ulang Sampah	ton/th			41,31 2		45,24 1		46,22 0		46,22 0		
					Total timbunan Sampah	ton/th			798,4 06		816,0 55		833,7 04		833,7 04		
					4 Persentase Sampah yang terproses	%			38.81		3.82		4.00		4.00		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Volume Sampah yang terproses	ton/th			309,8 98.00		31,17 8.00		33,37 7.00		33,37 7.00		
						Total timbulan Sampah	ton/th			798.4 05,91		816.0 54,93		833.7 03,65		833.7 03,65		
					5	Persentase sampah yang terproses di fasilitas instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan	%			33.19		66.18		66.00		66.00		
						Volume sampah yang terproses di fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan	ton/th			264.9 54,00		540.0 61,00		550.2 16,00		550.2 16,00		
						Total timbulan Sampah	ton/th			798.4 05,91		816.0 54,93		833.7 03,65		833.7 03,65		
	2				URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	1 2			URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUD													

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				UKAN DAN PENCATATA N SIPIL													
				Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil													
	2	1 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					20,591,638, 583		20,591,638, 583		20,591,638, 583		61,774,915, 749	Dinas Kependu dikan dan Pencatata n Sipil	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
					4	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV/ 0!		#DIV/ 0!		#DIV/ 0!		#DIV/ 0!		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	0	0	0		0		0		0		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	0	0	0		0		0		0		
					5	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					6	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
					7	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
						dipenuhi																
						Jumlah Standar Dokumen Administrasi Kependudukan		0	0	2		2		2		2						
	2	1 2	0 3	PROGRAM PENCATATA N SIPIL						93,134,924		97,009,337		101,171,03 8		291,315,300	Dinas Kependu dikan dan Pencatata n Sipil					
					1	Persentase dokumen pencatatan sipil yang terverifikasi sesuai standar	%	75.00	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Indikator Layanan yang dipenuhi		0	0	2		2		2		2						
						Jumlah Standar Dokumen Administrasi Kependudukan		0	0	2		2		2		2						
	2	1 2	0 4	PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI ADMINISTR ASI KEPENDUD UKAN						139,245,70 4		145,038,32 5		151,260,46 9		435,544,499	Dinas Kependu dikan dan Pencatata n Sipil					
					1	Cakupan layanan SIAK	%	75.00	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah instalasi SIAK pada OPD		0	0	14		14		14		14						
						Jumlah OPD Pelaksana Layanan		0	0	14		14		14		14						

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2				URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
213				URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DAN DESA													
				Kecamatan Tangerang													
21305				PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT				2,712,350,400		2,476,349,160		2,476,349,160		7,665,048,720		Kecamata n Tangan g	
				1Cakupan pemberdayaan RT/RW	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00			
				Jumlah RT dan RW yang diberdayakan	Orang	494	494	494		494		494		1,482			
				Jumlah keseluruhan RT dan RW yang diberdayakan	Orang	494	494	494		494		494		1,482			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
					Kecamatan Karawaci																	
	2	1 3	0 5		PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT					3,234,870,8 00		3,705,964,6 00		3,705,964,6 00		10,646,800, 000	Kecamata n Karawaci					
					1 Cakupan pelayanan RT/RW	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0							
					Jumlah RT dan RW yang diberdayakan	RT/RW	667	667	668		668		668		2,004							
					Jumlah keseluruhan RT dan RW yang ada	RT/RW	667	667	668		668		668		2,004							
					Kecamatan Cibodas																	
	2	1 3	0 5		PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT					2,828,909,8 00		2,728,440,0 00		2,728,440,0 00		8,285,789,8 00	Kecamata n Cibodas					
					1 Cakupan pelayanan RT/RW	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0							

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah RT dan RW yang diberdayakan	RT/RW	573	573	573		573		573		1,719		
						Jumlah keseluruhan RT dan RW yang ada	RT/RW	573	573	573		573		573		1,719		
					Kecamatan Jatiuwung													
	2		1 3	0 5	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT					1,347,922,0 00		1,412,476,0 00		1,412,476,0 00		4,172,874,0 00		Kecamata n Jatiuwun g
					1 Cakupan pelayanan RT/RW	%		100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah RT dan RW yang diberdayakan	RT/RW	268	272	272		272		272		816		
						Jumlah keseluruhan RT dan RW yang ada	RT/RW	268	272	272		272		272		816		
					Kecamatan Periuk													
	2		1 3	0 5	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA					2,614,490,4 00		2,614,490,4 00		2,623,897,5 00		7,852,878,3 00		Kecamata n Periuk

[illegible]

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	1	3	0	5	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT					1,082,648,0 00		1,159,730,1 00		1,159,730,1 00		3,402,108,2 00	Kecamata n Benda	
					1 Cakupan pelayanan RT/RW	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah RT dan RW yang diberdayakan	RT/RW	237	237	237		237		237		711			
					Jumlah keseluruhan RT dan RW yang ada	RT/RW	237	237	237		237		237		711			
					Kecamatan Batuceper													
2	1	3	0	5	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT					1,435,164,8 00		1,367,942,4 00		1,367,942,4 00		4,171,049,6 00	Kecamata n Batucepe r	
					1 Cakupan pelayanan RT/RW	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah RT dan RW yang diberdavakan	RT/RW	279	279	279		279		279		837			

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah keseluruhan RT dan RW yang ada	RT/RW	279	279	279		279		279		837		
				Kecamatan Cipondoh													
	2	1 3	0 5	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT						3,898,680,0 00		3,996,147,0 00		3,996,147,0 00		11,890,974, 000	Kecamata n Cipondoh
					1 Cakupan Pemberdayaan RT/RW	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah RT dan RW yang diberdayakan	Orang	826	826	826		826		826		2,478		
					Jumlah keseluruhan RT dan RW yang seharusnya diberdayakan	Orang	826	826	826		826		826		2,478		
				Kecamatan Pinang													
	2	1 3	0 5	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA						2,567,322,0 00		2,810,946,0 60		2,810,946,0 60		8,189,214,1 20	Kecamata n Pinang

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	1	3	0	5	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT					2,395,188,0 00		2,129,757,3 00		2,129,757,3 00		6,654,702,6 00	Kecamata n Karang Tengah	
					1 Cakupan pelayanan RT/RW	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah RT dan RW yang diberdayakan	RT/RW	435	435	435		435		435		1,305			
					Jumlah keseluruhan RT dan RW yang ada	RT/RW	435	435	435		435		435		1,305			
					Kecamatan Larangan													
2	1	3	0	5	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT					2,632,055,8 00		2,558,733,6 00		2,558,733,6 00		7,749,523,0 00	Kecamata n Larangan	
					1 Cakupan pelayanan RT/RW	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah RT dan RW yang diberdayakan	RT/RW	521	521	521		521		521		1,563			

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah keseluruhan RT dan RW yang ada	RT/RW	521	521	521		521		521		1,563		
	2			URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	1 4		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A													
				Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak, Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana													
	2	1 4	0 2	PROGRAM PENGENDAL IAN PENDUDUK					519,390,00 0		540,996,62 4		564,205,37 9		1,624,592,0 03		Dinas Pemberda yaan Perempu an, Perlindun gan

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	1	0	4	4	PROGRAM PEMBERDA YAAAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					5,764,553,6 52		6,004,359,0 84		6,261,946,0 89		18,030,858, 825	DP3AP2K B	
					1 Cakupan keluarga sakinah mawadah warahmah (samawa)	%	72.39	100.0 0	33.58		33.21		33.21		33.21			
					Jumlah RW yang SAMAWA (8 Fungsi Keluarga) di kampung KB	Kelompok	0	0	90		89		89		89			
					Dibagi Jumlah RW di Kampung KB	RW	0	0	268		268		268		268			
2					URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	1	5			URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERHUBUN GAN													
					Dinas Perhubunga n													

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					106,323,54 7,042		106,323,54 7,042		106,323,54 7,042		318,970,641 ,126	Dinas Perhubun gan	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					2 Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						3 Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						4 Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	96	96	96		96		96		288		
					Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	96	96	96		96		96		288		
					5 Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
					Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
					6 Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Pemerintah Daerah												
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
					9	Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
	2	1 5	0 2		PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					71,337,570, 333		74,305,213, 259		77,492,906, 908		223,135,690 ,500	Dinas Perhubun gan	
					1 Tingkat Pemanfaatan Angkutan Perkotaan Sistem Transit	%		99.61	99.70	99.80		99.90		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan Sistem Transit	Penumpa ng		504,7 96	505,2 96	505,7 96		506,2 96		506,7 96		506,7 96		
					Jumlah Penumpang yg seharusnya menggunakan Angkutan Perkotaan Sistem Transit	Penumpa ng		506,7 96	506,7 96	506,7 96		506,7 96		506,7 96		506,7 96		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					2	Persentase ketersediaan hasil kajian, analisa dan evaluasi transportasi untuk penyusunan kebijakan	%	91.67	93.33	33.33		66.67		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah kajian, analisa dan evaluasi transportasi untuk bahan kebijakan yang disusun	Dokumen	11	14	6		12		18		18		
						Jumlah kajian, analisa dan evaluasi transportasi yang harusnya disusun untuk bahan kebijakan yang disusun	Dokumen	12	15	18		18		18		18		
					3	Prosentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan	%	80.00	80.00	33.33		66.67		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah perlengkapan jalan pada ruas jalan yang dibangun/pelihar a	Ruas Jalan	0	0	20		40		60		60		
						Jumlah perlengkapan jalan pada ruas jalan yang seharusnya	Ruas Jalan	0	0	60		60		60		60		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024-2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
				Dinas Komunikasi dan Informatika													
	2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				18,266,549,491		18,266,549,491		18,266,549,491		54,799,648,473		Dinas Komunikasi dan Informatika	
				1Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Perangkat Daerah												
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						4 Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	0.00	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	0	43	43		43		43		129		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	0	43	43		43		43		129		
						5 Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						8 Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						9 Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan	%	#DIV /0!	#DIV /0!	100.0 0		#DIV/ 0!		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Tersedia												
						Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1 1 Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	126	126	429		429		429		1,287		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	126	126	429		429		429		1,287		
	2	1 6	0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKAS						8,347,396,5 05		8,694,648,1 99		9,067,648,6 07		26,109,693, 311	Dinas Komunik asi dan Informati	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					I PUBLIK												ka	
						1	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang terpublikasi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah informasi yang dipublikasi		0	0	1,080		1,080		1,080			
							Jumlah infromasi yang seharusnya dipublikasi (3 rilis/ hari x 30 x 12 bulan = 1080 rilis)		0	0	1,080		1,080		1,080			
						2	Presentase Kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif	%	53.85	69.23	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif	Kecamata n	7	9	13		13		13			
							jumlah Kecamatan yang seharusnya memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif	Kecamata n	13	13	13		13		13			

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					3	Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik	Point	92.00	90.00	90.00		90.50		91.00		91.00	
	2	1 6	0 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATI KA						21,559,858, 080		22,456,748, 176		23,420,142, 673		67,436,748, 929	Dinas Komunik asi dan Informati ka
					1	Persentase Dokumen Tatakelola SPBE Yang Dimanfaatkan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
						Jumlah Dokumen Tata Kelola SPBE	Dokumen	5	5	5		5		5		5	
						Jumlah Dokumen Yang Diaudit	Dokumen	5	5	5		5		5		5	
					2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	76.32	78.95	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
						Jumlah OPD Yang Terlayani Akses Internet	Perangkat Daerah	29	30	38		38		38		38	
						Jumlah OPD yang harus dikoneksikan internet oleh kominfo	Perangkat Daerah	38	38	38		38		38		38	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
					3	Persentase Ruang Publik yang terhubung dengan internet	%	41.38	41.38	62.07		82.76		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah Ruang Publik Terlayani Akses Internet	Lokasi	12	12	18		24		29		29						
						Jumlah Ruang Publik	Lokasi	29	29	29		29		29		29						
					4	Persentase Apilikasi yang dibangun dan Diintegrasikan	%	67.76	75.99	84.21		92.43		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah Aplikasi Yang Dibangun dan Diintegrasikan	Jenis	206	231	256		281		304		304						
						Jumlah Aplikasi Yang Direncanakan (Arsitektur SPBE)	Jenis	304	304	304		304		304		304						
					5	Persentase Aplikasi yang Termanfaatkan	%	67.76	75.99	84.21		92.43		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah Aplikasi Yang Termanfaatkan	Jenis	206	231	256		281		304		304						
						Jumlah Aplikasi Yang Direncanakan (Arsitektur SPBE)	Jenis	304	304	304		304		304		304						
2					URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	1	7		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
				Dinas Perindustria n, Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
2	1	7	03	PROGRAM PENGAWAS AN DAN PEMERIKSA AN KOPERASI					274,357,599		285,770,875		298,030,445		858,158,919	Disperind agukm	
					1 Tingkat kepatuhan koperasi	%	NA	NA	17.01		20.41		23.81		23.81		
					Jumlah koperasi yang telah memenuhi aturan	Koperasi	NA	NA	50		60		70		70		
					Total koperasi aktif	Koperasi	NA	NA	294		294		294		294		
2	1	7	05	PROGRAM PENDIDIKA N DAN LATIHAN PERKOPERA SIAN					205,248,819		213,787,170		222,958,639		641,994,628	Disperind agukm	
					1 Persentase SDM koperasi yang dibina	%	NA	NA	28.91		29.59		30.27		30.27		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah SDM koperasi yang dibina	Koperasi	NA	NA	85		87		89		89		
						Total koperasi aktif	Koperasi	NA	NA	294		294		294		294		
	2	1 7	0 6		PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PERLINDUN GAN KOPERASI					163,266,37 6		170,058,25 7		177,353,75 6		510,678,390	Disperind agukm	
					1 Persentase koperasi mandiri	%	NA	NA	10.20		13.61		17.01		17.01			
					Jumlah koperasi mandiri	Koperasi	NA	NA	30		40		50		50			
					Total koperasi aktif	Koperasi	NA	NA	294		294		294		294			
	2	1 7	0 7		PROGRAM PEMBERDA YAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					10,000,000, 000		12,000,000, 000		15,000,000, 000		37,000,000, 000	Disperind agukm	
					1 Persentase UMKM yang melakukan pemasaran melalui kemitraan marketplace dan pameran	%	NA	NA	3.59		3.59		3.59		3.59			
					Jumlah pelaku UMKM yang melakukan pemasaran	UMKM	NA	NA	300		300		300		300			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						melalui kemitraan marketplace dan pameran												
						Jumlah pelaku UMKM	UMKM	NA	NA	8,367		8,367		8,367		8,367		
	2	17	08		PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM					5,000,000,000		7,000,000,000		9,000,000,000		21,000,000,000	Disperind agukm	
					1	Persentase pengembangan usaha mikro	%	NA	NA	55.12		57.88		60.77		60.77		
						Jumlah usaha mikro yang berkembang	Unit Usaha	NA	NA	4,612		4,843		5,085		5,085		
						Jumlah usaha mikro	Unit Usaha	NA	NA	8,367		8,367		8,367		8,367		
	2				URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	18			URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PENANAMA N MODAL													
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	1	8	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				23,376,581, 166		23,376,581, 166		23,376,581, 166		70,129,743, 498	DPMPTSP	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					2 Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						3 Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
						4 Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	100	100	100		100		100		300		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	100	100	100		100		100		300		
						5 Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						6 Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Tersedia												
						Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 10 Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	1	1	1		1		1		3		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	1	1	1		1		1		3		
	2	18	02		PROGRAM PENGEMBA NGAN IKLIM PENANAMA N MODAL					11,440,000		11,915,904		12,427,096		35,783,000	DPMPTSP	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Tingkat Pelaksanaan Kebijakan Daerah Mengenai Perizinan Penanaman Modal	%	0.00	100.00	100.00		100.00		100.00				
						Jumlah kebijakan daerah mengenai perizinan dan penanaman modal yang dilaksanakan	Jenis	0	1	1		2		2		2		
						Jumlah kebijakan perizinan dan penanaman modal yang ada	Jenis	0	1	1		2		2		2		
	2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						630,540,768		656,771,264		684,946,751		1,972,258,783	DPMPTSP	
					1	Presentasi Promosi Yang Menarik Investor	%	0.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
						Jumlah promosi yang dilakukan	Kegiatan	0	2	6		6		6		6		
						Target jumlah promosi yang seharusnya dilaksanakan	Kegiatan	0	2	6		6		6		6		
	2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						97,890,000		101,962,224		106,336,403		306,188,627	DPMPTSP	
					1	Persentase perizinan dan Non Perizinan yang selesai tepat waktu	%	0.00	98.21	98.25		98.39		98.51		98.51		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024-2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	1	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAHAN DAN OLAHRAGA													
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga													
2	1	9	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					16,168,034,276		16,168,034,276		16,168,034,276		48,504,102,828	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					1Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
					Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						6	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21	
							Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21	
						7	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Daerah yang Seharusnya Tersedia												
	2	1 9	0 2	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDA AN						3,629,018,8 14		3,779,985,9 97		3,942,147,3 96		11,351,152, 208	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	
					1	Prosentase SDM kepemudan yang berprestasi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah SDM Kepemudaan berprestasi yang ada	Orang	1,600	2,000	300		600		1,000		1,000		
						jumlah SDM Kepemudaan berprestasi yang seharusnya	Orang	1,600	2,000	300		600		1,000		1,000		
					2	Prosentase jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirausaha muda	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirausaha muda yang ada	Orang	4,000	5,000	1,000		2,000		3,000		3,000		
						Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirausaha muda yang seharusnya	Orang	4,000	5,000	1,000		2,000		3,000		3,000		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang disediakan	Unit	3	3	3		3		3		3		
						Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang seharusnya tersedia	Unit	3	3	3		3		3		3		
	2		1 9	0 3	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN					55,147,699, 341		57,441,843, 634		59,906,098, 726		172,495,641 ,701	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	
					1	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	Atlet	2,376	180	300		600		1,000		1,000		
					2	Prosentase SDM keolahragaan yang berkompeten	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah SDM keolahragaan kompeten yang ada	Orang	2,400	3,000	300		600		1,000		1,000		
						jumlah SDM keolahragaan kompeten yang seharusnya	Orang	2,400	3,000	300		600		1,000		1,000		
					3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						olahraga yang dikembangkan												
						Jumlah pengembangan sarana prasarana olahraga yang disediakan	Unit	39	39	39		39		39		39		
						jumlah pengembangan sarana prasarana olahraga yang seharusnya tersedia	Unit	39	39	39		39		39		39		
	2	1 9	0 4		PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN					1,450,000,0 00		1,510,320,0 00		1,575,112,7 28		4,535,432,7 28	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	
					1	Prosentase SDM pramuka yang berprestasi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah SDM pramuka berprestasi yang ada	Orang	1,600	2,000	300		600		1,000		1,000		
						jumlah SDM pramuka berprestasi yang seharusnya	Orang	1,600	2,000	300		600		1,000		1,000		
					2	Tingkat fasilitasi kegiatan kepramukaan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah ketersediaan fasilitasi kegiatan kepramukaan yang ada	Kegiatan	2	2	2		2		2		2		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					jumlah ketersediaan fasilitasi kegiatan kepramukaan yang seharusnya	Kegiatan	2	2	2		2		2		2		
	2			URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	2 0		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG STATISTIK													
				Dinas Komunikasi dan Informatika													
	2	2 0	0 2	PROGRAM PENYELENG GARAAN STATISTIK SEKTORAL					1,550,000,0 00		1,614,480,0 00		1,683,741,1 92		4,848,221,1 92		Dinas Komunik asi dan Informati ka
					1 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	OPD	40	40	40		40		40		40		
						Jumlah OPD	OPD	40	40	40		40		40		40		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	2 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIA N													
					Dinas Komunikasi dan Informatika													
	2	2 1	0 2		PROGRAM PENYELENG GARAAN PERSANDIA N UNTUK PENGAMAN AN INFORMASI					1,237,260,9 60		1,288,731,0 16		1,344,017,5 77		3,870,009,5 52		Dinas Komunik asi dan Informati ka

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	36.00	44.00	52.00		60.00		68.00		68.00	
						Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian		9	11	13		15		17		17	
						Jumlah SE yang Ada		25	25	25		25		25		25	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	2	2	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAA N												

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata													
	2	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					21,086,266, 720		21,086,266, 720		21,086,266, 720		63,258,800, 160	Dinas Kebudaya an dan Pariwisat a	
					1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					2	Tingkat Ketersediaan Administrasi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Daerah												
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
						Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1 Penunjang 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	5	5	5		5		5		15		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	5	5	5		5		5		15		
	2	2	0	2	PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYAA N					2,613,500,0 00		2,722,221,6 00		2,839,004,9 07		8,174,726,5 07	Dinas Kebudaya an dan Pariwisat a
					1 Tingkat pelestarian budaya takbenda	%	N/A	N/A	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah obyek budaya takbenda yang dilestarikan	Obyek	N/A	N/A	10		10		10		10		
					Jumlah obyek budaya takbenda yang ada	Obyek	N/A	N/A	10		10		10		10		
	2	2	0	5	PROGRAM PELESTARIA N DAN PENGELOLA AN CAGAR BUDAYA					617,666,40 0		643,361,32 2		670,961,52 3		1,931,989,2 45	Dinas Kebudaya an dan Pariwisat a
					1 Persentase cagar budaya yang lestari	%	N/A	N/A	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah cagara budaya yang dilestarikan	Obyek	N/A	N/A	24		24		24		24		
					Jumlah cagara budaya yang ada	Obyek	N/A	N/A	24		24		24		24		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	2	2	0	6	PROGRAM PENGELOLA AN PERMUSEU MAN					700,000,00 0		729,120,00 0		760,399,24 8		2,189,519,2 48	Dinas Kebudaya an dan Pariwisat a
					1 Tingkat kunjungan museum	%	N/A	N/A	25.00		50.00		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah pengunjung museum	Orang	N/A	N/A	600		1,200		2,400		2,400		
					Jumlah target pengunjung museum	Orang	N/A	N/A	2,400		2,400		2,400		2,400		
	2				URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	2	2	3		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERPUSTAK AAN												
					Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah												
	2	2	3	0	1PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					15,295,107, 964		15,295,107, 964		15,295,107, 964		45,885,323, 892	Dinas Perpusta kaan dan Arsip Daerah

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47	
						2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					5	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
					6	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	10	10	10		10		10		30		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	10	10	10		10		10		30		
					7	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
						Daerah																
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21						
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21						
						8 Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12						
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12						

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					9	Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Barang	2	2	2		2		2	6			
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang	2	2	2		2		2	6			
						Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0	100.0 0			
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4	12			
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4	12			

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia												
					1 1 Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	5	5	5		5		5		15		
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	5	5	5		5		5		15		
	2	2 3	0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAK AAN						1,299,308,9 20		1,353,360,1 71		1,411,419,3 22		4,064,088,4 13	Dinas Perpusta kaan dan Arsip

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Pariwisata													
3	26	02		PROGRAM PENINGKAT AN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					41,481,000, 000		43,555,050, 000		45,732,802, 500		130,768,852 ,500	Dinas Kebudaya an dan Pariwisat a	
					1Tingkat perkembangan daya tarik pariwisata	%	N/A	N/A	33.33		66.67		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah daya tarik pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	N/A	N/A	7		14		21		21		
					Target jumlah daya tarik pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	N/A	N/A	21		21		21		21		
					2Tingakt perkembangan destinasi pariwisata	%	N/A	N/A	95.78		97.05		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	N/A	N/A	227		230		237		237		
					Target jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	N/A	N/A	237		237		237		237		
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					655,855,01 8		683,138,58 7		712,445,23 2		2,051,438,8 37	Dinas Kebudaya an dan Pariwisat a	
					1Tingkat hunian akomodasi pariwisata	%	N/A	N/A	50.00		58.33		69.44		69.44		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah kamar akomodasi pariwisata yang terhuni	Kamar	N/A	N/A	18		21		25		25		
						Jumlah kapasitas kamar akomodasi pariwisata yang ada	Kamar	N/A	N/A	36		36		36		36		
	3	2 6	0 5		PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					228,244,95 2		237,739,94 2		247,938,98 6		713,923,880		Dinas Kebudaya an dan Pariwisat a
					1 Tingkat perkembangan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	%	N/A	N/A	13.33		26.67		40.00		40.00			
					Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten	Orang	N/A	N/A	624		1,248		1,872		1,872			
					Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	N/A	N/A	4,680		4,680		4,680		4,680			
	3				URUSAN PEMERINTA HAN PILIHAN													
	3	2 7			URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERTANIAN													
					Dinas Ketahanan													

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Pangan													
	3	2 7	0 2		PROGRAM PENYEDIAA N DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN					950,000,00 0		989,520,00 0		1,031,970,4 08		2,971,490,4 08	Dinas Ketahana n Pangan	
					1 Produktivitas tanaman hortikultura	Ku/Ha	115.3 2	115.4 9	115.6 0		115.6 5		115.7 0		115.7 0			
					Jumlah Produksi	Kuintal	128,8 11	129,0 00	128,7 78		128,3 72		127,9 64		127,9 64			
					Luas Panen	Ha	1,117	1,117	1,114		1,110		1,106		1,106			
					2 Persentase pendistribusan bibit ternak dan ikan	%	16.00	18.00	20.00		22.00		24.00		24.00			
	3	2 7	0 4		PROGRAM PENGENDAL IAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKA T VETERINER					405,596,75 0		422,469,57 5		440,593,52 0		1,268,659,8 44	Dinas Ketahana n Pangan	
					1 Angka prevalensi penyakit hewan	Point	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00			
	3				URUSAN PEMERINTA HAN PILIHAN													
	3	3 0			URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERDAGAN													

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					GAN													
					Dinas Perindustria n, Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
	3	30	03		PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN GAN					84,633,016		88,153,749		91,935,545		264,722,311	Disperind agukm	
					1	Persentase pasar yang dibina	%	N/A	N/A	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah pasar yang dibina	Pasar	N/A	N/A	38		38		38		38		
						Jumlah pasar yang ada	Pasar	N/A	N/A	38		38		38		38		
	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHA N POKOK DAN BARANG PENTING					150,250,03 5		156,500,43 6		163,214,30 5		469,964,777	Disperind agukm	
					1	Persentase kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan	%	N/A	N/A	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan	Kegiatan	N/A	N/A	1		1		1		1		
						Jumlah kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan yang seharusnya dilakukan	Kegiatan	N/A	N/A	1		1		1		1		
	3	30	05		PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR					567,719,518		591,336,649		616,704,992		1,775,761,159		Disperind agukm
					1 Laju pertumbuhan ekspor	%	3.12	3.15	3.18		3.21		3.24		3.24			
					Nilai ekspor	Rp. Triliun	40	42	43		44		46		46			
	3	30	06		PROGRAM STANDARDI SASI DAN PERLINDUN GAN KONSUMEN					97,627,088		101,688,375		106,050,806		305,366,269		Disperind agukm
					1 Persentase Standarisasi alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya)	%	N/A	N/A	97.88		97.88		98.94		98.94			
					Jumlah pengujian alat UTTP	Unit	N/A	N/A	18,500		18,500		18,700		18,700			
					Jumlah pengujian alat UTTP sesuai lingkup yang seharusnya	Unit	N/A	N/A	18,900		18,900		18,900		18,900			

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	3	0	7	PROGRAM PENGGUNA AN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					776,585,92 0		808,891,89 4		843,593,35 7		2,429,071,1 71	Disperind agukm	
					1 Persentase pelaku usaha yang melakukan pemasaran produk dalam negeri	%	N/A	N/A	20.00		24.00		24.00		24.00		
					Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Pemasaran produk dalam negri	Pelaku Usaha	N/A	N/A	100		120		120		120		
					Jumlah Pelaku Usaha ada	Pelaku Usaha	N/A	N/A	500		500		500		500		
					2 Persentase tempat usaha yang dibina dan diawasi	%	N/A	N/A	12.30		16.39		20.49		20.49		
					Jumlah tempat usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Tempat Usaha	N/A	N/A	75		100		125		125		
					Jumlah tempat usaha	Tempat Usaha	N/A	N/A	610		610		610		610		
3				URUSAN PEMERINTA HAN													

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024-2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					PILIHAN													
	3	3	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
	3	3	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				20,679,493,834		20,679,493,834		20,679,493,834		62,038,481,503		Disperindagukm	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00			
					Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		
					4	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
					5	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	3	0	2	PROGRAM PERENCANA AN DAN PEMBANGU NAN INDUSTRI					758,008,99 2		789,542,16 6		823,413,52 5		2,370,964,6 83	Disperind agukm	
					1 Tingkat fasilitasi IKM	%	N/A	N/A	6.61		8.62		10.54		10.54		
					Jumlah pelaku IKM yang terfasilitasi	IKM	N/A	N/A	300		400		500		500		
					Jumlah pelaku IKM	IKM	N/A	N/A	4,542		4,642		4,742		4,742		
3	3	0	3	PROGRAM PENGENDAL IAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA					3,622,196		3,772,880		3,934,736		11,329,812	Disperind agukm	
					1 Persentase terlaksananya verfikasi IUI yang diajukan melalui OSS	%	N/A	N/A	50.00		50.00		50.00		50.00		
					Jumlah pemohon IUI yang diproses melalui OSS	Pemohon	N/A	N/A	12		12		12		12		
					Jumlah pemohon IUI yang diajukan melalui OSS	Pemohon	N/A	N/A	24		24		24		24		
4				UNSUR PENDUKUN G URUSAN PEMERINTA HAN													
4	0	1		SEKRETARI AT DAERAH													

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Sekretariat Daerah													
	4		0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN /KOTA					113,287,72 3,207		113,287,72 3,207		113,287,72 3,207		339,863,169 ,621	Sekretari at Daerah	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)		18	18	17		18		17		52		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)		18	18	17		18		17		52		
					2 Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan	%		100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Perangkat Daerah												
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jumlah Dokumen (Laporan)	64	64	64		64		64		192		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jumlah Dokumen (Laporan)	64	64	64		64		64		192		
						3 Tingkat Ketersediaan Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	1	1	6		5		5		16		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	1	1	6		5		5		16		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					4	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	172	172	175		175		175				
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	172	172	175		175		175				
					5	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	9	9	9		9		9				
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	9	9	9		9		9				
					6	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	0.00	0.00	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan	Orang	0	0	35		35		35				

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	5	5	5		5		5		15		
						1 2 Tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jenis Pelayana n	4	4	4		4		4		4		
						Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Pelayana n	4	4	4		4		4		4		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1 3	Tingkat Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Fasilitas (Pemenuhan Kebutuhan) Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jenis Fasilitas	2	2	2		2		2				
						Jumlah Fasilitas (Pemenuhan Kebutuhan) Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Fasilitas	2	2	2		2		2				
					1 4	Prosentase OPD dengan struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah OPD dengan struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi	OPD	40	40	40		40		40				
						Jumlah keseluruhan OPD yang ada	OPD	40	40	40		40		40				
					1 5	Prosentase OPD yang mendapatkan pembinaan pelayanan publik dan tatalaksana	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Fasilitas Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Diberikan	Jenis Fasilitasi	13	13	13		13		13		13		
	4	0 1	0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					27,319,515, 370		28,456,007, 209		29,676,769, 919		85,452,292, 498		Sekretariat Daerah
					1 Prosentase kecamatan dan kelurahan dengan nilai IKM kategori baik	%	97.44	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah kecamatan dan kelurahan dengan nilai IKM kategori baik	kecamatan dan kelurahan	114	117	117		117		117		117		
					Jumlah kecamatan dan kelurahan	kecamatan dan kelurahan	117	117	117		117		117		117		
					2 Prosentase SDM keagamaan yang dibina	%	77.27	100.0 0	33.41		66.61		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah SDM keagamaan yang dibina	orang	25,50 0	33,00 0	16,35 5		32,61 0		48,95 5		48,95 5		
					Jumlah SDM keagamaan yang seharusnya dibina	orang	33,00 0	33,00 0	48,95 5		48,95 5		48,95 5		48,95 5		
					3 Prosentase organisasi sosial budaya keagamaan yang dibina	%	100.0 0	0.00	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah organisasi sosial budaya keagamaan yang dibina	organisasi	15	0	15		15		15		15		
						Jumlah organisasi sosial budaya keagamaan	organisasi	15	0	15		15		15		15		
						4 Prosentase kelembagaan kesejahteraan masyarakat yang dibina	%	67.21	73.01	33.33		66.67		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah kelembagaan kesejahteraan masyarakat yang dibina	lembaga	1,728	1,877	250		500		750		750		
						Jumlah kelembagaan kesejahteraan masyarakat	lembaga	2,571	2,571	750		750		750		750		
						5 Prosentase peraturan daerah/perwal/ kepwal yang harmonis	%	80.98	100.0 0	33.33		66.67		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah peraturan daerah/perwal harmonis	perda/per wal	132	163	57		114		171		171		
						Jumlah peraturan daerah/perwal yang diinventarisir	perda/per wal	163	163	171		171		171		171		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					6	Prosentase bantuan hukum litigasi kepada orang atau masyarakat miskin	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
						Jumlah perkara litigasi bantuan hukum masyarakat miskin yang diberikan	Perkara litigasi	60.00	60.00	60.00		60.00		60.00		60.00	
						Jumlah perkara litigasi bantuan hukum masyarakat miskin yang sehatusnya diberikan	Perkara litigasi	60.00	60.00	60.00		60.00		60.00		60.00	
					7	Persentase naskah kerjasama aktif yang ditindaklanjuti	%	100.0 0	100.0 0	90.00		95.00		100.0 0		100.0 0	
						Jumlah kerjasama aktif yang ditindaklanjuti	dokumen	108	100	90		95		100		100	
						Jumlah kerjasama aktif	dokumen	108	100	100		100		100		100	
4	0	0	0	PROGRAM PEREKONO MIAN DAN PEMBANGU NAN						1,516,361,1 31		1,579,441,7 54		1,647,199,8 05		4,743,002,6 90	Sekretari at Daerah
					1	Tingkat pengendalian kebijakan perekonomian	%	80.00	100.0 0	33.33		66.67		100.0 0		100.0 0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						jumlah sarana dan prasarana aparatur yag seharusnya tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	28	233	233		233		233		233		
					7	Tingkat Ketersediaan Kesejahteraan Anggota DPRD	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Tingkat ketersediaan kesejahteraan Anggota DPRD yang tersedia	Jenis Jasa	0	50	50		50		50		50		
						Tingkat Ketersediaan Kesejahteraan Anggota DPRD yang seharusnya tersedia	Jenis Jasa	0	50	50		50		50		50		
	4	0 2	0 2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					77,723,833, 400		80,957,144, 869		84,430,206, 384		243,111,184 ,654	Sekretari at DPRD	
					1	Presentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi Peraturan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi Peraturan Daerah yang tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	22	16	16		16		16		16		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi Peraturan Daerah yang Seharusnya tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	22	16	16		16		16		16		
						2 Presentase Dokumen Anggaran yang telah disepakati	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen Anggaran yang tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	5	5	5		5		5		5		
						Jumlah Dokumen Anggaran yang seharusnya tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	5	5	5		5		5		5		
						3 presentase Dokumen Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah yang tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	1	1	1		1		1		1		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
						tersedia																
						5 Presentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						
						Jumlah Aspirasi yang dihimpun dalam Reses yang tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		3						
						Jumlah Aspirasi yang dihimpun dalam Reses yang seharusnya tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		3						
						6 Presentase Dokumen koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						
						Jumlah Dokumen koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	167,764	360	360		360		360		360						
						Jumlah Dokumen koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang seharusnya tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	167,764	360	360		360		360		360						

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN													
5	0 1				PERENCANA AN													
					Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah													
5	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				16,497,437, 681		17,183,731, 089		17,920,913, 152		51,602,081, 922	Badan Perencan aan Pembang unan Daerah		
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
						Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		100		100		100		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan /	Jenis Jasa	2	2	2		2		2		2		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jenis Jasa	2	2	2		2		2		2		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia Dikali 100%												
	5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2,862,464,696		2,981,543,227		3,109,451,432		8,953,459,355	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					1 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	%	NA	NA	17.80		21.36		24.91		24.91		
					Jumlah usulan masyarakat dalam APBD	Kegiatan/ Titik	-	-	520		624		728		728		
					Total usulan masyarakat	Kegiatan/ Titik	-	-	2,922		2,922		2,922		2,922		
					2 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
					Jumlah dokumen perencanaan yang dijaminatkan	Jenis	2	3	2		3		3		8		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah dokumen pelaporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah yang diamanatkan	Dokumen	2	2	2		2		2		6		
						Jumlah dokumen pelaporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan/disus un	Dokumen	2	2	2		2		2		6		
	5	0 1	0 3		PROGRAM KOORDINAS I DAN SINKRONISA SI PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH					5,422,145,5 64		5,543,706,8 19		5,674,281,8 42		16,640,134, 225		Badan Perencan aan Pembang unan Daerah
					1	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah dokumen Renstra PD yang diverifikasi Terhadap RPJMD	Dokumen	41	41	41		41		41		41		
						Jumlah dokumen Renstra PD yang seharusnya diverifikasi	Dokumen	41	41	41		41		41		41		
					2	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N													
	5	0 2		KEUANGAN													
				Badan Pendapatan Daerah													
	5	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN /KOTA				52,063,181, 096		52,063,181, 096		52,063,181, 096		156,189,543 ,288		Badan Pendapat an Daerah	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12						
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12						
	5	0 2	0 4		PROGRAM PENGELOLA AN PENDAPATA N DAERAH						5,991,980,9 41		6,241,247,3 48		6,508,996,8 59		18,742,225, 149	Badan Pendapat an Daerah				
					1	Tingkat realisasi penerimaan pendapatan PBB	%	108.6 2	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah realisasi penerimaan pendapatan PBB	Rp. Miliar	519.2 3	550.0 0	598.1 5		634.1 6		673.5 1		673.5 1						
						Jumlah target penerimaan pendapatan PBB	Rp. Miliar	478.0 0	550.0 0	598.1 5		634.1 6		673.5 1		673.5 1						
					2	Tingkat realisasi penerimaan pendapatan BPHTB	%	95.75	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah realisasi penerimaan pendapatan BPHTB	Rp. Miliar	541.0 1	715.6 0	707.6 0		773.4 5		830.1 7		830.1 7						
						Jumlah target penerimaan pendapatan	Rp. Miliar	565.0 0	715.6 0	707.6 0		773.4 5		830.1 7		830.1 7						

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						BPHTB												
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN													
	5	0 2			KEUANGAN					0						0		
					Badan Pengelola Keuangan Daerah													
	5	0 2	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					61,509,412, 944		61,509,412, 944		61,509,412, 944		184,528,238 ,832	Badan Pengelola Keuanga n Daerah	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96		
					3	Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					6	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	539	539	539		539		539		1,617		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	539	539	539		539		539		1,617		
					7	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					8	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
					9	Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Barang	80	80	80		80		80		240		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya	Jenis Barang	80	80	80		80		80		240		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Tersedia												
						10 Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
						11 Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	4	4	4		4		4		12		
	5	0 2	0 2		PROGRAM PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH						40,248,209, 058		41,922,534, 554		43,721,011, 287		125,891,754 ,899	Badan Pengelola Keuanga n Daerah
					1	Tingkat dokumen ketersediaan anggaran daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah dokumen anggaran daerah yang tersedia	Dokumen	59	59	59		59		59		177		
						Jumlah dokumen anggaran daerah yang seharusnya tersedia	Dokumen	59	59	59		59		59		177		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
					2	Tingkat ketersediaan dokumen penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah yang tersedia	Dokumen	114	111	109		109		109		327						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah yang seharusnya tersedia	Dokumen	114	111	109		109		109		327						
	5	0 2	0 3		PROGRAM PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH					3,061,456,4 10		3,188,812,9 97		3,325,613,0 74		9,575,882,4 81		Badan Pengelola Keuanga n Daerah				
					1	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan aset daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah dokumen pengelolaan aset daerah yang tersedia	Dokumen	67	67	76		76		76		228						
						Jumlah dokumen pengelolaan aset daerah yang seharusnya tersedia	Dokumen	67	67	76		76		76		228						
	5	0 2	0 4		PROGRAM PENGELOLA AN PENDAPATA					2,824,497,6 10		2,941,996,7 11		3,068,208,3 69		8,834,702,6 90		Badan Pengelola Keuanga n Daerah				

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Pengembang an Sumber Daya Manusia													
	5	0 3	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					80,226,616, 230		80,226,616, 230		80,226,616, 230		240,679,848 ,690	BKPSDM	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96	
						3	Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					4	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	172	172	175		175		175		525		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	172	172	175		175		175		525		
					5	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
					6	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan	Orang	91	91	91		91		91		273		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Kapasitas SDM												
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	91	91	91		91		91		273		
						Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggung Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4		12		
						9 Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Barang	5	5	5		5		5		15		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang	5	5	5		5		5		15		
						10 Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	5	5	5		5		5		15		
	5	0 3	0 2	PROGRAM KEPEGAWAI AN DAERAH					4,490,290,8 44		4,677,086,9 43		4,877,733,9 73		14,045,111, 760	BKPSDM	
					1 Persentase keterisian jabatan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah pegawai yang didudukan dalam jabatan	orang	1,251	1,251	1,251		1,251		1,251		1,251		
					Jumlah jabatan yang seharusnya diisi oleh pejabat	orang	1,251	1,251	1,251		1,251		1,251		1,251		
					2 Persentase penempatan sesuai kompetensi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah pegawai yang ditempatkan ke OPD	orang	7,703	7,703	7,950		8,100		8,300		8,300		
					Jumlah pegawai yang seharusnya ditempatkan ke OPD	orang	7,703	7,703	7,950		8,100		8,300		8,300		
					3 Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi Standar Komptensi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jabatan (SKJ)												
						Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi SKJ	orang	1,251	1,251	1,251		1,251		1,251		1,251		
						Jumlah Pejabat Struktural yang telah tersedia SKJ	orang	1,251	1,251	1,251		1,251		1,251		1,251		
					4	Nilai rata-rata SKP aparatur	Point	85.60	85.86	85.96		86.71		87.03		87.03		
						Jumlah nilai SKP dari seluruh pegawai di OPD	Point	659,3 77	661,3 77	683,3 77		702,3 77		722,3 77		722,3 77		
						Jumlah seluruh pegawai yang ada	Point	7,703	7,703	7,950		8,100		8,300		8,300		
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN													
	5	0 4			PENDIDIKA N DAN PELATIHAN													
					Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia													
	5	0 4	0 2		PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA					8,706,010,3 00		9,068,180,3 28		9,457,205,2 65		27,231,395, 893	BKPSDM	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi aparatur sesuai jabatan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai jabatan	Orang	180	215	250		250		250		750		
						Jumlah ASN yang seharusnya mendapatkan pengembangan kompetensi	Orang	180	215	250		250		250		750		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	5	0 5				PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN												
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
	5	0 5	0 2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH				1,989,389,0 12		2,072,147,5 95		2,161,042,7 27		6,222,579,3 34		
						1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam dokumen	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						perencanaan												
						Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam dokumen perencanaan	Dokumen	5	5	5		5		5		15		
						Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	5	5	5		5		5		15		
	6				UNSUR PENGAWAS AN URUSAN PEMERINTAHAN													
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH													
					Inspektorat													
	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					24,192,283,853		24,192,283,853		24,192,283,853		72,576,851,559	Inspektorat	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode					Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Tersedia												
						1 1 Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	2	2	2		2		2		6		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	2	2	2		2		2		6		
	6	0 1	0 2		PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWAS AN					670,548,32 0		698,443,13 0		728,406,34 0		2,097,397,7 91	Inspektor at	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi Internal	Point	5.83	6.00	10.00		10.00		10.00		10.00		
					2	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Internal yang Ditindaklanjuti	%	72.16	100.0 0	80.20		80.37		80.75		80.75		
						Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Internal yang telah Ditindaklanjuti	Rekomen dasi	2,240	3,250	3,285		3,295		3,331		3,331		
						Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Internal yang harus Ditindaklanjuti	Rekomen dasi	3,104	3,250	4,096		4,100		4,125		4,125		
	6	0 1	0 3	PROGRAM PERUMUSA N KEBIJAKAN, PENDAMPIN GAN DAN ASISTENSI						913,006,00 0		950,987,05 0		991,784,39 4		2,855,777,4 44		Inspektor at
					1	Indeks Survei Penilaian Integritas	Point	N/A	N/A	71.67		72.67		73.67		73.67		
	7			UNSUR KEWILAYAH AN														
	7	0 1		KECAMATA N														

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kecamatan Tangerang						0						0	
	7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN /KOTA						30,222,028, 547		30,222,028, 547		30,222,028, 547		90,666,085, 641	Kecamata n Tangeran g
					1 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	15	16	16		16		15		47		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	15	16	16		16		15		47		
					2 Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					4	Persentase Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	10	10	175		175		175		525		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	10	10	175		175		175		525		
					5	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9		
					6	Persentase Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Tersedia												
					Persentase Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100.0 0 Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis	4	4	5		5		5		15		
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	4	4	5		5		5		15		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN					223,825,400		233,136,537		243,138,094		700,100,031	Kecamata n Tangeran g	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					PELAYANAN PUBLIK													
					1	Persentase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan Tepat Waktu	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
	7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN					4,239,215,3 20		4,349,006,6 77		4,466,939,0 64		13,055,161, 061	Kecamata n Tangeran g	
					1	Persentase desa/kelurahan yangg aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Kelurahan yangg Aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Keluraha n	0	8	8		8		8		24		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Kelurahan yang ada	Keluraha n	0	8	8		8		8		24		
	7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM					944,105,30 4		983,380,08 5		1,025,567,0 90		2,953,052,4 79		Kecamata n Tangeran g
					1 Cakupan pelayanan penertiban wilayah kecamatan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah wilayah (titik) penertiban	Titik	8	8	8		8		8		24		
					Jumlah wilayah penertiban yang seharusnya	Titik	8	8	8		8		8		24		
	7			UNSUR KEWILAYAH AN													
	7	0 1		KECAMATA N													
				Kecamatan Karawaci													
	7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					43,494,652, 913		43,494,652, 913		43,494,652, 913		130,483,958 ,739		Kecamata n Karawaci

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	10	11	10		11		10		31	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	10	11	10		11		10		31	
						2	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	4	4	4		4		4		12	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan	Jenis	4	4	4		4		4		12	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						5	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9	
						6	Persentase Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
							Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	81	81	81		81		81		244	
							Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	81	81	81		81		81		244	
						7	Persentase Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
	7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN					7,639,761,8 72		7,824,455,9 66		8,022,845,1 27		23,487,062, 965		Kecamata n Karawaci
					1	Persentase desa/kelurahan yang Aktif Dalam Pemberdayaan masyarakat	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Keluraha n	16	16	16		16		16		48		
						Jumlah Kelurahan yang ada	Keluraha n	16	16	16		16		16		48		
	7	0 1	0 4		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM					1,144,750,3 68		1,192,371,9 83		1,243,524,7 41		3,580,647,0 93		Kecamata n Karawaci

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Cakupan Pelayanan Penertiban diwilayah Kecamatan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
						Jumlah Wilayah (titik) Penertiban	Titik	16	16	16		16		16		48	
						Jumlah wilayah penertiban yang seharusnya	Titik	16	16	16		16		16		48	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN												
	7	0 1			KECAMATAN												
					Kecamatan Cibodas												
	7	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				23,739,657,552		23,739,657,552		23,739,657,552		71,218,972,656	Kecamatan Cibodas	
					1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
						Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jenis	10	11	10		11		10		31	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan												
						Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	10	11	10		11		10		31		
						2 Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	4		4		4		12		
						3 Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						4 Persentase Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	233	233	233		233		233		699		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	233	233	233		233		233		699		
						5 Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						8 Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah barang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang di sediakan	Jenis	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	4	4	4		4		4		12		
						9 Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	6	6	6		6		6		18		
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						4,356,930,960		4,488,259,288		4,629,325,611		13,474,515,859	Kecamatan Cibodas
					1	Persentase desa/kelurahan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
						Jumlah Kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Kelurahan yang ada	Kelurahan	6	6	6		6		6		18		
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						993,778,320		1,035,119,498		1,079,526,125		3,108,423,943	Kecamatan Cibodas

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Cakupan pelayanan penertiban diwilayah Kecamatan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah wilayah (titik) penertiban	titik	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah wilayah penertiban yang seharusnya	titik	6	6	6		6		6		18		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												
	7	0 1				KECAMATAN N												
						Kecamatan Jatiuwung												
	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				22,577,208,743		22,577,208,743		22,577,208,743		67,731,626,229	Kecamatan Jatiuwung	
					1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		300.0 0		
						Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran	Jenis	10	11	10		10		10		30		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan												
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	10	11	10		10		10		30		
						2 Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		300.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi KeuanganPerangk at Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	4	4	4		4		4		12		
						3 Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		300.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	6	6	6		6		6		18						
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	6	6	6		6		6		18						
					4	Persentase Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		300.0 0						
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	127	127	127		127		127		381						
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	127	127	127		127		127		381						
					5	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		300.0 0						
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9						

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	7	7	7		7		7		21		
						8 Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		300.0 0		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	Jenis	0	4	4		4		4		12		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Harusnya Tersedia	Jenis	0	4	4		4		4		12		
						9 Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		300.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah												
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9		
		7		0102	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1,068,628,288		1,113,083,225		1,160,834,495		3,342,546,008	Kecamata n Jatiuwun g	
						1 Persentase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan Tepat Waktu	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	6	6	6		6		6		18		
	7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDA YAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN						4,146,786,2 32		4,269,372,5 39		4,401,048,6 21		12,817,207, 392	Kecamata n Jatiuwun g
					1	Persentase Desa/ Kelurahan yang Aktif Dalam Pemberdayaan Kelurahan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Kelurahan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	Keluraha n	6	6	6		6		6		6		
						Jumlah Kelurahan yang Ada	Keluraha n	6	6	6		6		6		6		
	7	0 1	0 4		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM						1,140,101,5 60		1,187,529,7 85		1,238,474,8 13		3,566,106,1 58	Kecamata n Jatiuwun g

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Cakupan pelayanan penertiban di Wilayah Kecamatan	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00				
						Jumlah Wilayah (titik) Penertiban	Titik	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Wilayah Penertiban yang Seharusnya	Titik	6	6	6		6		6		18		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN													
	7	01			KECAMATAN													
					Kecamatan Periuk													
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					21,854,337,462		21,854,337,462		21,854,337,462		65,563,012,386	Kecamatan Periuk	
					1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00				
						Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	10		11		10		31		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan												
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	10		11		10		31		
					2	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	1	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	1	4	4		4		4		12		
					3	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penangu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		
					4	Persentase Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	147	147	147		147		147		441		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	147	147	147		147		147		441		
					5	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3		9		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggung Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
					8	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Jenis	5	5	5		5		5		15		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	5	5	5		5		5		15		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					9	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis	4	5	6		6		6		18	
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	4	5	6		6		6		18	
	7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK						197,701,40 0		205,925,77 8		214,759,99 4		618,387,172	Kecamata n Periuk

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Persentase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan Tepat Waktu	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis pelayana n	6	6	6		6		6	18			
						Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis pelayana n	6	6	6		6		6	18			
	7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN					4,186,824,2 64		4,319,396,1 53		4,461,798,2 48	12,968,018, 666	Kecamata n Periuk		
					1	Persentase desa/kelurahan yang Aktif Dalam Pemberdayaan masyarakat	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Kelurahan Yang Aktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Keluraha n	5	5	5		5		5	15			
						Jumlah Kelurahan yang ada	Keluraha n	5	5	5		5		5	15			

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	04		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM					928,980,300		967,625,880		1,009,137,030		2,905,743,210	Kecamata n Periuk	
					1 Cakupan pelayanan penertiban %		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
					Jumlah Wilayah (titik) Penertiban	Titik	5	5	5		5		5		15		
					Jumlah wilayah penertiban yang seharusnya	Titik	5	5	5		5		5		15		
7				UNSUR KEWILAYAH AN													
7	01			KECAMATA N													
				Kecamatan Neglasari													
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					23,789,957,670		23,789,957,670		23,789,957,670		71,369,873,010	Kecamata n Neglasari	
					1 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						waktu												
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	10	11	10		11		10		31		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	10	11	10		11		10		31		
						2 Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	4		4		4		12		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
						3	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0							
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9					
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9					
						4	Persentase Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0					
							Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	136	136	136		136		136		408					
							Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	136	136	136		136		136		408					
						5	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0					

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Tersedia												
						9 Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9		
	7	0	0	1	2	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA					314,954,84 8		328,056,97 0		342,130,61 4		985,142,431	Kecamata n Neglasari

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					HAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
					1	Persentase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan Tepat Waktu	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	6	6	6		6		6		18		
	7	0 1 0 3			PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN					4,511,942,7 04		4,641,399,5 20		4,780,455,5 60		13,933,797, 784	Kecamata n Neglasari	
					1	Persentase desa/kelurahan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masvarakat	Keluraha n	7	7	7		7		7		21		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Kelurahan yang ada	Keluraha n	7	7	7		7		7		21		
	7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM					1,098,954,6 24		1,144,671,1 36		1,193,777,5 28		3,437,403,2 88		Kecamata n Neglasari
					1 Cakupan pelayanan penertiban diwilayah Kecamatan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		p		100.0 0		
					Jumlah wilayah (titik) penertiban	titik	7	7	7		7		7		21		
					Jumlah wilayah penertiban yang seharusnya	titik	7	7	7		7		7		21		
	7			UNSUR KEWILAYAH AN													
	7	0 1		KECAMATA N													
				Kecamatan Benda													
	7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					20,777,089, 002		20,777,089, 002		20,777,089, 002		62,331,267, 006		Kecamata n Benda

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	10	0	11		11		11		33		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	10	11	11		11		11		33		
					2	Presentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	32	32	32		32		32		96		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan	Jenis	32	32	32		32		32		96		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia												
						3 Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	6	6	6		6		6		18		
						4 Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	122	122	122		122		122		366		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	122	122	122		122		122		366		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					5	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9		
					6	Presentase Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	40	40	40		40		40		120		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	40	40	40		40		40		120		
					7	Presentase Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Umum Perangkat Daerah												
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Barang/J asa	7	7	7		7		7		21		
						Presentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jenis	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan	Jenis	4	4	4		4		4		12		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Kelurahan yang ada	Keluraha hn	5	5	5		5		5		15		
	7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM					864,215,62 2		900,166,99 2		938,784,15 6		2,703,166,7 71	Kecamata n Benda	
					1 Cakupan pelayanan penertiban	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Wilayah (Titik) Penertiban	Titik	5	5	5		5		5		15		
					Jumlah Wilayah Penertiban yang seharusnya	Titik	5	5	5		5		5		15		
	7			UNSUR KEWILAYAH AN													
	7	0 1		KECAMATA N													
				Kecamatan Batuceper													
	7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					24,926,810, 462		24,926,810, 462		24,926,810, 462		74,780,431, 386	Kecamata n Batucepe r	
					1 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						3	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3	18		
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3	18		
						4	Persentase Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0	100.0 0		
							Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	149	149	149		149		149	447		
							Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	149	149	149		149		149	447		
						5	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0	100.0 0		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					9	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9	
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9	
7	0	1	0	2	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK					334,733,80 0		348,658,72 6		363,616,18 5		1,047,008,7 12	Kecamata n Batucape r

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab				
								2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
					1	Persentase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan Tepat Waktu	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0								
						Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	3	3	3		3		3		9						
						Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	3	3	3		3		3		9						
	7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN					4,110,913,5 60		4,223,687,5 64		4,344,823,7 61		12,679,424, 885	Kecamata n Batucope r					
					1	Persentase desa/kelurahan yang Aktif Dalam Pemberdayaan masyarakat	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0						
						Jumlah desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Keluraha n	7	7	7		7		7		21						
						Jumlah Kelurahan yang ada	Keluraha n	7	7	7		7		7		21						

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	04		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM					1,394,038,912		1,452,030,931		1,514,323,058		4,360,392,900	Kecamata n Batucape r	
					1 Cakupan pelayanan penertiban di wilayah kecamatan	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
					Jumlah Wilayah (titik) Penertiban	Titik	7	7	7		7		7		21		
					Jumlah wilayah penertiban yang seharusnya	Titik	7	7	7		7		7		21		
7				UNSUR KEWILAYAH AN													
7	01			KECAMATA N													
				Kecamatan Cipondoh													
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					28,986,104,168		28,986,104,168		28,986,104,168		86,958,312,504	Kecamata n Cipondoh	
					1 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Daerah tersedia												
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	10	11	10		11		10		31		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	10	11	10		11		10		31		
						2 Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya	Jenis	4	4	4		4		4		12		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Tersedia												
						3 Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						4 Persentase Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	193	193	193		193		193		193		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	193	193	193		193		193		193		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					5	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9	
						Persentase Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	50	50	50		50		50		150	
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	50	50	50		50		50		150	
						Persentase Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	2	5	5		5		5		15		
						Persentase Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis	3	6	6		6		6		18		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	6	6		6		6		18		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	7	01	02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK					334,733,800		348,658,726		363,616,185		1,047,008,712	Kecamata n Cipondoh	
					1	Persentase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan Tepat Waktu	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00			
						Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	6	6	6		6		6		18	
						Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	6	6	6		6		6		18	
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN					7,539,388,800		7,769,827,374		8,017,352,968		23,326,569,143	Kecamata n Cipondoh	
					1	Persentase desa/kelurahan yang Aktif Dalam Pemberdayaan masyarakat	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00	
						Jumlah kelurahan yang Aktif Dalam Pemberdayaan	Keluraha n	10	10	10		10		10		10	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						masyarakat												
						Jumlah Kelurahan yang ada	Keluraha n	10	10	10		10		10		10		
	7	0 1	0 4		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM					599,165,71 2		624,091,00 6		650,864,51 0		1,874,121,2 27	Kecamata n Cipondoh	
					1 Cakupan pelayanan penertiban wilayah kecamatan		%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Wilayah (titik) Penertiban		titik	10	10	10		10		10		30		
					Jumlah wilayah penertiban yang seharusnya		titik	10	10	10		10		10		30		
	7				UNSUR KEWILAYAH AN													
	7	0 1			KECAMATA N													
					Kecamatan Pinang													
	7	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					34,232,932, 761		34,232,932, 761		34,232,932, 761		102,698,798 ,283	Kecamata n Pinang	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	10	11	10		11		10		31	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	10	11	10		11		10		31	
						2	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	4	4	4		4		4		12	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan	Jenis	4	4	4		4		4		12	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					5	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9		
					6	Persentase Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	73	73	73		73		74		220		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Seharusnya Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	73	73	73		73		74		220		
					7	Persentase Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	5	5	5		5		5		15		
						Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis	6	6	6		6		6		18		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	6	6	6		6		6		18		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	7	01	02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK					453,959,376		472,844,086		493,129,097		1,419,932,559	Kecamata n Pinang	
					1	Persentase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan Tepat Waktu	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00			
						Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	3	3	3		3		3		9	
						Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	3	3	3		3		3		9	
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN					6,338,638,213		6,510,805,562		6,695,739,121		19,545,182,896	Kecamata n Pinang	
					1	Persentase desa/kelurahan yang Aktif Dalam Pemberdayaan masyarakat	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00	
						Jumlah kelurahan yang aktif dalam pemberdavaan	Keluraha n	11	11	11		11		11		33	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	10	11	10		11		11	32			
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	10	11	10		11		11	32			
					2	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0	100.0 0			
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	4	4	4		4		4	12			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						7	Persentase Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	2	2	2		2		2		6	
							Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	2	2	2		2		2		6	
						8	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	4	4	4		4		4		12	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	4	4	4		4		4		12		
						Persentase Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jeni	3	3	5		5		5		15		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	5		5		5		15		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					10 Tingkat Ketersediaan Jase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis Jasa	3	3	3		3		3		9		
					Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Jasa	3	3	3		3		3		9		
	7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK					211,199,66 4		219,985,57 0		229,422,95 1		660,608,185	Kecamata n Ciledug	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						1	Persenttase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan Tepat Waktu	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	3	3	3		3		3	9		
							Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	3	3	3		3		3	9		
	7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN						4,797,232,7 30		4,930,237,6 11		5,073,104,8 05	14,800,575, 145	Kecamata n Ciledug	
						1	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Kelurahan yanng Aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Keluraha n	0	8	8		8		8	9		
							Jumlah Kelurahan yang ada	Keluraha n	0	8	8		8		8	9		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	0	1	0	4	PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM				1,085,533,5 77		1,130,691,7 74		1,179,198,4 51		3,395,423,8 03	Kecamata n Ciledug	
					1 Cakupan pelayanan penertiban wilayah kecamatan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah wilayah (titik) penertiban	Titik	8	8	8		8		8		24		
					Jumlah wilayah penertiban yang seharusnya	Titik	8	8	8		8		8		24		
	7				UNSUR KEWILAYAH AN												
	7	0	1		KECAMATA N												
					Kecamatan Karang Tengah												
7	0	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				23,166,562, 571		23,166,562, 571		23,166,562, 571		69,499,687, 713	Kecamata n Karang Tengah	
					1 Peresntase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Kinerja Perangkat Daerah tersedia												
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	10	11	10		11		10		31		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	10	11	10		11		10		31		
						2 Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya	Jenis	4	4	4		4		4		12		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Tersedia												
						3 Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						4 Persentase Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah yang tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	129	129	122		120		116		358		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah	Orang	129	129	122		120		116		358		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						7	Peresentase Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0			100.0 0				
							Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	7	7	7			7		21		
							Jumlah Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Aparatur Perangkat daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	7	7	7			7		21		
						8	Persentase ketersediaan barang penunjang penyelenggaran urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0			100.0 0		100.0 0		
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	Jenis	2	5	5			5		15		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia												
	7	01	02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK					266,032,260		277,099,202		288,986,758		832,118,220	Kecamata n Karang Tengah	
					1 Persentase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan tepat waktu	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
					Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	3	3	3		3		3		9		
					Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN					4,444,954,536		4,571,624,645		4,707,687,342		13,724,266,523	Kecamata n Karang Tengah	
					1 Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		

[illegible]

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	0	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					25,512,544, 428		25,512,544, 428		25,512,544, 428		76,537,633, 284	Kecamata n Larangan
					1 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	10	11	10		11		10		31		
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	10	11	10		11		10		31		
					2 Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	4	4	4		4		4		12		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	4	4	4		4		4		12		
						Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Persentase Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mematuhi Peraturan yang Berlaku	Orang	186	186	186		186		186		558		
						Jumlah Keseluruhan Aparatur Perangkat Daerah yang Ada	Orang	186	186	186		186		186		558		
						5 Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	3	3	3		3		3		9		
						6 Persentase Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	62	62	62		62		62		186		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah barang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang di sediakan	Jenis	0	5	5		5		5		15		
						Jumlah Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	0	5	5		5		5		15		
						Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis	4	5	5		5		5		15		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis	4	5	5		5		5		15		
	7	0 1	0 2		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK					294,915,70 0		307,184,19 3		320,362,39 5		922,462,288	Kecamata n Larangan	
					1	Persentase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan tepat waktu	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0		
						Jumlah pelayanan administrasi kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	Jenis	2	2	3		3		3		9		
						Jumlah keseluruhan pelayanan administrasi kecamatan yang seharusnya dilakukan	Jenis	2	2	3		3		3		9		
	7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDA YAAAN MASYARAKA					4,197,164,7 94		4,305,206,8 49		4,421,260,2 23		12,923,631, 865	Kecamata n Larangan	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					POLITIK													
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
	8	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					13,210,930, 376		13,002,596, 633		13,110,930, 376		39,324,457, 385	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0			
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47			
					Jumlah Dokumen/Lapora n Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	15	16	16		16		15		47			

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	32	32	32		32		32		96	
						3	Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0		100.0 0	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18	
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	6	6	6		6		6		18	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						6	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	3	3	3		3		3			
						9	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4			
							Jumlah Dokumen/Lapora n Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jenis Dokumen (Laporan)	4	4	4		4		4			
						1 1	Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0			

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							2022	2023	2024		2025		2026				
							Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah masyarakat yang diberikan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Orang	100	134	362		562		562		562		
	8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					73,450,590,450		7,049,535,143		7,273,697,700		87,773,823,293	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					1 Persentase Partai politik dan lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	%	100.00	100.00	73.33		80.00		86.67		86.67		
					Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan yang diberikan pendidikan politik	Partai dan lembaga	10	10	11		12		13		13		
					Jumlah partai politik dan lembaga	Partai dan lembaga	10.00	10	15		15		15		15		

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						pendidikan yang ada												
	8	0 1	0 4		PROGRAM PEMBERDA YAN DAN PENGAWAS AN ORGANISASI KEMASYARA KATAN					765,652,50 0		1,274,794,2 87		1,321,703,2 21		3,362,150,0 08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					1 Persentase Organisasi Masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dan pengawasan	%	17.54	35.09	52.63		70.18		87.72		87.72			
					Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dan pengawasan	Ormas	30	60	90		120		150		150			
					Jumlah Organisasi Masyarakat yang terdaftar	Ormas	171	171	171		171		171		171			
	8	0 1	0 5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1,550,000,0 00		1,650,000,0 00		1,650,000,0 00		4,850,000,0 00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realis asi	Proye ksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					1	Persentase masyarakat yang mendapat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100.0 0	100.0 0	100.0 0		100.0 0		100.0 0				
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Orang	100	100	100		100		100				
						Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Orang	100	100	100		100		100				
	8	0 1	0 6		PROGRAM PENINGKAT AN KEWASPAD AAN NASIONAL DAN PENINGKAT AN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANA N KONFLIK SOSIAL					1,139,944,0 00		1,139,944,0 00		1,139,944,0 00		3,419,832,0 00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					1	Tingkat Pencegahan Konflik dengan Mediasi	%	10,45	10,45	10,45		10,45		10,45				

Kode					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir dan Kerangka Pendanaan (2024- 2026)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
								2022	2023	2024		2025		2026				
								Realisasi	Proyeksi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah konflik sosial yang tertangani	Konflik	20	18	16		14		12		12		
						Jumlah konflik sosial yang terjadi	Konflik	20	18	16		14		12		12		
					TOTAL						5,242,108,989,388		5,420,432,705,429		5,604,319,771,873		16,266,861,466,690	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pencapaian visi pemerintah daerah bisa didekati dengan berbagai pendekatan dan instrumen pembangunan daerah terkait tolok ukur kinerja yang menjadi representasi perwujudan visi dan pelaksanaan misi pembangunan daerah. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu terkait tentang arsitektur kinerja pembangunan daerah bahwa tolok ukur kinerja perwujudan visi dan pelaksanaan misi dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan daerah dengan tingkatan dampak (*impact*) yaitu suatu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang bersifat makro dan diperoleh dari pencapaian keseluruhan program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan.

8.1. Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator makro pembangunan daerah Kota Tangerang merupakan tolok ukur dan representasi atas keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Kota Tangerang. Penetapan indikator makro pembangunan daerah Kota Tangerang tersebut merujuk dan selaras dengan indikator makro pembangunan Provinsi Banten yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Keselarasan indikator makro pembangunan antara Kota Tangerang dan Provinsi Banten ini dibangun untuk mewujudkan kesinergisan pembangunan daerah Kota Tangerang dan Provinsi Banten.

Berikut ini diuraikan **proyeksi indikator makro pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026** berdasarkan keselarasan dengan indikator makro RPD Provinsi Banten Tahun 2024-2026 dan perkembangan kondisi Kota Tangerang terkini.

Tabel 8.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,98	4,48	4,58	4,73	4,89	4,89
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	78,90	79,01	79,13	79,25	79,37	79,37
3	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	%	5,77	5,66	5,54	5,43	5,32	5,32
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,16	6,90	6,64	6,39	6,14	6,14
5	Indeks Gini (Gini Rasio)	Point	0,343	0,341	0,339	0,337	0,335	0,335
6	Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB Per Kapita)	Rp. Juta/ Jiwa	94,38	99,21	104,66	110,65	117,24	117,24
7	Laju Inflasi	%	4,56	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

8.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) daerah dirumuskan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berikut ini diuraikan **penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026**.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tangerang Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
1	Indeks Pendidikan (Pengetahuan)	Point	74.69	74.75	74.81	74.87	74.93	74.93
2	Indeks Kesehatan	Point	79.86	79.94	80.02	80.09	80.17	80.17
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.88	13.89	13.90	13.91	13.92	13.92
4	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.84	10.85	10.86	10.87	10.88	10.88
5	Tingkat Kegemaran Membaca	Point	66.12	68.00	71.00	72.00	73.00	73.00
6	Tingkat Pemajuan Kebudayaan Daerah	%	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
7	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	71.91	71.96	72.01	72.06	72.11	72.11
8	Indeks Pembangunan Olahraga	Point	0.47	0.50	0.53	0.55	0.58	0.58
9	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	%	5.77	5.66	5.54	5.43	5.32	5.32
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7.16	6.90	6.64	6.39	6.14	6.14
11	Persentase PMKS/PPKS yang mendapat pelayanan sosial	%	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Skor PPH Konsumsi	Point	89.40	89.50	89.60	89.80	89.90	89.90
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	64.86	64.87	64.87	64.88	64.89	64.89
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.10	2.08	2.07	2.06	2.05	2.05

No.	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
15	Jumlah Lowongan Kerja	Orang	19,107	19,680	20,000	20,000	20,000	60,000
16	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja (TPTK)	%	80.94	81.88	82,00	83,00	84,00	84,00
17	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	47.00	50.00	52.00	53.00	55.00	55.00
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.98	4.48	4.58	4.73	4.89	4.89
19	Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB Per Kapita)	Rp. Juta/Jiwa	94.38	99.21	104.66	110.65	117.24	117.24
20	Indeks Daya Beli (IDB)	Point	82.34	82.55	82.77	82.99	83.22	83.22
21	Indeks Gini (Gini Rasio)	Point	0,343*	0.341	0.339	0.337	0.335	0.335
22	Laju Inflasi	%	4.56	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
23	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliun	13.05	13.70	14.39	15.11	15.86	15.86
24	Jumlah UMKM	Unit Usaha	700	700	1,150	1,437	1,725	1,725
25	Jumlah Koperasi yang Akuntabel	Unit Usaha	85	85	95	105	115	115
26	Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	Rp. Triliun	15.14	15.47	16.14	16.85	17.60	17.60
27	Nilai Eksport	Rp. Triliun	185.99	190.92	195.98	201.17	206.50	206.50

No.	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
28	Nilai PDRB ADHK Sektor Perindustrian (Industri Pengolahan)	Rp. Triliun	39.05	40.08	41.19	42.36	43.59	43.59
29	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Unit Usaha	4,542	4,542	4,542	4,642	4,742	4,742
30	Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Triliun	1.77	1.83	1.90	1.98	2.07	2.07
31	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisatawan Nusantara/Domestik dan Wisatawan Mancanegara/Asing)	Orang	1,165,536	1,652,147	2,120,676	2,208,942	2,297,208	2,297,208
32	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Unit Usaha	895	939	940	980	1,040	1,040
33	Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp. Triliun	1.81	1.85	1.90	1.94	1.99	1.99
34	Nilai Produksi Perikanan	Rp. Miliar	8,44	8,71	8,75	8,77	8,80	8,80
35	Nilai Produksi Pertanian	Rp. Miliar	189,875.00	18,375.00	177,625.00	17,22	166,725.00	166,725.00
36	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	53.36	53.76	54.15	54.54	54.93	54.93
37	Indeks Kualitas Air (IKA)	Point	45.48	45.98	46.48	46.98	47.48	47.48
38	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Point	69.43	69.93	70.43	70.93	71.43	71.43

No.	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
39	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Point	37.19	37.19	37.19	37.19	37.20	37.20
40	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Tingkat Ketaatan terhadap RTRW)	%	87,00	87,50	88.00	88.50	89.00	89.00
41	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Point	116.80	115.30	113.80	112.30	110.80	110.80
42	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	%	0.55	0.58	0.61	0.64	0.67	0.67
43	Indeks Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Point	73.41	74.48	76.19	77.96	79.73	79.73
44	Tingkat Ketersediaan dan Kualitas Jalan dan Jembatan	%	95.95	96.95	97.45	97.95	98.45	98.45
45	Kecepatan Rata-rata Perjalanan Kendaraan	Km/Jam	24.91	25.00	26.00	27.00	28.00	28.00
46	Luas Banjir dan Genangan	Ha	509.38	487.47	437.47	387.47	337.47	337.47
47	Persentase Permukiman Kumuh	%	0.007	0.001	0.406	0.345	0.293	0.293
48	Persentase Jumlah Penduduk yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
49	Persentase Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	99.80	99.81	99.82	99.83	99.84	99.84
50	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
51	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	67.14	70.00	71.00	72.00	73.00	73.00

No.	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
52	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	Point	85.35	85.83	86.08	86.33	86.58	86.58
53	Indeks Profesional ASN	Point	90.00	91.00	80.00	81.00	82.00	82.00
54	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Point	67.12	70.00	71.00	72.00	73.00	73.00
55	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah)	%	48.26	50.32	49.95	51.37	52.67	52.67
57	Nilai Maturitas SPIP	Point	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
58	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Point	81.93	71.18	71,30	72,30	73,30	73,30
59	Indeks Daya Saing Daerah (Penilaian Mandiri)	Point	3.00	3.10	3.12	3.13	3.14	3.14
60	Rasio Tanah Milik Pemda Bersertifikat	%	40.61	45.91	51.22	56.53	61.84	61.84
61	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point	2,60 (Baik)	3,40 (Baik)	3,41 (Baik)	3,42 (Baik)	3,41 (Baik)	3,41 (Baik)
62	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Point	62.92	80.00	80.00	81.00	81.00	81.00
63	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No.	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
64	Jumlah Kasus Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/ Golongan (SARA)	Kasus	18.00	16.00	14.00	12.00	12.00	12.00

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya dirumuskan berdasarkan indikator tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan atau kompositnya. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah (*impact*). Indikator tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah diperlukan untuk mengukur kinerja masing-masing program yang telah dirumuskan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan **Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Tahun 2024-2026**.

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Tangerang Tahun 2021-2023

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
1	Urusan Wajib							
1.01	Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
1	Indeks Pendidikan (Pengetahuan)	Point	74,69	74,75	74,81	74,87	74,93	74,93
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,88	13,89	13,90	13,91	13,92	13,92
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,84	10,85	10,86	10,87	10,88	10,88
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS Pendidikan Dasar)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Rerata kemampuan Literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen Nasional	Point	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
8	Rerata kemampuan Numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan asesmen Nasional	Point	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
9	Rerata kemampuan Literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan asesmen Nasional	Point	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
10	Rerata kemampuan Numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan asesmen Nasional	Point	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
11	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	34,55	35,23	35,91	36,59	37,26	37,26
12	Proporsi jumlah pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	%	57,19	57,30	57,40	57,50	57,58	57,58
13	Indeks iklim keamanan	Point	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
14	Indeks iklim kebhinekaan	Point	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
15	Indeks inklusivitas	Point	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
16	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Dasar	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Tingkat Pelaksanaan dalam pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
1	Indeks Kesehatan	Point	79,86	79,94	80,02	80,09	80,17	80,17
2	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	71,91	71,96	72,01	72,06	72,11	72,11
3	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
4	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan pembinaan lingkungan sehat	%	89,00	89,00	89,00	89,50	90,00	90,00
11	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase orang dengan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase kasus berpotensi KLB yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
16	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Cakupan masyarakat yang mendapat kunjungan rumah oleh petugas kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar	%	62,50	67,50	67,50	70,00	72,50	72,50
21	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan alat laboratorium puskesmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Cakupan penduduk Kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
23	Cakupan pembinaan kesehatan kerja dan olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	90,91	91,67	76,36	78,33	80,00	80,00
25	Persentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensinya	%	83,91	87,99	92,40	95,18	98,04	98,04
26	Persentase IRTP yang memenuhi syarat	%	55,00	55,00	55,00	58,33	66,67	66,67
27	Pemeriksaan Post Market IRTP yang Memenuhi Syarat	%	55,00	55,00	55,00	58,33	66,67	66,67

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
28	Persentase fasilitas kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) dan alat kesehatan (Toko Alat Kesehatan dan Optikal) yang memenuhi syarat	%	80,00	80,00	80,00	81,11	86,67	86,67
29	Cakupan posyandu aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Cakupan rumah tangga ber PHBS	%	72,00	75,00	75,00	77,00	79,00	79,00
1.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
1	Indeks Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Point	73,41	74,48	76,19	77,96	79,73	79,73
2	Persentase Kualitas Jalan dan Jembatan yang Memadai	%	95,95	96,95	97,45	97,95	98,45	98,45
3	Luas Banjir dan Genangan	Ha	509,38	487,47	437,47	387,47	337,47	337,47
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Tingkat Ketaatan terhadap RTRW)	%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
5	Persentase Jumlah Penduduk yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	99,80	99,81	99,82	99,83	99,84	99,84
7	Persentase Terbangunnya Bangunan Sumber Daya Air	%	16,13	21,15	24,39	35,48	62,50	62,50
8	Persentase Terpeliharanya Bangunan Sumber Daya Air	%	86,15	86,15	86,15	86,15	86,15	86,15
9	Persentase Terbangunnya Sarana Prasarana Sumber Daya Air	%	13,45	14,86	12,70	20,91	32,18	32,18

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
10	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air	%	31,07	32,54	36,98	41,42	45,86	45,86
11	Prosentase Terbangunnya Bangunan Drainase (Perkotaan)	%	5,00	11,96	13,59	18,87	25,19	25,19
12	Prosentase Terbangunnya Bangunan Drainase (Lingkungan)	%	12,15	21,11	29,43	45,87	93,21	93,21
13	Prosentase Terpeliharanya Bangunan Drainase (Perkotaan)	%	30,78	30,78	31,37	31,76	32,35	32,35
14	Prosentase panjang jalan Arteri dan Kolektor yang dipelihara	%	1,51	2,16	2,55	2,55	2,55	2,55
15	Tingkat Rehabilitas Lalan Lingkungan	%	60,61	100	29,79	65,96	100	100
16	Tingkat Pemeliharaan Jembatan	%	100	100	100	100	100	100
17	Tingkat Ketersediaan Jalan Kolektor	%	13,39	18,80	21,00	23,84	28,06	28,06
18	Tingkat Ketersediaan Jalan Lingkungan	%	18,22	18,57	24,56	39,53	61,54	61,54
19	Tingkat ketersediaan jembatan	%	19,61	24,39	25,81	26,09	47,06	47,06
20	Presentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat	%	30,77	33,33	33,33	50,00	100,00	100,00
21	Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	20,00	25,00	33,33	50,00	100,00	100,00
22	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Penataan Ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Cakupan layanan air minum perpipaan	%	27,01	28,16	28,50	28,84	29,19	29,19
25	Tingkat kualitas air minum memenuhi baku mutu yang berlaku	%	NA	NA	30,00	42,86	100,00	100,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
26	Cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik	%	99,80	99,81	99,82	99,83	99,83	99,83
27	Tingkat kualitas air limbah domestik memenuhi baku mutu yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Persentase permohonan PBG yang diproses dalam SIMBG	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Presentase kesesuaian bangunan dengan dokumen PBG	%	20,00	20,00	22,73	24,44	26,50	26,50
30	Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	NA	NA	3,17	3,17	3,17	3,17
1.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase Permukiman Kumuh	%	0,007	0,001	0,406	0,345	0,293	0,293
2	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase rumah layak huni	%	99,82	99,78	33,333	67	100	100
5	Persentase perumahan yang memiliki PSU	%			27,861	29,851	31,841	31,841
1.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	Point	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Point	132,80	131,80	130,80	129,80	128,80	128,80
3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	%	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,67

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
4	Tingkat penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tingkat Pembinaan Satlinmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat Pembinaan PPNS	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tingkat Bimbingan Kepada Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	64,10	67,00	70,00	74,00	78,00	78,00
12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	14,63	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
1	Persentase PMKS/PPKS yang mendapat pelayanan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase kegiatan Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang sesuai dengan ketentuan	%	0,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
3	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	84,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
4	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Pelayanan Perlindungan Sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Pelayanan Jaminan Sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.02.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
1	Jumlah Lowongan Kerja	Orang	19.107	19.68	20	20	20	60
2	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja (TPKK)	%	80,94	81,88	82,00	83,00	84,00	84,00
3	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi	%	98,89	100,00	75,00	82,14	85,71	85,71
4	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	%	85,00	98,45	98,84	98,46	99,24	99,24
5	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	67,67	71,43	70,37	70,37	70,37	70,37
6	Prosentase pembinaan perusahaan	%	8,08	8,08	23,03	23,03	23,03	23,03

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
1.02.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	64,86	64,87	64,87	64,88	64,89	64,89
2	Tingkat partisipasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemberdayaan perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan perempuan yang mendapatkan pelatihan bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial dalam pemberdayaan perempuan	%	48,03	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
4	Cakupan organisasi perempuan yang mendapatkan pendampingan	%	100,00	100,00	11,54	11,54	11,54	11,54
5	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase layanan Konsultasi dan konseling	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase kekerasan terhadap anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							
1	Skor PPH Konsumsi	Point	89,40	89,50	89,60	89,80	89,90	89,90
2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	Gram/kapita/hari	72,26	72,26	57,00	57,00	57,00	57,00
3	Tingkat stabilitas Harga Pangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat cadangan pangan daerah	%	N/a	N/a	69,95	72,01	73,98	73,98
5	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/kapita/hari	2.210,60	2.210,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6	Rasio rekomendasi SKPG dan FSVA yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
7	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan daerah	%	93,03	95,00	95,06	95,12	95,18	95,18
1.02.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan							
1	Rasio Tanah Milik Pemda Bersertifikat	%	3.92	2.61	4.58	5.88	6.54	6.54
2	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan	%	19,87	33,33	10,00	22,22	57,14	57,14
3	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dam drainase	%	11,11	37,50	40,00	33,33	100,00	100,00
4	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas lingkungan	%	13,39	21,48	7,33	45,51	46,05	46,05
1.02.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	53,36	53,76	54,15	54,54	54,93	54,93
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Point	45,48	45,98	46,48	46,98	47,48	47,48
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Point	69,43	69,93	70,43	70,93	71,43	71,43
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Point	37,19	37,19	37,19	37,19	37,20	37,20
5	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat integrasi dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan rencana kerja dinas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase parameter kualitas udara dan kebisingan yang memenuhi baku mutu	%	67,48	68,71	69,94	71,78	75,15	75,15

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
8	Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca	%	20,30	20,40	21,00	22,00	23,00	23,00
10	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang dikembangkan	%	4,19	4,24	4,24	4,25	4,26	4,26
11	Tingkat Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase badan usaha dan /atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Cakupan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	%	47,76	52,77	57,78	65,21	72,11	72,11
14	Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase usaha/kegiatan yang dikenakan sanksi administrasi	%	100,00	100,00	24,00	24,00	24,00	24,00
16	Persentase volume sampah yang tertangani	%	78,00	75,00	72,00	70,00	68,00	68,00
17	Persentase volume sampah yang berkurang melalui mekanisme 3R	%	22,00	25,00	28,00	30,00	32,00	32,00
1.02.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang terverifikasi sesuai standar	%	75,00	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase dokumen pencatatan sipil yang terverifikasi sesuai standar	%	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan layanan SIAK	%	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Kerjasama Layanan Administrasi Kependudukan	%	75,00	100,00	50,00	70,00	100,00	100,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
5	Tingkat ketersediaan dokumen profil kependudukan yang berkualitas	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
1	Cakupan Pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.05	2,08	2.05	2.04	2.03	2.03
2	Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase PPKBD yang berperan aktif dalam Program Keluarga Berencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Cakupan keluarga sakinah mawadah warahmah (samawa)	%	72,39	100,00	33,58	33,21	33,21	33,21
1.02.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
1	Kecepatan Rata-rata Perjalanan Kendaraan	Km/Jam	24.91	25,00	26,00	27,00	28,00	28,00
2	Tingkat Pemanfaatan Angkutan Perkotaan Sistem Transit	%	99,61	99,70	99,80	99,90	100,00	100,00
3	Persentase ketersediaan hasil kajian, analisa dan evaluasi transportasi untuk penyusunan kebijakan	%	91,67	93,33	33,33	66,67	100,00	100,00
4	Prosentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan	%	80,00	80,00	33,33	66,67	100,00	100,00
5	Prosentase pemenuhan fasilitas penerangan jalan pada ruas jalan	%	80,00	80,00	33,33	66,67	100,00	100,00
6	Cakupan penanganan titik macet	%	76,92	100,00	33,33	66,67	100,00	100,00
7	Jumlah kendaraan yang diuji	Unit	52.829,00	52.929,00	53.029,00	53.129,00	53.229,00	53.229,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
1.02.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika							
1	Indeks Sistem Pemerintahanan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point	2,60 (Baik)	3,40 (Baik)	3,41 (Baik)	3,42 (Baik)	3,41 (Baik)	3,41 (Baik)
2	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang terpublikasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Presentase Kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif	%	53,85	69,23	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik	Point	92,00	90,00	90,00	90,50	91,00	91,00
5	Persentase Dokumen Tatakelola SPBE Yang Dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	76,32	78,95	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Ruang Publik yang terhubung dengan internet	%	41,38	41,38	62,07	82,76	100,00	100,00
8	Persentase Apilikasi yang dibangun dan Diintegrasikan	%	67,76	75,99	84,21	92,43	100,00	100,00
9	Persentase Aplikasi yang Termanfaatkan	%	67,76	75,99	84,21	92,43	100,00	100,00
1.02.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
1	Jumlah UMKM	Unit Usaha	700	700	1.15	1.437	1.725	1.725
2	Jumlah Koperasi yang Akuntabel	Unit Usaha	85	85	95	105	115	115
3	Tingkat kepatuhan koperasi	%	NA	NA	17,01	20,41	23,81	23,81

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	
4	Persentase SDM koperasi yang dibina	%	NA	NA	28,91	29,59	30,27	30,27
5	Persentase koperasi mandiri	%	NA	NA	10,20	13,61	17,01	17,01
6	Persentase UMKM yang melakukan pemasaran melalui kemitraan marketplace dan pameran	%	NA	NA	3,59	3,59	3,59	3,59
7	Persentase pengembangan usaha mikro	%	NA	NA	55,12	57,88	60,77	60,77
1.02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
1	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliun	13,05	13,70	14,39	15,11	15,86	15,86
2	Tingkat Pelaksanaan Kebijakan Daerah Mengenai Perizinan Penanaman Modal	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Presentasi Promosi Yang Menarik Investor	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase perizinan dan Non Perizinan yang selesai tepat waktu	%	0,00	98,21	98,25	98,39	98,51	98,51
5	Tingkat penyelesaian pengaduan perijinan dan penanaman modal dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat Pengendalian Pelaporan Penanaman Modal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tingkat Pemanfaatan Sistem Perizinan dan Non Perizinan Terhadap Pelayanan Perizinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga							
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	47,00	50,00	52,00	53,00	55	55
2	Indeks Pembangunan Olahraga	Point	0.47	0.5	0.53	0.55	0.58	0.58
3	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	Atlet	2.376	180	300	600	1	1
4	Prosentase SDM keolahraagaan yang berkompeten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Prosentase SDM pramuka yang berprestasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tingkat fasilitasi kegiatan kepramukaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
1	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	36,00	44,00	52,00	60,00	68,00	68,00
1.02.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
1	Tingkat Pemajuan Kebudayaan Daerah	%	60	70	80	100	100	100
2	Tingkat pelestarian budaya takbenda	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase cagar budaya yang lestari	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat kunjungan museum	%	N/A	N/A	25,00	50,00	100,00	100,00
1.02.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							
1	Tingkat Kegemaran Membaca	Point	66,12	68,00	71,00	72,00	73,00	73,00
2	Cakupan pelayanan perpustakaan sekolah sesuai standar nasional dari aspek layanan	%	N/A	N/A	0,83	1,66	2,48	2,48
1.02.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							
1	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Point	62,92	80,00	80,00	81,00	81,00	81,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	
2	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai standar	%	N/A	N/A	7,50	15,00	30,00	30,00
3	Presentase digitalisasi arsip	%	N/A	N/A	60,00	70,00	80,00	80,00
3	Urusan Pilihan							
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan							
1	Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp. Triliun	1,81	1,85	1,90	1,94	1,99	1,99
2	Nilai Produksi Perikanan	Rp. Miliar	8,44	8,71	8,75	8,77	8,80	8,80
3	Produktivitas perikanan	Kg/m2	6,25	6,27	6,30	6,32	6,34	6,34
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
1	Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Triliun	1,77	1,83	1,9	1,98	2,07	2,07
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisatawan Nusantara/Domestik dan Wisatawan Mancanegara/Asing)	Orang	1.165.536	1.652.147	1.734.754	1.821.492	1.912.567	1.912.567
3	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Unit Usaha	895	939	939	986	1.036	1.036
4	Tingkat perkembangan daya tarik pariwisata	%	N/A	N/A	33,33	66,67	100,00	100,00
5	Tingkat perkembangan destinasi pariwisata	%	N/A	N/A	95,78	97,05	100,00	100,00
6	Tingkat hunian akomodasi pariwisata	%	N/A	N/A	50,00	58,33	69,44	69,44
7	Tingkat perkembangan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	%	N/A	N/A	13,33	26,67	40,00	40,00
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
1	Nilai Produksi Pertanian	Rp. Miliar	18.99	18.38	17.76	17.22	16.67	16.67

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
2	Produktivitas pertanian	Kw/Ha	60,75	61,25	61,75	62,25	62,75	62,75
3	Persentase pendistribusian bibit ternak dan ikan	%	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	24,00
4	Angka prevalensi penyakit hewan	Point	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
1	Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	Rp. Triliun	15,14	15,47	16,14	16,85	17,60	17,60
2	Nilai Eksport	Rp. Triliun	185,99	190,92	195,98	201,17	206,50	206,50
3	Persentase pasar yang dibina	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Laju pertumbuhan ekspor	%	3,12	3,15	3,18	3,21	3,24	3,24
5	Persentase Standarisasi alat UTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya)	%	N/A	N/A	97,88	97,88	98,94	98,94
6	Persentase pelaku usaha yang melakukan pemasaran produk dalam negeri	%	N/A	N/A	20,00	24,00	24,00	24,00
7	Persentase tempat usaha yang dibina dan diawasi	%	N/A	N/A	12,30	16,39	20,49	20,49
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
1	Nilai PDRB ADHK Sektor Perindustrian (Industri Pengolahan)	Rp. Triliun	39,05	40,08	41,19	42,36	43,59	43,59
2	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Unit Usaha	4.542	4.542	4.542	4.642	4.742	4.742
3	Tingkat fasilitasi IKM	%	N/A	N/A	6,61	8,62	10,54	10,54
4	Persentase terlaksananya verifikasi IUI yang diajukan melalui OSS	%	N/A	N/A	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
4.01	Sekretariat Daerah							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	67,14	70,00	71,00	72,00	73,00	73,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	Point	85,35	85,83	86,08	86,33	86,58	86,58
3	Prosentase kecamatan dan kelurahan dengan nilai IKM kategori baik	%	97,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Prosentase SDM keagamaan yang dibina	%	77,27	100,00	33,41	66,61	100,00	100,00
5	Prosentase organisasi sosial budaya keagamaan yang dibina	%	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Prosentase kelembagaan kesejahteraan masyarakat yang dibina	%	67,21	73,01	33,33	66,67	100,00	100,00
7	Prosentase peraturan daerah/perwal/ kepwal yang harmonis	%	80,98	100,00	33,33	66,67	100,00	100,00
8	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada orang atau masyarakat miskin	Perkara Litigasi	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
9	Persentase naskah kerjasama aktif yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	90,00	95,00	100,00	100,00
10	Tingkat pengendalian kebijakan perekonomian	%	80,00	100,00	33,33	66,67	100,00	100,00
11	Persentase jumlah aktivitas pembangunan	%	89,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Prosentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	% per tahun	89,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Tingkat Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
14	Prosentase OPD dengan struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Prosentase OPD/UPT dengan pelayanan publik kategori baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Prosentase OPD yang mendapatkan pembinaan pedoman tata laksana sesuai aturan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Prosentase pemberitaan yang terpublikasi	%	77,53	100,00	90,00	96,00	100,00	100,00
18	Tingkat Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kategori Baik (Memuaskan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.02	Sekretariat DPRD							
1	Tingkat Fasilitasi Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat Fasilitasi Layanan Administrasi DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Presentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi Peraturan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Presentase Dokumen Anggaran yang telah disepakati	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Presentase Dokumen Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Presentase kegiatan kehumasan dan publikasi terhadap kinerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
7	Presentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Presentase Dokumen koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
5.01	Perencanaan							
1	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Point	67,12	70,00	71,00	72,00	73,00	73,00
2	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	%	34,22	36,62	37,34	46,20	48,25	48,25
3	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat pemanfaatan data perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian perencanaan yang ditetapkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat ketersediaan dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah ditetapkan/disusun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase keselarasan Renstra PD dengan Renja PD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase pelaksanaan program pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.02	Keuangan							

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah)	%	48,26	50,32	49,95	51,37	52,67	52,67
3	Tingkat realisasi penerimaan pendapatan PBB	%	108,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat realisasi penerimaan pendapatan BPHTB	%	95,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tingkat dokumen ketersediaan anggaran daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat ketersediaan dokumen penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan aset daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Tingkat pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.03	Kepegawaian							
1	Indeks Profesional ASN	Point	90,00	91,00	80,00	81,00	82,00	82,00
2	Persentase keterisian jabatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase penempatan sesuai kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Nilai rata-rata SKP aparatur	Point	85,60	85,86	85,96	86,71	87,03	87,03
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan							

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi aparatur sesuai jabatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.05	Penelitian Dan Pengembangan							
1	Indeks Daya Saing Daerah (Penilaian Mandiri)	Point	3,00	3,10	3,12	3,13	3,14	3,14
2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
6.01	Inspektorat Daerah							
1	Nilai Maturitas SPIP	Point	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Point	81,93	71,18	71,30	72,30	73,30	73,30
3	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi Internal	Point	5,83	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Internal yang Ditindaklanjuti	%	72,16	100,00	80,20	80,37	80,75	80,75
5	Indeks Survei Penilaian Integritas	Point	N/A	N/A	71,67	72,67	73,67	73,67
7	Unsur Kewilayahan							
7.1	Kecamatan							
1	Cakupan pelayanan administrasi kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase desa/kelurahan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir (s.d 2026)
			2022	2023				
			Realisasi	Proyeksi	Target	Target	Target	Target
5	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Unsur Pemerintahan Umum							
8.1	Kesatuan Bangsa Dan Politik							
1	Jumlah Kasus Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA)	Kasus	18	16	14	12	12	12
2	Persentase masyarakat yang diberikan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Partai politik dan lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Organisasi Masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dan pengawasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase masyarakat yang mendapat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat Pencegahan Konflik dengan Mediasi	%	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45



BAB 9 PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang untuk periode Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif berpedoman pada RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dan pedoman bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam menyusun RKPD Kota Tangerang dalam periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026, maka ditetapkan **kaidah pelaksanaan** sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tangerang berkewajiban menyebarluaskan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 kepada masyarakat.
2. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.
3. Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan

pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

5. Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.
6. Pemerintah Kota Tangerang berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.
7. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan, apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Partisipasi masyarakat Kota Tangerang dapat diwujudkan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Kota Tangerang menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dimana Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026, ditetapkan **pedoman transisi** sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Kota Tangerang Tahun 2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026 sepanjang belum

ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang periode berikutnya dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.

2. Penyusunan RKPD Kota Tangerang Tahun 2026 tetap memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Banten yang berlaku.

WALIKOTA TANGERANG,

ARIF R. WISMANSYAH